



Dr. Marianus Mantovanny Tapung, M.Pd.

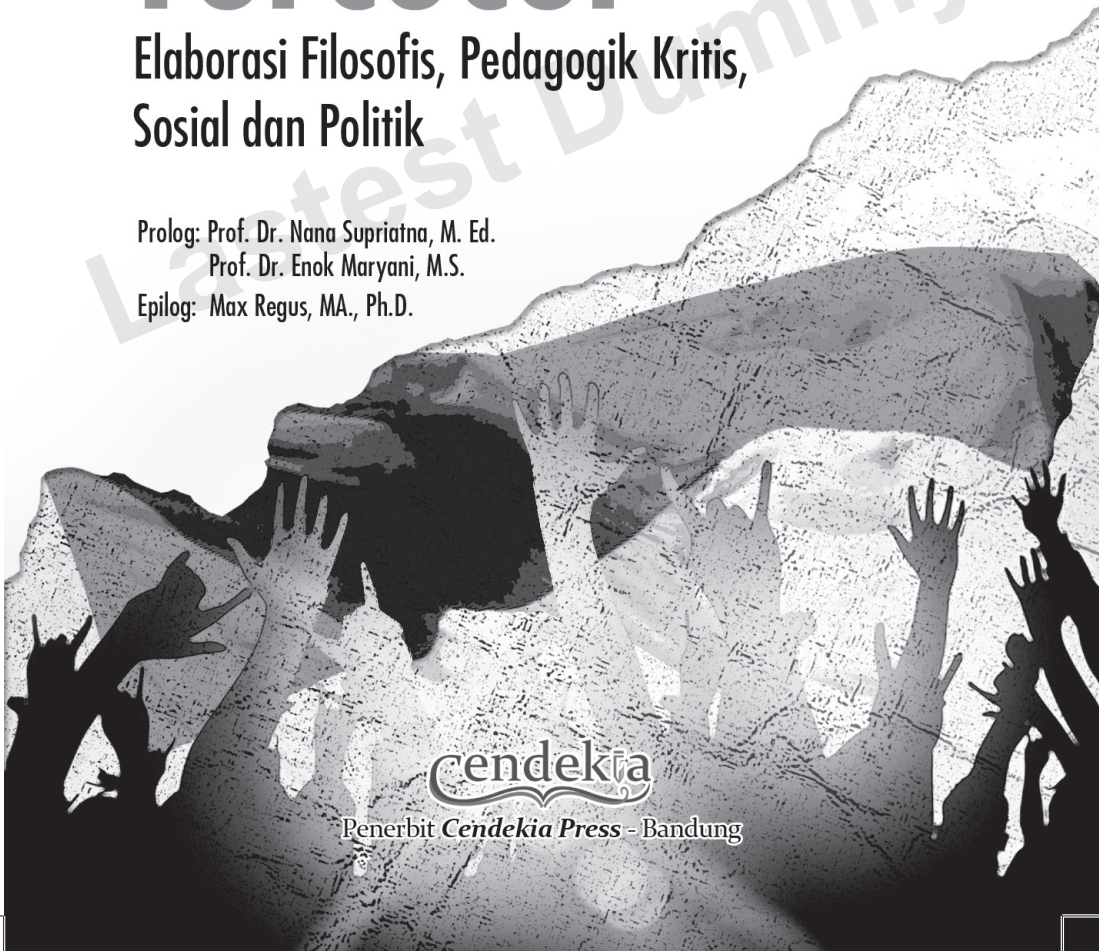
Narasi Bangsa yang Tercecer

Elaborasi Filosofis, Pedagogik Kritis,
Sosial dan Politik

Prolog: Prof. Dr. Nana Supriatna, M. Ed.

Prof. Dr. Enok Maryani, M.S.

Epilog: Max Regus, MA., Ph.D.



cendekia

Penerbit *Cendekia Press* - Bandung



NARASI BANGSA YANG TERCECER

Elaborasi Filosofis, Pedagogik Kritis, Sosial dan Politik

Copyright © 2018 - Marianus Mantovanny Tapung

ISBN 978-602-51920-1-2

Penulis : Dr. Marianus Mantovanny Tapung, M.Pd.

Editor : Ujang E.K.

Penata Letak : Subarna B.

Desainer Cover : Rianto Hidayat

Cetakan Pertama, September 2018

Diterbitkan oleh **CV CENDEKIA PRESS**

Komp. GBA Barat Blok C-4 No. 7 Bandung

Hotline: +6282127441400

Email: penerbit@cendekiapress.com

Website: www.cendekiapress.com

Hak cipta dilindungi undang-undang pada penulis dan hak penerbitan pada Cendekia Press. Dilarang memperbanyak tulisan ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Dicetak oleh Sonny Screen Printing - Bandung



Buku ini dipersembahkan untuk keluargaku tercinta,

*Theresia Evarista Risa yang selalu setia
dan selalu berusaha menjadi istri yang terbaik,
tiga putriku yang cantik-cantik: Samantha, Audy dan Laura;
Oma Rene, Oma Ros dan Opa Darius yang senantiasa setia berdoa
demi keberhasilan studi saya
di Bumi Siliwangi*



Lastest Dummy



KATA PENULIS

NARASI BANGSA YANG TERCECER

Elaborasi Filosofis, Pedagogik Kritis, Sosial, dan Politik

Buku berjudul “Narasi Bangsa yang Tercecer; Elaborasi Filosofis, Pedagogik Kritis, Sosial dan Politik” ini, merupakan serangkaian kumpulan opini yang dimuat di Media Indonesia, Harian Pos Kupang, dan ada berapa di Harian Flores Pos dan Flores.co. Meskipun hanya sebagai kumpulan opini, namun buku ini merupakan hasil pergumulan pemikiran selama saya berusaha menyelesaikan program doktoral di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Berbagai isu aktual dan kontekstual, baik yang berskala global, nasional dan local, yang muncul selama studi di bumi Siliwangi membuat saya tergugah untuk mengungkapkannya dalam bentuk



Narasi Bangsa yang Tercecer

tulisan. Dalam pengungkapannya tersebut, saya berusaha untuk berpikir secara alternatif, tidak cenderung *mainstream* dan berusaha *out of box* demi memunculkan unsur-unsur *extraordinary and novelty perspective*. Mungkin dengan cara ini, buku ini bisa lebih direspon dan diminati oleh pembaca. Namun saya tetap menyadari bahwa sangatlah sulit untuk mengarah pada level ‘perspektif kebaruan dan luar biasa’ atau sesuai dengan ekspektasi pembaca ketika melihat judulnya. Bisa saja pembaca masih menemukan pemikiran-pemikiran yang linear, umum, konservatif dan menjemukan dalam kajian-kajian di sebagian atau seluruh opininya.

Yang menjadi semangat dasar buku ini adalah ‘pengumpulan yang menggugah dan menggugat’, maka segala bentuk masukan dan pemikiran baru sangat mendapat tempat di dalamnya. Semakin banyak yang terlibat dalam pergumulan maka semakin berkualitas pula hasil ‘gugahan dan gugatannya’. Pergumulan yang eksistensial terletak pada kesungguhan dan komitmen untuk menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Berdasarkan semangat inilah, sungguh saya tidak pernah berpretensi untuk menjadikan buku sebagai rujukan untuk berpikir, diskusi dan tulisan ilmiah. Namun, saya yakin dengan berbagai elaborasi pemikiran di dalamnya dapat memberikan semacam umpanan untuk pembaca agar bisa berpikir dan berwacana pada status dan level yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, kepuasan saya sebagai penulis terletak pada tanggapan kritis, dialektis, konstruktif dan inovatif dari pembaca. Karena hanya dengan itulah buku ini akan dihargai dan dipromosi, sembari mendapat tempatnya di masyarakat.

Sebagai sebuah karya, buku ini juga merupakan hasil dari elaborasi dukungan beberapa pihak, antara lain: Pemimpin Redaksi Media Indonesia, pemimpin Redaksi Harian Pos Kupang, Harian Flores Pos, dan Flores.Co; yang telah menerima dan memuat opini-opini ini. Saya merasakan ‘hasrat’ menulis selalu



muncul ketika satu demi satu opini saya dimuat. Selanjutnya, saya berterima kasih kepada Rm. Gerardus Janur (Ketua Yaspar), Rm. Dr. Yohanes B. Lon, MA (Ketua STKIP St. Paulus Ruteng) dan P. David Djerubu, MA (Ketua STIKes St. Paulus Ruteng), Dr. Marsel R. Payong, dan rekan-rekan dosen, yang telah memberi waktu kepada saya “keluar sebentar” dan berkesempatan untuk mengaktualisasikan diri lewat-lewat berbagai bentuk tulisan saya. Terima kasih pula kepada Pihak Universitas Pendidikan Indonesia (UPI Bandung), khususnya Prof. Dr Yaya S. Kusumah, M. Sc, PhD., (Ketua Program Pascasarjana UPI), Prof. Dr. Nana Supriatna, M. Ed (Ketua Prodi IPS sekaligus co-promotor) dan Prof. Dr. Enok Maryani, MS (Pembimbing Akademik sekaligus Promotor). Terima kasih karena sudah dan sedang membentuk pola pikir saya sehingga lebih matang dan terstruktur melalui berbagai program pembelajaran, pendidikan dan kegiatan ilmiah lainnya. Prof. Nana, Prof. Enok, dan Romo Max Regus, MA., Ph.D, terima kasih karena di tengah kesibukan masih bisa melayani permintaan saya untuk membuat prolog dan dan epilog, sehingga membuat buku ini semakin memiliki daya pikat ilmiahnya.

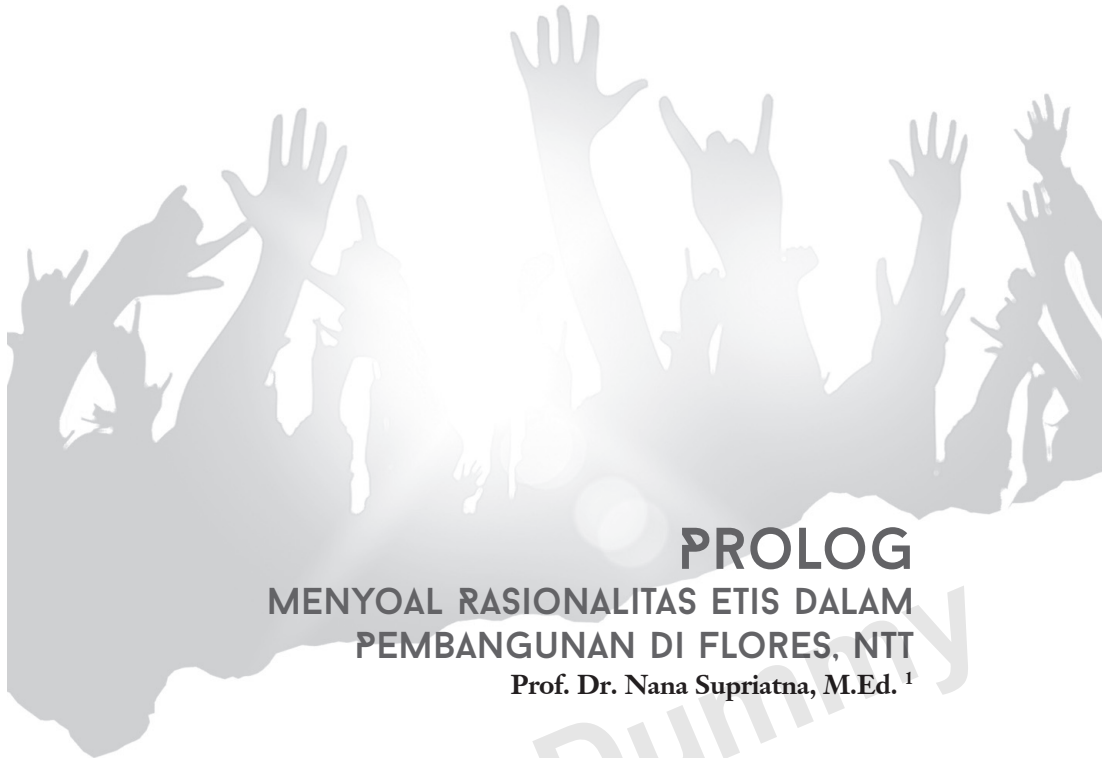
Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan di Prodi IPS: Sugyanto, Betty, Jen, Rusmawan, Liwa, Sumpama, Ipoel Bahri, Saiful Nur, dan Ahmal. Terima kasih kepada pihak Asrama Putra Bumi Siliwangi yang telah memberi saya tumpangan sekelas apartemen dengan berbagai fasilitas sehingga saya merasa nyaman dan lancar dalam melahirkan ide-ide dan kemudian dapat menulisnya. Terima kasih pula untuk teman seperjuangan, RD Frans Betu, Adik Florent Dopo, dan Adik-adik KMK PPGT/PPG-SM3T angkatan 2011-2013 di Asrama UPI Bandung. Terima kasih tak terkira juga buat keluarga Ferdi Radom dan Rovin Radom di Cipageran-Cimahi yang telah menampung saya sebagai anak kos untuk beberapa bulan, sehingga bisa berkonsentrasi dalam



Narasi Bangsa yang Tercecer

menyelesaikan disertasi dan buku. Tak lupa, teman-teman SANPIO 88 yang selalu mengkritisi dan mendukung tulisan saya di group WA. Perjuangan ini menjadi lebih mudah, enteng dan bermakna ketika ada bersama kalian semua.

Singkatnya, saya mengucapkan terima kasih berlimpah kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan namanya, yang telah mendukung dan mendoakan perjuangan hidup saya. Tuhan pasti membalas kebaikan saudara-saudara semua. Semoga buku ini benar-benar menjadi tanda dan bukti bahwa ide, pemikiran dan gagasan tidak akan pernah mati untuk membuat membuat kehidupan di dunia ini menjadi lebih baik dari hari kemarin. Mari terus bergerak dan berkembang dengan ide, pemikiran dan gagasan yang ada pada kita sebelum semuanya diambil oleh sang Pemilik. Akhirnya, saya mengutip ucapan Einstein (1879-1955): “Lebih baik jatuh ketika bergerak, daripada busuk dalam kelumpuhan”. Semoga buku ini berkenan dan bermanfaat!



PROLOG

MENYOAL RASIONALITAS ETIS DALAM PEMBANGUNAN DI FLORES, NTT

Prof. Dr. Nana Supriatna, M.Ed. ¹

SENSASI INDERAWI TENTANG FLORES NAN INDAH

Mengawali pengantar buku ini saya perlu menarasikan secuil kisah tentang perjalanan saya dengan Prof. Enok Maryani (juga pembuat pengantar untuk buku ini) ketika diundang untuk membawakan seminar pendidikan di kampus STKIP St. Paulus Ruteng pada tanggal 29 November 2017. Terus terang, Prof. Enok dan saya baru pertama kali menjejak kaki di bumi Flores. Dan ketika mendarat di Labuan Bajo dan selanjutnya menyusuri perjalanan menuju Ruteng dan kemudian kembali Labuan Bajo, saya merasakan sensasi inderawi yang ditawarkan oleh alam Flores Barat. Sensasi inderawi menegaskan berbagai informasi sebelumnya, yang saya

¹ Guru besar Universitas Pendidikan Indonesia. Sementara ini berposisi sebagai ketua Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial sekolah Pasca Sarjana UPI.



Narasi Bangsa yang Tercecer

peroleh dari berbagai sumber bahwa Flores NTT adalah salah satu bagian dari bumi Indonesia yang menyimpan sejuta potensi budaya, sosial, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan politik.²

Ketika berada dalam diskusi sepanjang perjalanan pulang ke Labuan Bajo, saya sempat mengajukan pertanyaan kepada Saudara Marianus Mantovanny Tapung (penulis buku *Narasi Bangsa yang Tercecer*) dan saudara Charles Jama (kandidat doktor bidang Seni dan Budaya di Udayana, alumnus Pascasarjana UPI). “Apakah potensi-potensi ini sudah dimanfaatkan secara optimal?” Pertanyaan reflektif ini rupanya menjadi biang dan basis fundamental dari diskusi panjang kami selama dua hari berada di Labuan Bajo. Memang, pada akhirnya pertanyaan ini mengerucut pada pembahasan mengenai prospek pengembangan ekonomi budaya pariwisata di Flores Barat. Pertanyaan ini justru muncul bertolak dari sebuah hipotesis bahwa bila potensi ini dikembangkan secara baik dan benar, saya kira hal itu akan membangkitkan NTT pada masa yang akan datang sebagai propinsi yang maju dan berkembang dalam budaya, sosial, ekonomi, pariwisata dan pendidikan. Indahnya panorama Pulau Padar, Pulau Rinca dan wilayah sekitar Labuan Bajo merupakan representasi penampakan dari sekian banyak pemandangan yang dapat memanjakan mata para pengunjung;

2 Saya mengetahui dan mengikuti kiprah beberapa tokoh nasional di bidang pendidikan seperti Dr. Gorys Keraf, seorang ahli bahasa ternama Indonesia dan salah seorang dosen Universitas Indonesia dengan bukunya yang terkenal *Komposisi*. Kemudian, Sonny Keraf sebagai Menteri Negara Lingkungan Hidup di Kabinet Persatuan Nasional dengan buku *Etika Lingkungan Hidup*; Lorens Bagus dengan buku *Kamus Filsafat* yang pertama di Indonesia; sastrawan, budayawan dan sejarawan, Dami N. Toda. Prof. Dr. Aleks Lanur dengan bukunya *Logika Selayang Pandang*. Tokoh politik nasional seperti; Frans Seda, Menteri Perkebunan dalam Kabinet Kerja IV (1963-1964), Menteri Keuangan (1966-1968), serta Menteri Perhubungan (1968-1973), Kraeng Ben Mboi Gubernur NTT untuk periode 1978-1988 dan isterinya, Ibu Nafsiah Mboi (mantan Menteri Kesehatan pada pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II. Dan tokoh-tokoh muda yang berperan penting dalam kancah politik nasional saat ini, seperti Johni Plate (Sekjen Nasdem), Benny Harman (Mantan Ketua Komisi I DPR RI, Partai Demokrat), Andreas Hugo Pareira (Ketua DPP PDI-P), Pengamat Politik Boni Hargens, dan salah satu penulis opini sosial politik di Kompas dan media nasional lain, Max Regus, MA., PhD (salah satu pembuat pengantar buku ini). Saya kira masih ada tokoh lain dari Flores yang tidak sempat saya rekam dalam memori ingatan.



dan bahkan bagi para pengembang (investor) ekonomi budaya dan pariwisata. Saya membatin, ‘pantas dan layak apabila banyak wisatawan yang berkunjung ke sini’. Saya pun akhirnya membandingkan ‘appel to appel’ dengan beberapa negara Eropa yang pernah saya kunjungi. Panorama alam yang indah seperti ini hampir tidak ada, bahkan tidak ada. Dalam refleksi saya, perilaku dan pemikiran yang sangat tidak ‘fair’ dan kerap kontradiktif bila kita lebih berorientasi wisata ke luar negeri (Eropa, Amerika, dll) ketimbang ke Labuan Bajo, misalnya. Secara kritis, ada semacam ‘suasana pertentangan ke dalam’ (*contradictio in terminis*), di mana kita memiliki sesuatu yang indah (hanya karena belum dipoles dan diberdayakan secara baik), tetapi lebih memilih yang lain, yang belum tentu gradasi keindahannya lebih tinggi dan lebih baik. Semacam inilah paradoks kehidupan kita sebagai negara berkembang. Perkara tentang begitu cepatnya kita jatuh cinta pada polesan (casing) belum bisa diselesaikan sampai saat ini. Tampilan luar pada akhirnya mengeser semangat kita untuk membuat pencarian terhadap inti terdalam, yang sebenarnya lebih fundamental, esensial dan substansial. Rupanya, rasionalitas substantif seringkali tunduk pada rasionalitas artifisial/atraktif, ketika belum ada upaya yang cukup berarti untuk mengedukasi, mengadvokasi dan mengemansipasi kesadaran masyarakat pada tahap yang lebih bermakna.

REFLEKSI DAN ABSTRAKSI KRITIS ATAS KONSEP PEMBANGUNAN

Dalam buku **Prosa dari Praha** (2018)³ dan **Ecopedagogy** (2017)⁴ saya telah membuat refleksi dan abstraksi kritis terhadap situasi ini sebagai kondisi keterjebakan masyarakat negara berkembang pada

3 Supriatna, Nana, 2018. *Prosa dari Praha: Narasi Historis Masyarakat Konsumen Era Kapitalisme Global*. Bandung: Rosdakarya.

4 Supriatna, Nana, 2017. *Ecopedagogy: Membangun Kecerdasaan Ekologis dalam Pembelajaran IPS*. Bandung: Rosdakarya.



Narasi Bangsa yang Tercecer

industri citra dan artifisial. Banyak di antara kita yang tertipu oleh citra iklan dan gambaran-gambaran artifisial, sehingga melupakan bahwa yang ada di samping 'aku Indonesia' ada 'dia Indonesia', ada 'mereka Indonesia' dan ada 'bumi Indah Indonesia'. Mereka ini adalah bagian penting dari 'aku Indonesia'. Aku ada karena mereka ada. Aku dan mereka satu. Aku menggandaikan mereka dan mereka juga sebaliknya. Karena itu, mereka yang adalah 'aku yang berada di luar diriku' pasti butuh dilihat, dijamah, dihargai, dinikmati, dan dieksplorasi. Aku harus berupaya mengembangkan mereka, karena kalau mereka berkembang berarti aku juga ikut berkembang. Ini merupakan prinsip dasar etis nan rasional mengenai relasi sosial kemanusiaan dalam sebuah negara bangsa. Prinsip etis ini merupakan satu manifestasi rasionalitas etis kemanusiaan yang mesti dikembangkan pada negara bangsa kita, yang pada negara lain mungkin sudah pudar dan menghilang. Bila rasionalitas sosial kemanusiaan ini diberdayakan untuk menjadi landasan yang kuat dalam pengembangan sosial ekonomi dan kesejahteraan, maka negara kita akan menjadi kuat dan memiliki 'bargaining position' yang positif di antara negara-negara lainnya.

Menurut saya, rasionalitas etis kemanusiaan seperti ini harus juga dilibatkan dalam kebijakan pengembangan ekonomi budaya dan pariwisata di Labuan Bajo.

Setidaknya, ketika kita bersemangat dalam program-program pengembangan ekonomi budaya dan pariwisata yang dianggap cukup mendesak, maka salah satu sensor dan kontrolnya adalah rasionalitas etis kemanusiaan tadi. Selain pertimbangan biaya, energi, kebijakan politik, sensor dan kontrol ini menjadikan berbagai program pengembangan untuk mengalami kebablasan dan terkesan eksploitatif. Selain itu, sebagai seorang yang konsern pada dunia pendidikan ekologi (*eco-pedagogy*) maka secara pribadi saya menghendaki agar segala bentuk pengembangan ekonomi budaya



dan pariwisata mesti bersudut pandang ekologis. Perlu melibatkan berbagai analisis ekologi (misalnya, analisis mengenai dampak lingkungan-AMDAL) dalam upaya pengembangannya, sehingga tidak mengorbankan dan menafikan keseimbangan alam lingkungan yang indah dari rahim bumi Flores. Alam lingkungan dan sosial tidak boleh dikorbankan hanya untuk kepentingan pengembangan dan peningkatan ekonomi seperti yang sudah terjadi di daerah lain atau di negara lain. Perlu ada rasionalitas, proporsionalitas, komprehensivitas dan holisitas dalam pengembangannya. Hal itu membuat bumi Flores tetap terjadi dan indah seperti keadaannya sekarang. Tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat karena hasil eksplorasi yang baik terhadap potensi yang ada.

Fenomena glorifikasi terhadap rasionalitas atraktif atau artifisial tampaknya semakin berkembang subur dalam masyarakat bangsa kita. Masyarakat terkeseima dengan iklan-iklan yang bersembunyi di balik kemas rasionalitas, tetapi kenyataan bersifat destruktif. Realitasnya, rasionalitas dalam berbagai penampakannya secara faktual telah mendera, membelenggu, mengeksploitasi masyarakat sendiri. Pembangunan telah mempreteli hakekatnya diri dan terjun ke jurang realitas kehidupan yang absurd.⁵ Lihat saja, berbagai kemas perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan industri, serta skema-skema pengembangan yang merupakan hasil dari kajian modernisme justru telah memberangus nilai-nilai inti dari kemanusiaan⁶. Banyak masyarakat yang tergiring penjara kemiskinan dalam artian fisiologis, psikologis, sosiologis dan bahkan moral. Alam juga mengalami 'kemiskinan' akibat pola pembangunan yang eksploitatif dan kurang mempertimbangkan dampak-dampak buruknya.

5 Seorang Weberian yang bernama Freidman menggugat tentang glorifikasi terhadap rasionalitas yang sudah dan sedang bertumbuh dalam masyarakat modern. dalam bukunya *Cultural Identity and Global Processes* (1994).

6 Soedjatmoko, 1983. *Pembangunan: Pilihan Karangan*. Obor: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).



Narasi Bangsa yang Tercecer

Memang harus diakui bahwa rasionalitas merupakan lahir dari rahim modernisme. Ketika direfleksikan secara kritis, rasionalitas modernisme ini ternyata lebih berpihak pada kebijakan politik pembangunan dengan orientasi berlebihan pada pembangunan ekonomi, yang kemudian justru telah memunculkan berbagai permasalahan sosial⁷. Permasalahan sosial dan segala manifestasi dampak multiplier-nya, pada akhirnya berkontribusi pada turunnya kualitas kemanusiaan dalam beberapa dimensinya. Hal ini terjadi karena yang mengemuka dalam kebijakan politik pembangunan dunia adalah rasionalitas formal-tenokratis, dan menafikan sebuah *reason* (nalar). Cara berpikir formal-teknokratis berbeda dari cara berpikir nalar, yang dalam pemikiran kaum kritis merupakan tumpuan harapan masyarakat. Nalar meliputi kemampuan untuk melihat realitas dari sudut nilai manusia yang tertinggi yang berkenaan dengan keadilan, perdamaian dan kebahagiaan.

Tujuan dari 'cara berpikir formal-teknokratis' adalah untuk membantu kekuatan yang mendominasi, bukan untuk memerdekakan individu dari dominasi. Perhatiannya semata-mata untuk menemukan cara yang paling efisien untuk mencapai tujuan apapun yang dianggap paling penting oleh pemegang kekuasaan, sekalipun mengorbankan manusia dan alam. Segala bentuk pemaksaan kehendak dalam bentuk privatisasi, totalitarianisme dan fasisme dalam pembangunan ekonomi adalah bentuk-bentuk dari rasionalitas formal-teknokratis yang berusaha melawan dan menjajah rasionalitas subyektif atau nalar sehat. Dengan demikian, paradoks dalam realitas kehidupan

⁷ Dalam buku *The Critique of Domination* (1973) Trent Schroyer menjelaskan tentang kenyataan bahwa dalam masyarakat modern, penindasan justru telah dihasilkan oleh rasionalitas, di mana kebijakan politik pembangunan yang berorientasi pada ekonomi berdampak pada munculnya berbagai masalah sosial.



modern adalah kelihatan rasional, tetapi sebenarnya penuh dengan ketidakrasionalan. Kondisi inilah yang disebut sebagai ‘irasionalitas dari rasionalitas formal’.⁸

PRINSIP (KESADARAN) ETIS DALAM PEMBANGUNAN

Permasalahan rasionalitas yang tidak konstruktif, esensi yang sebenarnya terletak pada mental dan perilaku masyarakat modern dalam membangun relasi dengan manusia dan alam. Sejatinya, kesadaran harus menjadi garansi utama dan menentukan ketika manusia berhubungan kosmosnya. Hubungan manusia dengan kosmosnya, sangat bergantung pada tinggi dan rendahnya kesadaran manusia. Menurut saya, adanya keadaan ‘tidak normalnya’ hubungan sosial dan lingkungan alam disebabkan karena kesadaran manusia belum tumbuh dan berkembang secara baik. Kesadaran yang rendah ini telah berdampak pada bangunan mental dan perilaku manusia yang menafikan prinsip-prinsip sosial etis dan norma-norma kesetaraan penghargaan antara manusia dan alam. Manusia cenderung agresif, destruktif, nafsu, serakah dan memaksa kehendak dalam membangun relasi dengan alam dunianya, dan kadang tidak akan tahu bagaimana seharusnya memperlakukan lingkungan sosialnya. Kondisi ini berlanjut pada krisisnya kemampuan dan keterampilan untuk mencegah, mengatasi dan memperbaiki, baik permasalahan sosial maupun persoalan lingkungan hidup.

⁸ Menurut pandangan Hebert Marcuse dalam bukunya *One-Dimensional Man* (1964), realitas menggambarkan bahwa tampaknya rasionalitas ada secara keseluruhan dalam diri masyarakat, tetapi rupanya tak rasional secara keseluruhan. Sebagian masyarakat kemudian menjadi tak rasional karena telah merusak individualitas, merampok kebutuhan dan kemampuan bahkan sosialitasnya dengan berbagai bentuk keinginan-keinginan yang dianggap rasional. Kebutuhan hidup dipenuhi dengan mengeksploitasi alam, perdamaian dirancang dengan melakukan perang, atau membangun kebersamaan dengan mengurbankan individualitas. Hasil akhir dari semuanya adalah fakta kemiskinan, ketertindasan, eksploitasi dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.



Narasi Bangsa yang Tercecer

Bila ditilik dari sisi prinsip etis, mesti disadari bahwa rasionalitas adalah sesuatu kekuatan dasar dalam membangun peradaban kebangsaan. Rasionalitas menjadi tonggak dalam dalam membentuk skema-skema berpikir dan berperilaku dalam berbangsa. Tanpa adanya rasionalitas, masyarakat bangsa akan terkurung dalam kesempitan berpikir dan bertindak. Hal itu akan memengaruhi rancangan pembangunan peradaban pada masa-masa yang akan datang. Namun, rasionalitas yang dibentuk harus berbasiskan pada kesadaran masyarakat untuk membangun pilar-pilar yang kuat dalam membantu perkembangan masyarakat. Rasionalitas berkesadaran tidak muncul begitu saja dalam diri masyarakat, tetapi membutuhkan proses dalam menumbuhkembangkannya.⁹ Dalam yang lebih praktis, ketika adanya program pembangunan di wilayah Flores, NTT, baik oleh pemerintah daerah/pusat atau pengembang (investor), maka upaya melibatkan masyarakat dalam tahapan seperti perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi merupakan bagian penting dalam membangun kesadaran rasional dalam diri masyarakat NTT. Dengan demikian, dalam program pembangunan tersebut ada dua hal yang berjalan sinerji. Di satu pihak pembangunan dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan

9 Immanuel Kant (1724-1804) dalam pengantar buku *Critique of Pure Reason* menyebutkan empat pertanyaan penting yang melandasi proses merancang kesadaran yang rasional manusia dalam bermasyarakat. Pertanyaan-pertanyaan itu, antara lain: (1) 'Apa yang dapat diketahui?'. Pertanyaan ini berhubungan dengan upaya memberdayakan pengetahuan yang benar tentang segala sesuatu; menggunakan rasionya agar bisa membedakan yang baik dan benar, memberi sumbangan pemikiran positif terhadap berbagai persoalan kehidupan, serta mencerna segala informasi buruk yang masuk dalam dirinya. (2) 'Apa yang harus dilakukan?'. Pertanyaan ini berkaitan dengan tindakan-tindakan etis seseorang yang berdampak pada kebaikan bersama (*bonum commune*), mendukung kehidupan sosial serta mampu memperbaiki tatanan sosial yang sudah rusak; (3) 'Apa yang dapat diharapkan?'. Pertanyaan ini bertalian dengan indahnya hidup bersatu dalam keberagaman (estetika) dan cita-cita akan hidup yang lebih baik. (4) 'Siapa itu manusia?'. Pertanyaan ini menjadi jalan bagi upaya menemukan jati diri sebagai manusia sempurna, ketika dia sudah memberdayakan pengetahuan, melakukan tindakan-tindakan etis, memiliki cita rasa kebersamaan dan cita-cita akan masa depan yang lebih baik.



masyarakat NTT, tetapi pada pihak lain masyarakat disadarkan akan pentingnya menjaga dan memiliki sumber daya alam, yang mendukung pembangunan tersebut¹⁰.

Seperti yang dinarasikan oleh Tapung, dalam opini “Merajut Kesadaran Kritis Berbasis *Eco-Pedagogy*; Belajar dari Berbagai Peristiwa Bencana Alam” (Pos Kupang, 04/10/2016), sejatinya, untuk membangun lagi kesadaran masyarakat, setiap warganya mesti membekali dirinya dengan berbagai pengetahuan yang mendalam tentang dunianya, baik dari sejarah lahir dan berkembangnya saat ini, maupun berkaitan dengan keunggulan-keunggulan komparatif yang ada padanya. Pengetahuan yang integral, holistik dan komprehensif tentang dunianya akan menumbuhkan perilaku, kecintaan dan rasa memilikinya. Berkembangnya rasa cinta pada dunianya disebabkan karena mendalamnya pengertian tentang kosmosnya. Seperti yang digambarkan oleh Tapung pada artikel dalam buku ini tentang “Rasionalitas yang Etis dan Bernilai”, bahwa dalam perspektif filosofis, kesadaran ini disebut kesadaran ontologik karena berhubungan dengan kemampuan untuk merenungkan tentang ‘ada dan adanya’ dunianya. Kesadaran ontologik menjadi dasar dalam membangun kesadaran epistemologik, yaitu pengetahuan yang benar ‘apa adanya’ tentang sesama dan lingkungan alamnya. Pengetahuan yang benar dan adanya semangat ‘mencintai dunia’ menjadi landasan berpikir untuk melakukan (*think for doing*) sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Seseorang yang dalam dirinya ada ‘rasa memiliki’ (*sense of belonging*) terhadap dunia yang tinggi, akan selalu berpikir tentang apa yang harus dilakukan untuk pertumbuhan dunia ke arah yang lebih konstruktif. Karena itu, otot, otak dan perasaan benar-benar diabdikan untuk pembangunan dunia.

¹⁰ Lihat pembahasan ini pada Marianus Mantovanny Tapung, “Merajut Kesadaran Kritis Berbasis *Eco-Pedagogy* (Belajar dari Berbagai Peristiwa Bencana Alam)”, SKH Pos Kupang, 04/10/2016



Narasi Bangsa yang Tercecer

Selain itu, kesadaran rasional etis perlu ditumbuhkembangkan agar menjadi basis bagi mekarnya optimisme akan dunia yang lebih baik pada masa yang akan datang. Sejumpt harapan ini mengandung optimisme dan idealisme bahwa dunia ini akan menjadi lebih baik pada masa yang akan datang. Kesadaran rasional etis menjadi fondasi dalam mengembangkan berbagai kapasitas pengetahuan, tindakan-tindakan etis, dan saling menghargai, yang seharusnya menjadi karakter dari seorang ‘manusia’ modern. Bila dia memiliki kapasitas-kapasitas ini, maka dia mendapatkan kemuliaan eksistensinya sebagai warga dunia. Menemukan diri sebagai warga dunia yang mulai merupakan bagian penting dari kesadaran etis. Kesadaran ini tereksresi dari model keadaban hidupnya sebagai warga dunia. Bila kehidupannya sudah beradab, dapat dipastikan sudah terkonstruksi kesadaran etis dalam diri masyarakatnya. Manifestasi utama dari kesadaran etis adalah kebaikan dan konsistensi tindakannya sebagai warga dunia. Praksisnya, dunia yang beradab tercermin dari pemikiran dan tindakan-tindakan etis warganya, seperti senantiasa menjunjung tinggi asas kebenaran, keadilan, kejujuran, menghargai perbedaan, toleransi, hak asasi manusia, hak asasi alam, dll.

Dalam disertasi berjudul “Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis (EL-KBK) Siswa SMP/MTs Pada Pembelajaran IPS (Studi Pengembangan pada SMP/MTs di Kota Ruteng)”, Tapung mengemukakan pemikiran Habermas mengenai masyarakat rasional komunikatif.¹¹ Menurut Habermas, keterlibatan masyarakat dalam memikirkan dan menentukan arah pembangunan masyarakatnya adalah bentuk dari tanggung jawab moral politiknya. Menurutnya, mengedepannya tanggung jawab moral politik ini bertolak dari

11 Juergen Habermas (1929-2015) dalam karya *Knowledge and Human Interests* (1971) dan *Religion and Rationality: Essays on Reason, God, and Modernity* (2002) menggambarkan bangunan masyarakat komunikatif yang mesti didasarkan pada rasionalitas.



semakin menguatnya kesadaran emansipatoris masyarakat. Dalam masyarakat rasional komunikatif kesadaran emansipatoris ini merupakan akumulasi dari dari tiga bentuk kesadaran¹², yaitu: Pertama, kesadaran teknis. Kesadaran tentang kemampuan sekaligus keterampilan dalam mengelola lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan material hidup sehari-hari, seperti kebutuhan dasar terkait sandang, pangan dan papan. Kesadaran ini menjadi prasyarat bagi kesadaran berikutnya. Karenanya, upaya memunculkan dan memberdayakan kesadaran ini menjadi sangat berat baik bagi masyarakat itu sendiri, maupun bagi negara yang secara yuridis formal bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan lahir batin dari masyarakatnya. Pemberdayaan dan pendidikan melalui kegiatan persekolahan, pelatihan, pembimbingan, advokasi, dll menjadi upaya-upaya alternatif dalam menumbuhkan kesadaran teknis ini.

Kedua, kesadaran praktis. Kesadaran yang berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan memuat interaksi dan relasi yang harmonis anggota masyarakat dengan lingkungan sosial dan sesamanya. Kesadaran ini mengarah kepada pemberdayaan kemampuan-kemampuan sosial untuk membangun masyarakat yang beradab dan damai. Kemampuan-kemampuan teknis dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia mesti didukung oleh pola-pola relasi dan interaksi yang baik dan harmonis di antara masyarakat, sehingga terbentuk sensitivitas dan tanggung jawab sosial di antara anggota masyarakat. Dalam hal ini, pemberdayaan dan keterlibatan lembaga-lembaga sosial masyarakat, lembaga adat, dan lembaga agama dapat menjadi ruang dan tempat untuk menumbuhkembangkan kesadaran ini. Pranata dan norma sosial

12 Lihat pembahasan Marianus Mantovanny Tapung dalam bagian kajian teori: Model Emancipatory Learning untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis (EL-KBK) Siswa SMP/MTs Pada Pembelajaran IPS (Studi Pengembangan pada SMP/MTs di Kota Ruteng), *Disertasi*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2018.



Narasi Bangsa yang Tercecer

yang sudah ada dalam masyarakat diberi penguatan sehingga tetap membantu pola-pola relasi dan interaksi sosial yang baik dan benar dalam masyarakat. Dan, ketiga, kesadaran emansipatoris. Kesadaran berkaitan dengan keterlibatan aktif warga masyarakat untuk memahami perubahan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, dan melakukan evaluasi sekaligus refleksi kritis terhadap perubahan tersebut. Bila masyarakat sudah bisa mengevaluasi dan merefleksikan secara kritis berarti mereka sudah memiliki pengetahuan, pemahaman, perspektif dan pemaknaan baru tentang keadaan lingkungan sosial serta tuntutan-tuntutan perubahan yang wajib dilakukan pada masa-masa yang akan datang. Evaluasi dan refleksi kritis serta munculnya pengetahuan, pemahaman, perspektif dan pemaknaan baru adalah sebuah bentuk transformasi. Jadi, kesadaran emansipatoris sangat identik dengan munculnya transformasi. Sementara itu, tanggung jawab moral politik yang tinggi menjadi salah satu bagian penting dalam membangun transformasi tersebut, yang secara fundamental menasar pada kesejahteraan umum, keadilan dan pemerataan sosial.

Kesadaran emansipatoris ini menjadi basis dalam membangun komitmen dan tanggung jawab untuk membangun masyarakatnya. Kesadaran emansipatoris ini juga berhubungan dengan keterlibatan dalam merancang kebijakan-kebijakan strategis pembangunan bersama dengan negara. Berdasarkan kesadaran emansipatoris ini, masyarakat juga kemudian diberdayakan untuk berani mengambil bagian dalam proses penguatan transformasi tatanan sosialnya. Proses penguatan transformasi tatanan sosial ini tampak dalam berbagai bentuk dan manifestasi pergerakan, seperti beralih dari kekakuan pola pikir dan sikap menuju kepada dinamisitas dan fleksibilitas; bergerak dari hanya sekedar kesadaran diri menuju pada kesadaran kolektif; beralih dari hanya mengandalkan kerja sendiri menuju pada kolaborasi dan jaringan kerja yang luas; berubah dari hanya



penghayatan nilai-nilai kehidupan parsial dan eksklusif menuju pada penghayatan nilai-nilai kehidupan yang inklusif, universal dan bermanfaat bagi kepentingan umum.

Dalam artikel tentang “Mengajarkan Keterampilan Sosial yang diperlukan Siswa Memasuki Era Global” dan makalah “Mengembangkan Pertanyaan Kritis *Model Ways Of Knowing Habermas* dalam Pembelajaran Sejarah”,¹³ saya membeberkan pandangan Habermas mengenai satu ciri masyarakat beradab dan memiliki rasionalitas yang tinggi. Menurut Habermas ciri masyarakat beradab dan memiliki rasionalitas yang tinggi tergambar dalam dua dimensi, yaitu dimensi kognitif-teknis dan dimensi moral-komunikatif. Pertama, dimensi kognitif-teknis berkaitan dengan kemampuan warga masyarakat dalam mencermati dan menyelesaikan berbagai masalah sehingga tidak terus menerus mengganggu kehidupannya. Masalah tersebut dipecahkan dengan mendiskusikan secara bersama, mencari alternatif jalan keluar, dan menyusun program-program praksis sebagai tindak lanjutnya. Yang menjadi istimewa dari dimensi kognitif ini, ketika berdiskusi segala bentuk prasangka, stereotip, eksklusivisme, dan intoleransi dikandangkan alias tidak mendapat tempatnya. Dalam asas kesetaraan dan persamaan hak, mereka betul-betul fokus pada penyelesaian masalah untuk kepentingan hidup yang lebih baik dengan mengandalkan kemampuan berpikir logis, analitis dan etis serta sedapat mungkin menghindari cara-cara kekerasan.

Kedua, dimensi moral-komunikatif berhubungan dengan upaya meraih konsensus dengan sesama tentang berbagai hal dalam hidup bermasyarakat, dengan mengedepankan komunikasi

¹³ Pemikiran Habermas tentang tipikalitas masyarakat dengan kandungan rasionalitas yang tinggi, juga bisa dilihat dalam Supriatna, Nana (2002). *Mengajarkan Keterampilan Sosial yang Diperlukan Siswa Memasuki Era Global*, JPIS No. 19; Supriatna, Nana (2007). “Mengembangkan Pertanyaan Kritis *Model Ways Of Knowing Habermas* dalam Pembelajaran Sejarah”, *Makalah*, Direktori UPI: Bandung.



Narasi Bangsa yang Tercecer

yang dialogis dan emansipatoris. Komunikasi yang dialogis dan emansipatoris ini membuka ruang adanya saling memahami, mengerti, mendukung dan melindungi antara warga masyarakat dari segala bentuk dominasi dan determinasi oleh kelompok dan golongan ideologis. Tentu kelompok dan ideologis ini kerap kali berusaha merongrong sendi-sendi kehidupan masyarakatnya.

Demi menangkal dan melemahkan kekuatan-kekuatan ideologis yang mengancam kedamaian dan ketenangan hidup berdunia, tentu yang diandalkan bukan lagi kekuatan otot atau fisik, tetapi keterampilan logis, analitis, etis dan senantiasa mengedepankan komunikasi yang dialogis dan emansipatoris, serta mampu mengelola risiko kehidupan melalui proses bernalar yang baik.

SAMPAILAH PADA PUTUSAN

Lazimnya, struktur epistemologi berpikir yang lengkap merupakan rangkaian kontinuitas dari sensasi inderawi, refleksi, abstraksi, prinsip, sampai pada yang paling tinggi adalah putusan. Berdasarkan hasil sensasi inderawi, refleksi, abstraksi dan prinsip saya tentang Flores, maka sampailah saya pada sebuah keputusan: suatu saat harus bisa kembali ke sana dan menyusuri Flores dari ujung timur menuju ujung barat! Menjajaki kembali panorama alam yang indah dan menikmati sejumlah sentuhan-sentuhan alam yang mungkin tidak ada pada tempat lain. Jelas, yang menjadi titik akhir adalah Labuan Bajo...karena dia sedang dilirik oleh hampir semua mata indah dari segala penjuru bumi. Untuk menutup prolog ini saya melantunkan sebuah puisi:



Elaborasi Filosofis, Pedagogik Kritis, Sosial, dan Politik

*Flores..., aku dan dia telah jatuh cinta padamu.
Pilih kegagahan baju modernnya,
atau ketulusan pandangan mataku.
Namun aku berharap penuh,
kau hanya boleh menerima cintaku.*

*Sebab cintaku bukan yang palsu,
bukan pula polesan,
yang sebentar pergi lalu datang,
Cuma menebar pesona.*

*Bukan!
Cintaku utuh, yang tak retak dipecah gelombang.
Bak cintamu yang nyaris sempurna untuk Indonesia kita.
Begitupun aku!
Kau Flores..kau Pulau bunga,
Mari..berkembang mekarlah bersamaku!*

(Nana S., UPI koda Juli 2018)



Narasi Bangsa yang Tercecer

Lastest Dummy



PROLOG

PENDIDIKAN KRITIS, BAGAIMANA MENILIKNYA?

Prof. Dr. Enok Maryani, M.S.¹

“In this World, if you want to win in the 21st century, you have to be making sure that making other people become powerful, empower others; making sure the other people are better than you are...(Jack Ma).

Ketika diminta untuk membuat pengantar untuk buku *Narasi Kebangsaan yang Tercecer* dari saudara Marianus Mantovanny Tapung, perhatian dan konsentrasi saya langsung tertuju pada “bagaimana menjelaskan posisi pendidikan kritis dalam konteks kekinian pendidikan”. Karena itu, saya memberi prolog ini dengan judul ‘Pendidikan Kritis, Bagaimana Meniliknya?’. Pertanyaan tersebut memiliki relevansi dengan

¹ Guru besar pada Universitas Pendidikan Indonesia dan sekarang menjabat sebagai ketua Program Studi Pendidikan Geografi Pascasarjana UPI.



Narasi Bangsa yang Tercecer

beberapa pemikiran yang ada pada buku ini yaitu pendidikan kritis (*critical pedagogy*), juga akan menjawab beberapa hal, antara lain: (1) Urgensi pendidikan kritis dalam konteks kebutuhan bangsa Indonesia yang masih dikerubuti kompleksitas permasalahan sosial; (2) Rekonstruksi gagasan pendidikan kritis; (3) Integrasi pendidikan kritis dalam pengembangan pendidikan bangsa; (4) Catatan rekomendatif terkait urgensi pendidikan kritis di Indonesia. Empat poin ini sedapat mungkin dibahas dalam sistematika dan struktur narasi-narasi di bawah ini.

URGENSI PENDIDIKAN KRITIS DALAM KONTEKS KEKINIAN BANGSA

Bila berpijak pada konsep dan praksis pendidikan kritis, saya melihat negara bangsa ini tidak cukup 'dihidupkan' oleh manusia-manusia yang berenerjik saja, tetapi juga harus dikembangkan penyangga-penyangga lain seperti idealitas, kritisitas, kreativitas, optimisitas dan karakterisitas. Sebagian besar penyangga-penyangga ini dapat ditumbuhkembangkan melalui pendidikan yang berbasis kritis. Dari sudut pandang pendidikan kritis, bila enerjisitas, dielaborasi secara baik dengan idealitas, kritisitas, optimisitas dan karakterisitas maka bangsa kita akan tetap kokoh sampai kapan pun. Bangsa kita akan berposisi tawar kuat ketika disejejerkan dengan bangsa-bangsa kuat lain di dunia.

Namun, dengan semakin kompleksnya permasalahan kebangsaan, seperti degradasi lingkungan hidup, kemiskinan, pengangguran, tindakan kriminal, bunuh diri, pergaulan bebas, penggunaan obat-obat terlarang, kapitalisme ekonomi, desintegrasi, radikalisme, terorisme, hedonisme dan konsumerisme, maka perlu ada upaya untuk menyelesaikan semuanya. Setidaknya, ketika dikaitkan dengan kegiatan pendidikan, sudah pasti persoalan-



persoalan ini secara langsung atau tidak langsung berimbas pada melemahnya upaya pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan². Bila ditilik dari perspektif ‘akibat’, kualitas pendidikan dapat mengalami kemunduran, berikut upaya pengembangan dan peningkatannya mengalami kendala. Sebab energi pendidikan harus membagi konsentrasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan tersebut. Sementara pada negara-negara yang sudah maju, fokus dan modus kegiatan pendidikan tidak lagi berkutat dengan permasalahan-permasalahan sosial seperti ini. Masalah-masalah itu sudah berkurang bahkan tidak ada. Pendidikan negara-negara maju sudah fokus pada upaya membentuk karakter dan keterampilan yang mumpuni dalam menyambut perubahan-perubahan besar (*sudden shift*) pada abad 21. Negara-negara maju tersebut melihat bahwa karakter yang kuat dan keterampilan yang handal menjadi garansi utama dalam menghadapi perubahan dunia yang begitu cepat (*speed*), tiba-tiba (*sudden*), dan mengejutkan (*surprise*).³

Dengan demikian, dalam pendidikan kritis, yang perlu dihilangkan dari masyarakat bangsa adalah sikap dan perilaku yang kurang kritis, kurang optimis, apatis, pasif, acuh tak acuh, daya saing lemah. Sikap dan perilaku seperti ini harus terus direduksi. Setiap warga perlu menyadari bahwa berbangsa dan bernegara tidak cukup hanya berada dalam aliran angin berhembus, tanpa ada pemaknaan, perjuangan, simpati dan empati. Dengan semakin kuatnya gelombang perkembangan dan tuntutan akan perubahan sebenarnya memaksa warga masyarakat agar berusaha memberi pemaknaan yang lebih tinggi terhadap kehidupannya. Dalam konteks menguatnya kompleksitas persoalan kebangsaan saat ini, sudah barang tentu yang ditagih adalah sikap simpati, empati dan

2 Maryani, Enok, 2008. *Pengembangan Pembelajaran IPS untuk Peningkatan Keterampilan Sosial*. Bandung: Alfabeta.

3 Reinald Kasali, Kompas, 24/08/2015



Narasi Bangsa yang Tercecer

tanggung jawab kebangsaan yang lebih radikal, namun tentunya tetap membalutnya dengan kekuatan kritis, selektif, kreatif dan optimis.

Sementara bila dilihat dari perspektif 'sebab', justru rendahnya mutu pendidikan dapat menjadi salah satu faktor munculnya berbagai permasalahan kebangsaan. Namun, keadaan rendahnya mutu pendidikan, tentu tidak berdiri sendiri. Menurut saya, ada beberapa faktor tidak langsung yang turut memberi pengaruh, antara lain: (1) Rendahnya perhatian dan bimbingan dari orang tua, guru dan masyarakat terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak. (2) Kualitas Indeks Pembangunan Manusia (pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan) yang masih cukup rendah. (3) Fenomena tergerusnya identitas adat istiadat, nilai-nilai kearifan lokal dan agama. Fenomena ini berdampak pada berkembangnya sikap ignoran, indifferens dan permisif terhadap bentuk-bentuk penyimpangan sosial dan penyakit sosial. Rendahnya antusiasme masyarakat dalam ritus-ritus agama dan adat serta minimnya partisipasi dalam melihara budaya, memberi gambaran mengenai kecenderungan menghilangnya identitas religus dan kultural. (4) Adanya gejala disorientasi praksis pendidikan sebagai satu tonggak kehidupan yang seharusnya bertanggung jawab dalam membentuk kecerdasan anak bangsa. Orientasi pada penguasaan konten materi (*hard skills*) yang tinggi dan lantas menyepelkan karakter diri (*soft skill*) seperti berpikir kritis, rasional, selektif dan analitis, menyebabkan masyarakat mudah terjebak dalam pola pikir dan tindakan yang merusak dan menyimpang.⁴ Padahal, pendidikan baik secara ontologis, epistemologis maupun aksiologis bertujuan untuk menjadikan manusia memahami tentang keberadaannya di

4 Wahab, Abdul Aziz, 2009. *Metode dan Model-model Mengajar IPS*, Bandung:Alfabeta.



tengah dunia.⁵ Pendidikan seharusnya membantu mengemansipasi manusia tentang cara berada dan mengada di tengah dunia dan bagaimana mengembangkan nilai-nilai dan keterampilan hidupnya.

Faktor 'penyebab tidak langsung' seperti krisis identitas dalam diri generasi muda, rendahnya perhatian orang tua, masyarakat, lembaga adat dan agama, dan kondisi IPM yang rendah, mungkin tidak bersentuhan langsung dengan realitas keharian dunia pendidikan. Faktor-faktor tersebut hadir sebagai pemicu, tetapi tetap berkontribusi bagi munculnya berbagai permasalahan sosial. Sedangkan yang menjadi faktor 'penyebab langsung' adalah masih rendahnya kualitas pendidikan, yang berujung pada rendahnya prestasi keilmuan dan penghayatannya dalam keseharian.⁶ Padahal yang diharapkan dari dunia pendidikan adalah terbentuknya generasi yang siap untuk menghadapi masalah, memecahkan dan menyelesaikannya. Ini berarti, pendidikan nasional masih harus tetap memiliki tugas dan tanggung jawab besar dalam membentuk dan memberdayakan generasi bangsa sehingga dapat menghadapi, memecahkan dan menyelesaikan permasalahan kebangsaan, baik yang terjadi di tingkat lokal, nasional maupun global.⁷ Salah satu tanggung jawabnya adalah membentuk dan membangun kualitas manusia yang mesti seimbang dari segi pengetahuan, sikap dan keterampilan.

Di sisi lain, secara konseptual kritis, pendidikan kita masih terjebak untuk menggunakan pendekatan konvensional dan

5 Soemantri, Muhammad Numan, 2001. *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: Rosdakarya.

6 **McPeck, John E., 2001.** "The Meaning of Critical Thinking." *Critical Thinking and Education*. New York: St. Martin Press (journal), hal. 1- 23. Bdk. Kwan, Yee Wan dan Angela F.L. Wong (2015). "Effects of The Constructivist Learning Environment on Students' Critical Thinking Ability: Cognitive and Motivational Variables as Mediators" *International Journal of Educational Research*, Volume 70, hal. 68-79. (<http://www.sciencedirect.com/science/journal/08830355/67>).

7 Sapriya, 2009. *Pendidikan IPS Konsep dan Pembelajaran*, Bandung : Penerbit : PT Rosdakarya.



Narasi Bangsa yang Tercecer

monologis dalam pembelajaran. Pendekatan ini dengan sendirinya mengekang aktivitas, kreativitas, inovasi dan kritisitas. Kegiatan pembelajaran kita kurang menantang, kurang bermakna dan berdaya kuat sehingga berdampak pada mengendurnya curiositas dan inkuirisitas dalam diri masyarakat sekolah.⁸ Model, pendekatan, metode dan strategi pembelajaran yang digunakan masih berorientasi pada penguasaan materi, dan belum cukup kuat dalam mengeksplorasi hubungan konten materi dengan permasalahan riil kehidupan masyarakat. Padahal, keadaan lingkungan dan kondisi bangsa yang riil sudah dapat menjadi 'laboratorium' yang strategis dalam mengembangkan pembelajaran kritis (*critical learning*) dan hadap masalah (*problem posing*).⁹ Kegiatan pendidikan dan pembelajaran kita belum cukup ideal dalam memberdayakan siswa untuk berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan interdisipliner serta mampu mengendalikan atau memecahkan berbagai persoalan yang melanda diri dan masyarakatnya. Pengelolaan kelas yang kurang demokratis dan dialogis, membuat siswa kurang berani untuk berbicara terbuka, kritis dan mandiri, memiliki rasa ingin tahu, mengambil keputusan, dan kemampuan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Guru menjadi satu-satunya sumber belajar, sementara lingkungan dengan berbagai permasalahannya kurang dimanfaatkan. Lingkungan dan masyarakat sosial belum dipandang sebagai sumber belajar yang mudah dan murah bagi pengembangan pembelajaran yang bertujuan untuk membangun sikap peduli dan rasa tanggung jawab masyarakat didik terhadap diri sendiri, sesama dan lingkungan.

8 Morcom, Veronica, 2015. "Scaffolding Social and Emotional Learning in An Junior High School Classroom Community: A Sociocultural Perspective". *International Journal of Educational Research*, Volume 70, 2015, hal. 18-29. (<http://www.sciencedirect.com/science/journal/08830355/67>).

9 Journell, W. dan Buchanan, 2013. "Fostering Social Problems Understanding Using The West Wing: Analyzing the Pedagogical Benefits of Film in Junior High School Social Studies Classrooms". *Journal of Social Studies Research* (ISSN: 0885985), Volume 37, Issue 2, hal. 67-83. (<http://www.sciencedirect.com/science/journal/08830355/67>).



REKONSTRUKSI GAGASAN PENDIDIKAN KRITIS¹⁰

Bila direkonstruksi, gagasan tentang berpikir kritis berkembang setelah adanya ruang untuk mengintegrasikan kegiatan pendidikan dengan konteks sosial, kultural, ekonomi, dan politik. Dengan adanya ruang tersebut, kegiatan pendidikan menjadi fasilitas untuk membangun kesadaran kritis masyarakat agar relasi antara pengetahuan, kekuasaan, dan ideologi tetap proporsional dan konstruktif¹¹. Dalam hal ini, pendidikan kritis menjadikan pengetahuan, kekuasaan dan ideologi sebagai penyanggah kebaikan dan kebenaran dalam kehidupan masyarakat, bukan malah mensubordinasi satu dengan yang lain, yang pada akhirnya dapat merusak tatanan kebaikan dan kebenaran dalam masyarakat. Pengetahuan, kekuasaan dan ideologi harus diolah secara sinergi sehingga bermanfaat bagi pengembangan eksistensi masyarakat. Karena itu, ‘hal yang tidak dapat tidak’ (*conditio sine qua non*) adalah membangun kesadaran kritis masyarakat untuk dapat memanfaatkan pengetahuan, mengelola kekuasaan dan membangun ideologi secara baik dan benar.

Dalam konteks ini, upaya membangun kesadaran kritis masyarakat sangat mendesak, agar mereka mampu keluar dari segala bentuk mistifikasi kepentingan ideologis yang membelenggu. Mereka mesti dilepas dari realitas palsu yang mencelakakan diri dan lingkungan sosialnya. ‘Kesadaran kritis’ merupakan kata kunci yang sangat penting, sebab penindasan, dominasi, eksploitasi dalam

¹⁰ Bagian ini dielaborasi dari bagian kajian teori Disertasi Marianus Mantovanny Tapung, 2018. *Model Emancipatory Learning untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis (EL-KBK) Siswa SMP pada Pembelajaran IPS (Studi Pengembangan pada Siswa SMP/MTs di Kota Ruteng, Universitas Pendidikan Indonesia*.

¹¹ Freire, Paulo, 1984. *Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan* (diindonesiakan oleh Sindhunata), Jakarta: Gramedia.



Narasi Bangsa yang Tercecer

berbagi bentuk dan manifestasinya terjadi karena terdegradasinya keterampilan berpikir kritis manusia.¹² Dalam hal ini, berpikir kritis merupakan model berpikir yang mampu menyingkap fenomena-fenomena tersembunyi, yang melampaui asumsi-asumsi, dan hanya berdasarkan pengetahuan umum saja. Berpikir kritis muncul dari kesadaran kritis untuk mampu keluar dari situasi yang membelenggu, yang membuat masyarakat didik tidak dapat bertumbuhkembang secara lebih baik. Kesadaran kritis perlu dibentuk secara mandiri dalam diri masyarakat didik, yang dikonstruksi secara kreatif melalui berbagai kegiatan advokasi, edukasi dan pemberdayaan di berbagai dimensi kehidupan.¹³

Kita dapat memulai membahas kesadaran kritis dengan membuat rekonstruksi pendidikan kritis. Rekonstruksi tersebut diawali dengan adanya dialektika antara pendidikan kritis dan berpikir kritis, yang terjadi ketika muncul pemikiran mazhab Frankfurt bertemu dengan pemikiran kaum postmodernis.¹⁴ Mazhab Frankfurt mendaraskan bahwa proyek modernisme berpijak pada asumsi mengenai perlunya meletakkan fondasi dasar kehidupan masyarakat modern dengan bertumpu pada universalisme akal, hak dan otonomi individu. Postmodernisme, kebalikannya, tidak mengamini adanya universalisme; yang ada cuma partikularitas, pluralitas dan keragaman.¹⁵ Mazhab Frankfrut menilik kebenaran

12 Beachboard, Martine Robinson and John C. Beachboard, 2010. "Critical-Thinking Pedagogy and Student Perceptions of University Contributions to Their Academic Development Informing Science". *The International Journal of an Emerging Transdiscipline* Volume 13, Idaho State University, Pocatello, ID, USA.

13 Kincheloe, J.L., 2008. *Knowledge and Critical Pedagogy: An Introduction*, 3, Springer Science and Business Media B.V.

14 Habermas, J., 1987. *The Theory of Communicative Action, Volume 2: Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason*, Beacon Press, Boston, MA. Bdk. Supardan, Dadang, 2015. *Manusia, Kekerasan, Multikultural dan Transformasi Pendidikan*, Rizqi: Bandung.

15 Morrison, K., 2003. "Jurgen Habermas", dalam Joy A. Palmer (ed), *50 Pemikir Pendidikan: Dari Piaget Sampai Masa Sekarang*. (Alih bahasa: Farid Assifa) Yogyakarta:Jendela.



sebagai suatu yang statis dan tidak mungkin berubah. Meski demikian, kebenaran sangat melindungi segala bentuk pergerakan kehidupan manusia. Sementara, postmodernisme melihat bahwa tidak ada kebenaran sejati. Kebenaran merupakan hasil interpretasi dan konstruksi bahasa manusia atas realitas. Karena itu, postmodernisme cenderung bersikap relativistik terhadap realitas.

Merujuk pada dialektika ini, mazhab Pendidikan Kritis mengadaptasi unsur-unsur positif dari mazhab Frankfurt dan postmodernisme demi mengonstruksi satu bentuk pendidikan yang membebaskan dan kritis, yang dapat menjadi medium bagi kritik sosial dan sekaligus mengembangkan ruang publik demokratis.¹⁶ Dua hal yang ditekankan dalam mazhab ini adalah pemberdayaan diri dan refleksi diri sebagai titik tolak untuk melakukan transformasi sosial dengan berpihak kepada yang lemah.¹⁷ Salah satu tema pokok mazhab pendidikan kritis adalah mengkritisi budaya kapitalisme yang mendominasi dan mendeterminasi kehidupan masyarakat modern masa itu.

Menurut mazhab pendidikan kritis, pohon kapitalisme telah membuahkan budaya positivisme dan rasionalitas teknokratik/instrumental yang sangat berpengaruh pada kebijakan dan laju arah pendidikan. Ilmu yang disampaikan kepada masyarakat didik dalam budaya positivistik-instrumental ini adalah ilmu yang berorientasi untuk menjadi 'pengabdian' pada dunia masyarakat industri.¹⁸ Proses

16 Thahjadi, S..P.L., 2004. *Pertualangan Intelektual*, Yogyakarta: Kanisius. Bdk. Supardan, Dadang, 2016. *Teori-Teori Belajar dan Pembelajaran; Dari Teori Gestalt sampai Teori Belajar Sosial*. Rahardja: Bandung.

17 McLaren, P., 1995. *Critical Pedagogy and Predatory Culture: Oppositional Politics in a Postmodern Era*. New York: Routledge.

18 Banks J.A, 2007. *Educating citizens in multicultural society. Second edition*. New York: Teachers College Columbia University. <https://faculty.washington.edu/jbanks/>, diakses, 21 Februari 2016. Bdk. Danzak, Robin L., 2015. "Sometimes the Perspective Changes": Reflections on a Photography Workshop with Multicultural Students in Italy, by International Journal of Multicultural Education, <http://ijme-journal.org/index.php/ijme>, Diakses, 26 Februari 2016.



Narasi Bangsa yang Tercecer

pembelajaran pun terarah pada akumulasi ilmu pengetahuan yang tunduk pada kepentingan profit. Jadilah pembelajaran sebagai arena imposisi pengetahuan, dari mereka yang menganggap tahu segalanya kepada mereka yang tidak mengetahui apa-apa. Dalam budaya positivisme, pengetahuan cenderung dipisahkan dari proses pembentukannya. Pengetahuan dianggap seperti “barang jadi” yang siap ditelan masyarakat didik tanpa melalui proses seleksi dan refleksi bersama.¹⁹

Padahal menurut perspektif Freire, proses pembentukan pengetahuan itu secara dialektis berkaitan erat dengan proses penerimaan secara sadar, kritis, reflektif dan dialogis.²⁰ Model pembelajaran yang ditekankan adalah bagaimana memahami, mengkritisi, memproduksi, dan menggunakan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk memahami realitas hidup dan mengubahnya. Metode yang dipakai adalah kodifikasi dan dekodifikasi. Kodifikasi mengacu pada proses merepresentasikan fakta yang diambil dari kehidupan masyarakat didik dan kemudian memasalahkannya. Sedangkan dekodifikasi adalah proses pembacaan atas fakta-fakta tersebut melalui metode deskriptif dan analitis. Tahap deskriptif digunakan untuk memahami ‘struktur permukaan’ (*surface structure*) sedangkan tahap analitis digunakan untuk memahami ‘struktur dalam’ (*deep structure*).²¹ Dua metode itulah yang dijadikan sebagai alat analisis untuk memahami realitas dan relasi-relasi antar kategori seperti ideologi, ras, gender yang umumnya ada dalam dunia pendidikan.

19 Beachboard, *Op. Cit.*

20 Freire, *Op. Cit.* Bdk. Delgaauw, Bernad, 1988. *Filsafat Abad XX*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.

21 Chomsky, N., 1978. *Human Rights and American Foreign Policy*. New York: Oxford University.



Untuk memahami 'struktur dalam, pendidikan kritis lebih menekankan pada aspek 'bagaimana berpikir' (*how to think*) daripada 'berpikir apa' (*what to think*). Penekanan pada aspek *what to think* atau materi pembelajaran itu penting, tapi proses atau metodologi untuk mendekati materi itu lebih penting. Dengan demikian, proses berpikir, berdebat, berargumentasi, mengapresiasi pendapat orang lain, selama kegiatan pembelajaran jauh lebih penting daripada materi pelajaran itu sendiri.²² Karena dalam proses itulah akan terjadi kritisisme, *sharing ideas*, saling menghargai, penilaian dan evaluasi yang komprehensif terhadap pengetahuan. Penekanan aspek *how to think* akan dapat terlaksana jika metode yang dipakai dalam proses pembelajaran adalah metode dialogis, bukan metode ceramah.²³ Dalam pendidikan kritis, dialog merupakan sarana humanis untuk menemukan jati diri sebagai manusia dan lebih dari itu, sarana untuk memanusiakan manusia. Tambahannya, pembelajaran dialogis perlu dikembangkan agar ada kesempatan bagi masyarakat didik untuk berpikir melalui perspektifnya sendiri. Proses dialogis akan menghasilkan apa yang disebut Freire dengan proses berkembangnya kesadaran. Konsientisasi adalah proses di mana manusia mempunyai kesadaran kritis, sehingga mampu melihat secara kritis berbagai kontradiksi, penyimpangan dan ketimpangan sosial yang ada di sekelilingnya dan kemudian muncul kesadaran untuk mengubahnya.²⁴

22 Eeds, M. & Wells, D., 1991. "Talking, Critical-Thinking, And Cooperative Learning: Lessons Learned From Listening to Children Talk About Books", *Social Education*, 55(2), hal. 134-137.

23 McPeck, *Op. Cit.* Bdk. Henderson-Hurley, M., & Hurley, D., 2013. *Enhancing Critical Thinking Skills Among Authoritarian Students*. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, hal, 78-90.

24 Hove, Genal, 2011. "Developing Critical Thinking Skills in the Senior High School Classroom" Retrieved June 21, 2016; <http://h08.cgpublisher.com/proposals/65/index.html>.



Narasi Bangsa yang Tercecer

Pendidikan kritis mengafirmasi bahwa tujuan pendidikan itu sebenarnya merupakan proses peningkatan kesadaran masyarakat didik, dari kesadaran magis dan naif, menuju kesadaran kritis. Untuk mendukung peningkatan kesadaran di atas, terdapat tiga tahapan dasar dalam kegiatan kritisnya,²⁵ yaitu: (1) *naming*: tahap menanyakan sesuatu: *what is the problem?* Tahap ini merupakan latihan untuk mempertanyakan sesuatu, baik itu berkaitan dengan teks, realitas sosial ataupun struktur ekonomi-politik. (2) *reflecting*: mengajukan pertanyaan mendasar untuk mencari akar persoalan: *why is it happening?* Tahap ini dimaksudkan agar peserta didik dibiasakan untuk tidak berpikir simplistik, tapi berpikir komprehensif, holistik dan reflektif. (3) *acting*: proses pencarian alternatif untuk memecahkan persoalan: *what can be done to change the situation?* Tiga tahapan ini merupakan bagian-bagian penting dalam membangun konsep dasar yang praktis tentang pendidikan kritis.

Sementara pengembangan pendidikan berpikir kritis dapat juga dimulai dengan memberdayakan komponen berpikir seperti mencermati (*watching*), menganalisa (*analysing*), menafsirkan (*interpreting*), membuat solusi (*giving solution*), merefleksi (*reflecting*) dan berpikir untuk beraksi (*think for doing*). Selanjutnya, secara konseptual pengembangan pendidikan yang berbasis berpikir kritis dapat disederhanakan dalam beberapa kegiatan, antara lain: dalam kegiatan mencermati (*watching*), generasi muda diberdayakan untuk dapat mengenal/mengidentifikasi masalah kebangsaan, mengumpulkan berbagai data pendukung agar hasil identifikasi menjadi lebih utuh dan komprehensif, dan selanjutnya diberdayakan untuk membuat asumsi dan rumusan masalah. Dalam kegiatan menganalisa (*analysing*), menafsirkan (*interpreting*), membuat solusi

25 McLaren, *Op. Cit.* Bdk. Edgington, W. D., 1999. "Emphasizing Divergent And Convergent Critical-Thinking: Structured Freedom In Elementary Social Studies", *Social Studies and the Young Learner*, 11(3), hal. 24-26.



(*giving solution*), orang muda diarahkan untuk dapat mendalami masalah, dampak, dan penyebab masalah kebangsaan, mencari dan menawarkan solusi, dan serta mencari data/sumber pendukung untuk menguatkan solusi yang terkait permasalahan kebangsaan tadi. Sementara dalam kegiatan merefleksi (*reflecting*) dan berpikir untuk beraksi (*think for doing*), mereka diarahkan untuk dapat memunculkan nilai-nilai yang dapat direfleksikan, merancang tindakan praktis untuk penanganan, membuat rancangan sosialisasi dan kampanye dan berpikir melakukan tindakan praktis.

INTEGRASI PENDIDIKAN KRITIS DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN²⁶

Delors mengangkat beberapa macam ketegangan masyarakat abad 21 yang kasat mata, seperti ketegangan antara globalisasi dan lokalisasi, antara universalitas dan individualitas, antara tradisi dan modernitas, antara kompetisi dan solidaritas, antara akselerasi/ekspansi pengetahuan dan daya serap manusia, dan antara yang spiritual dan material²⁷. Berbagai ketegangan ini menuntut seseorang untuk mengembangkan kompetensi, kapasitas, kapabilitas dan keterampilannya dalam mengkritisi berbagai kondisi dan situasi sosial yang menjadi dampak langsung dari berbagai ketegangan. Agar dapat memiliki keterampilan berpikir kritis yang baik dan benar maka diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki ketahanan dan daya saing, mampu berpikir dan bersikap rasional, kritis, solutif, alternatif, konstruktif, dan transformatif.²⁸ Selanjutnya, agar mampu keluar dari berbagai ketegangan ini,

²⁶ Lihat Marianus Mantovanny Tapung, 2018.

²⁷ Delors, 1996. *Learning: The Treasure Within*, The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Place de Fontenoy, France.

²⁸ Brubacher, John S., 1947. *A History of The Problems of Education*. New York and London, McGraw -Hill Book Company, Inc.



Narasi Bangsa yang Tercecer

maka masyarakat didik harus memiliki berbagai keterampilan abad 21 seperti yang dikemukakan Zevin,²⁹ yakni: *learning skills* yang terdiri dari *critical thinking, creative thinking, collaborating, communicating; literacy skills* yang terdiri dari *information literacy, media literacy, technology literacy; life skills* yang terdiri dari *flexibility, initiative, social skills, productivity, leadership*. Berbagai keterampilan ini memiliki kaitan erat dan saling mendukung satu dengan yang lain. Karena itu, mengembangkan keterampilan yang satu dapat pula berarti mengembangkan keterampilan yang lain. Dengan demikian, keharusan untuk mengembangkan secara simultan dan sinergi tiga keterampilan di atas sangat penting ketika berhadapan dengan berbagai tuntutan dan tegangan dunia.

Berbagai keterampilan abad 21 ini sudah pasti menuntut pembiasaan dan pemberdayaan yang intens dalam diri masyarakat didik. Pembiasaan dan pemberdayaan ini penting, karena pada dasarnya berpikir kritis merupakan salah satu model aktivitas kognitif yang menuntut keterampilan yang tinggi dalam mengembangkan dan mengaplikasikannya.³⁰ Dalam sejarah perkembangan peradaban bangsa di dunia, kegiatan berpikir kritis ini sudah dianggap sebagai salah satu tumpuan dalam mengembangkan karakter manusia dan keadaban masyarakatnya.³¹ Hal ini didasarkan pada

29 Zevin, Jack, 2007. *Social Studies for The Twenty-First Century; Methods and Materials for Teaching in Middle and Secondary Schools*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. Bdk. Case, R. & Wright, I., 1997. "Taking Seriously The Teaching of Critical-Thinking, In R. Case and P. Clark Eds.", *The Canadian Anthology of Social Studies*, hal. 178-193. Burnaby, BC: Simon Fraser University. Cornbleth, C., 1985. "Critical-Thinking And Cognitive Processes." *In Review of Research In Social Studies Education: 1976-1983*, ed. William B. Stanley. Washington, DC: National Council for the Social Studies, 1985. ED 255 469.

30 O'Sullivan, Edmund, 2007. *Learning Transformative: Educational Vision for 21st Century*. UK: Zed Books Ltd., 7.

31 Guest, K., 2005. "Introducing Critical Thinking to Non-Standard Entry Students: The Use of a Catalyst to Spark Debate". *Teaching in Higher Education*, 5, hal. 289-299. Bdk. Banks J.A., 2007. *Educating citizens in multicultural society. Second edition*. New York: Teachers College Columbia University. <https://faculty.washington.edu/jbanks/>, diakses, 21 Februari 2016.



pemahaman bahwa manusia yang memiliki potensi intelektual, memungkinkan dia dapat berpikir dalam mencermati kehidupan diri dan masyarakatnya.³² Dalam perjalanan sejarah peradaban bangsa di dunia, kegiatan berpikir kritis menjadi salah satu kekuatan demi mengonstruksi kehidupan sosial yang baik.

Dari sisi tilik pendidikan kritis, sekolah dan aktivitas pembelajarannya harus memainkan peranan yang signifikan dalam membentuk kehidupan sosial. Sekolah adalah media untuk menyiapkan dan melegitimasi bentuk-bentuk tertentu kehidupan social.³³ Dalam proses pembelajaran, guru tidak dianggap sebagai pusat segalanya. Ia bukan satu-satunya sumber otoritas kebenaran dan pengetahuan. Dia bukan pemilik tunggal kelas. Hubungan guru-murid bukan bersifat vertikal seperti hubungan atasan-bawahan, tapi bersifat horizontal dan egalitarian. Isi dan materi pembelajaran dalam pendidikan kritis tidaklah semata-mata hak preogative guru, kepala sekolah atau para pakar pendidikan, tanpa melibatkan masyarakat didik.³⁴ Pendidikan kritis melihat, pendekatan emansipatoris dan partisipatif menjadi opsi yang tepat dalam mengonstruksi pembelajaran atau kurikulum yang dapat mengaitkan konten dan struktur materi ajar dengan kehidupan faktual-empirik peserta didik. Richard Paul mengungkapkan bahwa kurikulum dan pembelajaran yang memberi ruang bagi pengembangan kemampuan berpikir kritis akan membentuk karakter siswa yang terampil dalam memecahkan berbagai permasalahan sosial.³⁵ Menurutnya, berpikir

32 Capra, Fritjof, 2007. *The Turning Point; Titik Balik Peradaban: Sains, Masyarakat, dan Kebangkitan Kebudayaan* (terj.: M Thoyibi). Jejak:Yogyakarta.

33 Hernandez, Hilda, 1989. *Multicultural Education: A teacher Guide to linking Context, Process, and Content*, New Jersey & Ohio : Prentice Hall.

34 Tsui, L., 2002. "Fostering Critical Thinking Through Effective Pedagogy". *Research in Higher Education*, 40 (2), hal. 740-763. Bdk. Entwistle, N. J., & Ramsden, P., 1983. *Understanding Student Learning*. London: Croom Helm.

35 Paul, Richard, 1995. "Critical Thinking: How to Prepare Students for a Rapidly Changing World". *Foundation for Critical Thinking, The Foundation for Critical Thinking*.



Narasi Bangsa yang Tercecer

kritis adalah salah satu kemampuan metakognitif siswa, di mana dia dapat berpikir dua kali (*think twice*) sebelum bertindak, menjadi pribadi yang jelas (*be clear*), sadar (*be concise*), akurat (*be accurate*), lengkap (*be complete*), dan dalam (*be deep*). Paul dan Linda Elder mengatakan bahwa berpikir logis-kritis, analitis, interperatif, konklusif, dan solutif adalah karakter-karakter penting dari keterampilan berpikir kritis. Berbagai karakter ini menjadi sangat mendasar dalam menumbuhkembangkan keterampilan berpikir kritis, yang sangat dibutuhkan dalam membentuk masyarakat didik yang berkualitas³⁶. Masyarakat didik yang berkualitas adalah mereka yang mampu berpikir kritis dalam memahami fenomena kehidupan dan dapat mengarahkan diri untuk memecahkan berbagai persoalan diri, sesama dan lingkungan sosialnya.³⁷

Menurut Kinch,³⁸ pendidikan dalam bentuk apa saja mesti membuka ruang untuk memberdayakan dan menumbuhkembangkan keterampilan berpikir kritis ini. Zevin mendukung pernyataan ini dengan menegaskan bahwa pendidikan sebagai kegiatan yang menandai interaksi manusia dengan manusia dan relasi manusia dengan lingkungan alamnya, selayaknya menjadi piranti bagi pengembangan berpikir kritis.³⁹ Sebab dengan berinteraksi dan memiliki keterampilan berpikir kritis siswa dapat memahami secara menyeluruh dan utuh tentang sesama dan lingkungan. Dengan keterampilan berpikir kritis, masyarakat didik dapat meningkatkan kualitas relasi, tetapi juga dapat mencegah

36 Shah, N.Z., 2007. "Final Year Students' Perceptions on Their Critical Thinking Strategies and the Importance of These Strategies in Future Employment". Retrieved July 20, 2016, from <http://h08.cgpublisher.com/proposals/65/index.html>.

37 Marsh, Colin, 2008. *Studies of Social and Environment*, Pearson-Practice Hall. Bdk. McLaren, P., *Op. Cit.*

38 Kinch, J.W., 1974. *Social Problems in the World Today*. London : Addison-Wesley Publishing Company.

39 Zevin, *Op. Cit.*



atau memperbaiki kondisi relasi yang mungkin telah rusak.⁴⁰ Oleh karena itu, salah satu bentuk upaya peningkatan keterampilan berpikir kritis masyarakat didik adalah melatih dan memberdayakan siswa untuk mengendalikan atau memecahkan masalah dengan mengikuti tahapan seperti mencermati atau mengidentifikasi masalah, menganalisis, menginterpretasi, memberi solusi, merefleksi makna atau nilainya bagi kehidupan, dan kemudian berpikir untuk melakukan tindakan-tindakan praktis.

Urgensi pengembangan pendidikan berbasis berpikir kritis sangat strategis dan relevan pada aktivitas pengembangan pendidikan, dengan penekanan: (1) Dalam setiap kegiatan pembelajaran, masyarakat didik diberi ruang yang luas untuk terlibat dalam berbagai diskusi yang terbuka dengan teman-teman dan gurunya. Dalam suasana yang demokratis, siswa dapat mengungkapkan perspektif dan pendapat pribadinya tentang satu atau berbagai hal, yang kemudian dapat ditanggapi oleh siswa lain atau guru.⁴¹ Diskusi yang partisipatif membuat siswa bersemangat dan berani mengemansipasi dirinya secara optimal dan dapat memberikan pemikirannya secara kritis, konstruktif dan transformatif dalam berkehidupan.⁴² Lebih jauh dari itu, siswa dengan mudah mendapat pengetahuan baru, yang diperoleh dari hasil diskusi dan memanfaatkan pengetahuannya bagi kepentingan perbaikan dan pengembangan diri. (2) Yang menjadi aras dasar pendidikan kritis adalah munculnya karakter peduli, terampil, bertanggung jawab, berani mengambil keputusan,

40 Parker, W. C., 1988. "Critical-Thinking and Its Contexts", *Social Education*, 52(7), hal. 495-499.

41 Moore, T., 2004. "The Critical Thinking Debate: How General are General Thinking Skills?" *Higher Education Research and Development*, 23(1), hal. 3-18. Bdk. Savich, C., 2008. "Improving Critical Thinking in History". *ERIC Database*. ED501311. 67 (3), hal. 56-59.

42 Atwood, V. A. & Wilen, 1991. "Wait Time and Effective Social Studies Instruction: What Can Research In Science Education Tell Us?". *Social Education*, 55(3), hal. 179-181. Bdk. O'Sullivan, *Op. Cit.*



Narasi Bangsa yang Tercecer

kreatif, inovatif, disiplin dan bermartabat dalam diri siswa. Secara eksplisit maupun implisit karakter-karakter ini muncul dalam rumusan-rumusan tujuan pendidikan nasional. Salah satu yang dapat dicontoh adalah rumusan tujuan pada pembelajaran IPS SMP/MTs (KTSP) yang kental dengan makna pendidikan kritisnya. Rumusan tujuan pembelajarannya, yaitu: (a) Memiliki sikap peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial, budaya, fisik melalui peran serta dalam mengembangkan kehidupan bangsa dan negara. (b) Memiliki sikap dan keterampilan sosial untuk mengembangkan masyarakat Bhineka Tunggal Ika. (c) Memiliki rasa ingin tahu, kemampuan inkuiri, mengambil keputusan, dan kemampuan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. (d) Memahami perjuangan kehadiran dan kehidupan bangsa serta mampu menjadi pewaris untuk mengembangkan kehidupan kebangsaan dalam kehidupan yang lebih berbudaya dan berkarakter. (e) Memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan disiplin.

CATATAN REKOMENDATIF

Saya mengira bahwa mengembangkan konsep dan praksis pendidikan kritis tidak mudah. Perlu waktu dan energi, serta adanya *good will* dan *political will* dari semua *stakeholders* pendidikan. Namun ada beberapa hal yang bisa catatan rekomendatif dalam menggagas pengembangan pendidikan kritis dalam pendidikan nasional, yakni: (1) Pelembagaan gagasan berpikir kritis di sekolah-sekolah perlu digalakan. Dengan dilembagakannya gagasan berpikir kritis ini, maka sistem dan lingkungan sekolah berada dalam kultur dan pembiasaan (habitulasi) untuk berpikir kritis. Baik guru dan siswa diberdayakan dan dibiasakan untuk menangani permasalahan di sekolah dan masyarakat dengan memberdayakan keterampilan berpikir kritis ini. (2) Perlu adanya program penguatan literasi pendidikan kritis. Program ini bertujuan untuk memberdayakan



dan membiasakan lingkungan sekolah dan masyarakat untuk berpikir kritis dalam menghadapi perkembangan dunia yang pesat dalam berbagai dimensinya. Dalam konteks pendidikan formal, menyertakan program literasi pendidikan dalam perencanaan dan praksis pembelajaran di kelas merupakan hal yang mesti dipertimbangkan secara serius. Dengan dukungan literasi pendidikan kritis, maka proses pembelajaran yang bertujuan memberdayakan keterampilan berpikir kritis siswa dapat dilakukan dengan lebih bermakna dan berdaya guna. (3) Para guru harus banyak terlibat aktif dalam kegiatan pelatihan dan pemberdayaan di wadah-wadah kelompok kerja guru berkaitan dengan pengembangan perangkat pembelajaran seperti silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, instrumen penilaian, metode dan model pembelajaran, sumber/media yang kontekstual dan relevan. Para guru harus menambah wawasan pengetahuan dan pemahamannya tentang metode, pendekatan dan model pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa dengan mencari informasi dan studi literatur yang mendalam.

(4) Perlu ada upaya yang lebih intensif untuk mengintegrasikan pendidikan kritis dalam sistem kurikulum nasional. Dengan mengintegrasikan konsep pendidikan kritis dalam sistem kurikulum, materi dan kegiatan pembelajaran, maka peluang untuk memberdayakan keterampilan berpikir kritis siswa semakin tercipta. Guru juga harus didukung dengan tingkat literasi pendidikan kritis yang mumpuni, sehingga memiliki kepantasan dalam membelajarkan siswa ketika berupaya mengatasi permasalahan sosial yang disebabkan karena berbagai dampak buruk perkembangan teknologi. (5) Pemangku kepentingan dalam pendidikan perlu merancang politik pendidikan yang berbasis pendidikan kritis yang menekankan keterampilan berpikir kritis siswa dalam memecahkan permasalahan social lokal, nasional dan global. Perlu ada kebijakan pendidikan



Narasi Bangsa yang Tercecer

yang mendorong adanya desain struktur dan konten kurikulum pembelajaran yang berperspektif pendidikan kritis dari tingkat Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. (6) Program-program pembangunan yang dijalankan pemerintah perlu menyertakan gagasan pendidikan kritis demi mendukung kelancaran dan kesuksesannya di tengah masyarakat. Dengan modal keterampilan berpikir kritis ini, masyarakat bisa secara mandiri dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan sosialnya sehingga memudahkan pemerintah mengimplementasikan program dan rencana pembangunan. Edukasi dan literasi sosial kritis melalui kegiatan informal dan non formal sangat membantu masyarakat dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritisnya.

Lastest Dummy



DAFTAR ISI

Kata Penulis — v

PROLOG

Menyoal Rasionalitas Etis dalam Pembangunan di Flores, NTT — ix
Prof. Dr. Nana Supriatna, M.Ed.

PROLOG

Pendidikan Kritis, Bagaimana Menilikinya? — xxv
Prof. Dr. Enok Maryani, M.S.

Daftar Isi — xlv

Revolusi Pengetahuan yang 'Tercecer' — 1

Politik Pendidikan yang Membebaskan, Mungkinkah? — 7

Sebaiknya Agama dan Pengetahuan Tetap Sejalan* — 13

Politik Kreatif dan Dekonstruksi Sosial* — 19

Cegah Jebakan Populisme Peyoratif! — 25



Narasi Bangsa yang Tercecer

- Menjaga Pilar Bangsa* — 31
Rancang Lagi Kesadaran Berbangsa* — 37
Membangun optimisme Dalam Bernegara Bangsa* — 43
Pilih Nekrokrasi Atau Biokrasi? — 49
Terapeutik Konstruksi Sosial: Memerangi Radikalisme!* — 55
Pendidik Yang Berkesadaran visioner* — 61
- Interaksi Simbolik dalam Berpolitik Bangsa* — 67
Menyoal Metanarasi Visi/Misi Calon Kepala Daerah* — 73
Masyarakat NTT dan Kesadaran Politik Emansipatoris* — 79
Politik NTT: Premis Negatif vs Rasionalitas Nilai* — 85
Pilkada 2015 - Pilgub 2018: NTT Terpolar
Pragmatisme Politik* — 91
- Ijazah/Gelar Palsu dan Pengkhianatan (Terhadap
Intelektual* — 97
Redupnya Rasionalitas Berbangsa* — 103
Merekonstruksi *Driving Forces* Pembangunan Bangsa* — 109
Menyoal (Senjakala) Pendidikan Kritis* — 115
Integrasi Nasional: Tolak Fatalisme,
Perkuat Etika Kebangsaan — 121
- Kritik Fenomenologi Terhadap Karakter Politik Artifisial* — 127
National Self Determination dan Literasi Politik* — 133
Merajut Kesadaran Kritis Berbasis *Eco-Pedagogy* — 139
Keadaban Beragama dan Garansi Kenyamanan — 145
Pilkada, Kehendak Berkuasa dan Kepercayaan Publik* — 151



Elaborasi Filosofis, Pedagogik Kritis, Sosial, dan Politik

- Mencermati Hate Speech dalam Pilkada* — 157
Tantangan “Gg” 2030 Bagi NTT* — 163
Masyarakat Ntt: Bisakah Menjadi Reading Society? — 169
Mea dan Tipikalitas Guru/Dosen Profesional — 175
Tantangan “Sudden Shift” Abad 21 dan Penguatan Pendidikan Karakter — 181
- Idolatria “uang” Trump dan Realitas Koruptif* — 185
Hut Kemerdekaan Ri: Kemana Revolusi Mental Jokowi-Jk? — 189
Mengenal Dimensi-Dimensi Revolusi Mental* — 193
Cerdas dan Etis dalam Pilkada* — 199
Mahar Politik: Pertarungan uang dan Kualitas Diri* — 205
Kapasitas, Popularitas dan Elektabilitas dalam Pilkada Serentak* — 213
- Mempertimbangkan Social Critical Thinking pada Masyarakat NTT* — 219
Melawan Terorisme dengan Social Critical Skills* — 225
Bahaya Laten Radikalisme Pada Siswa* — 231
“Ancaman” Mental Mekanik Pejabat Bagi Kepala Daerah* — 237
Imperatif Berpikir Kritis Mahasiswa!* — 243
Memelihara Revolusi Gerakan Mahasiswa — 249
- Pendidikan Karakter yang Prematur* — 255
Tenaga Kesehatan yang Entrepreneurial* — 261
Kurikulum 2013 dan Kemendesakan Pendidikan Nilai* — 269
Iis dan Revolusi “Kejujuran” Pendidikan* — 279



Narasi Bangsa yang Tercecer

Pendidikan Berbasis Sosial Masyarakat, Masihkah Dianggap Penting? — 285

Mempertimbangkan Human And Civic Education Dalam Pendidikan Yang Beradab* — 293

Mendidik Manusia Muda Menjadi Calon Pemimpin — 303

Orang Tua Sebagai Seniman dalam Pendidikan Anak* — 309

Berpikir Kritis, Emansipatoris dan Dialektis pada Siswa Sekolah Menengah — 315

Rasionalitas yang Etis dan Bernilai* — 329

Pembelajaran IPS Smp di Manggarai yang Belum Berbasis Critical Thinking* — 345

Menyoal Generasi yang Berpikir Kritis — 353

Menilik Konstruksi Filosofis pada Konsep dan Praksis Pendidikan IPS — 361

Epilog — 375

Daftar Pustaka — 387

Tentang Penulis — 397



REVOLUSI PENGETAHUAN YANG TERCECER*

Thomas Kuhn (1922-1996) dalam *The Structure of Scientific Revolution* (1962) memperkenalkan tentang terminologi “pergeseran paradigma” dengan menekankan pada pentingnya pembentukan peradaban masyarakat melalui suatu proses ‘pengalaman perubahan pengetahuan’ yang radikal demi pertumbuhan dan perkembangan yang lebih baik. Meskipun terminologi ini kental di dunia akademik, tetapi menurut saya, sangat sinergik, relevan dan implikatif bagi masyarakat yang sedang memiliki ‘kewajiban alamiah’ untuk migrasi dari peradaban pramodern ke modern dan selanjutnya ke postmodern. Menurut Kuhn proses ‘pengalaman perubahan pengetahuan’ yang radikal ini menjadi suatu keharusan dalam membentuk, membangun dan memberdayakan kesadaran dan pengetahuan masyarakat demi

* SKH Pos Kupang, 15/02/2017



Narasi Bangsa yang Tercecer

kepentingan kehidupan yang lebih beradab. Adanya kesadaran dan pengetahuan yang saling elaboratif bisa menjadi tonggak-tonggak penting dalam menenun jejak-jejak 'paradigma' peradaban ke kualitas yang lebih tinggi. Demi mendukung terajutnya fase-fase peradaban dan menguatkan tonggak-tonggaknya, maka prasyarat dasar adalah adanya inklusivitas, rasionalitas, kritisitas dan kuriositas, serta manifestasi sikap-sikap ilmiah lainnya, yang pada setiap tahapan perubahan pasti memiliki tuntutan standar kualitas yang berbeda.

Kuhn menyebut proses perubahan ini sebagai 'revolusi pengetahuan', yang dapat dipahami melalui empat struktur fase. Pertama, 'Pra-paradigma' sebagai fase ilmu pengetahuan yang belum matang, di mana penelitian-penelitian keilmuan dilakukan tanpa arah dan tujuan tertentu. Dan, muncullah berbagai macam aliran pemikiran yang saling bersaing dan meniadakan satu sama lain dan memiliki konsepsi dan teori yang berbeda dalam menyikapi berbagai masalah. Belum ditemukannya suatu paradigma tunggal untuk menjadi referensi praktik keilmiah, membuat masyarakat terkantong-kantung dengan berbagai masalah yang tidak terselesaikan.

Kedua, 'Sains Normal' sebagai fase konsensus dan komitmen bersama kaum ilmuwan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang mendera masyarakat dengan menetapkan standar-standar praktik keilmiah. Mereka cukup berhasil menentukan satu paradigma yang dijadikan sebagai rujukan pemecahan 'teka teki masalah' di dalam masyarakat. Namun, karena hanya berdasarkan konsensus dan komitmen, maka sebenarnya paradigma yang digunakan tidak cukup kuat dan kerap muncul upaya-upaya kritis untuk menggoyahkannya dan mengganti dengan paradigma baru.

Ketiga, 'Anomali' sebagai fase krisis kredibilitas terhadap ilmu pengetahuan dan paradigma yang mendukungnya, karena tidak lagi relevan dan kompatibel untuk mengurai persoalan yang



muncul. Keadaan ini menimbulkan kekacauan, kebingungan, dan sikap skeptis terhadap berbagai bentuk kajian ilmiah. Keadaan ini mendorong lahirnya bermacam komunitas ilmiah dengan kelompok-kelompok ilmuwan yang saling bersaing dalam membentuk paham/mazhab keilmuannya. Dialektika yang serius, kritis dan rasional antara kelompok ilmuwan justru kemudian menjadi embrio bagi munculnya paradigma baru.

Keempat, 'Paradigma baru' sebagai fase klimaks, di mana ilmu pengetahuan yang luar biasa dan baru (*extraordinary and novelty science*) muncul sebagai hasil kompetisi yang ketat dari para ilmuwan dalam membangun paradigma-paradigma baru, yang kemudian bisa menjadi patokan bagi berkembangnya konsepsi dan teori baru. Fase ini ditandai dengan semakin menguatnya sebuah aliran pemikiran yang sah, kompatibel dan relevan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, konsep dan teori baru dalam membahas kebutuhan dan persoalan dalam masyarakat. Perubahan ini menjadi puncak dari sebuah revolusi ilmu pengetahuan, di mana sebuah paradigma baru muncul dan menjadi rujukan bagi penerapan berbagai metode, prinsip teoretis, asumsi, kebijakan dan standar evaluasi dalam memecahkan berbagai masalah. Melalui proses edukasi dan internalisasi, paradigma baru ini kemudian berperan dalam mengubah cara pandang dunia, pola pikir dan pola laku, baik dari para ilmuwan dalam aktivitas keilmiahannya maupun dari masyarakat dalam seluruh prosesi kehidupannya.

Indonesia sudah dan akan bergerak dalam lintasan revolusi pengetahuan ini. Sebagai bangsa yang memiliki modal besar dari segi sumber daya manusia dan alamnya, momentum revolusi pengetahuan dalam segala bentuk penampakan dan modelnya mesti direspons dan diberdayakan secara optimal. Bila tidak, kita akan tetap tercecceh pada stagnasi kelamaan peradaban, yang



Narasi Bangsa yang Tercecer

menyebabkan tersendatnya pembangunan bangsa di segala bidang. Pendapat saya, ada tiga hal yang menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia dalam merespons dan memberdayakan revolusi pengetahuan ini. Pertama, sikap dan berpikir yang masih eksklusivistik, fundamentalistik dan radikalistik sering menjadi resistensi ketika mau bergerak pada paradigma yang lebih tinggi. Sikap dan pikiran ini sangat berpengaruh pada rendahnya indeks responsivitas dan aksesibilitas akan perubahan dan perkembangan. Karenanya, agar bisa bergerak dari ‘praparadigma’ ke ‘paradigma baru’ diperlukan proses dialektis yang lama, di mana masyarakat mesti berada dalam kondisi terbuka, rasional dan kritis. Slogan “Indonesia Hebat, Bergerak dan Bersaing”, “Indonesia Kuasa Kawasan”, “Indonesia Go Internasional”, dan “Think and Act Globally”, sudah pasti menuntut inklusivitas, rasionalitas dan krisitas masyarakat terhadap perubahan dan perkembangan, sehingga benar-benar mendapat ruang dan tempat untuk menegaskan eksistensi di dunia.

Kedua, klaim-klaim pengetahuan berbasis pendapat, opini dan pemikiran non ilmiah yang mewakili pribadi dan golongan tertentu begitu mengetengah dewasa ini. Ketika pendapat, opini dan pemikiran non ilmiah itu sering kali tidak melalui kajian, riset dan metode keilmiahan yang valid dan adequate, maka akan berujung pada keadaan anomali dan kekacauan referensi dalam masyarakat. Masyarakat digiring pada sikap ambigu, impulsif dan skeptis saat mau menyelesaikan masalah hidupnya. Ironisnya, ketika tingkat kecerdasan dan keterdidikan masyarakat belum memenuhi standar, maka yang kerap terjadi adalah keterjebakan pada keterarahan primordial, fasistik fatalistik, utopis, dll. Konsideransi keilmiahan yang seharusnya menjadi ‘optio fundamentalis’ dalam konstruksi kehidupan masyarakat modern, disubordinasi dan digagalkan oleh otoritas non ilmiah, yang entah karena factor lain, justru lebih mendapat tempatnya di hati dan pikiran masyarakat. Karenanya,



jangan heran bila pada kondisi tertentu, sebagian masyarakat Indonesia lebih memilih mengikuti kewenangan non ilmiah tersebut dalam memecahkan persoalan hidupnya. Hal ini tentu menjadi penghambat karena standar-standar pembangunan berikut pemecahan berbagai persoalannya, sudah pasti berbasis kajian dan riset yang mendalam dengan menggunakan pendekatan dan metode keilmuan yang terukur. Faktanya, bangsa-bangsa yang akseleratif, inovatif dan sejahtera pembangunannya, justru karena konsisten merujuk pada riset dan kajian ilmiah yang sudah terstandar.

Ketiga, peran para kaum intelektual (ilmuwan) belum optimal dalam konstelasi revolusi pengetahuan pada masyarakat Indonesia. Ada dua hal yang menyebabkannya: (1) Kaum intelektual belum diberi cukup ruang untuk berperan oleh negara dan masyarakat. Bila rezim pemerintah (pusat dan daerah) tersegmentasi pada kepentingan ideologinya dengan hanya memanfaatkan tenaga dari intelektual tertentu yang 'senapas', maka yang berbeda napas akan 'ditelantarkan' kemampuan dan kepakarannya. Padahal, bila pemerintah melibatkan sebanyak-banyaknya pakar akan terjadi kompetisi pemikiran dan kajian yang dialektis, kritis, paradigmatis, dan noveltik sehingga berkontribusi bagi penguatan pembangunan bangsa yang lebih integrative, komprehensif dan holistik. (2) Pada sisi lain, sebagian intelektual kerap terkooptasi oleh kepentingan-kepentingan sesaat dalam bidang social, politik, agama dan ekonomi. Mereka diduga menggadaikan kredibilitas dan kapabilitas keilmuannya untuk dihambakan pada keperluan afirmasi diri, kelompok dan golongannya. Pada kondisi yang paling miris, ada kaum intelektual yang menggunakan otoritas keilmuan untuk menciptakan inovasi pada bidang tertentu yang bahkan bertujuan merusak kehidupan manusia dan lingkungan hidup. Selain itu, tanpa 'rasa salah intelektual', mereka 'menggoreng' kapasitas dan pendapat pribadinya untuk mengagitasi dan memprovokasi kesadaran



Narasi Bangsa yang Tercecer

dan emosi masyarakat agar melakukan hal-hal negatif-destruktif, yang secara kasat mata telah melanggar norma/nilai universal dan nasional, serta mengancam stabilitas kehidupan berbangsa. Beberapa keresahan social yang berskala nasional maupun local, ternyata merupakan hasil eskloitasi dan kapitalisasi ketidaktahuan masyarakat oleh kaum intelektual tertentu demi kepentingan pragmatis dan sektariannya.

Lastest Dummy



POLITIK PENDIDIKAN YANG MEMBEBAHKAN, MUNGKINKAH?*

Paulo Freire (1921-1997) adalah seorang tokoh multikultural yang begitu gencar berbicara tentang ‘pendidikan yang membebaskan’. Tesisnya tentang ‘pendidikan yang membebaskan’ itu termaktub dalam bukunya Pendidikan Kaum Tertindas (*Pedagogy of the Oppressed, 1970*). Dalam buku ini Freire secara lugas menggambarkan tentang kaum elitis dalam segala kebijakan dan praksisnya, menjadikan pendidikan sebagai instrumen untuk menindas dan merampas hak-hak asasi masyarakat kecil, sehingga mereka tetap berada dalam “kebudayaan bisu” (*submerged in the culture of silence*).

Kemudian dalam buku “Pedagogi Hati” (*Pedagogy of Heart, 1997*) dan “Politik Pendidikan; Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan” (*The Politics of Education; Culture, Power and Liberation,*

* SKH Pos Kupang, 17/05/2016.



Narasi Bangsa yang Tercecer

1999), Freire mengajukan antitesis dengan mengajak semua pihak untuk berperang terhadap fatalisme atau kepasrahan pasif pada realitas kondisi pendidikan yang menindas tersebut. Ia menyerukan agar pemerintah, para politisi, masyarakat, LSM, praktisi pendidikan (guru), maupun siswa, harus kompak dan bekerja sama untuk membebaskan diri dan masyarakat dari keterpurukan dan keterbelengguan dalam segala bentuk dan manifestasinya. Dengan perjuangan dan kesadaran bersama serta didukung dengan niat baik dari semua pihak, maka diri dan masyarakat yang mengalami keterbelengguan akan terarah pada pembebasan, di mana semuanya akan menjalani kehidupan normal dan layak sebagai manusia sejati.

Apakah mungkin pemikiran Freire tentang 'politik pendidikan yang membebaskan' relevan dan kontekstual dengan situasi pendidikan di Indonesia saat ini? Menurut saya, relevan dan kontekstual! Memang, pendidikan kita saat ini tidak berada pada situasi, kondisi dan konteks (Amerika Latin) di mana Freire memunculkan pemikirannya tentang 'pendidikan yang membebaskan', seperti yang telah terkupas dalam buku-bukunya. Namun, setelah saya mencermatinya, kondisi-kondisi yang di ada Amerika Latin tersebut sudah mengalami migrasi dan metamorfosis dalam situasi kontekstual pendidikan Indonesia. Migrasi dan metamorfosis tersebut terkonfirmasi secara tidak kasat mata dalam berbagai cerminan kondisi keterpurukan, keterbelakangan, kemiskinan, degradasi etika dan moral, serta kerusakan lingkungan yang melanda bangsa sejak jaman kemerdekaan sampai saat ini. Sementara itu, berbagai upaya untuk bebas dari kondisi-kondisi seperti ini sudah sering dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan komponen-komponen bangsa lainnya, melalui bidang pendidikan. Pendidikan sampai saat ini tetap menjadi bidang strategis dan sebagai taruhan untuk merdeka dari masalah-masalah bangsa di



atas. Namun, tampaknya pemerintah, masyarakat dan komponen bangsa lainnya perlu bekerja keras lagi untuk menata pendidikan demi membebaskan bangsa ini keadaan yang negative tadi.

Merujuk pada pemikiran Freire, dalam tataran reflektif-kontekstual, saya membuat beberapa sintesis sebagai bentuk dukungan dan penguatan terhadap langkah dan niat baik pemerintah dalam membebaskan masyarakat bangsa Indonesia dari situasi 'tidak menyenangkan' tadi. Sintesis ini terangkum dalam tiga poin berikut ini: *Pertama*, semua pengambil kebijakan dan pembuat keputusan pendidikan dari tingkat pusat sampai daerah, bahkan sampai tingkat sekolah untuk berani keluar dari kerangkeng tata kelola pendidikan yang buruk (*poor education governance*). Dewasa ini, berbagai informasi tentang penerapan tata kelola pendidikan yang baik dan benar dari negara-negara yang sudah maju pendidikannya bisa menjadi model penerapan tata kelola pendidikan di negara kita dalam berbagai tingkatannya. Pada tingkat pusat, tata kelola pendidikan yang terintegrasi dan representatif (*integrated and representative education governance*) dengan mempertimbangkan berbagai kebutuhan dan kondisi riil tiap wilayah NKRI, perlu dipertimbangkan untuk dirancang dan diimplementasikan. Sementara itu, pada tingkat daerah dan sekolah, tata kelola pendidikan yang berbasis sekolah seperti Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan melibatkan *stakeholders* pendidikan, sebaiknya diterapkan secara komprehensif dan bila sudah menerapkannya, perlu ditingkatkan intensitas dan kualitasnya.

Menurut saya, dengan adanya perubahan tata kelola pendidikan yang terintegrasi, representatif, dan berbasis sekolah, maka akan menghindari kecenderungan tata kelola yang sentralistik, formalistik, sektarianistik, tidak transparan dan akuntabel. Tipikalitas tata kelola yang destruktif seperti ini bisa diduga menjadi salah satu penyebab terjun bebasnya mutu pendidikan kita. Oleh karena itu, perubahan



Narasi Bangsa yang Tercecer

tata kelola pendidikan begitu mendesak untuk dilakukan. Dari sudut piramida normal, baik buruknya tata kelola pendidikan nasional ini sangat berpengaruh signifikan dan sistemik terhadap tata kelola di tingkat daerah, tingkat sekolah, dan praksis pembelajaran di kelas. Sementara dari segi piramida terbalik, kualitas pembelajaran di kelas secara sangat signifikan dan sistemik menentukan kualitas pendidikan di tingkat sekolah, tingkat daerah dan tingkat nasional. Penerapan prinsip-prinsip manajemen yang transparan, akuntabel, dan fleksibel akan mengonstruksi tata kelola pendidikan yang bebas dari konflik kepentingan dan keterjerumusan perilaku koruptif, di mana akhir-akhir ini begitu menggejala dalam dunia pendidikan kita.

Kedua, sudah saatnya pendidikan kita dibebaskan dari intervensi politik dan menjadikan pendidikan sebagai komoditas politik baik oleh negara, partai politik ataupun oknum-oknum elitis tertentu. Bahaya laten dari intervensi politik dan menjadikan pendidikan sebagai komoditas politik bisa berakibat pada dua hal, yakni: (1) Pendidikan akan menjadi zona perang kepentingan pragmatis kaum elitis, yang menyebabkan terkooptasinya nilai-nilai luhur visi-misi pendidikan. Dampak turunannya, pendidikan menjadi mainan politik bagi segelintir oknum untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk proyek dan kepentingan melanggengkan kekuasaan. Politisasi pendidikan kerap membuat masyarakat pada umumnya dan masyarakat didik khususnya, dieksploitasi dan dikamuflese melalui sistem, kebijakan kurikulum dan berbagai regulasi. (2) Dalam banyak dimensi, perilaku pragmatis, instan dan bahkan tindakan koruptif dari para praktisi pendidikan, menjadi akibat langsung atau tidak langsung dari gejala dan fakta 'pendidikan sebagai komoditas politik'. Cukup banyak para praktisi pendidikan yang terjungkal pada pelanggaran hukum dan moral, karena 'mencontoh', 'meniru' dan bahkan 'mempraktikkan' cara



pikir dan bertindak dari kaum yang memanfaatkan pendidikan sebagai komoditas politik.

Ketiga, Bila ada kemauan politik dan niat yang tulus dari pemerintah untuk memperbaiki kondisi masyarakat melalui pendidikan, maka seharusnya bebas dari cara pandang dikotomis dan diskriminatif. Pemerintah perlu dengan arif untuk memperhatikan kesamaan, kesetaraan dan keadilan akses kebijakan, regulasi, informasi dan kesejahteraan antara sekolah di kota dan di desa, sekolah negeri dan swasta, guru negeri dan guru swasta. Dalam kerangka perbaikan kualitas masyarakat melalui pendidikan, sekat-sekat dikotomis dan diskriminatif tidak relevan dan seyogianya dihilangkan, baik dalam tataran regulasi maupun praksis. Dikotomi dan diskriminasi dalam pendidikan justru tetap akan mengekalkan penindasan dan pembelengguan dalam diri masyarakat, dan sudah pasti menghambat upaya luhur pendidikan untuk membebaskan manusia sebagai manusia.



Narasi Bangsa yang Tercecer

Lastest Dummy



SEBAIKNYA AGAMA DAN PENGETAHUAN TETAP SEJALAN*

Fenomena kebangkitan gerakan-gerakan yang bersayap keagamaan di Indonesia memberi signal bahwa masyarakat masih memiliki orientasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap agama yang dianutnya. Faktualitas ini menjadi sangat positif dan perlu dihargai, ketika dibandingkan dengan masyarakat bangsa barat yang pada umumnya mengalami disorientasi dalam hidup berkeagamaan. Disorientasi tersebut bisa saja disebabkan kencangnya hembusan paham-paham seperti rasionalisme, sekularisme, liberalisme, pragmatisme, dll yang mempengaruhi pola pikir dan tindakan masyarakatnya. Sementara dalam konteks kehidupan Indonesia yang plural/multikultural, 'entitas keagamaan telah memberi nilai lebih dalam mendukung kerukunan dan kedamaian

* SKH Pos Kupang, 19/11/2016.



Narasi Bangsa yang Tercecer

hidup masyarakatnya (*peaceful co-existence*). Bahkan bila menoleh pada sejarah awal perjuangan dan pembangunan bangsa Indonesia, agama telah menjadi basis spiritual-religius dan sosial yang begitu diperhitungkan ketika melawan segala bentuk imperialitas, dominasi dan determinasi dari luar maupun dari dalam, yang mengancam integrasi bangsa. Agama sebagai lembaga spiritual-religius dan sosial telah membuktikan diri sebagai salah satu tameng dan pilar kebangsaan dalam menjaga keutuhan NKRI. Institusi agama dan para ulamanya telah berperan sangat sentral dalam mengarahkan dan memberdayakan umatnya untuk senantiasa memelihara kerukunan dan kedamaian negara bangsa. Karenanya, agama-agama harus tetap bertahan dan perlu mengembangkan diri agar selalu dapat mendukung keberlangsungan kehidupan masyarakat Indonesia.

Pertanyaan muncul, mengapa agama masih bisa bertahan dan menjadi salah satu lembaga yang dapat memberi garansi bagi keberlangsungan hidup manusia? Saya coba menjawab dan mendalami pertanyaan ini dari perspektif hubungan antara ilmu pengetahuan dan agama. Saya ambil contoh kasus sejarah perkembangan gereja. Munculnya Revolusi Pengetahuan Kopernikus (1473-1543) dengan gerbong heliosentrismenya telah mengoreksi secara mendasar paham geosentrisme yang dikembangkan berabad-abad lamanya oleh otoritas Gereja. Koreksi yang besar ini membidani lahirnya berbagai dampak reformasi dan transformasi pemikiran, di mana gereja mulai terbuka pada diskursus, penalaran bebas dan cara pandang alternatif serta merespons secara positif perkembangan ilmu dan teknologi. Pengakuan mengenai 'adanya keselamatan di luar gereja' dan 'gereja harus senantiasa mengubah dirinya' serta 'gereja menjaga keseimbangan antara iman dan pengetahuan', menjadi tiga hal mendasar yang menandai perubahan dan keterbukaan dalam tubuh Gereja.



Momentum perubahan dan keterbukaan ini dilanjutkan spiritnya dalam konsili Vatikan II (1962-1965), di mana dalam beberapa segmennya telah membuat evaluasi terhadap isi dogma dan tradisi gereja yang dinilai tidak relevan, aktual dan kontekstual lagi. Evaluasi ini tentunya merujuk pada elaborasi konstruktif antara ilmu pengetahuan, filsafat dan teologi yang pada saat itu sudah berkembang pesat. Gagasan dan bahasan yang substantif, relevan, aktual dan kontekstual pada berbagai ensikliknya dalam konsili itu, memberi gambaran terang bahwa Gereja sudah semakin responsif dan akomodatif pada kebaruan dan kekinian, baik dalam cara pandang, sikap hidup, dan maupun cara menanggapi perubahan dan perkembangan. Karenanya, mengemukakan gagasan tentang keseimbangan pengembangan iman dan pengetahuan menjadi alasan yang paling masuk akal tentang mengapa Gereja tetap 'berada' dan 'mengada' secara baik sampai saat ini. Gagasan inilah yang kemudian membuat Gereja bertumbuh dan berkembang, diterima dan menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia. Menyadari hal ini, tahun 1992, Paus Yohanes Paulus II meminta maaf kepada dunia karena telah lama resisten terhadap perkembangan pengetahuan dan terlibat dalam konspirasi 'membunuh' Galileo Galilei (1564-1633); seorang 'santo' dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian, kesadaran ini diafirmasi kembali dalam pidato Paus Benediktus XVI, 21 Desember 2008 mengenai rehabilitasi nama Galileo Galilei sebagai ilmuwan dunia. Masyarakat dunia pada umumnya respek dan mengapresiasi secara baik permintaan maaf dari dua pemimpin tertinggi Gereja Katolik Roma ini.

Selanjutnya, pandangan dan sikap gereja terhadap perkembangan dan masalah dunia berikut berbagai penyelesaian, tidak pernah terlepas dari kajian-kajian kritis-analitis dan solutif, yang merupakan kompetensi inti dari ilmu pengetahuan. Adanya ruang untuk mengaktualisasikan dan mengkontestualisasikan



Narasi Bangsa yang Tercecer

ajaran-ajaran sosial gereja dengan realitas hidup masyarakat, serta kesempatan untuk menerjemahkan dan menginterpretasikan ajaran-ajaran tersebut dengan keseharian hidup masyarakat, menyebabkan gereja semakin mendapat tempatnya di dunia. Dampak lain dari keterbukaan ini, muncul para pemikir (teolog, filsuf, ilmuwan) yang dengan kritis-konstruktif memberi masukan kepada Gereja ketika menyikapi berbagai perkembangan dan perubahan di masyarakat. Bertolak dari masukan tersebut, Gereja selalu dapat mengubah dirinya sesuai dengan tuntutan perubahan zaman, serta tetap menjadi lembaga yang memiliki komitmen dan konsistensi dalam mengadvokasi, mengakomodasi dan memfasilitasi kebutuhan dan harapan umat ketika berelasinya dengan Tuhan dan sesama. Gereja jadinya harus selalu eksis sebagai tanda kehadiran Allah di tengah dunia dan senantiasa membawa keselamatan dan perdamaian di muka bumi.

Fisikawan Einstein (1879-1955) menegaskan 'ilmu pengetahuan tanpa agama adalah buta' dan 'agama tanpa ilmu pengetahuan adalah lumpuh'. Penegasannya, agama yang tidak berbasiskan pengetahuan akan cenderung mengalami 'kebutaan' dan rentan terjebak dalam alur spiritualisme, mistisisme, fasisme, radikalisme, eksklusivisme dan fundamentalisme. Ekstrem-ekstrem ini kerap kali menjajah rasionalitas dan intelektualitas sehingga dengan mudah menggiring umatnya pada praktik-praktik keagamaan yang tidak lazim dan di luar batas kewajaran. Karena tidak adanya saringan kritis, umat mudah digiring pada penghayatan yang ekstrem, kaku, tidak manusiawi, intoleran, berprasangka, berujar dan bertindak kebencian. Sebaliknya juga, bila iman disubordinasi oleh intelektualitas, maka ada kecenderungan glorifikasi berlebihan kepada pengetahuan (intelektualisme). Intelektualisme akan menjadikan masyarakat terkurung pada penghayatan dan penyelesaian masalah hidup secara positivistik dan rasionalistik semata, dan pada



akhirnya membentuk sikap absurd, gamang, agnotis, indiferen dan ateis. Sementara ada banyak hal di muka bumi ini yang tidak dapat diselesaikan dengan pengetahuan manusia semata, kecuali mengandalkan keyakinan pada sang Pemberi kehidupan. Ada banyak peristiwa miris merusak dan degradasi manusia di dunia ini, justru karena kaum intelektual terlalu memaksa diri untuk menyelesaikan proyek-proyek duniawinya hanya dengan bertumpu pada pengetahuan dan lupa akan keterbatasannya.

Sintesis yang dialogis antara agama dan pengetahuan akan melahirkan kecerdasan intelektual dan spiritual yang dapat membantu manusia agar bijak dalam menyikapi fenomena hidup kesehariannya. Agama menjadi penting dalam diri seorang intelektual demi membantu membangun kesadaran reflektif tentang keunggulan dan keterbatasan. Seorang intelektual perlu menyadari keunggulan agar semakin percaya diri dalam mengembangkan intelektualitasnya bagi kepentingan sesama dan keberlangsungan alam dunia. Namun, ia juga harus menyadari keterbatasannya, rendah hati dan bersyukur atas karunia intelektualitasnya itu sehingga ia semakin dicintai oleh Tuhan pemberi kemampuan tersebut.

Sementara itu, pengetahuan memberi landasan rasional terhadap penghayatan dan gerakan iman dalam agama. Pengetahuan membantu penganut agama untuk menjalankan iman secara kritis, dialogis dan inklusif dalam membangun hubungannya dengan sesama dan Tuhan, agar terhindar dari kesesatan berpikir dan godaan kepentingan-kepentingan sesaat. Jika rasionalitas dan kritisitas diremehkan oleh institusi agama dan penganutnya, maka akan berujung pada dua sisi negatif. Sisi negatif pertama, bisa saja institusi agama dan penganutnya menjadi sangat fasis, eksklusif, sektarian, radikal dan fundamental, yang bisa meresahkan dan mengganggu kenyamanan toleransi hidup beragama dan integrasi bangsa. Atau pada sisi negatif lainnya, bisa juga agama dan penganutnya menjadi



Narasi Bangsa yang Tercecer

sangat sekular, pragmatis, instan dan artifisial semata, yang kemudian dengan mudah terjerembab dalam konflik kepentingan, baik ekonomi, politik maupun ideologi sekular-pragmatis tertentu. Kita tidak mengharapkan dua sisi negatif membiak dan menjadi jamak, kemudian bisa mengancam kerukunan hidup beragama dan kesatuan bangsa yang sudah dipelihara dengan susah payah selama ini.

Lastest Dummy



POLITIK KREATIF DAN DEKONSTRUKSI SOSIAL*

Dalam satu bab dari buku *Of Grammatology* (1976) Jacques Derrida menyatakan: *The end of the book is the beginning of writing*, yang secara lurus diterjemahkan: “Akhir dari (membaca) sebuah buku adalah awal dari (membuat) sebuah tulisan.” Derrida menjelaskan serangkaian makna bahwa seseorang dalam hidupnya tidak saja membahas tentang apa yang pernah dihasilkan, tetapi membeberkan juga kemungkinan untuk membuat sesuatu pada masa yang akan datang. Agar seseorang dapat menghasilkan sesuatu pada masa yang akan datang berdasarkan pada apa yang pernah ‘dibaca’ pada masa lalu, maka sangat dibutuhkan kreativitas. Dalam hal ini, kreativitas adalah bentuk keterbukaan untuk ‘membongkar’ yang sudah lama, dan kemudian menyusun dan

* SKH Pos Kupang, 20/04/2017.



Narasi Bangsa yang Tercecer

membentuk kembali sesuatu yang baru berdasarkan pemaknaan yang baru pula. Pembentukan dan pemaknaan baru ini tidak menghilangkan ‘esensi’ dari yang lama, tetapi diperbaharui sesuai dengan tuntutan perubahan. Upaya kreatif untuk membentuk dan memaknai secara baru ini, diistilahkan Derrida sebagai proses dekonstruksi sosial.

Dekonstruksi sosial merupakan suatu kegiatan kreatif untuk membongkar klaim-klaim kemapanan yang sudah lama, tidak relevan dan kontekstual lagi, dan mencoba menatanya kembali pada posisi berbeda (transposisi), yang lebih positif dan konstruktif bagi kehidupan di dunia. Sudah pasti kegiatan kreatif untuk membongkar ini tidak menghilangkan sama sekali hakikat dari realitas yang ada. Hakikat dari realitas tetap dipertahankan, tetapi diberi makna baru sesuai tuntutan perubahan dan perkembangan. Dalam perspektif sosial politik, dekonstruksi sosial menjadi salah satu upaya alternatif dalam membangun kehidupan yang lebih baik; yang ketika menggagas dan mengimplementasikannya, sangat membutuhkan kreativitas para pelakunya. Kreativitas dalam berpolitik merupakan bagian penting dari proses dekonstruksi karena berkaitan dengan upaya meruntuhkan tatanan lama yang telah merusak, dan kemudian menata tatanan kehidupan yang lebih baru dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Sebagai bagian dari dekonstruksi yang kreatif, kegiatan politik menasar pada kesejahteraan dan keterarahan masyarakat pada prospek yang lebih bagus.

Ketika politik menjadi salah satu aktivitas potensial untuk bisa membangun masyarakat maka mereka yang terlibat dalam politik harus memiliki komitmen, totalitas dan opsi yang besar pada kepentingan masyarakat. Selain itu, mereka juga mesti kreatif dalam menangkap dan mengakomodasi harapan, keinginan dan kebutuhan masyarakat. Para pelaku politik dan institusi politik



(partai) yang memiliki komitmen, totalitas, dan opsi ini yang besar pada kepentingan umum sudah pasti akan mendulang kepercayaan masyarakat. Karenanya, ekspektasi masyarakat pada para pelaku politik yang kreatif sangatlah besar. Harapan muncul selain karena adanya desakan akselerasi dan signifikansi pembangunan, juga karena masyarakat semakin menyadari bahwa perubahan yang begitu cepat, *sudden shift*, *unlinear* dan sporadis, hanya bisa diantisipasi melalui model pendekatan politik yang kreatif, dialektis, dan progresif. Konsekuensinya, untuk mendukung kreativitas, dialektika, dan progresivitas ini, para pelaku politik juga harus memiliki keutamaan-keutamaan penting seperti berperilaku fleksibel, dinamis, berwawasan luas, berani keluar dari zona nyaman, dan tidak takut mengambil risiko.

Selanjutnya, kreativitas, dialektika, dan progresivitas dapat dibentuk dan dikembangkan dengan tidak henti-hentinya membuka diri untuk melihat (*watching*) kondisi dan situasi faktual masyarakat; kemudian menganalisis (*analyzing*) dan menafsirkannya (*interpreting*); dan selanjutnya merenungkan (*reflecting*); serta yang terakhir adalah berpikir untuk melakukan sesuatu (*thinking for doing*) untuk kepentingan dan kebaikan masyarakat. Terobosan-terobosan politik yang positif dan konstruktif akan membuka ruang dan peluang bagi pengembangan pemikiran dalam bidang politik yang dapat berdampak baik pada bidang-bidang kehidupan lain. Dengan munculnya berbagai inovasi, maka diharapkan dapat membongkar segala bentuk kebijakan-kebijakan yang membelenggu, yang selama ini mungkin tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Inovasi dan kreativitas dalam merumuskan kebijakan-kebijakan politik dengan melibatkan masyarakat secara aktif dan kritis, akan membuat demokrasi semakin berkualitas dan menjadi tumpuan harapan masyarakat.



Narasi Bangsa yang Tercecer

Bila belajar dari negara yang berkembang dalam demokrasinya, politik masih menjadi aktivitas yang efektif dan ‘berkekuatan’ dalam membangun sebuah negara bangsa. Dalam hal ini, aktivitas politik yang dikembangkan senantiasa mengarah pada perubahan dan perkembangan masyarakat, dan sedapat mungkin menghindari konflik kepentingan, baik yang bersifat personal maupun institusional. Dan untuk negara-negara yang masih berusaha mematangkan politik demokrasi, perlu berada dalam proses belajar sehingga benar-benar memahami substansi berpolitik, berikut tujuan dan manfaatnya bagi kepentingan negara bangsa. Adapun munculnya berbagai konflik, friksi dan mungkin mengarah pada perpecahan, mesti dilihat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dramaturgi politik demokrasi. Karenanya, para pelaku politik harus mampu mengelolanya secara kreatif dan inovatif, sehingga konflik dan friksi tersebut dapat diarahkan pada kematangan dan penguatan karakter berdemokrasi. Sehingga, sekalipun muncul berbagai macam fluktuasi politik yang berat dan kasar, namun hal tersebut tidak sampai menyebabkan runtuhnya tonggak-tonggak demokrasi. Bahkan jika dilihat dari perspektif dialektika, keadaan tersebut akan semakin mematangkan dan memperkuat sendi-sendi bangunan demokrasi.

Politik sebagai salah satu aktivitas untuk mendekonstruksi kehidupan sosial sudah pasti berangkat dari pemahaman yang mendalam tentang keadaan dan situasi sosial masyarakat. Agar dekonstruksi berjalan dengan efektif dan berdaya guna, ada beberapa hal ini yang perlu diperhatikan: (1) Kreativitas untuk melihat kehidupan sosial berdasarkan kebutuhan dan keinginan yang ada dalam masyarakat. Usaha melihat kebutuhan dari perspektif masyarakat akan sangat membantu membentuk kreativitas dalam berpolitik. Sebab kompleksitas kebutuhan masyarakat sudah pasti akan menuntut kreativitas dalam melakukan pendekatan



pelayanan dan perumusan kebijakan-kebijakan yang strategis. (2) Segala bentuk pendekatan dan kebijakan politik mestinya selalu bertolak dari nilai-nilai yang sedang bertumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan dengan kreatif mengembangkan nilai-nilai tersebut untuk membantu menguatkan tonggak-tonggak kehidupan masyarakat. Dengan memberdayakan dan mengembangkan nilai-nilai tersebut, aktivitas politik akan mendapatkan bobot yang lebih kuat dan berarti. Dengan berbasis pada nilai lokal, pendekatan dan kebijakan politik dapat lebih menghampiri kebutuhan masyarakat, dan menjadi harapan dalam memecahkan berbagai masalah yang menerpanya di kemudian hari. (3) Membuat wacana dan diskursus tentang prospek dan masa depan masyarakat yang lebih baik. Masyarakat perlu dibawa dan digiring untuk keluar dari masalah yang melandanya dan mengarahkan mereka agar untuk berani menatap masa depannya. Aktivitas politik juga menjadi bagian dari upaya memberdayakan masyarakat agar mandiri dalam memecahkan masalah-masalah keseharian hidupnya.

(4) Membuat jaringan kerjasama dengan pihak terkait dalam membahas berbagai kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang dalam kehidupan masyarakat pada masa-masa yang akan datang. Selain untuk untuk menghindari cara berpolitik yang *mainstream*, rutin, statis, dan linear, kerjasama juga perlu dibentuk untuk merekatkan hubungan relasional antara elemen-elemen masyarakat dalam memanfaatkan kekuatan/peluang dan menghindari/mencegah kelemahan/ancaman. Membangun persahabatan politik dengan pihak lain akan sangat membantu mendapatkan berbagai masukan yang lebih tepat dan akurat tentang situasi dan keadaan masyarakat. Studi relevansi, kontekstual dan korelasional tentang kebutuhan dan keinginan masyarakat menjadikan aktivitas politik menjadi lebih responsif dan representatif. (5) Menambah bacaan/referensi ilmiah dan empirik akan sangat membantu mengembangkan wawasan



Narasi Bangsa yang Tercecer

untuk berpolitik secara kreatif. Karenanya, para pelaku politik perlu bergumul dengan berbagai bacaan/referensi agar semakin memiliki perspektif yang luas, baik dalam tataran konseptual maupun dalam tataran empirik. Bila memungkinkan, para pelaku bisa mengutarakan gagasan dan manifesto politiknya melalui tulisan yang dapat dipublikasi pada berbagai media sebagai bentuk kegiatan edukasi dan literasi terhadap masyarakat.

Lastest Dummy



CEGAH JEBAKAN POPULISME PEYORATIF!

Dalam sejarahnya, solidaritas kelas telah membidani lahirnya populisme. Populisme yang lahir dari solidaritas kelas cenderung kiri dengan selalu menggunakan retorika perjuangan kelas. Biasanya sikap ekstrem kiri dipicu karena protes terhadap perlakuan tidak adil dan distribusi kebijakan kesejahteraan yang tidak merata. Populisme ekstrem kiri bisa saja berpotensi menciptakan konflik antara kelas (*conflict of class*). Konflik kelas yang diciptakan populisme kiri muncul dari slogan dikotomis ‘kelas atas menguasai kelas bawah’ atau ‘negara lebih berpihak pada satu golongan dan menelantarkan golongan lain’ (Samuel, 2016). Dalam bacaan sejarah, konflik kelas yang lahir dari rahim populisme kiri, antara lain yang dipimpin Luiz I.L da Solva (Brazil), Hugo Chavez (Venezuela), Aung San Suu Kyi (Myanmar), dan Nelson Mandela (Afrika Selatan). Dalam sejarah Indonesia, sampai



Narasi Bangsa yang Tercecer

saat ini belum pernah terjadi letusan gerakan dari populisme kiri ini. Salah satu sebabnya, cukup responsif dalam mengidentifikasi dan mengelola kecenderungan-kecenderungan tersebut. Negara telah menggunakan instrumen-instrumen secara efektif dalam menanganinya, sehingga tidak menjadi ancaman yang berarti bagi kelangsungan kehidupan bangsa dan bernegara.

Pasca populisme kiri yang berbasis solidaritas kelas, kemudian muncul pula populisme kanan yang bertolak dari klaim solidaritas publik. Klaim solidaritas publik ini membawa isu-isu yang berkaitan dengan kemaslahatan rakyat umum. Mereka cenderung mengatasnamakan gerakan-gerakan pada kepentingan mayoritas yang ada dalam negara. Dengan demikian, gerakan-gerakan dilakukan sering kali mengkomodifikasi atribut-atribut yang berbau nasionalisme, patriotisme atau bahkan mayorisme suku, ras, golongan atau agama. Berkat menggandeng atribut-atribut ini mereka meyakini bahwa segala bentuk dan manifestasi kegiatannya sangat legitim, legal dan didukung oleh negara. Pada fase normal pembangunan negara bangsa, kehadiran gerakan populisme kanan ini justru sangat dibutuhkan untuk menambah konsolidasi kekuatan-kekuatan sosial politik ketika berhadapan dengan ancaman negara-negara lain. Cukup banyak bangsa yang mengandalkan berbagai gerakan kekuatan-kekuatan sosial politik populisme kanan untuk mempertegas identitas kebangsaan dan kekuatan politik bilateral dan multilateral.

KECEMASAN YANG MUNCUL

Namun, ketika gerakan populisme radikal kanan ini mencoba menyaingi kekuatan negara atau mengalahkan otoritas bangsa maka sudah pasti menimbulkan kecemasan kolektif. Tentu kecemasan muncul saat pergerakannya dilakukan dengan sporadis dan fasis, diikuti dengan tindakan verbal dan non-verbal untuk melecehkan,



menghina dan merendahkan orang, kelompok atau golongan tertentu. Bila hal ini terjadi, dalam perspektif makna kebahasaan, gerakan-gerakan populis kanan ini memiliki keterarahan peyoratif. Mereka menggunakan dalil-dalil kebahasaan tertentu guna menghina, merendahkan dan mencemooh orang, kelompok dan golongan lain. Bila keterarahan ini lebih dominan dan determinan maka kekuatan-kekuatan sosial ini tidak lagi secara positif mendukung sendi-sendi bangsa, namun bisa menjadi bumerang bagi tegaknya kehidupan berbangsa. Kecemasan yang paling akut, bila gerakan populisme radikal kanan ini akan diasumsikan sebagai gerakan kebangsaan. Sebab dengan adanya militansi yang dibangun secara sistematis, terstruktur dan masif membuat pergerakan ini dapat menggiring persepsi dan sikap publik untuk mengakuinya secara langsung atau pun tidak langsung. Selanjutnya, pada titik krusial tertentu negara bisa saja takluk, tunduk dan frigid pada kendali gerakan-gerakan populisme kanan yang peyoratif ini.

Menurut saya, adanya gerakan populisme radikal kanan yang peyoratif ini dapat memunculkan pencitraan negatif dan kegamangan dalam berbangsa. Bila negara berikut otoritasnya tidak dapat memperbaiki pencitraan negatif ini dan mengurai kegamangan berbangsa, maka dampak yang paling dini akan membenihkan disorientasi berbangsa. Disorientasi bertunas karena adanya penggiringan dan *framing* ideologi negara pada kepentingan pergerakan populis peyoratif tersebut. Bila negara tidak kuat untuk membendung dan bertindak tegas kepada gerakan-gerakan ini, tentu akan berlanjut pada munculnya ketidakpercayaan (*distrust*) masyarakat kepada negara. Ketidakpercayaan ini tentunya akan menumbuhkembangkan bentuk-bentuk ketidakpatuhan (*disobedience*) dan ketidakloyalan (*disloyalty*) masyarakat terhadap negara. Selanjutnya, ketidakpatuhan dan ketidakloyalan ini menjadi embrio utama dalam menciptakan pemisahan atau perpecahan



Narasi Bangsa yang Tercecer

(disintegration). Bila ditelisik lebih dalam dari perspektif politik ideologi, sebenarnya intensi dan atensi gerakan-gerakan ini tidak murni memperjuangkan ideologi dari wadahnya, tetapi lebih bermaksud untuk menimbulkan situasi dan kondisi kacau (chaos) dalam tubuh bangsa. Targetnya, bila bangsa dalam keadaan kacau maka terbuka kemungkinan adanya proses sosial politik baru, di mana akan memberi ruang bagi mereka untuk bereksistensi dan bisa jadi mengambil alih kendali kekuasaan sosial politik.

PENYEMBUHAN KONSTRUKSI SOSIAL

Sudah barang tentu negara dan masyarakat harus berupaya untuk menetralkan dan membebaskan diri dari jebakan populisme dalam segala bentuknya. Upaya ini menjadi sangat urgen dan mendesak, agar tidak terlanjur berakibat sistemik pada kehidupan masyarakat. Ada negara yang sudah mulai bebas dari ancaman, gangguan dan hambatan populisme radikal karena telah membahas dan menyelesaikannya melalui kajian dan perspektif terapeutik konstruksi sosial. Gergen (2001) mengatakan, terapeutik berbasis konstruksi sosial ini sangat mendasar ketika permasalahan sosial, termasuk radikalisme dan populisme menjadi ancaman bagi tatanan bangsa. Terapeutik tersebut berangkat dari diagnosa terhadap sebab dan akar dari munculnya gerakan populisme radikal tersebut. Selanjutnya, terapeutik disertai dengan perangkat-perangkat untuk melakukan studi dan analisis terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang terlantar, potret ketidakadilan dan ketidakmerataan dalam beberapa bidang kehidupan, ketidaktersediaan lapangan kerja dan lahan ekonomi, dekadensi moral etis dan diskrepansi sosial sebagai akibat ketidaksiapan masyarakat dalam menerima lajunya perkembangan, serta degradasi lingkungan sosial dan alam sebagai konsekuensi logis dari tuntutan kepentingan ekonomi global. Studi dan analisis menjadi bagian integral dalam proses terapeutik berbasis konstruksi



sosial karena bersamanya negara dan masyarakat akan mengetahui secara persis dan detail tentang penyebab, dampak dan solusi dari masalah populisme radikal kanan yang peyoratif ini.

Manfaat lain dari penyembuhan berbasis konstruksi sosial dengan mengintegrasikan studi dan analisis ini adalah membangun kesadaran kolektif antara negara dan masyarakat dalam mengatasi berbagai pergerakan radikal. Kesadaran kolektif menjadi basis dalam membangun komitmen dan tanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa. Kesadaran kolektif ini juga berhubungan dengan merancang dan menyusun langkah-langkah strategis yang bisa diterapkan demi mengatasi sekaligus mencegah tumbuh-kembangnya paham-paham radikal, termasuk di dalamnya kesepakatan tentang sistem informasi keamanan, hak dan kewajiban, perlindungan serta kenyamanan sebagai anggota masyarakat. Berdasarkan kesadaran kolektifnya, masyarakat juga kemudian diberdayakan untuk 'berani terlibat' dalam proses penguatan transformasi tatanan sosialnya. Proses penguatan transformasi tatanan sosial ini tampak perubahan dari kekakuan pola pikir dan sikap menuju dinamisitas dan fleksibilitas; berubah dari hanya sekadar kesadaran diri menuju kesadaran kolektif; beralih dari hanya mengandalkan kerja sendiri menuju pada kolaborasi dan jaringan luas; berubah dari hanya penghayatan nilai-nilai kehidupan parsial dan eksklusif menuju pada penghayatan nilai-nilai kehidupan yang inklusif, universal dan bermanfaat bagi kepentingan umum.

Langkah-langkah penyembuhan berbasis konstruksi sosial sebenarnya sangat strategis, potensial dan relevan dalam konteks Indonesia karena mempertimbangkan: (1) Sudah mendarah-dagingnya dasar-dasar penghargaan terhadap sesama yang beragam, sejak saat warga negara mulai bersosialisasi dalam keluarga dan masyarakat. (2) Pranata dan norma sosial yang ada dalam budaya dan adat istiadat sudah bersudut pandang multikultural, sehingga



Narasi Bangsa yang Tercecer

berbagai persoalan berbasis SARA sebetulnya tidak lagi menjadi diskusi yang membebankan secara sosial maupun akademik. (3) Literasi kebhinekaan dan multikultural sudah *correlated and integrated* dalam sistem dan praksis kurikulum pendidikan, sehingga secara pengetahuan, sikap, dan praksis, masyarakat didik sudah memiliki kesadaran kuat menjalankan praktik-praktik pluralis. Harapannya, masyarakat akademik bisa mempengaruhi pemahaman dan pengertian masyarakat umum tentang realitas dan kompleksitas kemajemukan. (4) Negara dan instrumen hukumnya telah menjamin kebebasan individu, kelompok, dan masyarakat dalam berpendapat dan berorganisasi dengan prinsip dasar: Tidak mengganggu kepentingan dan kenyamanan umum dan tidak melanggar/melawan hukum!

Lastest Dummy



MENJAGA PILAR BANGSA*

Demi merespons munculnya radikalisme, fundamentalisme dan transnasionalisme yang bahkan telah merambah sampai tingkat PT, maka sebanyak 50 pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) pada 26/04/2017 di kampus UIN Ar Raniry Banda Aceh telah mendeklarasikan beberapa hal ini: (1) Bertekad bulat menjadikan empat pilar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, UUD RI 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara. (2) Menanamkan jiwa dan sikap kepahlawanan, cinta tanah air, dan bela negara kepada setiap mahasiswa dan anak bangsa, guna menjaga keutuhan dan kelestarian NKRI. (3) Menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai ajaran Islam yang *rahmatan lil 'alamin*, Islam inklusif,

* Harian Pos Kupang, 16 Mei 2017



Narasi Bangsa yang Tercecer

moderat, menghargai kemajemukan, realitas budaya, dan bangsa. (4) Melarang berbagai bentuk kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, dan anti-NKRI, intoleran, radikal dalam keberagamaan, serta terorisme di seluruh PTKIN. (5) Melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan UUD RI 1945 dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan penuh dedikasi dan cinta tanah air.

Respons ini perlu diapresiasi sebagai bentuk tanggung jawab moral, politik dan sosial dari PT terhadap keutuhan NKRI. Sebenarnya, dengan munculnya gerakan-gerakan radikal anti demokrasi ini, memberi peringatan kepada negara untuk segera melakukan langkah-langkah strategis 'penyelamatan' sekaligus tindakan-tindakan tegas untuk memberangus kehadiran berbagai bentuk organisasi yang dinilai mengancam pluralitas dan multikulturalitas. Radikalisme tentunya tidak bisa terlepas dari semakin menggemanya isu transnasionalisme. Transnasionalisme merupakan gerakan sistematis yang berupaya mereduksi dan menyeragamkan masyarakat dari berbagai bangsa menjadi satu bangsa dunia dengan satu ideologi politik tertentu, sudah pasti akan menjadi ancaman nyata bagi ideologi keberagaman dan multikultural, persis seperti yang melekat dengan kehidupan bangsa Indonesia. Radikalisme, fundamentalisme dan transnasionalisme sudah pasti menjadi ancaman nyata, serius dan krusial, yang pada tingkat paling kronis akan memporakporandakan demokrasi Pancasila. Gerakan-gerakan dengan berpola destruksi yang sangat masif dan sistematis, selain berideologi ekstrem, intoleran dan tidak manusiawi, juga memiliki militansisme dan heroisme yang kuat dari para penggagas, berikut pengikutnya.

Menurut saya, ada beberapa hal yang menjadi penyebab munculnya gerakan-gerakan ini, antara lain:

Pertama, pendidikan demokrasi belum mengalami transformasi yang cukup berarti dalam menyadarkan, mencerdaskan dan



membentuk wawasan kebangsaan masyarakat. Meskipun negara sudah mengintegrasikannya dalam sistem pendidikan, struktur kurikulum dan materi ajar, namun ketika demokrasi hanya pada tataran kognitif saja, dan tidak masuk ranah pengamalan/penghayatan, maka hanya menjadi sekadar label/slogan yang tidak menggambarkan realitas kebangsaan. Bila pendidikan demokrasi tidak diberdayakan dalam diri masyarakat umum dan masyarakat sekolah sampai pada tahap penghayatan/pengamalan, maka akan memudahkan ideologi lain merasuk kehidupannya

Kedua, tingkat literasi demokrasi Indonesia dinilai masih belum bisa menyamai negara-negara lain yang sudah maju demokrasinya. Realitas yang dapat mengafirmasi penilaian ini adalah sulitnya masyarakat membedakan secara jelas (distingsi) antara urusan negara dengan urusan agama. Padahal sejak awal berdirinya, secara ideologi politik sudah ditegaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan negara beragama, bukan negara agama. Suatu kecelakaan berat bagi suatu negara demokrasi bila urusan negara diintervensi dan bahkan disubordinasi oleh urusan-urusan agama yang secara ideologis menganut paham teokratisme. Dalam catatan sejarah, paham teokrasi ini kerap gagal dalam aplikasinya, karena selain tidak relevan dengan perkembangan negara modern dan menganggangi realitas keduniawian yang menjadi bagian dari realitas kesurgawian, juga seringkali menciptakan pelanggaran/kejahatan terhadap manusia dengan mengatasnamakan Tuhan. Tuhan dan urusan surgawi sering dijadikan sebagai tameng oleh oknum radikal dan fundamental untuk melegitimasi tindakan-tindakan yang tidak beradab dan tidak manusiawi;

Ketiga, adanya pembiaran oleh pemerintah/masyarakat terhadap berkembangnya praktik politik sektarian oleh partai politik tertentu dan berbagai organisasi sayapnya. Tentu tak bisa dipungkiri, gerbong politik menjadi salah satu kekuatan yang



Narasi Bangsa yang Tercecer

berpengaruh secara intensif-signifikan pemahaman masyarakat terhadap realitas kebangsaan, termasuk sikap dan perilaku dalam masyarakat. Bila masyarakat tidak cukup rasional dan kritis dalam menerima pengaruh dari ideologi politik sektarian, maka persepsi dan sikapnya mudah sekali untuk digiring oleh opini sesat dan dangkal yang sudah didesain untuk kepentingan tertentu. Parade kegagalan politik demokrasi yang terjadi belakangan ini disebabkan karena isu sektarian sangat kuat dihembus oleh golongan/party tertentu demi tujuan kekuasaan dan eksistensi ideologinya. Masif dan sistematisnya isu-isu sektarian ini melumpuhkan wawasan dan rasa kebangsaan masyarakat yang sudah lama terbina.

Keempat, gagasan tentang pilar-pilar kebangsaan masih sebatas resonansi dan belum menjadi inherensi penghayatan hidup berbangsa. Selain karena sosialisasi dan edukasi yang belum holistik dan komprehensif kepada semua elemen bangsa, juga karena adanya polarisasi ideologi politik kekuasaan yang menyebabkan pilar-pilar kebangsaan ini hanya sebatas gagasan dan 'jualan' ideologi politik dari rezim pemerintah. Padahal, bila negara secara tegas mengharuskan empat pilar ini menjadi platform ideologi semua partai politik maka bisa meminimalisasi kecenderungan sektarian. Bahkan partai politik bisa diberdayakan secara optimal untuk menangkal/mencegah segala manifestasi paham/gerakan radikal yang berusaha merusak ideologi Pancasila.

Negara-negara yang berdemokrasi modern sekalipun, sudah menganggap berbagai gerakan radikal menjadi ancaman serius bagi kehidupan masyarakatnya. Berbagai kebijakan politik dan langkah-langkah strategis telah didesain untuk mencegah dan mengatasinya sehingga tidak berdampak sistemik pada kehidupan masyarakat. Dan, satu hal yang mendukung kebijakan negara dalam berhadapan dengan gerakan-gerakan radikal ini adalah sistem budaya demokrasi menyeluruh, yang dimulai sejak dini dan dibudayakan pada hampir



setiap sisi kehidupan masyarakatnya. Budaya demokrasi menyeluruh ini tidak berhenti pada konsep-konsep pembelajaran di persekolahan, tetapi menjadi bagian dari praksis keseharian masyarakat. Ketika menjadi praksis keseharian, demokrasi tidak lagi sebatas ideologi politik semata, tetapi menjadi budaya yang melekat erat dalam kehidupan masyarakat. Demokrasi menjadi bagian yang sifatnya menyeluruh (holistik) dalam berbangsa, sehingga apapun kegiatan warga masyarakat, semangat demokrasi menjadi landasan utamanya. Demokrasi dianggap sangat membantu membangun kehidupan yang beradab, manusiawi, menghargai hak dan perbedaan, serta toleran terhadap keberagaman.

Dalam *Transforming Education Policy Shaping a Democratic Future* (2011), Philip A. Wood memaparkan tentang budaya demokrasi holistik yang melandasi praktik demokrasi modern. Budaya demokrasi holistik ini memiliki empat komponen penting, yakni: (1) Pemahaman menyeluruh (*holistik meaning*) akan konsep dan praksis demokrasi, yang tidak terlepas dari realitas kehidupan setempat, di mana telah memiliki tatanan sosial, hukum, norma, nilai-nilai, kearifan-kearifan lokal, bentuk relasi sosial, dan filsafat hidup. Praktik demokrasi holistik mesti ditopang oleh dimensi spiritual, kognitif, estetika, afektif, etika, maupun fisik yang sudah bertumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat bangsa. Justru dengan mempertimbangkan realitas kehidupan dan dimensi yang menopangnya, maka demokrasi akan menjadi 'milik' masyarakat dan enggan untuk melepaskannya dengan dalih apapun. (2) Adanya pembagian kekuasaan (*power sharing*) yang rasional dan seimbang antara lembaga-lembaga formal, termasuk hak untuk mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan umum. Pembagian kekuasaan yang rasional dan seimbang ini, mesti didukung oleh nilai-nilai kejujuran, keadilan, akuntabel, transparan, dan menjunjung tinggi martabat manusia. (3) Adanya transformasi dialog (*transforming*



Narasi Bangsa yang Tercecer

dialogue) yang bisa dilakukan dengan mengeksplorasi berbagai perspektif agar dapat keluar dari tendensi sektarian, eksklusif dan pragmatis. Banyaknya kegiatan dialog, diskusi, dan kritik konstruktif akan menumbuhkembangkan demokrasi yang deliberatif dan partisipatif. (4) Adanya kesejahteraan masyarakat yang menyeluruh (*holistic well-being*) dalam bentuk pemerataan kepemilikan sosial, keterjangkauan akses perkembangan, pemberdayaan dan partisipasi yang aktif dalam politik demokrasi sehingga dapat mengembangkan kepercayaan diri, harapan akan kebahagiaan masa depan, dan relasi positif sebagai warga bangsa.

Lastest Dummy



RANCANG LAGI KESADARAN BERBANGSA*

Upaya untuk menumbuhkan kembali kesadaran berbangsa menjadi gagasan-gagasan penting akhir-akhir ini, ketika semakin maraknya ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) terhadap entitas dan identitas Indonesia sebagai negara kesatuan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Gerakan-gerakan yang berupaya memberangus keadaban berbangsa ini, bahkan sudah dipandang sangat terstruktur, sistematis, masif dan sporadis. Dan, bila tidak segera 'digebuk' akan sangat merusak konstruksi kebangsaan yang sudah lama terpelihara. Menilik urgensinya, Pemerintah pusat sampai daerah semestinya bersikap responsif dan menjadikan isu-isu destruksi kebangsaan ini sebagai tema prioritas pada program-program kerja jangka pendek. Saya

* Harian Umum Flores Pos, 28/07/2017



Narasi Bangsa yang Tercecer

yakin, sampai saat ini masyarakat masih menunggu kebijakan-kebijakan strategis dan progresif pemerintah terkait dengan upaya menangkal dan mengelola berbagai isu dan gerakan, yang dari waktu ke waktu cenderung menggugat eksistensi kedaulatan NKRI.

Usaha menumbuhkan dan membentuk kembali kesadaran berbangsa menjadi '*conditio sine qua non*' untuk kondisi bangsa saat ini. Sebab bila menangguk atau melupakannya akan berakibat fatal bagi tatanan kebangsaan pada masa-masa mendatang. Dalam pemikiran Sejarah Filsafat Barat Modern, kesadaran menjadi kekuatan penting bagi kemajuan peradaban dan keutuhan sebuah masyarakat (bangsa). Kesadaran, baik individu maupun kelompok masyarakat, sangat menentukan arah dan gerak perjalanan suatu masyarakat bangsa. Kesadaran yang tinggi pada setiap anggota masyarakat sudah pasti berdampak pada semakin besarnya tanggung jawab terhadap masyarakat bangsa. Segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang berupaya menggerogoti kehidupan masyarakat bangsa, dapat diselesaikan atau tidak, sangat tergantung pada kualitas tanggung jawab dari warga masyarakatnya.

Kesadaran berbangsa tidak muncul begitu saja dalam diri warga masyarakat, tetapi membutuhkan proses dalam menumbuhkembangkannya. Immanuel Kant (1724-1804) dalam pengantar buku *Critique of Pure Reason* menyebutkan empat pertanyaan penting yang melandasi proses merancang kesadaran manusia dalam bermasyarakat. Pertanyaan-pertanyaan itu, antara lain: (1) 'Apa yang dapat diketahui?'. Pertanyaan ini berhubungan dengan upaya memberdayakan pengetahuan yang benar tentang segala sesuatu; menggunakan rasionya agar bisa membedakan yang baik dan benar, memberi sumbangan pemikiran positif terhadap berbagai persoalan kehidupan, serta mencerna segala informasi buruk yang masuk dalam dirinya. (2) 'Apa yang harus dilakukan?'. Pertanyaan ini berkaitan dengan tindakan-tindakan



etis seseorang yang berdampak pada kebaikan bersama (*bonum commune*), mendukung kehidupan sosial serta mampu memperbaiki tatanan sosial yang sudah rusak; (3) ‘Apa yang dapat diharapkan?’ Pertanyaan ini bertalian dengan indahnya hidup bersatu dalam keberagaman (*estetika*) dan cita-cita akan hidup yang lebih baik. (4) ‘Siapa itu manusia?’. Pertanyaan ini menjadi jalan bagi upaya menemukan jati diri sebagai manusia sempurna, ketika dia sudah memberdayakan pengetahuan, melakukan tindakan-tindakan etis, memiliki cita rasa kebersamaan dan cita-cita akan masa depan yang lebih baik.

Merujuk pada pemikiran Kant ini, saya menjelaskan empat hal yang perlu mendapat perhatian dalam menumbuhkan kesadaran berbangsa. *Pertama*, sejatinya, untuk merajut lagi kesadaran berbangsa, setiap warga negara mesti membekali dirinya dengan berbagai pengetahuan yang mendalam tentang Indonesia, baik dari sejarah lahir dan berkembangnya saat ini, maupun berkaitan dengan keunggulan-keunggulan yang ada padanya. Pengetahuan yang integral, holistik dan komprehensif tentang bangsa akan menumbuhkan patriotisme dan nasionalisme pada seseorang. Tumbuh dan berkembangnya rasa cinta pada negeri disebabkan karena mendalamnya pemahaman tentang keindonesiaan. Dalam pemikiran filosofis, kesadaran ini disebut kesadaran ontologis karena berhubungan dengan kemampuan untuk merenungkan tentang ‘ada dan mengadanya’ bangsa Indonesia. Kesadaran ontologis menjadi dasar dalam membangun kesadaran epistemologis, yaitu pengetahuan yang benar ‘apa adanya’ tentang Indonesia, baik dari sudut positif maupun negatifnya.

Kedua, pengetahuan yang benar dan adanya semangat cinta tanah air menjadi landasan berpikir untuk melakukan (*thinking for doing*) sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa. Seseorang yang dalam dirinya ada ‘rasa memiliki bangsa’ (*sense*



Narasi Bangsa yang Tercecer

of belonging for nation) yang tinggi, akan selalu berpikir tentang apa yang harus dilakukan untuk pertumbuhan bangsa ke arah yang lebih konstruktif. Karena itu, otot, otak dan perasaan benar-benar diabdikan untuk pembangunan bangsa (nation building). *Ketiga*, mekarnya sejumlah harapan akan Indonesia yang lebih baik pada masa yang akan datang, merupakan resultansi dari perbuatan-perbuatan baik dan benar dari warga negara. Sejumlah harapan ini mengandung optimisme dan idealisme bahwa bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar dan mampu bersaing dengan bangsa maju lainnya di dunia. Optimisme dan idealisme ini justru semakin tertopang kuat ketika melihat besarnya potensi sumber daya alam dan keragaman suku, ras, dan agama. Karena itu, sangat naif dan konyol bila masih ada orang Indonesia yang pesimis dan kehilangan idealisme berbangsa lantaran ‘hasutan’ paham/ideologi lain, yang belum terbukti memiliki kualitas sebanding dengan ideologi Pancasila.

Keempat, kapasitas pengetahuan, tindakan-tindakan etis, dan memiliki cita rasa kebersamaan dan cita-cita akan masa depan yang lebih baik, harus menjadi tipikalitas dari seorang ‘manusia’ Indonesia. Bila dia memiliki kapasitas-kapasitas ini, maka dia menemukan kesejatan eksistensinya sebagai warga negara. Menemukan diri sebagai warga negara yang sejati merupakan bagian penting dari kesadaran etis. Kesadaran ini terekspresi dari model keadaban hidupnya sebagai warga negara. Bila kehidupannya sudah beradab, dapat dipastikan sudah terkonstruksi kesadaran etis dalam diri masyarakatnya. Manifestasi utama dari kesadaran etis adalah kebaikan dan konsistensi tindakannya sebagai warga negara. Praksisnya, bangsa yang beradab tercermin dari pemikiran dan tindakan-tindakan etis warganya, seperti senantiasa menjunjung tinggi asas kebenaran, keadilan, kejujuran, menghargai perbedaan, toleransi, hak asasi manusia, hak asasi alam, dll.



Rekonstruksi kesadaran memberi manfaat yang besar dalam pembangunan bangsa terkait beberapa hal, yaitu: Sebagai dasar dalam membangun proses konstruksi kewarganegaraan (*citizenship construction*), di mana termuat di dalamnya kehendak untuk melestarikan kebudayaan, kebijakan-kebijakan, cita-cita luhur, dan nilai-nilai budaya bangsa. Warga masyarakat kembali disadarkan tentang nilai-nilai dan kebijakan lokal yang menjadi warisan tak ternilai dari nenek moyang dulu. Nilai-nilai dan kebijakan lokal tersebut telah menjadi dasar dalam menjalin kehidupan berbangsa yang erat dan kental. Selain itu, rekonstruksi kesadaran merupakan embrio dalam mengembangkan semangat patriotisme dan nasionalisme, membentuk integritas dan tanggung jawab sebagai warga Negara. Selanjutnya, upaya membentuk kembali kesadaran etis berbangsa merupakan kiat mendorong munculnya partisipasi aktif dalam berdemokrasi; kemampuan untuk memecahkan berbagai masalah social. Kesadaran etis juga tampak pada penghargaan warga negara terhadap perbedaan budaya, suku, ras, maupun agama yang didukung dengan sikap toleran, inklusif dan respek.

Rekonstruksi kesadaran ini menjadi relevan untuk kekinian Indonesia karena dasar-dasar penghargaan terhadap sesama dan perbedaan yang sudah ditanamkan sejak awal ketika warga negara ada dalam keluarga dan masyarakat. Selain itu, pranata dan norma sosial sudah berbasis plural dan multikultural, sehingga berbagai masalah berdimensi SARA sebenarnya tidak lagi menjadi diskusi yang memberatkan, baik secara sosial maupun akademik. Upaya rancang kembali kesadaran berbangsa, juga strategis karena literasi kebhinekaan dan multikultural sudah terintegrasi dalam sistem dan praksis kurikulum, sehingga masyarakat didik sudah memiliki kesadaran yang kuat dalam mempraktikkan keanekaragaman. Harapannya, masyarakat persekolahan mempengaruhi secara positif



Narasi Bangsa yang Tercecer

pengertian masyarakat umum tentang realitas kemajemukan. Upaya ini juga sudah didukung oleh negara dan kelengkapan perangkat hukumnya yang telah menjamin kebebasan individu, kelompok dan masyarakat dalam berkumpul, berpendapat dan berekspresi.

Lastest Dummy



MEMBANGUN OPTIMISME DALAM BERNEGARA BANGSA*

Pernyataan ketua Umum Partai Gerindra Bapak Prabowo Subianto tentang bubarnya bangsa Indonesia pada tahun 2030 tentu banyak memanen polemik. Dari sisi positif, meskipun bersumber pada sebuah novel fiksi berjudul *Ghost Fleet* (2015) karya P.W. Singer dan August Cole, tetapi pernyataan ini bisa dilihat sebagai sebuah *warning* untuk tetap berbenah kesadaran berbangsa. Saya melihat, pernyataan ini menjadi ungkapan alam bawa sadar dari seorang tokoh bangsa agar setiap insan tetap *concern*, solid dan bertanggung jawab dalam berbangsa. Selain itu, pernyataannya dapat juga dinilai sebagai manifestasi rasa cinta yang begitu mendalam terhadap tanah air. Pernyataan seperti ini jarang muncul dan tidak bisa diungkapkan begitu

* Harian Pos Kupang, 25 Maret 2018



Narasi Bangsa yang Tercecer

saja oleh orang yang bukan tokoh. Tentu ketika pernyataan ini diungkapkan, sudah melalui pertimbangan dan keputusan yang matang. Dan, saat menjadi viral dan menuai perdebatan, maka pernyataan ini bisa dipersepsi memiliki makna dan daya kuat (meaningful dan powerful statement) bagi ekosistem kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini.

Sementara dari sisi negatif, saya berkesimpulan bahwa pernyataan ini terlalu vulgar dalam mengumbar pesimisme. Ada dua hal yang menjadi alasan kesimpulan: *Pertama*, selama saya belajar sejarah berbangsa, pernyataan ini menjadi satu-satunya yang begitu pesimistis dan sangat imajiner. Pernyataan ini sekonyong-konyong memporakporanda optimisme dan idealisme sebagai anak bangsa yang berasal dari belahan timur Indonesia. *Kedua*, untuk mendalami pernyataan ini, saya perlu mengulas perbedaan antara pesimisme dan skeptisisme. Pesimisme adalah sebuah bentuk kecenderungan sikap subjektif, bercampur bumbu fiktif dan imajiner. Umumnya, kecenderungan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang dangkal, artifisial dan sensasional semata. Artikulasinya sering tidak berdasarkan pada kajian-kajian ilmiah, kerap apriori dan tidak melewati sebuah proses metodologi berpikir yang adequate (Blackburn, 2013). Pesimisme juga kadang muncul karena kesimpulan dikonstruksi tidak berangkat dari premis-premis yang masuk akal, hanya mengandalkan opini dan persepsi, serta tidak melalui proses refleksi yang panjang. Sementara pemikiran skeptis adalah sebuah disposisi intelektual, di mana seorang memutuskan untuk ragu-ragu (dubium) akan sesuatu hal, atau suatu rancangan akan masa depan, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang masuk akal dan beralasan (Bagus, 1999). Pemikiran skeptis merupakan dampak langsung dari sebuah kesimpulan sebagai hasil analisis mendalam, dan sudah pasti berdasarkan fakta dan data yang



tervalidasi (falsifikasi dan verifikasi) oleh para ahli (expert judgement). Pemikiran skeptis menjadi salah satu sisi dari sebuah proses refleksional yang dalam terhadap tangkapan panca indra (sensasi) dan artifisialitas. Jelasnya, pemikiran skeptis merupakan hasil interpretasi dan pemaknaan terhadap, fenomena, fakta dan data. Nah, dari ulasan ini silahkan menilai, apakah *statement* bapak Probowo masuk dalam kategori pemikiran skeptis atau sekadar sikap pesimistis-imaginer.

SKENARIO MEMBANGUN BANGSA YANG OPTIMIS

Dalam konteks matriks analisis SWOT, skeptisisme muncul ketika ancaman (*threat*) dan kelemahan (*weakness*) lebih kuat dibanding peluang (*opportunity*) dan kekuatan (*strength*). Biasanya SWOT merupakan salah satu instrumen yang bisa dipakai untuk membuat sebuah ramalan ilmiah atau yang disebut prediksi. Sementara dalam konteks pembangunan bangsa, yang sering digunakan adalah analisis atau skenario membangun bangsa (*nation scenario building*). Untuk mendukung skenario membangun bangsa ini, yang kerap menjadi rujukan dasar adalah kekuatan-kekuatan penentu (*driving forces*) yang kontekstual dalam bangsa tersebut. Jika kekuatan-kekuatan penentu, seperti ekonomi, sumber daya manusia, sumber daya alam, infrastruktur, keamanan, pendidikan, kesehatan, dll., rapuh maka bisa diprediksi atau diproyeksi mengenai pembubaran suatu bangsa. Namun, selagi faktor-faktor penentu di atas masih normal, seimbang (equilibrium) dan prospektif untuk mengalami peningkatan, maka sangatlah tidak beralasan untuk berpikir skeptis atau hanya sekadar bersikap pesimistis.

Bila muncul pemikiran skeptis dan sikap pesimistik pada saat kondisi bangsa normal dan bergerak maju, bisa dikategorikan sebagai sebuah 'fenomena anomali berbangsa'. Bila fenomena



Narasi Bangsa yang Tercecer

pemikiran skeptis dan sikap pesimistis berusaha dikembangkan secara terstruktur, sistematis, masif; maka selain bisa dilihat sebagai sebuah kepentingan politik ideologis, tetapi juga menjadi ancaman yang akan merampok optimisme generasi bangsa. Meski demikian, pada negara-negara yang sudah matang dalam berdemokrasi, fenomena anomali berbangsa ini lumrah dan sering terjadi. Tugas negara adalah berusaha untuk menetralkan dan menjawab pemikiran skeptis dan sikap pesimistis tersebut dengan program-program nyata demi penguatan tonggak-tonggak negara bangsa, agar tidak rapuh dan goyah.

MARI MULAI MEMBANGUN MANUSIA

Narasi mengenai besar dan berkembangnya sebuah negara bangsa sangat tergantung pada manusianya. Adanya pesimisme, skeptisisme dan optimisme sangat tergantung pada manusianya. Bila belajar dari negara Jepang yang mengalami situasi porak-poranda akibat perang dunia ke-2 dengan peristiwa Bom Nagasaki dan Hiroshima (Agustus 1945), maka kita akan menyadari betapa penting membuat prioritas pembangunan manusia. Para pemimpin Jepang begitu optimis untuk bangkit dari keterpurukan waktu itu, justru ketika mereka mengetahui secara pasti kekuatan-kekuatan penentu negara yang bisa diandalkan, antara lain manusia dan kekayaan alamnya. Sampai pada abad 21 ini, Jepang sudah menjadi salah satu negara *superpower* dalam segala bidang kehidupannya. Kemudian bisa diprediksi dan diproyeksi, apa pun bentuk ancaman dan hambatan yang akan melanda, negara ini tetapi berdiri teguh dan tak akan mungkin bubar. Bahkan mereka optimis, pada pertengahan abad ini Jepang akan menjadi satu-satunya negara berkekuatan ekonomi paling besar di dunia.

Ketika pemerintah Indonesia saat ini fokus dan berorientasi pada pembangunan fisik, mungkin lebih pada pertimbangan



bahwa masyarakat Indonesia masih sangat membutuhkan sarana dan prasarana dasar untuk mempertahankan dan menjaga keberlangsungan hidupnya. Namun, hal ini tidak berarti menafikan kebutuhan akan pembentukan karakter manusia. Sebab, pada fase tertentu proyek-proyek fisik ini bisa mubazir dan terjebak dalam 'politik pembangunan Mercusuar', di mana yang diandalkan adalah kehebatan fisik pembangunan, tetapi belum pasti berdampak signifikan bagi kehidupan masyarakat. Yang menjadi kebutuhan saat ini adalah model manusia yang bisa memanfaatkan dan memberdayakan sarana prasarana dengan baik dan benar. Lebih dari itu, terbentuk manusia yang bisa menciptakan dan membangun sendiri. Hal ini penting demi menghindari segala bentuk ketergantungan pada sumber daya dari negara lain. Dalam konteks bonus demografi, harapan kekinian adalah manusia berkarakter kuat dalam membangun bangsa. Seandainya sekarang kita lebih fokus pada pembangunan manusia, maka pada tahun 2030 Indonesia akan mengalami surplus manusia yang memiliki semangat dan jiwa inovatif, kreatif, prospektif, optimis dan memiliki rasa cinta bangsa yang tinggi. Bila hal ini menyata, maka segala bentuk pernyataan pesimisme dan pemikiran skepitisme, dengan sendirinya terbantahkan dan dianggap prematur.

Dengan majemuknya manusia yang berjiwa dan bersemangat inovatif, kreatif, optimis, prospektif, dan nasionalis, maka Indonesia tetap akan menjadi penentu utama penggerak kemajuan. Mereka akan menegaskan bahwa Indonesia adalah milik sepenuh rakyat Indonesia. Segala bentuk determinasi dan imperialitas dari negara lain dengan mudah dibendung, hanya ketika bangsa Indonesia sendiri sudah memiliki manusia yang memiliki kapasitas, kapabilitas dan kompetensi dalam membangun. Jadi, membangun manusia adalah



Narasi Bangsa yang Tercecer

sebuah keniscayaan dalam upaya mempertahankan bangsa. Erich Fromm (2001) pernah berujar: “Mencintai negara tanpa mencintai (membangun) kemanusiaan sama saja dengan menyembah berhala.” Karena itu, marilah kita lebih fokus membangun manusia!

Lastest Dummy



PILIH NEKROKRASI ATAU BIOKRASI?*

Erich Fromm (1900-1980) pernah membeberkan bahwa pada fase perkembangan tertentu, entah secara kolektif ataupun individual, anggota masyarakat bisa masuk dalam dikotomi antara kelompok yang ‘mencintai kematian’ (*nekrofilia*) dan kelompok yang ‘mencintai kehidupan’ (*biofilia*). Masing-masing kelompok memiliki tipikalitasnya. Kelompok nekrofilia umumnya terdiri dari kaum pesimistis dalam sikap dan skeptis dalam berpikir, fatalistik dalam menatap masa depan. Dari perspektif psikologi sosial, kelompok nekrofilia cenderung eksklusif dalam penghayatan hidup kesehariannya dan tidak terbuka pada pendapat, pemikiran dan perkembangan alternatif. Kemudian, kelompok ini bisa membelah diri menjadi kelompok militan, radikal dan rigoristik

* Koran Nasional Media Indonesia, 23/05/2018



Narasi Bangsa yang Tercecer

dalam menjalani kehidupannya. Seandainya suatu saat mereka menguasai negara dan sistem pemerintahannya, maka secara tidak sadar terbentuklah nekrokrasi.

Nekrokrasi tidak secara kasat mata hadir sebagai sebuah sistem administrasi kenegaraan, tetapi lebih pada sistem psikologi massal yang bertumbuhkembang pada kaum nekrofil. Namun pada saatnya, sebagai sebuah sistem psikologi massal, nekrokrasi akan secara laten mempengaruhi sistem administrasi kenegaraan. Ketika kaum ini berkesempatan untuk memegang tampuk pimpinan, mereka bisa membawa negara pada bentuk otoritarian, totaliter dan fasis. Mereka biasanya militan dan masif dalam memproklamasikan suatu ideologi dengan menggandeng isu lain seperti agama, budaya, suku, dan ras. Isu-isu ideologis ini kerap digunakan untuk membungkus secara baik sistem psikologi massal ini. Segala modus bisa digunakan untuk mencapai tujuan dan maksud kelompok. Bahkan bila dipandang perlu, mereka rela mengorbankan jiwa dan material.

Sementara kelompok biofil, tentu memiliki tipikalitas yang bertolak belakang dengan kelompok nekrofil. Kelompok ini memandang kehidupannya dengan sangat optimis. Mereka bersikap inklusif dan terbuka pada pemikiran dan perkembangan baru. Kelompok ini cukup dinamis dan fleksibel dalam memandang sesuatu, sehingga kadang tidak memiliki pegangan ideologi yang kuat. Bila kelompok ini menguasai masyarakat atau suatu sistem pemerintahan, maka yang terbentuk adalah sistem psikologi massal yang disebut biokrasi. Umumnya, mereka memandang masyarakat sebagai organisme yang terus berkembang dan tidak terpaku pada patron ideologi tertentu. Mereka respek pada demokrasi modern yang sangat menekankan penghargaan pada hak-hak asasi manusia, pluralitas dan multikulturalitas. Kaum biofil meyakini bahwa masing-masing pribadi memiliki kekhasan dalam menjalani hidupnya dan sama sekali tidak ada bergantung pada uniformitas cara berpikir



dan bertindak. Bagi kaum ini, bertumbuh dan berkembangnya suatu bangsa terletak pada penghargaan terhadap kemajemukan budaya, suku, ras dan agama, dan bahkan pada kejamakan berpikir dan berpendapat. Namun, sebagai sistem psikologi massal, biokrasi cukup rentan dengan munculnya konflik dan perpecahan ketika dalam mengelolanya tidak memakai instrumen yang efektif.

Menurut Fromm (George, 2004), dengan munculnya sistem psikologi massal dalam bentuk nekrokrasi dan biokrasi ini, maka ada tiga tipikalitas masyarakat, yaitu: (1) Masyarakat pecinta kehidupan. Karakter sosial masyarakat ini penuh cita-cita, optimisme, menjaga kelangsungan dan perkembangan kehidupan dalam segala bentuknya. Pada masyarakat seperti ini, jarang terjadi destruksi, konflik, dan friksi sosial. Masyarakat ini sering menjalin kerja sama, solidaritas dan toleransi dengan penuh cinta dan penghargaan. Mereka secara bertanggung jawab merajut ikatan-ikatan persaudaraan dan selalu membangun pengertian tentang diri, sesama dan lingkungannya. Masyarakat bersifat komunitarian humanistik, di mana setiap orang dengan latar belakang berbeda, memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi manusia seutuhnya. (2) Masyarakat non-destruktif tapi agresif dan progresif. Masyarakat ini memandang agresivitas, progresivitas dan destruksi merupakan hal wajar dalam kehidupannya. Situasi masyarakat ini penuh dengan kompetisi dengan manuver dan strategi untuk mempertahankan hidup. Persaingan tidak mengarah pada konflik karena masih bisa dikelola dengan baik. Masyarakat model ini sebagian besar terdiri dari anggota yang individualistik, eksklusif dan tidak saling mempercayai satu dengan yang lain. Mereka berjuang sendiri-sendiri untuk bertahan dan menjaga kelangsungan hidupnya. (3) Masyarakat destruktif. Karakter sosialnya adalah merusak, brutal, berprasangka buruk, intoleran, penuh dengan dendam, pengkhianatan dan permusuhan. Pada masyarakat ini sering terjadi persaingan dan dapat berujung



Narasi Bangsa yang Tercecer

pada perpecahan. Perang dalam segala bentuk bagi mereka adalah kelaziman dan dibenarkan menurut cara pandang tertentu. Bias dari tipikalitas masyarakat ini adalah kuatnya sikap dan rasa pesimis yang dominan terhadap bangsanya. Pada fase akut, mereka kerap menjadikan bangsa sebagai ruang dan tempat pengekspresian bentuk-bentuk protes, rasa penyesalan, putus asa dan tindakan-tindakan fatalistik. Banyaknya kritik vulgar yang mengundang friksi dan konflik, demonstrasi dan protes yang ekstrem, sporadis dalam memberitakan informasi, serta ancaman separatis dan desintegrasi, merupakan bentuk-bentuk tantangan yang mesti dihadapi dan dikelola secara serius oleh negara.

Saya kira, tantangan internal untuk semua negara bangsa saat ini adalah fenomena menguat dan mengakarnya tipikalitas masyarakat destruktif. Dari perspektif manajemen konflik, salah satu isyarat tentang negara yang kuat adalah ketika mampu mengelola berbagai bentuk gejala destruktif, dan mengonversi gejala tersebut menjadi kekuatan untuk semakin merekatkan soliditas berbangsa. Ada banyak negara bangsa yang hari ini tetap berdiri tegak dan bahkan menjadi besar, justru karena telah cerdas melewati berbagai tantangan internal bangsanya. Kecerdasan tersebut mungkin terletak pada asas bahwa negara tidak boleh kalah! Dan cara mengelolanya tetap mengedepankan prinsip yang keras, tetapi bijak dalam cara penyelesaiannya (*fortiter in re, suaviter in modo*). Penyelesaian berbagai gejala destruksi mesti mempertimbangkan berbagai pendekatan seperti kemanusiaan, kultural, sosio politik, sosio-ekonomi, dll., sehingga masyarakat merasakan perhatian dan keadilan.

Saya punya hipotesis bahwa bernegara bukanlah sebuah tujuan, tetapi sebagai sarana agar manusia mendapatkan pengakuannya. Tujuan manusia bernegara adalah untuk mendapatkan eksistensi



sebagai 'ens politicon'. Dalam negara seorang akan mendapatkan hak dan kebebasan sejatinya sebagai manusia. Bernegara adalah tempat dan ruang di mana manusia mampu berada dan mengada, hidup dan menghidupkan dirinya. Bernegara bisa jadi merupakan suatu bentuk keterberian bagi masyarakat tertentu, tetapi menjadi anggota masyarakat yang sejahtera lahir dan batin merupakan suatu pilihannya. Bernegara merupakan tempat yang disediakan oleh Tuhan agar umat manusia mendapat kehidupan yang layak dan sejahtera sebagai manusia.

Bila bernegara hanya sebatas sebagai tujuan, maka yang sering terjadi adalah munculnya pengingkaran terhadap hak-hak sebagai manusia. Masyarakat bahkan akan dikorbankan dan dieksploitasi hanya untuk kepentingan negara semata. Fakta sejarah membuktikan bahwa dengan adanya dalil tentang 'masyarakat harus memberi untuk negara' seakan melegitimasi kehendaknya untuk berkuasa. Dalil ini kemudian dipakai untuk melanggengkan hegemoninya dan membenarkan segala bentuk penyimpangan kekuasaan. Ada banyak pemimpin di dunia ini melakoni kekuasaan dengan memanfaatkan dalil ini demi mempertahankan negaranya, meski dengan mengorbankan masyarakat sendiri.

Bisa jadi konsep dan pemikiran 'bernegara sebagai tujuan' merupakan dampak dari sikap 'memiliki' (having mood). Secara positif sikap ini akan memunculkan sikap patriotisme dan nasionalisme. Namun, secara negatif sikap ini akan berdampak pada bentuk fasisme dan totalitarianisme. Pemimpin dan rakyatnya menganggap negaranya yang paling besar dan berjaya (*uber alles*), sementara negara lain menjadi subordinasi. Namun bila motivasi bernegara muncul dari sikap 'menjadi' (being mood), di mana setiap anggota masyarakat mendapat ruang dan tempat untuk mendapatkan kehidupan yang layak sebagai manusia, maka akan terbentuk sikap patriotisme dan nasionalisme sejati. Ekspresi-ekspresi kecintaan



Narasi Bangsa yang Tercecer

terhadap negara justru muncul sebagai dampak dari rasa bahagia masyarakat karena diperlakukan adil oleh dari negaranya.

Dalam menghayati hidup kenegaraan yang sejati, ada beberapa konsep kebaikan dapat dikembangkan, yakni: (1) Keterhubungan. Kebaikan ini muncul ketika seseorang berani keluar dari diri sendiri dan bergabung dengan warga lain dalam suasana cinta, persaudaraan, perhatian, tanggung jawab, penghargaan, dan pengertian. (2) Keberakaran. Kebaikan ini ada ketika kebutuhan dasar manusia terpenuhi sehingga membuatnya nyaman dan bahagia, serta kreatif dalam mengembangkan dirinya. (3) Menjadi pencipta. Kebaikan yang muncul ketika individu menyadari diri, sesama dan lingkungannya. Seseorang melakukan upaya pengembangan diri dengan mencipta dan membangun, dan berjuang mengatasi keterbatasan dan kekurangan hidupnya untuk menjadi lebih baik dan sejahtera. (4) Kesatuan. Kebaikan ini terlihat ketika seorang mau menyatukan dan mengidentifikasi dirinya dengan sesama dan lingkungannya. Ia mampu berbagi cinta dan kebahagiaan kepada orang lain melalui berbagai kegiatan yang produktif dan konstruktif. (5) Identitas. Kebaikan yang terajut ketika seseorang dapat mengontrol nasibnya sendiri, menegaskan diri, membuat keputusan, dan merasa sebagai pemilik hidup seutuhnya.



TERAPEUTIK KONSTRUKSI SOSIAL: MEMERANGI RADIKALISME!*

Isu dan peristiwa yang terkait dengan fenomena radikalisme tidak henti-hentinya menerpa kehidupan masyarakat dunia akhir-akhir ini. Banyak negara cukup disibukan dengan urusan radikalisme ini, yang sebenarnya sudah harus selesai pada era di mana IPTEKS sudah maju dengan sangat pesat, dan perhatian lebih tercurah pada pembangunan dan kesejahteraan masa depan masyarakat. Menurut saya, kadar 'gangguannya' tidak hanya pada masalah penyimpangan terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal atau pelanggaran terhadap hukum negara saja, tetapi radikalisme juga sangat terpapar pada rusaknya tatanan sosial yang sudah ada, yang berdampak pada disharmoni dan disequilibrium kehidupan masyarakat. Destruksinya tatanan sosial ini terjadi saat 'embel-

* Harian Umum Flores Pos, 6 April 2017.



Narasi Bangsa yang Tercecer

embel' ideologis dengan maksud tertentu berusaha dipasangkan pada pakaian kebangsaan dan bergayut pada kehidupan masyarakatnya. Ketika embel-embel ideologis ini bertumbuh dan berkembang tanpa terkontrol, maka perlahan tapi pasti menggerogoti bentuk-bentuk tatanan sosial, yang pada titik kulminatif tertentu akan meruntuhkan sendi-sendinya.

Sudah barang tentu negara dan masyarakat harus bertanggung jawab untuk membebaskan dan membersihkan kembali konstruksi sosial suatu bangsa pada kesejatian dan keasliannya. Upaya memurnikan dan menyembuhkan (terapeutik) dalam konteks pemikiran konstruksi sosial menjadi sangat urgen dan mendesak, agar tidak terlanjur berdampak sistemik pada kehidupan masyarakat. Ada negara yang sudah mulai bebas dari ancaman, gangguan dan hambatan radikalisme karena telah membahasnya dan menyelesaikannya dengan tindakan-tindakan praktis melalui kajian dan perspektif terapeutik konstruksi sosial. Dalam buku *Social Construction In Context*, Kenneth J. Gergen (2001) mengatakan bahwa terapeutik berbasis konstruksi sosial ini sangat mendasar ketika permasalahan sosial, termasuk radikalisme menjadi ancaman bagi tatanan masyarakat suatu bangsa. Terapeutik tersebut berangkat dari diagnosa terhadap sebab/akar dari permasalahan tersebut, karenanya studi dan analisis terhadap realitas sosial menjadi bagian yang tak terpisahkan darinya. Terapeutik dilengkapi dengan perangkat-perangkat untuk melakukan studi dan analisis terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang terlantar, potret ketidakadilan dan ketidakmerataan dalam beberapa bidang kehidupan, ketidakterediaan lapangan kerja dan lahan ekonomi, dekadensi moral etis dan diskrepansi sosial sebagai akibat ketidaksiapan masyarakat dalam menerima lajunya perkembangan, serta degradasi lingkungan sosial dan alam sebagai konsekuensi logis dari tuntutan kepentingan ekonomi global. Studi dan analisis menjadi bagian integral dalam proses



terapeutik berbasis konstruksi sosial karena bersamanya negara dan masyarakat akan mengetahui secara persis dan detail tentang penyebab, dampak dan solusi dari masalah radikalisme ini.

Tujuan lain dari terapeutik berbasis konstruksi sosial dengan mengintegrasikan studi dan analisis ini adalah membangun kesadaran kolektif antara negara dan masyarakat dalam mengatasi radikalisme. Kesadaran kolektif menjadi basis dalam membangun komitmen dan tanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa. Kesadaran kolektif ini juga berhubungan dengan merancang dan menyusun langkah-langkah strategis yang bisa diterapkan demi mengatasi sekaligus mencegah tumbuh-kembangnya paham-paham radikal, termasuk di dalamnya kesepakatan tentang sistem informasi keamanan, hak dan kewajiban, perlindungan serta kenyamanan sebagai anggota masyarakat. Berdasarkan kesadaran kolektifnya, masyarakat juga kemudian diberdayakan untuk 'berani terlibat' dalam proses penguatan transformasi tatanan sosialnya. Proses penguatan transformasi tatanan sosial ini tampak dalam berbagai bentuk dan manifestasi pergerakan, seperti beralih dari kekakuan pola pikir dan sikap menuju kepada dinamisitas dan fleksibilitas; bergerak dari hanya sekadar kesadaran diri menuju pada kesadaran kolektif; beralih dari hanya mengandalkan kerja sendiri menuju pada kolaborasi dan jaringan kerja yang luas; berubah dari hanya penghayatan nilai-nilai kehidupan parsial dan eksklusif menuju pada penghayatan nilai-nilai kehidupan yang inklusif, universal dan bermanfaat bagi kepentingan umum.

Demi mendukung berlangsungnya proses penguatan transformasi tatanan sosial ini, Kenneth menambahkan perlu adanya 'perubahan' praktis dalam diri masyarakat, antara lain: (1) *From mind to discourse*; masyarakat diberdayakan untuk tidak sekadar bermain dalam ranah konsep saja, tetapi berani terlibat dalam berbagai diskursus praktis yang bertujuan untuk mengikis



Narasi Bangsa yang Tercecer

irasionalisme, primordialisme dan fundamentalisme. Maturitas dalam berpengetahuan menjadi garansi utama dan pertama dalam membangun konstruksi sosial yang rasional, elegan dan inklusif. (2) *From self to relationship*; masyarakat harus keluar dari 'ghetto' kebenaran dan narsisme diri/kelompok yang berlebihan menuju terjalannya relasi, persahabatan, dan kekeluargaan dengan orang lain/kelompok lain. Menemukan kesejatan diri dalam kebersamaan dengan orang lain menjadi seruan etis moral dalam membangun konstruksi sosial yang beradab. (3) *From singularity to polyvocality*; masyarakat harus melepaskan asas tunggal dan monolitik dari kehidupannya, menuju pada keterbukaan akan perbedaan dan keanekaragaman. Pemaksaan pola laku dan pikir yang seragam sudah pasti mengangangi berikut menafikan kreativitas dalam membangun kehidupan. Keterbukaan pada pendapat dan pemikiran yang berbeda menjadikan ruang kreativitas mendapat tempatnya, yang berarti membuka atmosfer yang positif-konstruktif pada perubahan dan perkembangan.

(4) *From problems to prospects*; masyarakat perlu berada dalam kultur dan habituasi untuk senantiasa berbicara mengenai masa depan dan bukan melulu berbicara tentang masalah. Memecahkan masalah berangkat dari masalah merupakan suatu imperatif, tetapi masyarakat harus diarahkan untuk lebih banyak bergumul tentang masa depan agar lepas dari trauma dan belenggu masalah masa lalu, dan merajut harapan yang pasti akan masa depan. Masyarakat yang bermental prospektif menjadi salah satu andalan dalam mendukung akselerasi roda pembangunan bangsa. (5) *From Insight to action*. Masyarakat diberdayakan untuk tidak sebatas melihat dan memahami realitas lingkungan alam sosial yang destruktif, degradatif dan deviatif, tetapi berusaha melakukan tindakan-tindakan nyata. Tindakan-tindakan nyata ini dapat dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan masyarakat setempat, sampai kemudian



menjadi tindakan-tindakan kolektif yang sinergik, simultan serta menjadi bagian dari kehidupan masyarakat bangsa. Tindakan-tindakan kolektif ini merupakan perekat utama dalam memperkuat konstruksi sosial bangsa dan membentuk tameng dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman/gangguan ideologis yang bertujuan untuk merusak dan meruntuhkannya.

Menurut saya dalam konteks bangsa Indonesia, langkah-langkah terapeutik yang berbasis konstruksi sosial sebenarnya sangat strategis, potensial dan relevan karena mempertimbangkan beberapa hal berikut: (1) Dasar-dasar penghargaan terhadap sesama dan perbedaan yang melekat di dalamnya sudah ditanamkan sejak awal ketika warga negara Indonesia mulai bersosialisasi dalam keluarga dan masyarakat. (2) Pranata dan norma sosial yang ada dalam budaya dan adat istiadat sudah berperspektif plural/multikultural, sehingga berbagai persoalan yang menyangkut SARA sebetulnya tidak lagi menjadi diskusi yang membebankan secara sosial maupun akademik. (3) Literasi kebhinekaan dan multikultural sudah *correlated and integrated* dalam sistem dan praksis kurikulum pendidikan, sehingga secara kognitif, afektif, dan psikomotor, masyarakat didik sudah memiliki kesadaran kuat menjalankan praktik-praktik keanekaragaman. Ekspektasinya, masyarakat persekolahan secara signifikan dan positif mempengaruhi pemahaman dan pengertian masyarakat umum tentang realitas dan kompleksitas kemajemukan. (4) Negara dan kelengkapan perangkat hukumnya sungguh telah menjamin kebebasan individu, kelompok, dan masyarakat dalam berpendapat dan berorganisasi dengan prinsip dasar: Tidak mengganggu kepentingan dan kenyamanan umum, melanggar/melawan hukum.

Program terapeutik untuk menyelesaikan masalah radikalisme secara holistik dan komprehensif sudah pasti melibatkan unsur-unsur masyarakat dari tingkat keluarga, RT/RW, pemerintah



Narasi Bangsa yang Tercecer

daerah sampai pusat. Eksplorasi dan identifikasi masalah mulai dari unit-unit sosial terkecil sangat membantu pemerintah daerah dan pusat dalam merumuskan tindakan praktis terapeutik ini. Selain itu, melibatkan lembaga pendidikan, LSM, lembaga adat, organisasi sosial/politik, dalam menangkal fenomena radikalisme adalah keharusan. Mereka dilibatkan dan diberdayakan dalam kegiatan edukasi, sosialisasi dan advokasi terkait pentingnya kesatuan, kerukunan, penghargaan terhadap sesama, menghormati kebebasan individual dan merawat kebhinekaan.

Lastest Dummy



PENDIDIK YANG BERKESADARAN VISIONER*

Bila ada yang menilai bahwa diskusi tentang ‘pendidikan yang berkesadaran visioner’ saat ini cenderung konseptual dan normatif, bisa dimaklumi. Namun, saya tetap melihatnya sebagai tema strategis yang perlu dieksplorasi untuk membantu bangsa yang sedang berada dalam jamak ketegangan akibat pesatnya perkembangan dunia, ikut berperang secara paradigmatis, bertarung dengan ideologi global, dan berkutut dengan isu-isu degradasi kemanusiaan dan ketidakseimbangan alam, dll. Dalam hal ini, pendidikan tetap menjadi andalan utama dalam memberi solusi, atau sekurang-kurangnya bisa menjadi ‘pintu masuk’ bagi kajian dan analisa demi mengurai berbagai tegangan tersebut.

* Harian Flores Pos, 30 Maret 2017



Narasi Bangsa yang Tercecer

Karena itu, gagasan pendidikan berkesadaran visioner harus tetap mengedepan dan menjadi landasan bagi praksis pendidikan yang responsif terhadap perkembangan-perkembangan terkini dan perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang.

Pendidikan berkesadaran visioner adalah istilah Edmund O'Sullivan dalam *Learning Transformative: Educational Vision for 21st Century* (2007). Kesadaran ini merupakan lanjutan sekaligus puncak dari tiga tahapan kesadaran terdahulu, yakni pra-sadar non-reflektif, kesadaran-kelangsungan hidup, dan kesadaran kritis. Untuk mencapai kesadaran visioner, prasyaratnya adalah para pendidik dan peserta didik harus melewati secara gradual-intens tiga kesadaran yang lain. Kesadaran visioner yang dimaksud adalah kesadaran untuk memiliki cita-cita dan pandangan jauh ke depan yang berlandaskan pada potensi-potensi yang terkuak pada masa saat ini. Seorang pendidik harus menyadari bahwa apa yang akan terjadi pada masa depan sangat tergantung pada bagaimana menjalani masa sekarang. Pendidikan yang visioner adalah pendidikan yang terarah secara jelas pada masa depan dengan bersikap realistis terhadap keadaan masa sekarang.

Kampanye Sullivan tentang kesadaran visioner selaras dengan adanya tuntutan keterampilan yang wajib dimiliki pendidik dan peserta didik abad 21, yakni: (1) *Learning skills* dengan sub keterampilan: *communicating, critical thinking, creative thinking, collaborating*; (2) *Literacy skills* dengan sub keterampilan: *information literacy, media literacy, technology literacy*; (3) *Life skills* dengan sub keterampilan: *flexibility, initiative, social skills, productivity, leadership*. Ketiga keterampilan dengan sub-sub turunannya ini merupakan bagian dari konstruksi kesadaran visioner, di mana satu dengan yang lain saling mendukung dalam pengembangannya, terutama dalam membangun peradaban dunia yang lebih manusiawi pada masa mendatang. Tiga keterampilan ini didukung oleh tiga



tujuan pembelajaran abad 21 (Zevin, 2011), yakni: (1) Tujuan didaktif berkaitan dengan pencapaian dan penguasaan sejumlah pengetahuan, sikap dan keterampilan; (2) Tujuan afektif berkaitan dengan pemberdayaan kemampuan peserta didik dalam mengambil keputusan yang tepat terkait isu-isu strategis dan kontroversial, serta sikap yang tepat terkait norma, moral dan etika dalam relasi manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan alam. (3) Tujuan reflektif berhubungan dengan kemampuan berpikir kritis, analitis, sintesis, analogis, berdasarkan data/fakta, serta kemampuan memproyeksi masa depan berdasarkan kekuatan penentu yang ada pada masa sekarang. Ketiga tujuan ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan kompetensi pembelajaran yang visioner dan responsif terhadap berbagai bentuk perkembangan dan perubahan.

Menurut saya, dalam konteks pendidikan Indonesia, benih-benih kesadaran visioner tampak pada tiga upaya berikut: Pertama, menghilangkan segala bentuk 'zona nyaman' yang telah membenamkan cara berpikir kritis, kreatif dan alternatif. Pendidik harus berani berpikir kritis, alternatif dan kreatif agar membuka ruang pembaharuan dan perubahan. Pendidikan adalah dunia pengembangan di mana segala upaya membangun manusia berawal dari inisiasi kreatif dan konstruktif yang tidak ada hentinya. Mengikuti saja sistem kurikulum pendidikan yang sudah berlaku umum menjadi pilihan yang baik, tetapi 'tidak cukup baik' dalam konteks pengembangan pendidikan yang kontekstual, selaras tuntutan global dan kebutuhan lokal. Kurikulum tentu dibutuhkan agar pengembangan pendidikan tetap 'on the track' dan terarah, namun tidak berarti memasung bentuk-bentuk inisiasi dan kreativitas. Karenanya, berpikir dan bertindak 'out of the box' seorang pendidik dapat menjadi pilihan agar suasana pendidikan semakin dinamis dan memberikan kepuasan jiwa (katarsis) bagi yang terlibat di dalamnya. Memanfaatkan dan memberdayakan



Narasi Bangsa yang Tercecer

lingkungan dan sumber daya yang ada di sekitar sekolah secara kreatif akan menjadikan pembelajaran lebih bermakna (meaningful) dan berdaya kuat (powerful), dan membuat materi terkoneksi secara integratif dengan dunia nyata (real world).

Kedua, memberangus tendensi yang memaksa pendidikan untuk diabdikan pada kebutuhan pasar dan kepentingan ideologi-ideologi tertentu. Politik pendidikan mesti terus 'dimandikan' agar bersih dari upaya penjajahan terselubung dari kelompok, golongan dan rezim budaya, yang secara laten telah mereduksi makna dan nilai luhur pendidikan. Saya sangat setuju bila negara memanfaatkan pendidikan sebagai instrumen untuk melestarikan ideologi pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan, persatuan dan kesatuan negara bangsa. Namun, saya sangat tidak merasa 'sreg' bila negara membiarkan pendidikan dijadikan sebagai ajang melancarkan proyek-proyek ekonomi dengan menggusur program-program kemanusiaan yang merupakan substansi pendidikan. Pengadaan fasilitas pendidikan seperti buku pelajaran, alat tulis, sarana prasarana teknologi, perangkat evaluasi nasional, dana operasional sekolah, dana untuk siswa dan guru, menjadi sasaran dan target proyek ekonomi dari tingkat pusat sampai daerah. Pada titik tertentu proyek ekonomi ini akan menggeser substansi makna pendidikan ketika tidak dikontrol dan diawasi dengan ketat dalam pelaksanaannya. Beberapa penyimpangan yang pernah terjadi dalam menjalankan proyek-proyek ini telah mencoreng makna sejati dari tujuan pendidikan nasional.

Selain itu, bangunan kesadaran visioner ini turut ditentukan oleh kemauan politik pendidikan pemerintah. Kehendak politik ini bukan saja pada skala kebijakan kurikulum dan perangkat-perangkat turunannya, tetapi juga pada keadilan dan pemerataan pendidikan. Keadilan dan pemerataan pendidikan, selain pada pada distribusi dan alokasi, tetapi juga berkorelasi dengan rasionalitas



tingkat kesejahteraan dari para pendidiknya. Rasio kesenjangan kesejahteraan antara guru negeri dan swasta di daerah terpencil menjadi agenda yang belum terselesaikan oleh pemerintah sampai saat ini. Sudah pasti ketika berbicara tentang kesadaran visioner, maka kita akan berurusan dengan kesadaran material (kesejahteraan) dari para pendidikan. Kesadaran visioner tidak muncul begitu saja tanpa dibangun di atas kesadaran material yang matang dan mapan. Kesadaran visioner ini akan terbangun dengan sendirinya bila pemerintah bisa menyudahi urusan-urusan material para pendidik secara adil dan merata. Pada negara-negara yang sudah maju peradaban pendidikannya, kesadaran visioner ini bertumbuh dengan baik ketika urusan-urusan material pendidiknya sudah diselesaikan dengan tuntas.

Ketiga, keberlanjutan kosmos harus menjadi tema/topik utama dalam aktivitas pendidikan, ketika fenomena kerusakan alam sangat nyata sekaligus mengancam sistem kehidupan global. Sungguh tidak mungkin berbicara tentang keadaan lingkungan pada masa sekarang tanpa membayangkan profil keadaannya pada masa mendatang. Pendidikan dan perangkat-perangkat yang terkait padanya harus berperspektif ekologis dan *sustainable*. Isu ekologis dan keberlanjutan sangat menggeliat pada kegiatan pendidikan negara-negara yang maju pendidikannya. Mereka 'sudah selesai dengan dirinya', lantas berkomitmen memikirkan keadaan lingkungan bangsa lain karena bertolak dari asumsi bahwa persoalan lingkungan negara lain adalah bagian dari persoalannya.

Selain itu, kesadaran visioner berbasis ekologis ini berbicara juga tentang pemberdayaan dan rekonstruksi potensi dan kearifan lokal sebagai rambu untuk mengarahkan pendidikan yang 'memanusiakan alam' dan 'mengalamkan manusia' (eco-humanisme). Pengembangan kurikulum berbasis lingkungan hidup dan keberlanjutan kehidupan alam dunia senantiasa diwacanakan



Narasi Bangsa yang Tercecer

sebagai bagian dari kematangan kesadaran visioner tersebut. Karena itu, membentuk perilaku kognitif, afektif dan psikomotor yang berkarakter ekologis dan sustainable hendaknya menjadi bagian dari rumusan tujuan pembelajaran pada setiap mata pelajaran dari jenjang usia dini sampai perguruan tinggi.

Lastest Dummy



INTERAKSI SIMBOLIK DALAM BERPOLITIK BANGSA*

John Dewey (1859-1952) adalah filsuf pertama yang memperkenalkan pendekatan interaksi simbolik dalam penelitian pendidikan. Kemudian, Geroge Herbert Mead (1863-1931) dan peneliti-peneliti lainnya mengembangkannya untuk kajian yang lebih luas pada bidang sosio kultural, politik, ekonomi dari seseorang, sekelompok orang atau masyarakat tertentu. Inti dari penelitian interaksi simbolik adalah upaya metodologik untuk mengungkapkan realitas perilaku personal, kelompok, maupun masyarakat dalam hubungan dengan sosio kultural, politik, ekonomi, yang terfasilitasi melalui aktivitas komunikasi. Aktivitas komunikasi menjadi variabel penting dalam interaksi simbolik, karena dengannya peneliti dapat mengeksplorasi berbagai

* SKH Pos Kupang, 28/06/2016.



Narasi Bangsa yang Tercecer

simbol, tanda-tanda, fenomena yang bermakna untuk dijelaskan, dipahami dan diinterpretasi demi kepentingan kesimpulan yang baik. Kesimpulan ini nantinya dimanfaatkan untuk pengembangan keilmuan selanjutnya, pengembangan kehidupan masyarakat, penyusunan kebijakan dalam berbagai bidang kehidupan, dll.

Premis interaksi simbolik menurut Blumer (Jailani, 1994) ada tiga, yaitu: *Pertama*, manusia melakukan berbagai hal atas dasar makna yang muncul di hadapannya; *Kedua*, bermacam-macam makna muncul sebagai akibat dari interaksi sosial seorang dengan orang lain. Ketiga, bermacam makna itu perlu dijelaskan (*erklaren*), dimengerti (*vertehen*) dan diinterpretasi (*hermenuetika*) sesuai dengan konteks dan kebutuhan dari mereka yang memiliki simbol tersebut. Selanjutnya, *ketiga* premis ini memunculkan tujuh prinsip dasar interaksi simbolik, yakni: (1) simbol dan interaksi tidak bisa dipisahkan; seperti fakta tidak bisa dilepaspisahkan dari konteks; (2) simbol bersifat personal, karenanya perlu ada pemahaman jati diri yang baik dari subjek-subjek yang terlibat dalam interaksi tersebut; (3) simbol pribadi selalu mesti berelasi dengan konteks sosio budaya, politik, ekonomi yang mengitarinya; (4) situasi yang menggambarkan simbol perlu direkam dan dicerna; (5) metode dalam memahami interaksi mesti merefleksikan hubungan antara bentuk perilaku dan prosesnya; (6) upaya menangkap makna di balik fenomena sangat penting; (7) interaksi simbolik membutuhkan pemikiran dan tindakan yang fokus dan tidak berbias.

Saya mencoba meletakkan konteks politik bangsa ini dalam telusuran perspektif interaksi simbolik ini. Pemerintah, partai politik, parlemen, anggota parlemen dan masyarakat secara langsung atau tidak langsung, terlibat dalam interaksi simbolik ini. Pemerintah memiliki keharusan untuk berinteraksi dengan warga masyarakat agar segala bentuk program dan rencana-rencana pembangunan cocok



dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karenanya, komunikasi intens mesti terus mengemuka untuk menggali makna tersembunyi dari simbol-simbol kebutuhan masyarakat, yang relevan dengan konteks sosio kultural, politik dan ekonomi. Melalui pendekatan interaksi simbolik ini, simbol-simbol yang selama ini terpendam (*undercover*), dimunculkan dengan metode penjelasan, pemahaman dan interpretasi. Munculnya berbagai makna simbol kebutuhan masyarakat tersebut diharapkan akan mempengaruhi rumusan kebijakan pembangunan yang lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat (*option for the society needs*).

Politik pembangunan yang berbasis pada fakta dan konteks kebutuhan masyarakat akan menjauhkan pemerintah dari pola kebijakan dan program yang minim analisis, mubazir dan mangkrak. Komunikasi dalam interaksi simbolik ini secara mendasar membuat pemerintah lebih fokus, komprehensif dan holistik, dan menghindari egosektoral serta kecenderungan sektarianistik dalam menerapkan polisi-polisi pembangunannya. Kegiatan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) serta kegiatan-kegiatan sejenisnya dari tingkat desa sampai dengan tingkat nasional merupakan kegiatan yang sangat ideal (*das sein*), sekurang-kurangnya menurut sudut pandang interaksi simbolik. Namun, sejauh mana kegiatan ini benar-benar menjadi aktivitas signifikansi atas kebutuhan-kebutuhan kontekstual masyarakat, baik dari segi pendekatan, metodologi, konten dan aplikasinya, sangat tergantung pada 'political will' dari pemerintah dan para pihak yang terlibat. Formalisme, rutinitas dan orientasi menghabiskan anggaran (*budget spending oriented*) akan mengkooptasi esensi dari kegiatan Musrenbang dan kegiatan sejenis lainnya, dalam menjawab apa yang seharusnya (*das sollen*) menjadi kebutuhan masyarakat.

Kegiatan komunikasi dalam interaksi simbolik demi meng'cover' makna dari simbol-simbol pada masyarakat, sangat



Narasi Bangsa yang Tercecer

relevan juga untuk partai politik berikut para praktisinya. Sebagai sebuah lembaga akomodatif atas berbagai simbol ideologi demokrasi kehidupan masyarakat, maka partai politik dan para anggotanya mesti senantiasa memiliki keterarahan yang berkelanjutan dalam memaknai simbol-simbol kemauan masyarakat. Bila bercermin pada negara yang sudah maju demokrasinya, pendirian partai politik lebih besar termotivasi karena hasil penelitian interaksi simbolik tentang kebutuhan ideologi dari kelompok masyarakat tertentu. Karena berdasarkan kebutuhan masyarakat, maka partai-partai politik tersebut senantiasa eksis, dan ketika menjadi partisipan dalam pemilu mereka sudah pasti memiliki tingkat kredibilitas, popularitas dan elektabilitas yang relatif stabil. Nah, di sini terjadi simbiosis mutualisma dalam membangun pilar-pilar demokrasi yang kuat dari sebuah negara bangsa. Tentunya, kondisi ini secara ideologis-politis akan mendukung berbagai kegiatan pembangunan bangsa.

Partai yang membentuk platform politiknya berdasarkan kedekatan dengan masyarakatnya, rerata memiliki tingkat kepercayaan, keterkenalan, keterpilihan dan kesukaan yang tinggi dari masyarakat konstituen. Hal ini disebabkan karena manifestasi visi-misi, program kerja dan spirit partainya sudah tergambar dalam pergerakan politiknya (political movement) yang faktual dan membumi. Mereka sangat yakin dengan kontrak dan komitmen politik yang sudah dimaterai antara keduanya. Sebaliknya, bila partai politik dibentuk secara abal-abal dan pragmatis serta tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat, maka cepat atau lambat partai tersebut akan menghilang dari peredaran politik, dikarenakan rendahnya capaian 'Parliamentary Threshold' (PT). Mereka akan sangat terpaksa berfusi atau berafiliasi dengan partai politik yang kredibel untuk sekadar 'bargaining' dalam mempertahankan eksistensinya di dunia politik, atau berposisi tawar demi mengembalikan modal dan investasi politik yang sudah habis.



Sementara itu, lembaga parlemen (DPRD, DPR, DPD, MPR) sebagai lembaga representasi dari suara masyarakat konstituen, tidak pernah boleh menafikan perspektif interaksi simbolik ini. Spirit ‘dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat’ sebenarnya merupakan ejawantah dari perilaku interaksi simbolik, bila para politisi dan politikus dapat menerapkannya pada level kognitif, afektif dan psikomotor, sehingga spirit ini tidak menjadi absurd, pemanis bibir semata dan terjebak pada kamufase. Selain itu, tanggung jawab parlemen untuk menjalankan fungsi kontrol, legislasi dan penganggaran, sangat berkorelasi dengan keharusan memaknai simbol kebutuhan masyarakat. Substansi dari tiga fungsi ini adalah terrepresentasinya kehendak masyarakat, karenanya sedapat mungkin menghindari berbagai bentuk polarisasi dan konflik kepentingan, yang menyebabkan bergesernya substansi tadi.

Kegiatan reses dari para anggota parlemen menjadi sangat strategis untuk memberi penguatan terhadap interaksi simbolik ini. Dalam reses ini, anggota parlemen berhadapan dengan tantangan adanya masyarakat yang pasif, apolitis, unik, resisten, yang sebenarnya bila dilakukan komunikasi personal, intensif, dan persuasif akan membicarakan tentang banyak makna simbol dalam kehidupan mereka. Bila anggota parlemen memiliki cukup kemampuan untuk menginterpretasikan secara lebih sistematis dan ilmiah berbagai simbol, tanda-tanda dan fenomena ini, maka akan berkekuatan intelektual, sehingga bisa diperhitungkan ketika diperdengarkan kepada pihak terkait. Ketika ‘turba’, anggota parlemen akan terpapar dengan banyaknya ‘stock of life problems’, karenanya fokus dan komit dalam mendengarkan, memfasilitasi dan menyuarakan masalah-masalah, akan sangat membantu masyarakat keluar permasalahan tersebut. Dalam aktivitas interaksi simboliknya, anggota parlemen juga bisa mengedukasi, mengadvokasi, memberi masukan yang bersifat kuratif maupun preventif terhadap realitas



Narasi Bangsa yang Tercecer

persoalan masyarakat. Reses yang masalistik dan formalistik, bisa menjadi salah satu penyebab tergerusnya 'roh sebagai wakil rakyat' dalam diri anggota parlemen. Hal ini bukan tidak mungkin dapat berimbas pada menurunnya kepercayaan diri sebagai wakil rakyat, dan mungkin juga hilangnya kepercayaan masyarakat konstituen terhadap dirinya.

Lastest Dummy



MENYOAL METANARASI VISI/MISI CALON KEPALA DAERAH*

Dalam buku *The Postmodern Condition* (1984), Jean Francois Lyotard membuat kritik terhadap konsep/ide besar (metanarasi; *grandtheory*) yang dikemukakan banyak pemikir pada abad modern tentang gagasan membangun dunia, menyejahterakan dan membebaskan masyarakat dari keterpurukan situasi dan kondisi zamannya. Pada kenyataannya, konsep/ide besar tersebut hanya sebatas jargon, kemudian gagal total, dan bahkan memberi kontribusi bagi kehancuran masyarakat di beberapa bidang kehidupannya. Pada buku *The Differend* (1988) Lyotard menilai kegagalan terjadi karena konsep/ide besar tersebut tidak membumi dan tidak berpijak pada situasi riil dan empirik masyarakat yang sudah sangat plural, multidimensional, dan beragam. Kehidupan

1 | Harian Umum Flores Pos, 20/04/2017.



Narasi Bangsa yang Tercecer

manusia postmodern tidak bisa lagi dipahami hanya sebagai satu kesatuan organik-singular saja seperti yang dikemukakan oleh Durkheim; tidak juga dipahami hanya sebagai satu sistem fungsional yang identik saja menurut Parsons, atau tidak juga hanya dipahami sebagai kesatuan dari dua kekuatan yang saling bertentangan menurut Marx. Namun, kehidupan manusia sudah harus dipahami secara terbuka, kritis, jamak, dan detail dengan berbagai karakteristik dan tipikalitas yang berbeda, baik dari segi sosial, politik, ekonomi, budaya, agama maupun geografinya. Perbedaan karakteristik dan tipikalitas ini sudah pasti menuntut pendekatan konsep/ide yang bervariasi selaras dengan situasi dan kondisi faktual masing-masingnya. Sebab kalau tidak, maka gagasan-gagasan besar tersebut akan mengalami kegamangan dan keterasingan dan bukan tidak mungkin berujung pada kegagalan.

Berangkat dari pengalaman sejarah masa lalu tentang kegagalan dari beberapa metanarasi ini, Lyotard mengajak para pemikir di bidang filsafat, sosiologi, pendidikan, ekonomi, dan politik pada masa postmodern untuk mengkritisi berbagai konsep/ide yang sudah tidak relevan dan kontekstual bagi kehidupan manusia, dan berupaya membangun narasi-narasi yang lebih representatif, sesuai dengan kebutuhan masyarakat berikut keragaman-keragaman yang melekat padanya. Mendelegitimasi berbagai metanarasi yang absurd, mengawang dan sangat jauh dari jawaban-jawaban pertanyaan kebutuhan masyarakat, merupakan tindakan yang ilmiah, elegan dan manusiawi demi menghindari masyarakat dari repetisi peristiwa kegagalan dan kehancuran yang pernah terjadi sebelumnya. Tentunya, upaya delegitimasi ini diikuti dengan usaha yang konstruktif dalam merancang gagasan-gagasan yang inovatif, kontekstual dan relevan dengan permintaan kebutuhan masyarakat. Mengingat meluasnya dimensionalitas dan tingginya pluralitas kehidupan masyarakat sekarang ini, maka narasi dan



gagasan yang dibangun mesti berdasarkan studi dan analisis yang mendalam, akurat dan valid tentang kehidupan sehingga benar-benar memberi sumbangan dan dampak positif bagi pembangunan masyarakat dunia.

Momentum pemilihan kepala daerah merupakan ajang bagi para calon pemimpin untuk menarasikan hal-hal penting yang tereksplisitasi dalam bentuk konsep/ide pembangunan dan pengembangan daerahnya masing-masing. Selanjutnya, konsep/ide ini terderivasi dalam rumusan visi/misi dan program kerja. Koherensi, konsistensi dan relevansi antara narasi-narasi besar tentang pembangunan masyarakat dengan turunannya pada visi/misi dan program kerja menjadi titik kritis untuk menilai apakah para calon masih terbelenggu dan terjebak pada metanarasi yang absurd, mengawang-awang, membius dan mengelabui masyarakat; ataukah sudah bergerak pada narasi praksis dan implementatif, yang memuat sejumlah jawaban-jawaban inti tentang kebutuhan masyarakat. Pengalaman empiris menyajikan, banyak daerah yang mengalami kegagalan pembangunan karena visi/misi dan program kerja dari kepala daerahnya tidak dijalankan sesuai dengan harapan, sebagaimana yang telah dijanjikan pada masa kampanye. Padahal, salah satu faktor dominan yang mempengaruhi masyarakat untuk memilih kepala daerahnya pada kontestasi sebelumnya adalah visi/misi dan program kerja serta ide/konsep besar yang melatarbelakanginya.

Sejatinya, bila ada kepala daerah yang sudah terpilih, tentu saja mereka telah mendapatkan legitimasi politiknya, Namun, ketika belum atau tidak mengimplementasikan visi/misi dan program kerjanya, maka mereka dipastikan belum memiliki legitimasi etis-moral dan keilmiahan. Dalam hal ini, legitimasi etis-moral berkaitan dengan adanya pengakuan masyarakat tentang tanggung jawab dari kepala daerah terhadap harapan dan masa



Narasi Bangsa yang Tercecer

depan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Sementara legitimasi keilmiahan berhubungan dengan pengakuan masyarakat akan adanya konsistensi, koherensi dan relevansi dari visi/misi dan program kerjanya. Dengan demikian, saat kepala daerah gagal membangun daerahnya, maka yang terjadi bukan saja delegitimasi politik, tetapi juga ikut memudarnya pengakuan etis moral dan keilmiahan masyarakat. Cikal bakal kegagalan seorang kepala daerah bisa saja merupakan akumulasi dan eskalasi dari tiga bentuk delegitimasi masyarakat ini.

Menurut saya, untuk menghindari para calon kepada daerah dari kejerembaban metanarasi yang absurd, maka beberapa hal ini perlu dipertimbangkan: (1) Menghindari penyusunan visi/misi dan program kerja dengan berlatar belakang ide/konsep yang besar tanpa melalui studi dan analisis kebutuhan masyarakat. Studi dan analisis yang mendalam melalui survei, dialog, blusukan, menjadi kegiatan-kegiatan penting demi mengetahui secara persis dan akurat tentang keinginan dan kebutuhan masyarakat. Sehingga, pada gilirannya ide/konsep yang besar tersebut dapat dijabarkan secara praktis, aplikatif dan konkret pada rumusan visi, misi dan program kerja. (2) Melibatkan para ilmuwan/pakar, akademisi, pegiat sosial, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya dalam menyusun visi/misi dan program kerja sangatlah penting. Masukan dari berbagai elemen masyarakat ini menjadi bahan dasar untuk menyusun visi/misi dan program kerja yang benar-benar membumi dan menjawab kebutuhan dan keinginan masyarakat. (3) Menghindari adopsi dan plagiaritas visi/misi dan program kerja dari kepala daerah lain. Kegiatan adopsi dan plagiaritas ini, selain menganggangi tanggung jawab keilmiahan dari calon kepala daerah yang bersangkutan, tetapi yang lebih esensial, terjadinya 'ketidaksesuaian dan ketidakcocokan' (*unlink and mismacth*) visi/misi dan program kerja tersebut dengan karakteristik dan tipikalitas



Elaborasi Filosofis, Pedagogik Kritis, Sosial, dan Politik

kebutuhan masyarakat yang akan diampunya. Minimal, sang calon kepala daerah secara elegan, terbuka dan jujur dalam ‘mencontek’, tetapi tetap melakukan adaptasi dan elaborasi sesuai dengan kenyataan riil dan empirik masyarakatnya. (4) Meskipun momen debat kandidat menjadi hal yang sangat normatif dan standar dalam fase pemilihan kepala daerah, namun hal ini harus menjadi kultur dan habituasi dari konstruksi politik rasional. Selain, sebagai bagian dari upaya cerdas untuk mempertanggungjawabkan visi/misi dan program kerja, debat juga merupakan momen penting untuk lebih awal menagih tanggung jawab moral-etis dan ilmiah dari para calon. Di beberapa negara demokrasi modern, sesi-sesi debat justru menjadi saat yang cukup strategis sekaligus krusial bagi masyarakat dalam menentukan pemimpin daerah pilihannya.

Lastest Dummy



Narasi Bangsa yang Tercecer

Lastest Dummy



MASYARAKAT NTT DAN KESADARAN POLITIK EMANSIPATORIS*

Sudah pasti banyak harapan yang muncul dari masyarakat untuk para calon yang akan berkontestasi pada Pilgub NTT tahun 2018. Pada tingkat artifisial, harapan tersebut bisa saja terjawab melalui rumusan visi/misi dan program kerja dari para calon. Sementara pada tahap yang paling substansial, harapan tersebut nantinya bisa terjawab atau terbukti melalui implementasi dan realisasi dari visi/misi dan program kerjanya. Namun yang sudah pasti bahwa NTT sebagai salah satu propinsi yang mendapat predikasi 'nyaris terbelakang' dalam beberapa bidang kehidupan masyarakatnya, butuh perubahan dan pergerakan yang lebih signifikan, pembangunan yang lebih akseleratif, dan pengembangan

* Harian Umum Flores Pos, 6 Mei 2017



Narasi Bangsa yang Tercecer

yang lebih progresif. Tuntutan-tuntutan untuk keluar dari zona 'nyaris terbelakang' ini semakin mendapat momentumnya pada peristiwa politik seperti pemilihan gubernur ini.

Menurut saya, tuntutan agar keluar dari zona keterbelakangan ini secara implisit muncul dalam beberapa fenomena berikut ini: Pertama, indikasi sudah menguatnya kesadaran politik, yang didukung oleh semakin meningkatnya indeks melek politik masyarakat. Masyarakat sudah semakin menyadari bahwa momentum politik bukan hanya sekadar kesempatan berwacana atau bermimpi tentang perubahan, tetapi lebih dari itu, kesempatan dan peluang untuk berpartisipasi aktif dan nyata dalam membangun daerahnya. Masyarakat sudah sampai pada kesadaran yang cukup tinggi bahwa yang menentukan perkembangan daerah, salah satunya adalah pilihan politik. Kedua, masyarakat sudah memiliki kemampuan komparatif dimana dengan cukup detail mereka membandingkan perubahan dan perkembangan yang terjadi pada propinsi-propinsi lain yang sudah maju dengan pesat. Perbandingan-perbandingan yang masyarakat buat berlandaskan pada prinsip retorik sederhana, yaitu: Mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Meskipun ada banyak hal yang perlu didiskusikan tentang perbedaan tipikalitas dan peluang dari satu daerah dengan daerah yang lain, yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan.

Ketiga, munculnya figur-figur kepala daerah yang fenomenal berikut kinerjanya yang positif terhadap perkembangan daerah yang dipimpinnya. Mengemukakan figur-figur kepala daerah seperti ini menginspirasi masyarakat untuk menginisiasi lahirnya kepala daerah yang selevel dalam hal karakter, integritas, dan kepemimpinan. Inisiasi masyarakat untuk memunculkan model kepemimpinan yang selevel, secara sosio-politis sangat masuk akal dan tentunya harus menjadi pertimbangan bagi partai politik dalam mencari figur-figur yang akan diusung pada Pilgub mendatang. Tentu



hal ini relevan dan terkait dengan pertimbangan popularitas dan elektabilitas calon yang akan diusungnya. Keempat, infrastruktur-infrastruktur politik seperti partai politik dan organisasi sayapnya, dan organisasi sosial masyarakat, dinilai sudah cukup berperan sebagai wadah yang akomodatif dan aspiratif untuk menampung kepentingan politik masyarakat NTT. Sejauh ini, untuk wilayah NTT, sistem pencalonan melalui partai politik masih cukup efektif untuk mengusung calon kepala daerah. Karenanya, harapan masyarakat bersandar penuh pada tanggung jawab moral politik partai politik dalam membesut calon pemimpin yang dinilai bisa membawa perubahan dan perkembangan yang berarti bagi NTT.

Dapat disimpulkan, ketiga fenomena di atas menunjukkan bahwa masyarakat NTT sudah memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masa depan daerahnya. Dalam perspektif masyarakat rasional komunikatif Habermas (1929-2006) keterlibatan masyarakat dalam memikirkan dan menentukan arah pembangunan bangsanya adalah bentuk dari tanggung jawab moral politiknya. Menurutnya, mengedepannya tanggung jawab moral politik ini bertolak dari semakin menguatnya kesadaran emansipatoris masyarakat. Dalam masyarakat rasional komunikatif kesadaran emansipatoris ini merupakan akumulasi dari tiga bentuk kesadaran, yaitu: (1) Teknis. Kesadaran tentang kemampuan sekaligus keterampilan dalam mengelola lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan material hidup sehari-hari, seperti kebutuhan dasar terkait sandang, pangan dan papan. Kesadaran ini menjadi prasyarat bagi kesadaran berikutnya. Karenanya, upaya memunculkan dan memberdayakan kesadaran ini menjadi sangat berat baik bagi masyarakat itu sendiri, maupun bagi negara yang secara yuridis formal bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan lahir batin dari warga negaranya. Pemberdayaan dan pendidikan melalui kegiatan persekolahan, pelatihan, pembimbingan, advokasi, dll menjadi upaya-upaya alternatif dalam menumbuhkan kesadaran teknis ini.



Narasi Bangsa yang Tercecer

(2) Praktis. Kesadaran yang berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan memuat interaksi dan relasi yang harmonis anggota masyarakat dengan lingkungan sosial dan sesamanya. Kesadaran ini mengarah kepada pemberdayaan kemampuan-kemampuan sosial untuk membangun masyarakat yang beradab dan damai. Kemampuan-kemampuan teknis dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia mesti didukung oleh pola-pola relasi dan interaksi yang baik dan harmonis di antara masyarakat, sehingga terbentuk sensitivitas dan tanggung jawab sosial di antara anggota masyarakat. Dalam hal ini, pemberdayaan dan keterlibatan lembaga-lembaga sosial masyarakat, lembaga adat, dan lembaga agama dapat menjadi ruang dan tempat untuk menumbuhkembangkan kesadaran ini. Pranata dan norma sosial yang sudah ada dalam masyarakat diberi penguatan sehingga tetap membantu pola-pola relasi dan interaksi sosial yang baik dan benar dalam masyarakat. (3) Emansipatoris. Kesadaran berkaitan dengan keterlibatan aktif warga masyarakat untuk memahami perubahan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, dan melakukan evaluasi sekaligus refleksi kritis terhadap perubahan tersebut. Bila masyarakat sudah bisa mengevaluasi dan merefleksikan secara kritis berarti mereka sudah memiliki pengetahuan, pemahaman, perspektif dan pemaknaan baru tentang keadaan lingkungan sosial serta tuntutan-tuntutan perubahan yang wajib dilakukan pada masa-masa yang akan datang. Evaluasi dan refleksi kritis serta munculnya pengetahuan, pemahaman, perspektif dan pemaknaan baru adalah sebuah bentuk transformasi. Jadi, kesadaran emansipatoris sangat identik dengan munculnya transformasi. Sementara itu, tanggung jawab moral politik yang tinggi menjadi salah satu bagian penting dalam membangun transformasi tersebut, yang secara fundamental menyoroti pada kesejahteraan umum, keadilan dan pemerataan sosial.



Kesadaran emansipatoris ini menjadi basis dalam membangun komitmen dan tanggung jawab untuk membangun wilayahnya. Kesadaran emansipatoris ini juga berhubungan dengan keterlibatan dalam merancang kebijakan-kebijakan strategis pembangunan bersama dengan negara. Berdasarkan kesadaran emansipatoris ini, masyarakat juga kemudian diberdayakan untuk berani mengambil bagian dalam proses penguatan transformasi tatanan sosialnya. Proses penguatan transformasi tatanan sosial ini tampak dalam berbagai bentuk dan manifestasi pergerakan, seperti beralih dari kekakuan pola pikir dan sikap menuju kepada dinamisitas dan fleksibilitas; bergerak dari hanya sekadar kesadaran diri menuju pada kesadaran kolektif; beralih dari hanya mengandalkan kerja sendiri menuju pada kolaborasi dan jaringan kerja yang luas; berubah dari hanya penghayatan nilai-nilai kehidupan parsial dan eksklusif menuju pada penghayatan nilai-nilai kehidupan yang inklusif, universal dan bermanfaat bagi kepentingan umum.

Dalam konteks pemilihan gubernur NTT tahun 2018, praksis kesadaran politik emansipatoris tampak pada perubahan dalam diri masyarakat, di mana mereka berani terlibat dalam berbagai diskursus praktis yang bertujuan untuk mengurangi primordialisme dan fatalisme ketika menentukan pilihan politiknya. Dalam hal ini, kecerdasan sosial politik masyarakat merupakan garansi penting dalam menentukan arah perkembangan NTT pada masa mendatang. Pada tataran yang mendalam, masyarakat NTT harus melepaskan asas monolitik, kepentingan diri, kelompok, wilayah, menuju pada keterbukaan akan perbedaan dan keanekaragaman. Pemaksaan pola laku dan pikir yang seragam dalam berpolitik sudah pasti menafikan kreativitas dalam membangun kehidupan. Keterbukaan pada perubahan menjadikan ruang kreativitas mendapat tempatnya, yang berarti membuka atmosfer yang positif, konstruktif dan prospektif pada perkembangan. Masyarakat NTT



Narasi Bangsa yang Tercecer

perlu dibiasakan untuk senantiasa membahas tentang masa depan dan bukan melulu berbicara tentang masalah. Masyarakat yang bermental positif, konstruktif dan prospektif menjadi andalan dalam mendukung akselerasi roda pembangunan bangsa. Mental-mental ini menjadi perekat dalam memperkuat kesadaran politik emansipatoris, dan modal utama untuk membangun NTT yang lebih sejahtera dan bermartabat.

Lastest Dummy



POLITIK NTT: PREMIS NEGATIF VS RASIONALITAS NILAI*

Mungkin saya termasuk dalam kelompok orang yang sudah terjebak pesimisme ketika berhadapan dengan realitas politik lokal NTT. Pesimisme ini beralasan ketika bertolak dari lima premis negatif namun cukup faktual, terkait panorama pergerakan politik (political movement) dari satu peristiwa politik ke peristiwa politik yang lain, baik yang terjadi pada skop provinsial maupun skop distrikial. Meski demikian, saya masih optimis bahwa bangunan pilar-pilar demokrasi yang baik dan berkualitas masih berproses dan akan tetap menjadi fundamen dasar dalam mendukung pembangunan di wilayah NTT.

Adapun lima premis negatif tersebut, yakni: *pertama*, isu-isu yang berbasis primordialisme dan sektarianisme yang kadang

* SKH Pos Kupang, 15/07/2016.



Narasi Bangsa yang Tercecer

mengemuka, baik pada *mindset* masyarakat maupun *mindshift* dari para praktisi politik. Beberapa isu berbasis primordialisme dan sektarianisme berdampak pada masifnya bias 'fatalisme' keterwakilan golongan Kristen dan Katolik, dan representasi wilayah Flores dan Timor. Saya kira, bias ini sangat menjenuhkan berbagai pihak, yang berakibat pada mandulnya kreativitas dan inovasi dalam berpolitik. *Kedua*, payung patronase partai politik begitu berperan kental dalam pentas perpolitikan lokal. Kesempatan menjadi calon pemimpin lebih besar ada pada kader partai politik atau mereka yang berakses langsung ke partai politik. Sementara, orang luar (outsider) yang sebenarnya potensial untuk menjadi pemimpin, sulit diakomodasi karena tidak memiliki akses dan investasi pada partai politik. Dikotomi kader dan non kader partai, yang kadang didesain para elit politik pusat, ternyata merambah juga pada dramaturgi politik lokal.

Ketiga, politik kapitalistik masih cukup menggurita. Realitas ini bisa terkonfirmasi dari pameo yang mengatakan, 'politik itu mahal', 'politik itu harus bermodal kuat'. Kelihatannya, menjadi pemimpin lokal lebih condong pada pertimbangan modalitas kapital dibandingkan dengan modalitas sosial politik, moral dan intelektualnya. Hanya mereka yang berkemampuan membayar mahar politik atau berjejaringan kuat dengan pemilik modal, kemungkinan besar memiliki jembatan menjadi calon pemimpin. *Keempat*, minimnya kreativitas, fenomenalitas, voluntaritas (kerelawanan) dan noveltivitas (kebaruan) dalam dunia politik lokal menyebabkan berberapa hajatan politik kurang terlihat *gereget*-nya. Mungkin saja hal ini menjadi penyebab hilangnya semangat dan antusiasme masyarakat untuk terlibat dalam berbagai momentum politik. Masyarakat merasa jengah dengan stagnasi atau *flat*-nya dinamika politik daerah dengan kehadiran figur yang itu-itu saja. Mirisnya, figur-figur lama tersebut tetap membawa jargon dan daya pikat



(branding) politik yang sudah kadaluwarsa, irelevan, tidak kontekstual serta tidak responsif terhadap kebutuhan vital masyarakat. Adanya kecenderungan elitis dalam berpolitik membuat masyarakat lebih berposisi sebagai objek daripada subjek politik.

Kelima, masih belum optimalnya literasi politik masyarakat yang berimbas pada rendahnya partisipatori dan emansipatori, baik pada level berpikir, bersikap dan maupun bertindak. Masyarakat belum sepenuhnya melek dalam memahami politik sebagai variabel penting menuju perubahan kehidupan yang lebih baik. Sikap ignoran, pasif, apolitis, indifereen menggejala dalam diri masyarakat. Ada masyarakat yang 'terpaksa' terlibat dalam proses pesta demokrasi lebih karena motivasi emosional-primordial atau karena iming-iming kebendaan. Bahkan ada yang bersikap resisten dan apriori bahwa politik itu tidak bermanfaat (hopeless) dan dapat mendestruksi kohesi psiko-sosial. Tampaknya, masyarakat yang benar-benar literatif, partisipatoris dan emansipatoris dalam berbagai momentum politik, jumlahnya masih relatif sedikit.

Selanjutnya, intuisi akademik saya terpanggil untuk memperlawankan premis-premis negatif ini dengan konsep Rasionalitas Nilai menurut Juergen Habermas (1929-2015). Habermas dalam Teori Kritisnya dan diskursus tentang Masyarakat Komunikatif menegaskan, bangunan demokrasi yang kuat dan bisa mendongkrak partisipatori dan emansipatori politik masyarakat mesti didasarkan pada rasionalitas. Namun pertanyaannya, rasionalitas model manakah yang bisa menyebabkan transformasi sosial, politik, kultural dan personal? Menurutnya, ada tiga manifestasi rasionalitas, yakni: *Pertama*, Rasionalitas Tindakan. Rasio teknis yang mengacu pada perhitungan yang masuk akal untuk mencapai sasaran dengan dukungan sarana teknis, teknologis, mekanis, formalistik dan birokratis. *Kedua*, Rasionalitas Tujuan. Rasio yang hanya mementingkan tujuan, menafikan proses, dan



Narasi Bangsa yang Tercecer

menggeser nilai-nilai mendasar dalam kesadaran manusia. *Ketiga*, Rasionalitas Nilai. Rasio yang terbentuk sebagai hasil sebuah proses berkesadaran, yang didukung oleh komitmen personal untuk berpihak pada nilai kebaikan, kebenaran, keadilan dan tanggung jawab sosial. Setiap rasionalitas di atas berpotensi untuk terjadinya perubahan dan transformasi. Namun, rasio model manakah yang dapat membawa perubahan dan transformasi yang berorientasi kesejahteraan masyarakat dan tegaknya fundamen demokrasi?

Menurut Habermas, sudah pasti jawabannya ada pada rasio yang terakhir, karena rasio ini memungkinkan munculnya otonomi kesadaran dan tanggung jawab berpikir dan berperilaku sebagai manusia, yang tercermin dengan menguatnya kapasitas pengetahuan kritis. Rasio ini memerdekakan manusia untuk mengkonstruksi dirinya secara kreatif, dinamis, inovatif dan demokratis. Rasio ini mendukung berkembangnya nilai etis-moral yang senantiasa terarah pada keberpihakan nilai kesantunan, kejujuran, kebenaran dan keadilan dalam bermasyarakat. Rasio ini juga membuka ruang dialog dan komunikasi yang seimbang tanpa intimidasi kapitalisme, fatalisme, primordialisme, sektarianisme, dll. Habermas menambahkan, bila mayoritas masyarakat dalam dirinya memiliki rasionalitas nilai maka negara bangsa akan terarah pada habitus berdemokrasi yang berkualitas, yang terrefleksi dalam lajunya pembangunan, pertumbuhan dan perkembangan bidang politik, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan budaya.

Dan asumsi saya, agar perpolitikan lokal NTT bisa berkembang serta kemudian dapat menjadi barometer kehidupan demokrasi di Indonesia, maka sesuatu yang tidak boleh tidak (*conditio sine qua non*) semua anasir seperti negara (pemerintah), parlemen, masyarakat, partai politik, para politisi/politikus, LSM, mahasiswa, lembaga pendidikan, lembaga agama, lembaga adat, mesti terlibat dalam upaya pemberdayaan dan penguatan rasionalitas nilai ini.



Kegiatan-kegiatan pemberdayaan dan penguatannya secara praksis bisa dijalankan melalui 'sekolah-sekolah demokrasi' secara formal, informal dan non formal dalam bentuk pendidikan, pembelajaran, diskursus, dialog, renungan, khotbah, rekoleksi, pelatihan dan pemberdayaan yang berbasis kearifan lokal. Tentunya, kegiatan ini dibuat secara komprehensif, integratif dan melibatkan secara aktif semua pemangku kepentingan demokrasi lokal.

Seperti optimisme awal saya, kematangan demokrasi sebagai pilar pendukung pembangunan di NTT masih berproses dan membutuhkan perhatian dan komitmen dari semua pihak. Untuk mendukungnya, rasionalitas nilai harus menjadi sebuah pilihan demi terbukanya ruang literasi, partisipatori dan emansipatori masyarakat dalam berdemokrasi. Rasionalitas nilai menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk melawan dan mengeliminasi premis-premis negatif yang melekat secara fatalistik berdemokrasi politik lokal. Dengan berpikir dan bertindak rasional, serta bertumpu pada nilai universal dan kearifan lokal, perwajahan politik lokal mengalami transformasi yang berkualitas. Bukan tidak mungkin, politik lokal NTT bisa menjadi 'role model', kiblat, atau miniatur politik bagi bangsa Indonesia.



Narasi Bangsa yang Tercecer

Lastest Dummy



PILKADA 2015 - PILGUB 2018: NTT TERPOLAR PRAGMATISME POLITIK*

John Dewey (1859-1952) merupakan salah satu filsuf, kritikus sosial dan pemikir dalam bidang pendidikan yang menggagas filsafat pragmatisme. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengklaim bahwa sesuatu disebut benar dan memiliki kebenaran bila mengandung kegunaan atau manfaat secara praktis bagi seseorang atau sekelompok orang. Pragmatisme menilai, kebenaran objektif sangat tergantung sejauh mana pengetahuan, kebijakan dan keputusan bermanfaat nyata bagi individu-individu dan kelompok individu yang menginginkannya. Kebenaran merupakan representasi realitas yang subjektif, bukan kebenaran objektif yang didasarkan pada fakta-fakta umum.

* SKH Pos Kupang, 28/04/2016.



Narasi Bangsa yang Tercecer

Penalaran pragmatisme mengikuti gagasan Immanuel Kant (1724-1804) yang mengatakan realitas hanya pada dirinya (*das ding an sich*) dan tidak bisa diketahui. Seseorang hanya bisa mengetahui realitas melalui kacamata yang dipakainya, karenanya ada kecenderungan untuk menafikan realitas kebenaran yang objektif. Konsekuensinya, setiap individu memiliki otoritas dan otonomi yang besar dalam memahami setiap fenomena yang dia hadapi, termasuk mengkonstruksi kebenaran, pengetahuan, ide, keputusan dan kebijakan. Konsekuensi berikutnya adalah keterarahan untuk mereduksi dan mensimplifikasi realitas hanya pada dimensi praktikalitas, manfaat, dan keuntungan yang parsial dan subjektif. Realitas terkooptasi pada asas manfaat bagi kepentingan diri sendiri dan sekelompok orang yang sifatnya 'sesaat', 'sekarang' dan 'di sini'.

Dalam tataran praktis hidup manusia, pragmatisme sangat wajar dan beralasan. Bahkan, saat ini kehidupan (post) modern sangat diwarnai oleh gaya hidup pragmatis. Orang bekerja hari ini untuk makan hari ini, belajar untuk dapat ijazah, berpolitik untuk bisa mendapat kekuasaan, mendukung paket tertentu dalam Pilkada untuk mendapat saweran proyek, 'hari ini didukung, besok wajib mendukung', dll. Namun, bila dikritisi secara mendalam, pragmatisme telah menggilas aspek lain dari kebenaran yang sejati, seperti proses analisis yang mendalam dan komprehensif, keterlibatan komponen-komponen lain, dan mempertimbangkan efek gandanya (*multiplier effect*) terhadap kemaslahatan umum. Prinsip filosofisnya, parameter kebenaran dari suatu pengetahuan, kebijakan dan keputusan, tidak saja berhenti pada asas kegunaan dan manfaat semata, tetapi juga secara utuh dan holistik mempertimbangkan asas-asas seperti kebaikan bersama (*common good*), keadilan (*justice*), kewajaran (*fairness*), kedaulatan (*sovereignty*), keberlanjutan (*sustainability*), dan kemakmuran (*prosperity*), kebajikan (*righteousness*), sikap netral (*impartiality*)



dan ketulusan hati (probitiy). Dalam pragmatisme, asas-asas ini sangat dilecehkan sehingga kerap kali kaum pragmatisme sangat resisten terhadap diskusi mendalam tentang kebenaran yang sejati, objektif, substantif dan berpihak pada kepentingan umum.

Pilkada serentak 2016 (di NTT) sudah selesai dan akan berlangsung Pilgub 2018. Namun, dalam observasi saya, berbagai polarisasi pasca Pilkada tidak serta merta hilang lenyap begitu saja. Bahkan kecenderungan polarisasi itu tetap ada meskipun terlokalisasi dalam internal paket pemenang Pilkada. Selanjutnya, saya berasumsi bahwa menjelang Pilgub, polarisasi akan mengekskalasi kembali. Berdasarkan asumsi ini dan dengan mengikuti nalar pragmatisme politik, saya membuat dua kajian di bawah ini.

Pertama, fakta bahwa praktik politik primordial masih sangat mengental dalam perpolitikan daerah yang dilandasi politik balas budi (politik etis) dengan semangat 'siapa mendukung siapa'. Kontraproduksi dengan ideologi politik, logika politik pragmatisme mengatakan kemenangan paket dalam Pilkada adalah kemenangan tim sukses, konstituen, dan partai politik pendukung, bukan kemenangan masyarakat secara keseluruhan. Logika politik seperti ini secara laten terpolar pada perilaku-perilaku dan cara berpikir pragmatis yang mungkin termanifestasi dalam ruang gerak seperti kemudahan mendapat jatah proyek, mendapat jatah jabatan, kemudahan akses dengan lingkaran pemegang kekuasaan, kepastian dukungan basis pada peristiwa politik berikutnya, dll. Perilaku-perilaku tentu saja bisa berujung pada benturan kepentingan internal para tim sukses, partai politik pendukung dan konstituen. Untuk mengelola dan menyelesaikan kondisi dan situasi ini, kepala daerah harus membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit.

Hal ini memberi gambaran, idealisme politik para kepala daerah yang sudah secara bagus diterjemahkan dalam visi dan misi,



Narasi Bangsa yang Tercecer

terdekonstruksi dengan sendirinya. Perilaku pragmatis dengan mudah menghancurkan bangunan ideologi politik para kepala daerah. Lebih miris lagi, bila ada kepala daerah yang sudah sejak awal terjebak dalam nalar pragmatisme ini, maka akan sangat sulit untuk keluar dari wilayah perang berbagai kepentingan (the war zone of interests). Kepala daerah membutuhkan dua sampai tiga tahun untuk mengatasi bias pragmatisme ini. Lantas, bila waktu sisanya (mungkin) dipersiapkan untuk Pilkada periode berikutnya, lalu kapan kepala daerah memperhatikan kemaslahatan umum?

Kedua, keterjerembaban politik NTT dalam pusaran pragmatisme kembali tidak bisa terhindarkan menjelang Pilgub 2018. Menurut saya, Pilgub 2018 adalah ajang dan momentum yang paling tepat sekaligus sangat krusial dalam mengembalikan investasi politik yang sudah ditanam pada Pilkada 2016. Disebut 'paling tepat' karena bupati/walikota dapat dengan mudah memanfaatkan gerbong tim sukses dan konstituen yang masih militan dan emosional terkait Pilkada yang lalu. Sementara itu, disebut 'sangat krusial', karena pilgub itu sendiri sangat menentukan pergerakan politik kepala daerah pada masa yang akan datang. Secara siklus, kemenangan pilgub merupakan 'kemenangan politik' dari bupati/walikota yang mendukungnya. Sekali lagi logika politik primordial dengan spirit 'saya memberi supaya kamu memberi' (do ut des) tetap mengemuka. Bupati/Walikota terpaksa kembali mengorbankan ideologi politiknya untuk kepentingan kesuksesan Pilgub dari calon yang mendukungnya pada Pilkada. Menurut saya, waktu dan perhatian Bupati/Walikota bahkan semua sumber daya di masyarakat dan di pemerintah daerah akan diberdayakan (diperpedaya?) dan diarahkan secara total untuk kemenangan Pilgub.

Sementara itu, bila dikaji dari perspektif sosio-politik, dramaturgi politik di NTT telah memberangus masyarakat dalam kegaduhan horisontal. Masyarakat belum sepenuhnya mengalami



Elaborasi Filosofis, Pedagogik Kritis, Sosial, dan Politik

titik anti-klimaks yang terendah dan menjalin rekonsiliasi hubungan yang telah tercecer akibat beda pilihan pada Pilkada 2016, tiba-tiba mereka terpolar lagi dengan Pilgub 2018. Untuk beberapa tahun ke depan, masyarakat NTT tidak memiliki kesempatan untuk ‘tidur’ dan mengalami kehidupan sosial secara normal, dan berupaya mengembangkan hidupnya. Waktunya dihabiskan untuk mengikuti arus gonjang-ganjing politik dan mengelola psiko-sosialnya. Sebagai Bupati/Walikota, apakah punya cukup waktu dan tenaga untuk menyelesaikan polarisasi akibat nalar pragmatisme politik seperti ini, berikut dampak-dampaknya bagi masyarakat? Mungkinkah kondisi seperti ini menjadi salah satu penyebab mengapa ada beberapa kabupaten di NTT masuk dalam kategori termiskin di Indonesia?

Lastest Dummy



Narasi Bangsa yang Tercecer

Lastest Dummy



IJAZAH/GELAR PALSU DAN PENGKHIANATAN (TERHADAP) INTELEKTUAL*

Berita Skh Pos Kupang, edisi 7/01/2016,¹ tentang Sidang Kasus Gelar Palsu, menggelitik saya untuk mengkaji kembali isu ijazah/gelar palsu yang santer diberitakan pada bulan Mei 2015. Masih ingat dalam benak kita pemberitaan tentang hasil temuan Menristek-Dikti, M. Nasir terhadap 187 pemilik ijazah palsu. Mirisnya, para pemilik ijazah palsu tersebut diduga telah menduduki jabatan strategis di berbagai lembaga negara.

Salah satu yang memproduksi secara murah meriah ijazah-ijazah tersebut adalah University of Berkeley. Universitas ini telah menjual lebih dari 250 ijazah palsu dengan berbagai gelar akademik palsu. Sementara itu, pada 25/5/2015, Rektor University of Sumatera (Medan), ditangkap pihak kepolisian atas kasus pembuatan ijazah

* SKH Pos Kupang, 10/02/2016.



Narasi Bangsa yang Tercecer

palsu. Pak Rektor mengaku telah mengeluarkan 1.200 ijazah palsu dalam kurun 12 tahun dengan kisaran harga 10 juta sampai 40 juta rupiah (Batam Pos, 29/5/2015).

Fenomena ijazah/gelar palsu begitu menguat pada dekade terakhir. Tidak sedikit orang yang berusaha mendapatkan gelar secara instan untuk berbagai kepentingan, seperti: mendapatkan pekerjaan, promosi jabatan/kenaikan pangkat di instansi pemerintah/swasta, atau kenaikan/promosi pangkat akademik di Perguruan Tinggi. Selain itu, upaya mendapat gelar secara pragmatis ini didorong juga untuk meningkatkan status sosial dan popularitas dalam memperebutkan jabatan politik atau jabatan lainnya di masyarakat.

MUNCULNYA FENOMENA IJAZAH/GELAR PALSU

Lantas, mengapa fenomena ini menggejala? Paling tidak ada dua faktor penyebab munculnya; *Pertama*, mewabahnya mental *easy going* yang melanda masyarakat Indonesia dewasa ini sampai ke pelosok-pelosok. Mental cari gampang ini merupakan konsekuensi logis dari gaya hidup hedonistik dan konsumeristik. Orang yang hanya mau senang-senang dan cuma mau makan saja setiap hari, tanpa bersusah payah mendapatkannya, maka akan cenderung untuk melakukan upaya-upaya pragmatis dan instan. Mental ini sudah pasti menafikan proses, dan bahkan menggampangkan semua cara untuk mendapatkan sesuatu. Etos kerja, *fighting spirit*, *survive* dan *struggle* yang sebenarnya *ansich* melekat dalam karakter manusia Indonesia, meluntur seiring dengan mengakarnya mental ini.

Kedua, melemahnya kontrol masyarakat, dan sulitnya pemerintah dan aparat penegak hukum membuat perlakuan terhadap kasus ijazah/gelar palsu ini. Masyarakat kadang-kadang bersikap



permissif dan apatis terhadap masalah ini, karena mungkin merasa tidak berpengaruh langsung pada kehidupannya. Sementara itu, pemerintah dan aparat penegak hukum sulit membuat tindakan preventif ketika modus ‘jual-beli’ ijazah/gelar terjadi secara laten dalam dunia maya. Teknologi komunikasi (internet) telah menawarkan berbagai kemudahan dalam mencari lembaga-lembaga penyedia jasa atau pembuat ijazah. Seseorang dengan mudah meng-*googling* dengan mengetik *keyword*: ‘jasa pembuat ijazah’, dan muncullah berbagai lembaga yang menawarkan pilihan ijazah palsu sesuai kebutuhan konsumennya, dengan harga variatif.

Karenanya, sungguh tidak mengherankan bila kasus ijazah/gelar palsu dari tahun ke tahun selalu ada, bahkan semakin meningkat, tidak saja dalam soal kuantitas tetapi juga meningkat dalam hal modusnya. Namun yang disesalkan, kasus demi kasus selalu berujung pada menghilang atau tidak jelas status hukumnya. Hal ini tentu sangat memprihatinkan, selain merusak citra dunia pendidikan, tetapi lebih dari, secara masif dan sistematis, meruntuhkan moral dan mutu kehidupan bangsa Indonesia.

Bila bangsa Indonesia dipenuhi dengan oknum-oknum yang ‘berijazah/bergelar’, tanpa melalui proses-proses standar pendidikan dan pembinaan sesuai dengan aturan akademik, maka akan menjadi preseden buruk terhadap kualitas kehidupan masyarakat. Masyarakat yang dibangun oleh pribadi-pribadi yang tidak kompeten dari segi intelektual, profesional, personal dan sosial, cepat atau lambat akan mengerogoti kehidupannya secara destruktif. Kegaduhan dan kekacauan dalam masyarakat kerap disebabkan oleh orang-orang yang bergelar, tetapi tidak bisa mempertanggungjawabkan gelarnya dalam kehidupan personal maupun sosial. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dari gelar yang dimilikinya.



PENGKHIANATAN (TERHADAP) INTELEKTUAL

Ketika suatu perguruan tinggi memberikan ijazah/gelar kepada seseorang, sudah pasti berdasarkan pertimbangan kualitas dirinya. Ijazah/gelar adalah manifestasi dari kualitas kognitif, afektif, dan psikomotor yang telah dicapai seseorang setelah menjalankan proses pendidikan dan pembinaan yang memakan waktu, tenaga, dan biaya. Nah, bila seseorang begitu mudah mendapatkan ijazah/gelar, tanpa menjalankan proses pendidikan dan pembinaan sesuai dengan standar yang berlaku secara nasional, maka sebenarnya telah terjadi ‘pengkhianatan terhadap intelektual’.

Saya mengelaborasi istilah ‘pengkhianatan terhadap intelektual’ berdasarkan pemikiran filsuf Perancis Julien Benda (1867-1956) dalam karyanya *La Trahison des Clerces* (Pengkhianatan Kaum Intelektual). Menurutnya, mereka yang ‘berijazah/bergelar’ akademik tertentu, tetapi tidak mempresentasikan kualitas diri di tengah masyarakat sesuai dengan ijazah/gelar yang melekat dalam dirinya, maka orang tersebut adalah pengkhianat (terhadap) intelektual. Biasanya orang-orang seperti ini kerap melakukan ‘perselingkuhan’ dengan memanfaatkan ijazah/gelarnya untuk hibridaisasi (kawin silang) antara intelektualitas, politik, dan kekuasaan.

Intelektualitas dieksploitasi untuk kepentingan politik dan kekuasaan. Hal ini berakibat pada jual beli gelar akademik yang senantiasa dimanfaatkan untuk kepentingan meraup keuntungan, melanggengkan kekuasaan, dan mekanisme membenaran diri atau kelompok. Sementara itu, filsuf eksistensial Nietzsche (1844-1900) mengatakan, justru orang-orang yang bergelar akademik, memiliki nafsu yang besar untuk berkuasa (*will to power*). Dengan gelar akademik, mereka dengan mudah membuat rasionalisasi demi menjustifikasi dan melegitimasi kekuasaan yang dimilikinya.



Filsuf Italia Gramsci (1891-1937) dalam bukunya *The Prison of Note Books* (Catatan Di Balik Penjara) mengatakan, mereka yang mengeksploitasi intelektualitas secara palsu cenderung bermental intelektual mekanik. Mental intelektual mekanik ada pada pribadi oportunistis, yang menggunakan segala macam cara, taktik, dan strategi untuk melanggengkan posisi, jabatan dan kekuasaan pada lembaga negara atau masyarakat. Hal ini berlawanan dengan mental organik yang dimiliki kaum intelektual sejati. Kaum intelektual organik adalah mereka yang memiliki integritas kepribadian, kredibilitas, kapasitas dan kapabilitas intelektualnya yang tidak diragukan lagi. Mental intelektual organik tidak lahir dari cara instan-pragmatis, tetapi melalui proses pendidikan dan pembinaan yang intens, membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga yang banyak. Niscaya, merekalah yang menjadi tumpuan dan harapan, terutama dalam melawan dan memerangi berbagai bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara.



Narasi Bangsa yang Tercecer

Lastest Dummy



REDUPNYA RASIONALITAS BERBANGSA*

Sungguh sangat mencemaskan apabila isu-isu yang berbau suku, ras dan agama (SARA) sudah sangat laten mendeterminasi dan mendominasi alur kehidupan masyarakat Indonesia. Isu-isu ini merebak bias dan telah beredar melalui berbagai bentuk dan cara yang masif, *out of control*, kasar, brutal serta mengangkangi batasan moral-etis. Mengemukanya isu ini bahkan telah menggeser jauh isu-isu lain yang sebenarnya mendesak untuk dicermati dan dibahas, seperti: korupsi, transparansi, kenaikan harga sembako, kesenjangan sosial ekonomi, pelayanan publik, kinerja kaum eksekutif, yudikatif dan legislatif, keamanan negara, dan pelaksanaan demokrasi. Sebagian masyarakat begitu mudah tergiring, terprovokasi dan teragitasi oleh isu-isu ini sampai

* SKH Pos Kupang, 12/01/2017.



Narasi Bangsa yang Tercecer

gagal fokus pada kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhan vital kesehariannya. Sementara pada pihak pemerintah sebagian energinya terkuras untuk meredam potensi-potensi konflik yang bisa saja meletus selepas munculnya isu-isu berbau SARA tersebut. Pada sisi lain, seperti bangsa Indonesia mau dipreteli baju kebhinekaannya dan coba dikenakan dengan baju lain yang berlabel agama, tunggal, seragam, monokultur dan monolitik.

Saya menduga ada tiga hal yang dapat ditelisik sebagai pemicu potensial tentang mengemukanya isu SARA sebagai jajanan laris manis saat ini, yaitu: Pertama, isu ini muncul berkaitan dengan momentum politik Pilkada. Ada usaha dari kontestan tertentu untuk merebut simpati pemilih, meningkatkan popularitas dan elektabilitas dengan mengeksploitasi kelemahan kontestan lain. Salah satu kelemahan yang begitu mudah dijadikan komoditas politik adalah prediksi minoritas yang dimiliki oleh calon lain. Biasanya prediksi ini kerap merujuk pada dikotomi mayoritas dan minoritas yang kemudian diturunkan pada subdikotomi: jenis kelamin, suku, ras, agama dan wilayah. Begitu kuatnya sentimen dan dikotomi antara mayoritas dan minoritas menyebabkan isu SARA sangat laku, 'mengena' dan efektif, sehingga sulit untuk dinetralkan. Saya menilai, berbagai bentuk wacana, fatwa, diskusi dan pendidikan politik demokratis belum cukup signifikan untuk sekadar membuat isu ini mengalami antiklimaks atau hilang dari konstelasi demokrasi di Indonesia.

Kedua, bertolak dari situasi ini kita bisa secara gamblang menilai, ternyata bingkai pluralitas/multikulturalitas yang sudah lama dibangun oleh pendiri bangsa, mulai 'kandas' hanya oleh secul sentimen SARA. Muncul anomali kebangsaan, di mana pada satu pihak Indonesia dikenal sebagai bangsa yang berbhineka, tetapi pada pihak lain gerakan-gerakan monokulturisasi, monopolitisasi dan bahkan transnasionalisasi oleh golongan ideologis tertentu



semakin menguat eksistensinya. Gerakan-gerakan ini sepertinya semakin masif, sistematis, terstruktur, sporadik, dan ada kesan negara 'kalah' berhadapan dengannya. Bila nanti negara benar-benar kalah oleh gerakan-gerakan ini berarti semboyan kebhinnekaan akan perlahan-lahan runtuh dan kemudian hanya tinggal kenangan. Sungguh sayang, apabila karakter dan identitas 'kemajemukan yang mempersatukan' ini, justru pudar hanya dalam sekejap mata saja oleh kepentingan gerakan ideologi sektarian.

Ketiga, sepertinya rasionalitas kebangsaan sedang berada pada grafik tajam menuju titik nadir. Ketika bangsa lain begitu bersemangat memberdayakan segala potensi diri dan alam lingkungan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakatnya dan mungkin kesejahteraan masyarakat bangsa lain, atau ada bangsa yang sedang memikirkan kemungkinan kehidupan di planet lain; bangsa Indonesia masih harus berkutut dengan bisnis emosionalisme, primordialisme, irasionalisme dan dikotomisme. Mirisnya, di saat sedang berusaha mengejar ketertinggalan pembangunan dari negara lain, justru sebagian besar energi dan modal bangsa terkuras untuk mengurus hal-hal yang sifatnya *non*-substansial, elementer, dan parodial semata. Rupanya hembusan angin postmodern dan tren revolusi pengetahuan untuk bangsa Indonesia hanya merupakan klaim artifisial saja, sebab belum sepenuhnya dituruti dalam bentuk pola berpikir dan pola berperilaku. Sementara derajat pengetahuan yang paling tinggi sudah terekspresi jelas dalam peradaban kehidupan dan kebudayaan bangsa, di mana urusan-urusan emosional, primordial, irasional dan dikotomis tidak lagi mengganggu kehidupan masyarakatnya.

Bercermin pada bangsa-bangsa yang sudah maju derajat pengetahuannya, perkara monokulturalisme, emosionalisme, primordialisme, irasionalisme dan dikotomisme ini sudah diselesaikan pada setengah abad yang lalu. Mereka sudah dengan cerdas



Narasi Bangsa yang Tercecer

menilai bahwa kecenderungan-kecenderungan itu sudah tidak relevan dan kontributif, bahkan dipersepsikan sebagai penghambat dalam pembangunan negara bangsa. Padahal, seturut perspektif pembangunan negara bangsa, salah satu tonggak penting dalam membangun adalah rasionalitas dan kritisitas masyarakatnya, di mana mereka dengan segenap kemampuan akal budi dan kecerdasan sosial emosionalnya membantu pemerintah dalam merealisasikan program-program pembangunan. Kuatnya rasionalitas dan kritisitas pada masyarakat pembangun membuat mereka menanggalkan berbagai bentuk sentimen bernuansa kedaerahan, ras, suku dan agama, melepas diri dari cara berpikir parsial dan fragmentaris. Perbedaan dalam segala bentuknya sudah tidak menjadi halangan untuk menyatukan komitmen dan tanggung jawab dalam membangun bangsa yang sejahtera dan beradab.

Pada gradasi kepentingan inilah saya berani bersumpah bahwa rasionalitas masih menjadi sesuatu yang ideal untuk masyarakat bangsa pembangun seperti Indonesia sekarang ini. Tentu, saya tidak berpretensi untuk mengglorifikasi rasionalitas dan lantas menafikan komponen-komponen lain dalam membentuk peradaban masyarakat sehingga terjebak pada kecenderungan rasionalisme. Namun bila memahami dan menyikapi secara jernih konteks kekinian Indonesia, rasionalitas masih menjadi garansi utama dan *entry point* dalam usaha melepas masyarakat dari belenggu emosionalisme, primordialisme, irasionalisme dan dikotomisme yang dilansir sebagai menghambat kemajuan kehidupan berbangsa. Sebab, bila berpikir lebih progresif dan inklusif, Indonesia '*das sollen*' sudah menjadi bangsa yang jauh lebih maju dan beradab dari bangsa lain, karena segala macam kekayaan yang terkandung pada manusia, alam dan lingkungan budaya multikulturalnya. Namun semua itu sudah dan akan mengalami kendala dalam pengelolaan dan pengembangannya ketika rasionalitas belum



sepenuhnya merambah secara optimal pada berbagai matra kehidupan masyarakat. Prasyaratnya, bila Indonesia tetap ingin menjadi bangsa yang berharga dan bermartabat di mata dunia dan dalam dirinya sendiri, maka *conditio sine qua non* harus tetap menegakkan tonggak-tonggak rasionalitas melalui berbagai aktivitas, antara lain: persekolahan, pemberdayaan, pelatihan, kegiatan-kegiatan literatif, dan diskursus. Khusus dalam dunia pendidikan, aktivitas-aktivitas ini sedapat mungkin dimulai sejak dini dan berkelanjutan sampai pada tingkat pendidikan yang paling tinggi.

Menurut Habermas (Suseno, 2005), salah satu karakter dari masyarakat yang beradab adalah tingginya kandungan rasionalitas yang terderivasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi kognitif-teknis dan dimensi moral-komunikatif. Dimensi kognitif-teknis berkaitan dengan kemampuan warga bangsa dalam mencermati dan menyelesaikan berbagai masalah sehingga tidak terus menerus mengganggu kehidupannya. Masalah tersebut dipecahkan dengan mendiskusikan secara bersama, mencari alternatif jalan keluar, dan menyusun program-program praksis sebagai tindak lanjutnya. Yang menjadi istimewa dari dimensi kognitif ini, ketika berdiskusi segala bentuk prasangka, stereotip, eksklusivisme, dan intoleransi dikandangkan alias tidak mendapat tempatnya. Dalam asas kesetaraan dan persamaan hak, mereka betul-betul fokus pada penyelesaian masalah untuk kepentingan hidup yang lebih baik dengan mengandalkan kemampuan berpikir logis, analitis dan etis serta sedapat mungkin menghindari cara-cara kekerasan.

Sementara dimensi moral-komunikatif berhubungan dengan upaya-upaya mencapai kesepakatan atau konsensus dengan orang lain tentang banyak hal dalam berbangsa, dengan mengedepankan komunikasi yang dialogis dan emansipatoris. Komunikasi yang dialogis dan emansipatoris ini memungkinkan adanya saling memahami, mengerti, mendukung dan melindungi antara warga



Narasi Bangsa yang Tercecer

bangsa dari segala bentuk dominasi dan determinasi oleh kelompok/ golongan ideologis tertentu yang berusaha merongrong sendi-sendi kehidupan bangsanya (Bertens, 2002). Untuk menangkal dan melemahkan kekuatan-kekuatan ideologis yang mengancam kedamaian dan ketenangan berbangsa tersebut, tentu yang ditonjolkan bukan lagi kekuatan otot/fisik, tetapi kemampuan dan keterampilan logis, analitis, etis dan senantiasa mengedepankan komunikasi yang dialogis dan emansipatoris. Ayolah...saya kira belum terlalu terlambat untuk memelihara, meningkatkan dan menegakkan tonggak-tonggak rasionalitas demi mengembalikan martabat dan harga diri bangsa yang sudah mulai tercabik.

Lastest Dummy



MEREKONSTRUKSI *DRIVING* *FORCES* PEMBANGUNAN BANGSA*

R*ekonstruksionisme* merupakan aliran pendidikan yang dikembangkan oleh George Count dan Harold Rugg pada tahun 1930 di Amerika dan Daratan Eropa (Gandhi, 2013). Aliran ini memiliki tujuan yang sama dengan aliran perenialisme, yaitu mendidik dan memberdayakan masyarakat agar mampu mengelola dan mengatasi krisis kehidupan modern yang diakibatkan berbagai kecenderungan sekularisme, hedonisme, pragmatisme, dan rasisme dengan memanfaatkan potensi budaya dan nilai-nilai yang berkembang dalam dirinya. Menurut aliran ini kemampuan mengelola dan mengatasi krisis kehidupan dengan memberdayakan nilai-nilai budaya dan social yang ada dalam masyarakat, dengan mengedepankan kekuatan konsolidasi, kerja sama dan konsensus

* SKH Pos Kupang, 26/01/2017.



Narasi Bangsa yang Tercecer

antara berbagai elemen-elemen masyarakat. Dalam perspektif rekonstruksionisme, semua elemen diedukasi dan diadvokasi untuk berusaha meraih tujuan utama hidup dengan mengatur tata kehidupan manusia pada suatu tatanan yang baru dan lebih baik.

Sebagai aliran pendidikan yang cukup berpengaruh, rekonstruksionisme kemudian mengelaborasi pandangan ontologis, epistemologis dan aksiologis dalam pengembangan dan peruntukannya bagi masyarakat (Sumantri, 2011). Pandangan ontologis menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi memiliki potensi ketertujuan pada yang Universal, di mana keutamaan seperti kebenaran, kebaikan, keseimbangan dan keadilan ada padaNya. Untuk mencapai yang Universal tadi, tugas dan tanggung jawab manusia adalah berusaha mengejawantahkan keutamaan-keutamaan ini lebih dahulu dalam praksis keseharian. Bila keutamaan-keutamaan ini hilang atau tidak ditumbuhkembangkan maka dengan sendirinya potensi keterarahan menuju yang Universal mengalami kegagalan sehingga dapat memperburuk kehidupan manusia.

Pandangan epistemologis mengedepankan tentang intelektualitas manusia dalam memecahkan berbagai masalah kehidupannya dengan memadukan secara proporsional antara kerja indra (pengalaman) dan rasio (akal budi); antara kesimpulan induktif dan deduktif. Kehidupan manusia tidak hanya dikonstruksi oleh konsep-konsep teoretis belaka tetapi justru semakin mendapat penguatan maknanya lewat pengalaman-pengalaman keseharian antara manusia. Pandangan dan konsep tentang kehidupan semakin berarti ketika dialami secara nyata dalam keseharian hidup. Karenanya, permasalahan kehidupan manusia sebaiknya dipecahkan dengan mengedepankan rasionalitas dengan tanpa menafikan pengalaman-pengalaman kehidupan yang kaya akan makna dan nilai.



Sementara pandangan aksiologis menegaskan bahwa nilai sebagai kebaikan manusia sebagai manusia sangat dibutuhkan dalam setiap pola dan proses interaksi antara manusia dengan manusia dan manusia dengan alam semesta. Nilai inilah menjadi kekuatan penentu (*driving force*) dalam menggerakkan relasi tersebut agar tetap terjalin dengan baik, bermutu dan saling menguntungkan. Tujuan utama relasi manusia adalah keterarahan pada relasi teologis dengan yang disebut Universal. Manusia tidak bisa lepas dari keterarahan pada relasi teologis ini, karena itu dia harus selalu berada dalam proses mencari dan terus mencari. Dengan potensi kebaikan dan kebenaran yang ada dalam dirinya, manusia berusaha mencapai relasi teologis tersebut melalui hubungan yang baik dengan sesama dan alam semesta. Dengan memberdayakan pengetahuannya manusia berusaha merawat relasi horisontalnya agar dapat mendukung relasi vertikalnya dengan yang Universal. Pola-pola pendidikan, pemberdayaan, pembimbingan dan pengasuhan yang benar akan memungkinkan manusia menjaga secara seimbang relasi horisontal dan vertikalnya.

Dalam konteks kekinian bangsa Indonesia, rekonstruksi tata kehidupan dapat menjadi wacana alternative ketika secara faktual-empirik tanggung jawab untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan menjadi sangat berat akhir-akhir ini. Berbagai problem multidimensional kebangsaan telah menyasar kehidupan masyarakat yang berdampak pada disequilibrium, diskrepansi, dekadensi, disharmoni dan bahkan mengarah pada gejala desintegrasi. Saling berkorespondensinya satu persoalan dengan persoalan lain, serta berbagai cara masyarakat merespons dan menafsir persoalan-persoalan tersebut kadang turut menambah carut marutnya keadaan berbangsa. Rentetan dan deretan persoalan tersebut bukan tidak mungkin berimplikasi pada ketidakstabilan bangsa dan signifikan berdampak pada tercecernya program-program pembangunan



Narasi Bangsa yang Tercecer

yang seharusnya berjalan sesuai perencanaan. Agenda-agenda besar pemerintah untuk menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan masyarakat bangsa terhalang oleh beberapa kasus nasional berikut local, yang dalam penyelesaiannya menyita sekian energi, waktu dan biaya.

Sejauh ini kita perlu mengapresiasi Pemerintah yang sudah berupaya mengelola berbagai persoalan kebangsaan sehingga tidak terlalu menjadi ancaman serius. Menurut saya, kemampuan mengelola suasana kebangsaan ini tidak bisa terlepas dari usaha merekonstruksi beberapa kekuatan penentu yang turut menjadi tonggak dalam membangun bangsa. Adapun bentuk rekonstruksi tersebut, antara lain: Pertama, konsolidasi dan kerja sama dengan elemen masyarakat akademik-intelektual, politik, agama, adat, dan lembaga swadaya. Konsolidasi dan kerja sama dengan masyarakat akademik-intelektual tentunya berkaitan dengan informasi, perspektif, kajian-kajian ilmiah, kritis, dan konstruktif dalam mencari pemecahan masalah; dengan masyarakat politik berhubungan dengan dukungan terhadap kebijakan pembangunan yang pro kesejahteraan masyarakat, pemerataan dan berkeadilan social; dengan masyarakat agama berhubungan dengan komitmen kerukunan dan kedamaian inter/intra agama serta penguatan nilai kemanusiaan, sosial dan berketuhanan; dengan masyarakat adat berkaitan dengan menggali kearifan-kearifan lokal yang bisa mempererat persatuan dan kesatuan bangsa; dan dengan lembaga swadaya bertalian dengan isu-isu strategis, aktual dan kontekstual yang terjadi dalam masyarakat dan kajian tentang relevansi dan *link and match*-nya program dan kebijakan pemerintah. Konsolidasi dan kerjasama dengan para pihak ini merupakan salah satu kekuatan penentu yang seyogianya dirancang secara permanen dan berkelanjutan demi penyelesaian masalah yang integratif, komprehensif dan holistik.



Kedua, sejarah pengalaman bangsa adalah sejarah ‘keberagaman yang mempersatukan’ (diversity in unity) yang tergambar dalam lambang Pancasila. Sejarah pengalaman ini menjadi salah satu kekuatan penentu karena Pancasila mampu menyatukan kurang lebih 1.340 suku bangsa, 736 bahasa daerah, dan 6 agama. Karena itu, kebhinekaan ini harus selalu dirawat baik melalui konsep dan implementasi kurikulum pendidikan formal, informal dan nonformal pada setiap jenjangnya, juga melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila senantiasa direvitalisasi dan dikontenstualisasikan agar tetap menjadi tameng yang valid dan *adequat* ketika berhadapan dengan ancaman perpecahan dan keretakan. Revitalisasi dan kontekstualisasi ini mesti diikuti dengan pengafirmasian anasir-anasir plural/multikultural pada hampir setiap lini kehidupan masyarakat, demi menetralkan berbagai bentuk diskriminasi, ketidakadilan dan dikotomi sosial yang kerap menjadi ‘sumbu pendek’ keresahan berbangsa.

Ketiga, identitas dan karakter kebangsaan yang tetap mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong. Kekeluargaan dan gotong royong menjadi nilai-nilai utama (*core values*) pada masyarakat Indonesia, yang belum tentu dimiliki oleh bangsa lain. Nilai-nilai tersebut sudah sering menjadi garansi dan rujukan dalam memecahkan dan menyelesaikan berbagai permasalahan. Saya kira banyak konsep kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah dan program-program pemberdayaan di lembaga pemerintah dan *non*-pemerintah memposisikan nilai-nilai ini sebagai muatan inti untuk melandasi berbagai bentuk implementasinya. Bukan hanya itu, banyak pula organisasi massa dan partai politik yang meletakkan nilai kekeluargaan dan gotong royong sebagai *platform* dan semangat kerjanya. Karenanya, baik



Narasi Bangsa yang Tercecer

pemerintah maupun masyarakat harus tetap komit dan konsisten dalam mengeksplorasi dan mengkonservasi nilai-nilai ini sebagai sebuah kekuatan penentu untuk mendukung pembangunan bangsa.

Tekad merekonstruksi tiga kekuatan penentu ini mesti terus digalakan pada berbagai momentum kehidupan masyarakat. Rekonstruksi ini bertujuan untuk menyusun secara apik dan teratur lagi tatanan kehidupan berbangsa yang mungkin sudah terporak-poranda oleh berbagai desakan modernisme, sekularisme, radikalisme/fundamentalisme, sektarianisme, trans-nasionalisme dan pragmatisme. Pada galibnya, upaya merekonstruksi beberapa kekuatan penentu di atas didasarkan pada urgensi untuk mengatasi krisis, pergolakan, konflik dan berusaha mencapai konsensus dan kerja sama demi membangun kehidupan bangsa yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik tersebut dimengerti dan dipahami sebagai hasil proses transformasi dan akumulasi dari nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebaikan, kebenaran, keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan umum.



MENYOAL (SENJAKALA) PENDIDIKAN KRITIS*

Peradaban bangsa sangat ditentukan oleh kemajuan pendidikan! Diktum ini menjadi pegangan penting dalam mencermati berbagai peristiwa bersayap radikalisme dan fundamentalisme keagamaan, yang akhir-akhir ini mengusik suasana kebatinan bangsa dan negara. Peristiwa-peristiwa itu memberi gambaran betapa peradaban bangsa bisa jadi sedang beranjak ke titik nadir. Mengapa sampai terjadi 'terjun bebasnya' peradaban bangsa? Banyak analisa dan kajian yang bisa ditilik, baik dari sudut pandang politik, ekonomi, sosial, budaya dan maupun pendidikan. Bila dilihat dari perspektif pendidikan sebagai aktivitas manusia untuk memanusiakan manusia, maka berbagai bentuk kesesatan berpikir, berperilaku dan bertindak memberi sinyal bahwa peran pendidikan belum cukup

* SKH Pos Kupang, 19/12/2016.



Narasi Bangsa yang Tercecer

optimal (bila tidak mau dikatakan gagal). Pendidikan kehilangan taring dan mungkin sedang mengalami senjakala atau pasang surut dalam membentuk dan membangun karakter manusia Indonesia yang seharusnya cerdas dan beradab.

Saya boleh dinilai terlalu naif dan dangkal bila menyimpulkan bahwa salah satu penyebab pendidikan mengalami senjakala adalah belum cukup seriusnya penerapan gagasan dan praksis pendidikan kritis dalam konstruksi kekinian pendidikan kita. Menurut saya hal ini bisa disebabkan: (1) Pendidikan masih dilihat sebagai hal yang terlepas dari realitas sosial, budaya, ekonomi, politik dan perkembangan IPTEKS, serta berbagai permasalahannya. (2) Pemujaaan yang tinggi pada kecerdasan individual dan menafikan kecerdasan sosial. (3) Capaian hasil pendidikan (pembelajaran) yang lebih berurusan dengan kemampuan kognitif, sementara aspek rasa dan tindakan dalam membentuk karakter manusia cukup ditelantarkan. (4) Gagasan pendidikan dialogis, humanis, demokratis, emansipatori dan partisipatif aktif peserta didik masih dalam tataran ideal-konseptual dan *lipservice*; belum masuk pada tataran praksis. (5) Konsep berpikir kritis belum dianggap urgen dan relevan untuk dielaborasi dalam konten materi dan pendekatan pembelajaran dari sejak usia belajar dini sampai usia belajar perguruan tinggi.

Saya menduga, bila beberapa hal di atas masih kental dalam pola pikir dan pola laku pendidikan, maka kita akan tetap dihantui oleh stagnannya kualitas peserta didik. Sementara, negara-negara yang sudah maju peradabannya telah lama mengintegrasikan pendidikan kritis dalam kerangka konsep dan praksis pendidikan kontemporer. Pengintegrasian ini berangkat dari asumsi bahwa selain telah mendorong peningkatan kualitas pembelajaran, pendidikan kritis juga memiliki urgensi dan relevansinya bagi kepentingan percepatan pembangunan. Masyarakat yang memiliki



kemampuan berpikir kritis akan menjadi kekuatan dasar dan penentu dalam mendukung pembangunan bangsanya. Dengan kemampuan kritis, mereka bertanggung jawab dan bekerjasama dalam membereskan lebih awal berbagai masalah sosial seperti eksklusivisme, ekstrimisme, intoleransi, radikalisme, diskriminasi, disparitas, diskrepansi, dll. Ketika sudah selesai dengan masalah-masalah ini, masyarakat bersama pemerintah kemudian dapat membangun bangsanya dengan lenggang, lancar dan berkelanjutan.

Urgensi dan relevansi pendidikan kritis ini selaras dengan tuntutan pendidikan kontemporer tentang profil peserta didik era abad 21 yang harus memiliki empat keterampilan, yakni: komunikasi, bekerjasama, berpikir kritis dan kreativitas. Keterampilan berkomunikasi berkaitan dengan membangun relasi interpersonal dan intrapersonal, memahami dan mempraktikkan cara-cara berkomunikasi yang baik, benar, santun dan beradab. Sementara, keterampilan bekerja sama berhubungan erat dengan membangun sistem kerja partisipatif, dialogis, demokratis dan inklusif serta berkeadilan sosial. Selanjutnya, keterampilan berpikir kritis berkaitan dengan kemampuan memahami secara cermat realitas perkembangan dan perubahan sosial dalam segala dimensinya, termasuk mengkritisi berbagai penyimpangan dan ketimpangan yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan dari dalam maupun dari luar. Kemampuan berpikir kritis juga berkaitan dengan membedakan secara jelas antara kebaikan dan keburukan/kejahatan, kebenaran dan kesalahan, keadilan dan diskriminasi, dll. Sedangkan keterampilan berkreasi berkuat dengan penciptaan inovasi-inovasi baru dalam teknologi, informasi, ekonomi, sosial dan budaya yang dapat memberi kontribusi signifikan bagi pengembangan diri dan masyarakat.

Pendidikan kontemporer sebenarnya telah memberi ruang dan tempat bagi gagasan dan praksis pendidikan kritis



Narasi Bangsa yang Tercecer

ini; bahkan sudah diposisikan sebagai fasilitas untuk kritik sosial dan pengembangan ruang publik demokratis, di mana peserta didik dapat memberdayakan diri, membuka wawasan berpikir, berdialog dan bersosialisasi dengan sesama dan dunia. Peserta didik juga diberi kesempatan untuk mengungkapkan rasa ingin tahu yang kuat dalam memahami realitas kekinian dunianya dengan menganalisa, merefleksi dan bertindak nyata dalam mengatasi problematika hidup. Melalui cara berpikir kritisnya, peserta didik kemudian dapat menjelaskan fenomena-fenomena secara mendalam dan jelas, yang mungkin tidak dapat diungkap melalui asumsi-asumsi atau pandangan umum saja. Karenanya, praksis pembelajaran dalam pendidikan kritis berupaya semaksimal mungkin menumbuhkan dalam diri peserta didik kemampuan untuk memahami, mengkritisi, memproduksi, dan menggunakan ilmu pengetahuan sebagai wahana dalam merangkai hidupnya. Peserta didik dilatih untuk 'berpikir bagaimana berpikir' melalui kegiatan berdebat, berargumentasi, dan mengapresiasi pendapat orang lain. Freire (1921-1997) mengatakan bahwa kemampuan 'berpikir bagaimana berpikir' dapat dikembangkan secara humanis melalui pembelajaran dialogis, dengan mengarahkan peserta didik untuk mengenal diri dan lingkungan serta mengatasi berbagai persoalan yang melingkupi hidupnya.

Dalam konteks pendidikan kritis di era kontemporer ini, Habermas (Morrison, 1996) melihat pentingnya pengembangan pembelajaran emansipatoris yang melibatkan partisipasi aktif dan kritis peserta didik melalui gagasan-gagasan seperti: meningkatkan pemberdayaan peserta didik; menghindari kurikulum instrumentalistik; mendorong kesetaraan; mengembangkan otonomi; proses belajar kolaboratif; mengembangkan moral, etika dan estetika; mengembangkan fleksibilitas pemecahan masalah; dan memahami konteks lingkungan kritis. Karenanya



dalam pembelajaran emansipatorinya, perlu menitikberatkan prinsip: kegiatan pembelajaran yang kooperatif dan kolaboratif; kegiatan berbasis diskusi; belajar mandiri melalui pengalaman yang fleksibel; belajar melalui diskusi yang dialektis; proses belajar melalui lingkungan; belajar memecahkan masalah; memberi ruang peserta didik untuk berpendapat; guru hadir dan bertindak sebagai intelektual yang transformatif.

Jack Zevin (2011) dalam *Social Studies for 21 Century*, meyakini bahwa pendidikan kritis bisa terarah dalam praksisnya bila merujuk pada tiga tujuan pendidikan, yakni: didaktik, afektif dan reflektif. Tujuan didaktik berkaitan dengan pencapaian dan penguasaan sejumlah pengetahuan, pembentukan sikap dan pemberdayaan berbagai keterampilan. Tujuan afektif berkaitan dengan pemberdayaan kemampuan peserta didik untuk keluar dari egoisme dan eksklusivisme pengetahuannya, kemudian berani berpikir di luar kebiasaan (*out of the box*), tangkas dalam mengambil keputusan terkait dengan berbagai isu kekinian, strategis dan kontroversial, serta menentukan sikap moral dan etis yang cerdas; mencermati berbagai ketimpangan yang diakibatkan oleh kebijakan politik, sosial dan ekonomi. Sedangkan, tujuan reflektif berkaitan dengan penguasaan cara berpikir kritis, analitis, sintesis, analogis, dan hipotetis berdasarkan data dan fakta dalam menyelidik berbagai perubahan dan dampaknya.

Demi terbangunnya peradaban bangsa, berpikir kritis menjadi sebuah kebutuhan dan keharusan yang dapat dilakukan melalui pembiasaan (*habitulasi*) dalam diri peserta didik, baik melalui pendidikan maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Habitulasi ini menjadi sangat mendesak, sebab selain berpikir kritis merupakan salah satu model aktivitas kognitif yang menuntut keterampilan yang tinggi dalam mengembangkan dan menerapkannya, tetapi



Narasi Bangsa yang Tercecer

juga sangat penting dalam membantu mencerdaskan masyarakat bangsa. Dalam perkembangan bangsa di dunia, kegiatan berpikir kritis ini sudah menjadi salah satu tumpuan dalam mengembangkan karakter keadaban masyarakatnya. Hal didasarkan pada pemahaman bahwa dengan potensi intelektualnya, masyarakat dapat berpikir, mencermati dan menyelesaikan persoalan kehidupannya, serta membangun kehidupan yang rukun, toleran, imparial, dan multikultur. Segala model kesesatan dalam berpikir, berperilaku, bertindak, yang mendestruksi sendi-sendi kehidupan bangsa dapat direduksi seawal mungkin melalui pemberdayaan dan pembiasaan berpikir kritis, sehingga tidak lagi menjadi penghambat dan pembangunan bangsa pada hari-hari mendatang.

Lastest Dummy



INTEGRASI NASIONAL: TOLAK FATALISME, PERKUAT ETIKA KEBANGSAAN

(Catatan untuk Berbagai Kerusuhan Bernuansa SARA)*

Fatalisme adalah cara pandang seorang atau sekelompok orang untuk menerima apa saja yang sudah terberi dan mengamini saja realitas kehidupannya dengan pasrah pasif, linear dan seragam. Secara laten maupun manifest, fatalisme sangat lekat dengan kehidupan masyarakat arkhais, tradisional, konvensional, primordialistik, dan irrasional. Karakter-karakter ini tereksplisitasi dalam pola pikir, pola laku dan polanya. Mereka menganggap apa yang sudah menjadi warisan budaya, etos, keadaan, kebiasaan, tradisi, dan dogma, 'meski buruk sekalipun', adalah sesuatu yang sudah baik, benar, legitim tidak bisa diperbaiki lagi. Segala hal yang berbau menggugat dan upaya keluar dari 'apa yang sudah terberi' tersebut dianggap sangat mustahil dan kesia-siaan belaka.

* SKH Pos Kupang, 03/08/2016.



Narasi Bangsa yang Tercecer

Dari perspektif mazhab fatalisme yang ekstrem, berbagai upaya untuk menyimpang dari linearitas dan keseragaman kehidupan dicurigai sebagai bentuk ‘kudeta’ untuk mengganggu stabilitas, keamanan dan kenyamanan. Dalam tataran filosofis, fatalisme sangat dekat dengan aliran determinisme yang melihat takdir sebagai sesuatu yang tak terhindarkan dalam kehidupan manusia. Manusia hanya bisa menerima saja apa yang sudah dianugerahi, meskipun ketika ditelusuri dengan akal sehat, apa yang sudah ditakdirkan itu tidak cukup membangun kehidupannya secara lebih baik dan sejahtera.

Masyarakat fatalis sangat alergik dan defensif terhadap hal yang berbau perbedaan, multikultur, rasional, kritis, dialektik, kreatif, inovatif, kebaruan dan berpikir *out of box*. Mereka cenderung resisten terhadap keanekaragaman, perubahan, perbaikan dan kritik. Menurut mereka, perubahan, perbedaan atau perbaikan sebaik apapun dianggap sebagai mimpi yang mengerikan bagi kehidupannya; sebab akan merusak sistem dan kenyamanan yang sudah berlaku lama. Bahkan secara argumentatif mereka membuat dalil empirik bahwa tidak sedikit masyarakat yang hancur masa depannya, justru karena cepat tergoda dengan tawaran perbedaan dan perubahan dan menganggap perubahan sebagai dewa penolong. Sejarah perang antara bangsa, konflik bernuansa SARA, degradasi moral, lunturnya nasionalisme, munculnya ambuigitas, anomali, *chaos*, desintegrasi, separatisme dan rasialisme, yang berdampak pada terhambatnya pembangunan dan pengembangan bangsa, sudah sangat faktis menggambarkan tentang dampak buruk dari perubahan. Bisa jadi, dugaan kaum fatalis dan determinis ini selaras dengan asumsi sisi buruk perubahan dan perbedaan yang pernah dikemukakan antara lain oleh Fukuyama dan Huntington tentang benturan peradaban (*crush of civilization*) atau masyarakat yang tidak beridentitas atau tanpa nilai (*anomie*) menurut Emile Durkheim.



Dalam konteks kekinian Indonesia, bentuk krisis multidimensional di bidang politik, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan hukum, seolah-olah membenarkan dugaan kaum fatalis ini. Gejala dan fakta melunturkan nilai kesatuan dan keakraban, nilai-nilai agama, budaya dan ideologi serta pembangunan material dan spiritual bangsa tersendat, bisa jadi mengafirmasi asumsi kaum fatalis ini. Menurut saya, bila dugaan kaum fatalis ini benar, maka ada beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab terjadinya situasi ini, antara lain: (1) penghayatan dan pengalaman kehidupan multikultur yang melemah, munculnya pemahaman ajaran agama yang keliru, radikal dan fundamentalistik, serta tidak harmonisnya pola interaksi antara umat beragama; (2) kebijakan pembangunan bangsa yang tidak adil dan merata dan mengabaikan kepentingan daerah sehingga menimbulkan fanatisme kedaerahan; (3) kurang berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebhinekaan dan kemajemukan dalam kehidupan berbangsa, (4) terjadinya ketidakadilan ekonomi dalam lingkup luas dan dalam kurun waktu yang panjang melewati ambang batas kesabaran masyarakat secara sosial yang berasal dari kebijakan publik dan munculnya perilaku ekonomi yang bertentangan moralitas dan etika, (5) kurangnya keteladanan dalam sikap dan perilaku sebagian pemimpin dan tokoh bangsa, (6) tidak berjalannya penegakan hukum secara optimal, dan lemahnya kontrol sosial untuk mengendalikan perilaku yang menyimpang dari etika yang secara alamiah masih hidup di tengah-tengah masyarakat, (7) adanya keterbatasan kemampuan budaya lokal, daerah, dan nasional dalam merespons pengaruh negatif dari budaya luar, dan (8) meningkatnya prostitusi, media pornografi, perjudian serta pemakaian, peredaran dan penyelundupan obat-obat terlarang.



Narasi Bangsa yang Tercecer

Perubahan dan perbedaan menjadi sebuah keniscayaan dalam diri bangsa Indonesia. Perubahan dan perbedaan dalam berbagai penampakannya selain memberikan berbagai kemudahan, tetapi juga memunculkan berbagai persoalan yang sulit dan rumit. Untuk itu, bangsa Indonesia sangat membutuhkan sumber daya yang berkualitas, dan memiliki ketahanan diri, daya saing yang andal dan kesanggupan untuk hidup dalam suasana multikultur. Saat ini, Bangsa Indonesia memerlukan individu yang segi perilaku pengetahuan, sikap maupun keterampilan, mampu melahirkan banyak gagasan atau alternatif pemecahan terhadap masalah akibat perubahan dan perbedaan yang dihadapinya. Selain itu, ia juga dapat menentukan dan menilai secara kritis tentang segala sesuatu yang melingkupi diri dan lingkungannya, sehingga tidak terjerembab dan lantas menjadi korban berbagai model perubahan dan perbedaan.

Dari perspektif integrasi nasional, kita wajib menolak secara kritis pandangan kaum fatalis yang terlalu aprioristik, *predijuce* dan *fobia* terhadap perubahan dan perbedaan serta dampaknya. Selain mengkritisi, kita perlu memberi pengetahuan dan pencerahan kepada kaum fatalis tentang pentingnya perubahan dan perbedaan dan manfaatnya bagi kehidupan yang lebih baik. Mereka perlu diinformasikan bahwa ada banyak masyarakat suatu bangsa berkembang justru karena mereka begitu terbuka pada perubahan dan perbedaan, sambil tetap intensif memberi penguatan pada karakter manusianya sehingga mereka tetap rasional, kritis, selektif dan konstruktif dalam menerima perubahan. Hal penting yang perlu ditekankan adalah elaborasi yang proporsional antara aksesibilitas pada perubahan dan perbedaan, dibarengi dengan penguatan etika dan karakter kebangsaan melalui kegiatan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial ekonomi politik dan budaya. Elaborasi yang seimbang ini menjadi imperative agar perubahan tidak mencelakakan dan menimbulkan benturan peradaban.



Untuk kepentingan bangsa Indonesia, upaya membawa masyarakat bangsa untuk keluar dari kerangkeng fatalisme bukan pekerjaan mudah. Pemerintah dan masyarakat sedapat mungkin membangun komitmen dan tanggung jawab untuk keluar dari pengaruh fatalism, baik dalam tataran konsep maupun praksis. Salah satu yang bisa ditawarkan adalah dengan menentukan arah kebijakan pembangunan etika kehidupan berbangsa dengan memperhatikan beberapa hal berikut ini: (1) Menginternalisasi sejak dini tentang pentingnya menghargai nilai-nilai perubahan dan perbedaan dalam konteks bangsa Indonesia yang multikultur; (2) Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara melalui pendidikan formal, informal dan nonformal dan pemberian contoh keteladanan oleh para pemimpin Negara, pemimpin bangsa, dan pemimpin masyarakat; (3) Mengarahkan orientasi pendidikan yang bersifat terpadu dengan menekankan ajaran etika yang bersumber dari ajaran agama dan budaya luhur bangsa serta pendidikan watak dan budi pekerti yang menekankan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kematangan emosional dan spiritual serta amal kebajikan; (4) Mengupayakan agar setiap program pembangunan dan keseluruhan aktivitas kehidupan berbangsa dijiwai oleh nilai-nilai etika dan akhlak mulia, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi.



Narasi Bangsa yang Tercecer

Lastest Dummy



KRITIK FENOMENOLOGI TERHADAP KARAKTER POLITIK ARTIFISIAL*

Fenomenolog kritis, Edmund Husserl (1859-1938) pernah membahas tentang prinsip intensionalitas di mana manusia selalu terarah pada sesuatu yang lain selain dirinya. Untuk mengarahkan diri pada 'sesuatu yang lain' secara baik, seseorang perlu melakukan reduksi fenomenologis, yakni kerelaan untuk 'kembali kepada sesuatu itu sendiri' (back to the things themselves) dan biarkan 'sesuatu' itu berbicara apa adanya. Berikutnya, prosedur 'epoche' yakni menanggalkan semua asumsi tentang 'sesuatu' itu untuk memunculkan esensinya. Setelah menangkap esensinya, seseorang membuat abstraksi transendental untuk memaknai secara utuh hakikat dari 'sesuatu' itu sebagai realitas yang objektif. Realitas objektif inilah yang menjadi basis utama dalam membentuk

* SKH Pos Kupang, 19/08/2016.



Narasi Bangsa yang Tercecer

kesadaran manusia. Proses fenomenologi kritis seperti ini mengajak setiap orang untuk tidak berhenti pada asumsi-asumsi, pengertian dan keputusan artifisial, tetapi membentuk kesadaran yang utuh, mendalam dan nyata tentang realitas kehidupan.

Selanjutnya fenomenolog ontologi, Martin Heidegger (1889-1976) mengedepankan konsep *Das Sein* tentang hakikat manusia sebagai yang terlahir 'ada dalam dunia', 'ada bersama dunia' dan 'ada di sana' (Bakker, 2000). Manusia dan pikirannya tidak terlepas dari alam dunia dan senantiasa berpikir dari dan untuk alam dunia. Dalam 'Ada dan Waktu' (Being and Time), manusia selalu berada dalam proses 'mengada' secara berkelanjutan (continuum) dari sejak masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Supaya manusia senantiasa menyadari dirinya dalam ruang dan waktu, maka perlu ada proses refleksi dan afirmasi diri dalam mencermati hubungannya dengan sesama dan alam. Hal ini penting karena ada fenomena, di mana modernitas dan politik demokrasi kurang menghargai alam dan manusia dengan 'menjajahnya' hanya untuk kepentingan sesaat. Manusia modern dengan otoritas pengetahuannya telah membuat 'kelupaan akan yang Ada' (forgetfulness of Being) dan menyebabkan terputusnya modus 'mengada' (modes of being uncontinued), serta terlepasnya keterikatan (uninvolvement) manusia dengan manusia, manusia dengan alam. Secara faktis, fenomena ini telah menyebabkan distansi, diskrepansi dan disparitas, yang berdampak pada kerusakan, kemiskinan, kemelaratan dan konflik.

Konstelasi politik mondial, nasional lokal telah memberi persepsi bahwa politik sebagai aktivitas yang bertujuan untuk menjejahterakan dunia dan manusianya sangat penting dan bermanfaat. Hampir semua keputusan strategis yang terpaut dengan hajat hidup orang banyak, sebagian besar sangat ditentukan oleh



keputusan politik. Dalam kekinian politik Indonesia, determinasi keputusan politik sangat signifikan untuk tingkat pusat sampai daerah, baik pada konteks pembuatan perangkat peraturan perundang-undangan dan turunannya, pembentukan berbagai keputusan/kebijakan, maupun penyusunan berbagai program berikut penganggarnya. Bermutu, bermanfaat dan berdaya gunanya esensi dari semua perangkat perundang-undangan, keputusan/kebijakan dan program serta penganggaran sangat bergantung pada kualitas keputusan politiknya, berikut niat baik dari mereka yang terlibat di dalamnya.

Kecelakaan diduga bisa saja terjadi, bila dalam proses pembuatan, pembentukan dan penyusunannya, baik pemerintah pusat/daerah, partai politik dan para politikus terjebak pada ego sektoral. Indikasi prematur, parsial, *overlap*, dan mubazirnya beberapa perangkat perundang-undangan, keputusan/kebijakan, program dan penganggaran, menandakan bahwa beberapa keputusan politik masih sangat artifisial dan tidak esensial serta sarat dengan konflik kepentingan. Bisa juga alur dalam membuatnya telah menafikan studi komprehensif tentang kebutuhan, kemendesakan, asas kebermanfaatan, kepatutan, kelayakan, keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan alam sosial. Konflik horisontal, kerusakan alam, kemiskinan dan kemelaratan merupakan akibat logis dari keputusan-keputusan politik yang tidak populis dan esensial. Kecelakaan ini bisa berlanjut ketika para politikus berjuang atas nama rakyat, tetapi tujuan adalah kepentingan diri dan kelompok (partai); atau di depan publik menunjukkan konsistensi perjuangannya, tetapi di belakang ruang sidang terlibat dalam kompromi, kamufase, aktivitas politik 'dagang sapi' dan tukar guling/barter kepentingan.

Menurut saya, ada beberapa hal yang menyebabkan bangsa terjerembab dalam karakter politik artifisial seperti ini. Pertama, kemampuan sebagian politikus untuk memahami realitas objektif



Narasi Bangsa yang Tercecer

secara utuh dan menyeluruh, belum cukup diberdayakan. Apa yang menjadi substansi kebutuhan dan harapan masyarakat tidak teridentifikasi dengan baik karena mereka belum memiliki keberanian untuk ‘masuk’ dalam realitas yang utuh tentang kehidupan nyata masyarakat. Keberanian menjadi tumpul, selain karena tidak adanya kekuatan dan kesadaran dalam diri, juga karena terkooptasi oleh kepentingan politik kepartaian. Alhasil, perjuangan dan keputusan politik hanya berbasis asumsi saja dan sifatnya temporal, insidental maupun aksidental. Kedua, moralitas dan intelektualitas politik belum cukup mendukung perjuangan dan keputusan politik yang berdampak signifikan bagi kemaslahatan umum. Sebagian politikus memberdayakan kemampuan moral dan intelektualnya untuk sekadar membuat rasionalisasi terhadap keputusan politik yang awalnya berpihak pada kepentingan umum, tetapi di balik itu, terimplisit reduksi kepentingan sektarian. Bahkan tidak jarang, keputusan politik sangat tidak menyentuh substansi, karena hanya merujuk pada pendapat pihak yang memiliki otoritas (appeal to authority), dan hanya berdasarkan *reason*, intuisi dan pengetahuan umum belaka. Hal ini berimplikasi pada rendahnya efisiensi, efektivitas dan bahkan akuntabilitas ketika mengimplementasikan keputusan tersebut pada masyarakat.

Dalam terang pemikiran Husserl dan Heidegger, politik adalah fenomena di mana terjadi aktivitas pengalaman, perjumpaan dan sekaligus pertentangan seseorang dengan sesama dan dunianya. Berbagai aktivitas ini merupakan bentuk substansial dari penghayatan akan keberadaan manusia sebagai makhluk sosial dan “yang ada di dalam dunia” (Being in the world). Politik sebagai fenomena juga dimaknai sebagai bentuk pengungkapan cara berada manusia yang selalu mengalir di antara keniscayaan dan kebebasan, bertahan di antara kesia-siaan dan kebermaknaan, bergumul di tapal batas antara tatanan (order) dan tanpa tatanan (chaos) (Miskawi,



2012). Mereka yang terlibat dalam politik wajib hukumnya untuk memahami apa yang menjadi keharusan dan kebebasan dalam berjuang, kerelaannya untuk berkorban, dan keberaniannya untuk membongkar tatanan yang membelenggu dunia dan sesamanya. Politik membentuk kepribadian seseorang untuk tidak berhenti pada asumsi dan artifisialitas saja, tetapi berani masuk pada inti terdalam dari hakikat diri sesama, dan mampu membaca esensi kebutuhan, kemendesakan, dan harapan masyarakat.

Politik mengafirmasi karakter manusia yang tetap mempertahankan kesejatiannya di tengah segala tawaran kepalsuan dunia dan kepentingan sesaat. Ia senantiasa berdiri kokoh ketika berpapar dengan ekstremitas dan kontingensi dunia, dan terampil mengurai perkara rasionalitas tentang yang benar dan yang salah dan perkara moralitas tentang yang baik dan yang buruk. Ia berani merefleksi tentang kerapuhan dan kesementaraan dirinya, keterbatasan intelektualitas dan moralitasnya, tetapi tetap berupaya memberdayakan diri sesuai dengan kapasitas/potensi dirinya. Politik membuat seseorang agar matang, andal dan beradab dalam memposisikan dirinya di tengah dunia dan berjuang untuk kebaikan umum. Pada akhirnya, politik merupakan fenomena tentang pembuktian kualitas dan integritas diri, yang akan divalidasi lewat konsistensi dan koherensi antara kata (*logon*) dan perbuatan (*ergon*). Konsistensi dan koherensi antara kata dan perbuatan tidak saja menggambarkan kualitas karakter manusia, melainkan juga merupakan modalitas dalam mengaktivasi dan melegitimasi seluruh mobilitas politik.



Narasi Bangsa yang Tercecer

Lastest Dummy



NATIONAL SELF DETERMINATION 'DAN LITERASI POLITIK*

Mengentalnya kecenderungan isu SARA, munculnya ujaran kebencian, kampanye hitam, gerakan massa sektarian dan politik uang dalam proses Pilkada cukup memberi kesimpulan bahwa literasi politik di Indonesia mengalami stagnasi, bahkan mungkin mengalami degradasi. Pemerintah sudah berusaha menangkal kecenderungan ini dengan UU ITE No. 11/2008 dan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian, tetapi tampaknya belum cukup kuat untuk mengontrol dan mengawal ekspresi-ekspresi publik yang reaktif, eksplosif dan negatif. Sistem perundangan-undangan dan segala bentuk turunannya tentu baru dapat berjalan efektif, efisien serta bermanfaat bila didukung oleh kesadaran politik yang matang

* SKH Pos Kupang, 03/11/2016.



Narasi Bangsa yang Tercecer

dan kritis dalam diri masyarakat. Bila kesadaran politik masyarakat sudah matang dan kritis, instrumen-instrumen legal formal ini tidak hanya menyentuh aspek pencegahan, pengontrolan dan penyelesaian, namun bisa juga secara intensif menyentuh aspek edukatif dan membangun kesadaran baru. Pada negara-negara yang sudah maju politik demokrasinya, instrumen-instrumen legal formal bertugas hanya untuk mengawal jalannya prosesi politik. Masyarakat sendirilah yang secara bertanggung jawab, bebas dan otonom mengambil bagian dalam berbagai peristiwa politik. Mereka dengan sadar menjadikan peristiwa politik sebagai momentum untuk membuktikan komitmen dalam memajukan negara bangsa (nation state).

Kesadaran politik yang tinggi ini juga tercermin dari bebasnya masyarakat dari sekat-sekat primordial suku, ras dan agama. Tingkat kesadaran dan rasionalitas politik yang tinggi membuat masyarakat tidak cepat terpengaruh oleh ujaran kebencian, kampanye hitam dan politik uang. Masyarakat telah berangkat dari kesadaran historis yang memberi pelajaran bahwa sekat-sekat primordial dalam segala bentuk dan manifestasinya telah mencelakakan demokrasi dan telah terbukti meruntuhkan tatanan kehidupan serta membuat mereka tidak mandiri sebagai warga bangsa. Dalam catatan sejarah politik demokrasi, negara-negara yang masih kuat dan kental isu-isu primordialnya telah mengalami penurunan kualitas demokrasi, yang berdampak signifikan pada perlambatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurunnya kualitas demokrasi ini berpengaruh pula secara simultan pada rendahnya kemampuan penentuan diri bangsa (National Self Determination). Mudah-mudahan masyarakat dikendalikan oleh organisasi massa tertentu, terprovokasi oleh isu-isu sektarian berbasis SARA, tersandera oleh paham dan ekstrem yang secara massif menggerogoti sendi-sendi karakter kebangsaan, dan terjajah oleh ideologi bangsa lain,



menjadi beberapa indikator mengenai rendahnya determinasi diri suatu bangsa .

National Self-Determination (NSD) adalah konsep ideologi politik internasional yang muncul setelah perang dunia II, ketika negara-negara sekutu mundur dan melakukan dekolonisasi di negara imperium Asia dan Afrika. Kaum sekutu ini terpaksa menerima konsep NSD yang telah menjadi prinsip dasar dalam politik internasional dan melihat praktik kolonisasi sudah tidak relevan lagi (Scott, 2001). Berakhirnya imperium Eropa menyebabkan lahirnya banyak negara independen baru dan secara perlahan menerapkan NSD. Dalam piagam PBB, NSD diakui sebagai sistem politik yang berprinsip dasar bahwa setiap individu, masyarakat dan bangsa memiliki kebebasan dan otonomi dalam menentukan masa depannya. Woodrow Wilson menyebut NSD sebagai sebuah ide yang mencerahkan dan bersinonim dengan esensi politik demokrasi sebagai jalan menuju tatanan politik dunia yang lebih baik. Tatanan politik ini menjadikan suatu negara bangsa dapat mengendalikan diri sendiri, memiliki identitas yang jelas, berkarakter kuat, memiliki otonomi dan kebebasan dalam membangun, melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan ideologi baik dari luar maupun dari dalam, bebas dari intimidasi dan provokasi dari pihak lain yang sengaja menghancurkan sendi-sendi kebangsaan, mengendalikan diri dan menentukan secara mandiri arah pembangunan bangsanya. NSD merupakan sebuah sistem politik yang mengelaborasi antara konsep ideologi dan praktik politik yang bertujuan semata-mata demi kepentingan warga bangsanya. Dalam pandangan humanistik, NSD muncul dari kesadaran diri warga masyarakat (*civics self consciousness*) untuk menentukan yang terbaik bagi diri dan bangsanya. Untuk kawasan Asia, Republik Korea, Jepang dan Singapura adalah contoh sempurna dari negara-negara yang menerapkan NSD secara baik,



Narasi Bangsa yang Tercecer

dan telah mendukung usaha pemerintah dalam meningkatkan keadilan dan kesetaraan pada masyarakatnya.

Menurut saya, dalam konteks kekinian Indonesia, NSD menjadi sangat mendesak untuk digalakan, bukan saja untuk menangkal berbagai bentuk ideologi bangsa lain yang berusaha menjajah bangsa, tetapi juga untuk mengeliminasi keterarahan primordial dan paham-paham sektarian yang tidak jera-jeranya berupaya memporakporandakan entitas kesatuan bangsa. Salah satu upaya untuk mendukung konstruksi determinasi diri bangsa adalah membangun kultur, sistem dan bangunan politik bangsa demi meningkatkan kualitas kesadaran politik masyarakatnya. Jika belajar dari bangsa yang sudah maju kesadaran politiknya, membangun kultur, sistem dan bangunan politik bangsa untuk meningkatkan kualitas kesadaran politik masyarakat tidak bisa terlepas dari peran sentral dan strategis literasi politik. Peran literasi dalam memberi kecerdasan politik dan berbagai dimensinya sangat vital sehingga memungkinkan terjadinya perubahan dan perkembangan masyarakat, baik dalam pola pikir dan pola laku politiknya. Literasi politik yang berwawasan demokratis mengarahkan masyarakat pada pembentukan kapasitas kritis, keingintahuan yang benar, dan otonomi yang bertanggung jawab. Literasi politik maju dan berkualitas tergambar dari semakin meningkatnya kesadaran masyarakat demokrasi tentang nilai-nilai universal, etis dan politis, serta penghargaan terhadap hak dan martabat manusia dalam memenuhi segala kebutuhan kodrati, meningkatkan derajat dan martabat diri, dan mendapatkan pengakuan terhadap milik pribadi.

Literasi politik menjadi faktor dan kekuatan politik yang utama. Secara negatif, literasi politik yang dikemas melalui pendidikan di sekolah, keluarga dan masyarakat merupakan refleksi dari kekuatan-kekuatan politik dari rezim pemerintahan yang ada. Namun secara positif mesti dilihat sebagai bagian dari



penjabaran ideologi politik bangsa yang bertujuan untuk membentuk identitas kebangsaan, pengakuan dari bangsa lain dan membantu kelancaran program-program pemerintah. Karena itu, tak dapat dihindari bahwa literasi politik menjadi komponen penting bagi terbentuknya sikap politik warga negara agar dapat mendukung jalannya sistem pemerintahan yang baik dan benar. Negara-negara yang sedang mengalami transisi demokrasi sangat memerlukan literasi politik demi memberdayakan masyarakatnya, khususnya generasi muda dalam memahami demokrasi. Dengan literasi politik yang mendalam, mereka dapat memahami dengan benar esensi kekuasaan, makna dari pilar-pilar demokrasi, variabel-variabel yang berpengaruh dalam lembaga-lembaga politik, dan efek-efek dari kehadiran lembaga-lembaga politik bagi masyarakat. Kaum muda diberdayakan, dilatih dan dididik secara terencana, kontinu dan berkelanjutan agar memiliki kesadaran politik yang matang, kritis dan dinamis, dan kemudian dapat menjadi andalan dalam membangun bangsa.

Dalam membangun NSD, literasi politik selain berperan sebagai *maintenance* atau *persistence* untuk memelihara sebuah sistem politik bangsa, tetapi juga untuk *nation and character building* yang kuat. Literasi politik juga berperan untuk membangun budaya demokrasi yang berkarakteristik rasional, aktif, bekerja sama, solider, patuh pada sistem politik, percaya pada pemerintah dan pada sesama warga negara. Dalam perspektif literasi politik, budaya demokrasi yang dibangun mesti berbasiskan pada nilai-nilai egalitarian, pluralisme, keterbukaan, dialogis, persuasif, distribusi kekuasaan dan oposisi yang membangun. Dalam budaya demokrasi, literasi politik merupakan suatu proses dialogis antara pemerintah dan lembaga-lembaga politik (DPR dan Partai Politik) sebagai pemberi pesan dan masyarakat sebagai penerima pesan. Pesannya bisa dalam bentuk nilai-nilai, norma-norma dan simbol-simbol politik,



Narasi Bangsa yang Tercecer

program dan kebijakan pembangunan. Melalui literasi politik ini, masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma dan simbol-simbol politik, program dan kebijakan pembangunan dan secara kritis memberi penilaian terhadapnya. Penilaian kritis masyarakat bermanfaat agar pemerintah dan lembaga-lembaga politik dapat mengevaluasi diri dan berbenah ke arah yang baik.

Lastest Dummy



MERAJUT KESADARAN KRITIS BERBASIS *ECO-PEDAGOGY* (Belajar dari Berbagai Peristiwa Bencana Alam)*

Hampir setiap tahun, peristiwa bencana alam sepertinya tidak berhenti menghantam kehidupan masyarakat Indonesia. Banjir bandang yang menghantam wilayah Garut Jawa Barat (20/21 September 2016) menambah deretan tragis peristiwa bencana alam di negeri kita. Bencana ini telah cukup banyak mengorbankan nyawa dan materi, serta kerusakan alam lingkungan dan sosial. Dalam proses pemulihannya sudah jelas membutuhkan tenaga, biaya dan waktu yang tidak sedikit. Ada banyak dugaan mengenai penyebab peristiwa ini. Dugaan klasik tetapi tetap faktual dan rasional, yakni terlalu kuatnya determinasi dan dominasi manusia terhadap alam. Bentuk-bentuknya seperti kegiatan eksploitasi dan eksplorasi besar-besaran dan tanpa batas,

* SKH Pos Kupang, 04/10/2016.



Narasi Bangsa yang Tercecer

pembangunan yang minim wawasan lingkungan, dan perilaku yang kerap mencemari lingkungan sekitar tempat tinggal. Secara imajiner, alam memang kelihatannya lemah dan tak berdaya, tetapi rupanya dia memiliki cara tersendiri untuk dalam membela diri, membalas dominasi dan determinasi manusia atasnya. Banjir (bandang), tanah longsor, pemanasan lokal dan global, perubahan cuaca ekstrem, munculnya berbagai wabah penyakit kronis, menjadi peristiwa yang bisa ditilik dari konteks imajiner sebagai bentuk 'balas dendam' alam terhadap mental dan perilaku manusia yang telah melecehkan alam.

Esensi yang sebenarnya terletak pada mental dan perilaku masyarakat Indonesia dalam membangun relasi yang sadar dengan alam. Idealnya, kesadaran harus menjadi garansi utama dan menentukan ketika manusia berhubungan dengan alam. Baik tidaknya hubungan manusia dengan alam sangat bergantung pada tinggi dan rendahnya kesadaran manusia. Menurut saya, adanya degradasi lingkungan alam disebabkan karena kesadaran ekologis manusia belum tumbuh dan berkembang secara baik. Kesadaran yang rendah ini telah berimplikasi pada bangunan mental dan perilaku manusia yang menafikan prinsip-prinsip ekologis dan norma-norma kesetaraan penghargaan antara manusia dan alam. Manusia cenderung irasional, agresif, nafsu dan serakah dalam memanfaatkan alam, dan kadang tidak akan tahu bagaimana seharusnya memperlakukan lingkungan hidupnya. Kondisi ini berlanjut pada krisisnya kemampuan dan keterampilan untuk mencegah, mengatasi dan memperbaiki permasalahan lingkungan hidup.

Menurut saya, beberapa faktor berikut ini turut berkontribusi bagi rendahnya kesadaran kritis masyarakat, yakni: pertama, masyarakat sudah terlalu dalam terjebak pada hegemoni kehidupan postmodern yang berkarakteristik konsumeristik-pragmatis.



Pola-pola konsumsi merujuk pada pemenuhan kebutuhan yang keliru (*false needs*) dan bukan berdasarkan kebutuhan real (*real needs*). Banyak masyarakat sudah kehilangan otonomi dan ‘pasrah’ pada berbagai iklan aneka produk yang justru dalam banyak segi menyesatkan dan mencelakakan. Masyarakat postmodern tidak menyadari bahwa hegemoni produsen, pemilik media, dan penguasa informasi telah menggerus otonomi, identitas dan jati diri. Variabel keinginan menjadi dominan dibandingkan dengan variabel kebutuhan. Demi memenuhi tingginya tingkat keinginan, bahan-bahan baku yang disiapkan produsen dalam berproduksi sudah pasti mengeksploitasi alam dengan menggunakan cara-cara instan-pragmatis. Selanjutnya, tak terkontrolnya gaya konsumsi dan pemakaian fasilitas-fasilitas hidup yang ‘bermerek’, tetapi tidak ramah lingkungan, menggambarkan betapa kesadaran kritis masyarakat tersubordinasi oleh hegemoni konsumeristik-pragmatis tersebut.

Kedua, dalil-dalil kebijakan pembangunan negara yang pro rakyat, tetapi sebenarnya kental dengan orientasi kapitalistik liberal dan *profit oriented*, secara tidak langsung ‘membunuh’ kesadaran kritis masyarakat tentang pentingnya kehidupan yang berkelanjutan (*sustainability of life*). Kuatnya dalil investasi, percepatan pembangunan serta akselerasi pergerakan ekonomi, membuat pemerintah pusat maupun daerah ‘membiarkan’ diri untuk dikendalikan oleh pihak-pihak pengembang dan pemodal. Para investor diberi ruang tanpa batas untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi alam serta membangun berbagai infrastruktur. Parahnya, bila kegiatan aktivitas-aktivitas pemanfaatan ini tidak disertakan dengan analisis yang kritis dan intensif mengenai dampaknya terhadap lingkungan, eksistensi ekosistem, sosialitas manusia, maka sudah pasti berdampak buruk pada keberlanjutan kehidupan manusia berikut alamnya. Banyak peristiwa kecelakaan



Narasi Bangsa yang Tercecer

alam dan sosial yang terjadi akhir-akhir ini di negeri kita, disebabkan hanya karena pemerintah dan masyarakat tidak bijak dan benar dalam mengelola kawasan pembangunan, serta kurangnya pertimbangan asas kemanfaatan dan keberlanjutan kehidupan manusia dan alam.

Ketiga, masih rendahnya tingkat literasi ekologis dan belum menguatnya perspektif pembelajaran berbasis ekologis pada kerangka pendidikan kita. Masyarakat masih belum cukup diberdayakan dan dicerahkan mengenai betapa urgennya membangun kehidupan dengan mempertimbangkan prinsip dan asas kesetaraan, keseimbangan dan keberlanjutan. Rendahnya tingkat literasi dan perspektif ekologis ini membuat masyarakat kita belum semuanya cerdas dalam mengelola alam secara benar dan bijak, yang secara kasat mata ditunjukkan dengan perilaku membakar hutan, menebang pohon secara liar, membuang sampah dan limbah industri di kawasan perairan, menggunakan bahan tidak ramah lingkungan dalam mengelola dan memanfaatkan isi alam. Penggunaan pupuk kimiawi, racun, bahan peledak, bahan bakar beremisi tebal, dll., menjadi kebiasaan yang masih melekat dalam keseharian masyarakat. Konsep dan praktik pendidikan lingkungan hidup sepertinya mengalami involusi karena dilakukan tanpa perencanaan, parsial, bahkan seremonial dan administratif belaka. Literasi dan perspektif ekologis belum diakomodasi secara komprehensif-signifikan dalam konten perangkat kurikulum dan implementasinya, sehingga kurang optimal dalam membentuk kesadaran dan kepedulian masyarakat didik terhadap lingkungan. Padahal, pendidikan dipandang sangat potensial untuk memfasilitasi dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan serta berperan mengadvokasi kapasitas masyarakat dalam menangani masalah-masalah lingkungan hidup. Agaknya, pendidikan belum dilihat sebagai menjadi wahana embrional dalam meng-*endors* tumbuhnya kesadaran, etika, nilai, sikap, dan keterampilan dalam memelihara lingkungan.



Negara-negara yang maju pembangunan dan kehidupan masyarakatnya, seperti Singapura, Jepang, Korea, Australia, Amerika, Inggris, Jerman, Swiss dan Kanada, sudah cukup lama membangun kesadaran kritis tentang keberlanjutan lingkungan melalui penerapan *green curriculum*, yang berbasiskan pada konsep literasi ekologis dan pembelajaran berperspektif *eco-pedagogy* (Kahn, 2010). Gerakan *eco-pedagogy* berkembang dari pemikiran pedagogi kritis Paulo Freire, dengan aras dasarnya untuk mengembangkan kesadaran kolektif demi mewujudkan masyarakat yang peduli, peka dan kritis terhadap kesetaraan, keseimbangan, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam praksis gerakan *eco-pedagogy* ini, masyarakat didik diberdayakan agar bisa berintegrasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan realitas, kritis terhadap perubahan, dan berani melawan berbagai bentuk ketidakadilan/kesewenangan yang menyebabkan bumi mengalami ketertindasan, degradasi, deekologisasi, dan deforestasi. Pendekatan pendidikan berbasis ekologis mengafirmasi tentang pentingnya pembangunan berwawasan ekologis, partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, empati pada semua bentuk kehidupan (*empathy for all forms of life*), serta pengintegrasian isu-isu sosial, hak-hak hewan dan tumbuhan, dan keadilan lingkungan hidup.

Dalam konteks membangun kesadaran kritis, penerapan *green curriculum* di Indonesia bisa efektif bila sekolah/kampus mendukungnya dengan menjalankan konsep *green school/green campus*, serta mengaktivasi secara kontinu dan intens berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang berkonten cinta lingkungan. Tujuannya agar masyarakat didik memiliki kecerdasan ekologis yang mumpuni dengan adanya peningkatan *hard skills* dan *soft skills* (Supriatna, 2016). *Hard skills* berhubungan dengan pemahaman yang fundamental tentang keberlanjutan hidup umat manusia dalam relasinya dengan lingkungan sosial dan alam, serta berbagai masalah yang dapat muncul akibat relasi tersebut itu. Masyarakat didik secara



Narasi Bangsa yang Tercecer

sadar-kritis terarah pada pemahaman mengenai pentingnya prinsip sustainabilitas, yang mungkin beberapa praksisnya tampak lewat keterampilan seperti mengurangi (*reduce*), menggunakan kembali (*reuse*) dan mendaur ulang (*recycle*). Sementara *soft skills* berhubungan dengan mengakarnya karakter ekologis yang tergambar dalam sikap empatik, ulet, kreatif, inovatif, profesional, percaya diri, santun, hemat, bijak, dan hidup selaras alam dalam menggunakan produk berbasis sumber daya alam, baik ketika berada di sekolah, keluarga, maupun lingkungan masyarakat.

Lastest Dummy



KEADABAN BERAGAMA DAN GARANSI KENYAMANAN

(Catatan Lepas tentang Teror Bom
di Gereja St. Yosep Medan)*

Agama sudah dipersepsikan dan didefinisikan sebagai salah satu lembaga yang merepresentasi tentang hal yang bersifat adab, tertib, nyaman dan tenteram. Dalam perspektif sosio-teologis, agama adalah tempat orang-orang berinteraksi dengan berkumpul, berdoa, berbuat amal dan kebaikan sesuai dengan ajaran imannya untuk mencapai keselamatan 'sekarang' dan 'di sini' (hic et nunc), serta keselamatan yang akan datang (eskatologis). Dalam menjalankan agamanya setiap penganut didasarkan pada iman, cinta, kasih, kebaikan, keadilan dan kesejahteraan, yang merupakan nilai-nilai universal di dunia. Karena itu, bila ada lembaga agama yang menyimpang dalam mempraktikkan nilai-nilai luhur dan universal di atas, maka jelas menimbulkan 'pertentangan internal'.

* Tidak dipublikasikan



Narasi Bangsa yang Tercecer

Meskipun kerap kali lembaga agama berdalih bahwa yang melakukan penyimpangan tersebut sifatnya kasuistik dan dilakukan oleh oknum tertentu, tetapi citra agama tetap terseret dalam keterpurukan yang berefek multiplier pada degradasi kualitas kehidupan.

Dalam konteks kekinian keberagamaan di Indonesia, ada tiga hal yang turut mendorong terjadinya berbagai penyimpangan terhadap ajaran iman dan agama, yakni: Masih rendahnya indeks toleransi keberagamaan, tingginya kecenderungan apologetisme, dan pengagungan yang tinggi (glorifikasi) terhadap kesalahan individual. Dengan demikian, bila kehidupan keberagamaan di Indonesia terjaga dengan baik, maka tugas dan tanggung jawab masyarakat dan pemerintah adalah bagaimana meningkatkan mutu toleransi agar bisa mendukung kehidupan yang beradab, tertib, dan nyaman, mengurangi gejala apologetisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, serta mendorong munculnya gerakan kesalahan sosial dalam diri masyarakat beragama.

MENINGKATKAN MUTU TOLERANSI

Dengan munculnya berbagai kasus konflik bernuansa SARA dan teror terhadap agama lain atas nama agama di Indonesia beberapa dekade terakhir menuntut masyarakat dan pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan mutu toleransi keberagamaan. Upaya meningkatkan mutu ini tentunya mesti diikuti dengan upaya penguatan terhadap kemampuan dalam menerima keadaan dan situasi multikultur. Upaya penguatan ini bisa melalui berbagai kegiatan pencerahan, pemberdayaan dan pendidikan yang dapat dijalankan secara formal, nonformal dan informal di sekolah, keluarga dan masyarakat. Melalui kegiatan pendidikan dan pemberdayaan, nilai-nilai tentang penghargaan terhadap perbedaan terinternalisasi dan teraktualisasinya dengan baik dan benar, yang didukung oleh



kematangan intelektual, emosional, spiritual dan amal kebajikan. Tujuan dan sasaran dari kegiatan ini adalah meminimalisasi fenomena terorisme, radikalisme, fanatisme dan fundamentalisme dalam menjalankan ajaran agama serta mendorong terjalannya kerukunan hidup bermasyarakat bangsa.

Selanjutnya, demi komprehensif dan holistiknya upaya peningkatan mutu toleransi keberagamaan, pemerintah dan masyarakat perlu melihat beberapa hal ini (bdk. Opini Pos Kupang, “Integrasi Nasional: Tolak Fatalisme, Perkuat Etika Kebangsaan”, 03/08/2016): (1) mengontrol dan mengawasi upaya penyebaran isu, rumor, ujaran kebencian (hate speech) dan fitnah, baik lewat komunikasi langsung maupun melalui media sosial demi mencegah tafsir dan reaksi negatif yang bisa menjadi pemicu munculnya perilaku-perilaku anarkis dan teror. (2) pengendalian yang intensif berbagai bentuk prostitusi, media pornografi, perjudian, dan pemakaian, peredaran serta penyelundupan obat-obat terlarang, sehingga tidak menggerogoti moral dan etika bangsa. (3) penguatan identitas budaya lokal, daerah, dan nasional demi merespons pengaruh negatif dari budaya luar, sehingga kearifan nilai budaya tetap terpelihara untuk menjaga identitas diri bangsa. (4) para pemimpin/tokoh agama dan masyarakat perlu menunjukkan keteladanan hidup dan kesalehan sehingga bisa menjadi contoh dan panutan bagi umat dan masyarakat. (5) optimalisasi penegakan hukum yang tegas dan tidak tebang pilih demi menjamin rasa keadilan, ketertiban dan keamanan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. (6) pentingnya mengakses dan mengakomodasi secara adil dan merata kegiatan pembangunan dalam segala bidang di setiap daerah, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan, fanatisme dan gejala separatism serta terorisme.



MENEKAN APOLOGETISME

Setiap agama memiliki hak dan kewajiban untuk membela ajaran iman dan agamanya. Pembelaan ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengamalan dan penghayatan agama serta semakin menegaskan identitas keimanan seseorang. Namun, pembelaan yang berlebihan terhadap ajaran iman dan agama sembari menutup diri (clausura) terhadap kebenaran agama lain akan menjerumuskan seseorang pada apologetisme yang mencelakan diri dan sesama. Kecenderungan apologetisme tampak pada usaha dari kaum beragama untuk membenarkan ajaran iman dan praktik keagamaannya dengan mendiskreditkan ajaran iman dan praktik keagamaan dari agama lain. Apologetisme kerap kali dibuat secara sistematis dan meyakinkan dengan mengangkat ayat-ayat kitab suci, mengkonstruksi premis-premis dan perbandingan-perbandingan yang dianggap memiliki korelasi, relevansi dan aplikasinya dengan ajaran iman dan praktik keagamaan. Dalam apologetisme, sering terjadi legitimasi, justifikasi, dan verifikasi (membuktikan secara benar) cara berpikir, bersikap dan berkegiatan dari kaum agama tertentu, dan sembari mendelegitimasi dan memfalsifikasi (membuktikan secara salah) ajaran dan praktik dari agama lain.

Dewasa ini, modus publikasi apologetisme terjadi melalui tulisan, renungan, khotbah, dakwah dan ceramah yang dengan mudah disebarkan dan diakses melalui media digital dan sosial. Sudah pasti apologetisme menjadi momok sekaligus ancaman bagi kehidupan keagamaan, dan bisa terpolarisasi dalam bentuk mekanisme pembelaan diri yang ekstrem dan irasional, serta membangun fondasi resistensi, defensi, provokasi dan agitasi yang ekstrem. Polarisasi dari apologetisme yang radikal ini sangat potensial dan embrional dalam memicu tindakan-tindakan terror, anarkis, brutal dan destruktif.



Menurut saya, untuk menghindari kecenderungan ini maka pemerintah dan masyarakat perlu mengupayakan beberapa hal berikut ini: (1) Meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi dengan lebih memperhatikan konten dan materi pengetahuan keagamaan yang lebih terbuka, inklusif, rasional, ilmiah, dialogis, kritis dan partisipatif. (2) Meningkatkan dan memberdayakan kerja Forum Kerjasama antara Umat Beragama (FKUB) yang sudah dibentuk dari pusat sampai ke daerah, serta mendukung kegiatan-kegiatan lintas agama dalam bentuk dialog tentang ajaran agama, diskusi dan sharing iman. (3) Meningkatkan kerja sama dalam mengidentifikasi gejala radikalisme dan terorisme dengan membuat pendekatan persuasif dan kooperatif. (4) Mengupayakan adanya dialog kehidupan antara umat beragama dalam bentuk praktis seperti saling salaman saat merayakan hari raya, saling menolong dan mendoakan bila penganut agama lain mengalami kesusahan, bergotong royong membangun rumah ibadat, dan menjaga keamanan dan ketertiban ketika agama lain sedang beribadat.

MENGEMBANGKAN KESALEHAN SOSIAL

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama secara baik dan benar menjadi keharusan bagi pemeluk dengan tetap mempertimbangkan secara seimbang antara kesalehan individual dan kesalehan sosial. Menurut saya, penghayatan dan pengamalan agama yang berkualitas adalah ketika kaum beragama berani bergerak dari glorifikasi terhadap kesalehan individual menuju tumbuh kembangnya kesalehan sosial. Kesalehan sosial merupakan gambaran tentang kualitas dan intensionalitas iman seseorang yang kemudian dapat diinteraksikan dan dikomunikasikan kepada orang lain dan dunia sekitarnya. Sebab itu, kesalehan sosial dapat meretas ritualisme yang rigoristik, artifisial dan individualistik, dan mengarahkan



Narasi Bangsa yang Tercecer

seseorang pada ibadat sosial yang berdaya guna bagi kebaikan bersama (*bonum communa*).

Menurut saya, memang penting mendekati diri kepada Tuhan dengan rajin beribadat di gereja, vihara, masjid, namun yang lebih penting lagi adalah membangun kehidupan bersama yang aman dan nyaman dalam satu komunitas bangsa Indonesia. Kesalehan sosial tereksplisitasi juga dalam praktik imani seperti berderma, beramal, menolong sesama yang menderita, saling menyapa dengan senyuman, menjaga ketenangan dan ketertiban umum. Kesalehan sosial menjadi lebih utama karena dengannya nilai-nilai universal seperti iman, cinta kasih, kebaikan, keadilan dan kesejahteraan dapat dirasakan oleh orang lain, termasuk yang beda iman dan agama. Semakin banyak orang yang saleh secara sosial, maka semakin beradabnya kehidupan bermasyarakat. Keadaban ini akan memberi garansi kenyamanan dan kesejahteraan yang dapat berimplikasi pada semakin berkualitasnya konstruksi sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.



PILKADA, KEHENDAK BERKUASA DAN KEPERCAYAAN PUBLIK*

Dalam karyanya *Beyond Good and Evil*, *The Genealogy of Morals* dan *The Will to Power*, filsuf eksistensialisme Friedrich W. Nietzsche (1844-1900) menegaskan bahwa untuk menandakan eksistensi seseorang di dunia, salah satunya adalah berkuasa. Berkuasa menjadikan seseorang bukan hanya sekadar 'to live' saja, tetapi juga 'to exist'. Berkuasa membuat hidup lebih hidup, bermakna dan tidak mengambang. Berkuasa berarti memberi makna terhadap hakikat dan keberadaan dirinya, yang tereksplisitasi melalui keterampilan-keterampilan hidup yang sadar, cerdas, gesit, tangkas, tanggung jawab, percaya diri dan terbuka pada perkembangan. Nietzsche memberi tekanan, manusia yang sadar akan keberadaannya adalah manusia yang menghayati suistainabilitas

* SKH Pos Kupang, 19/10/2016.



Narasi Bangsa yang Tercecer

eksistensinya, dan terus menerus terarah pada cita-cita yang tinggi untuk menjadi “Manusia Super” (Über- Mensch). “Manusia Super” ini memiliki karakteristik seperti memiliki keterarahan akal, mental dan keterampilan menjadi pemimpin, berorientasi pada nilai keadilan, kebenaran dan kebaikan; membebaskan, mencerahkan, dan senantiasa membangun optimisme hidup, serta bertanggung jawab dan memiliki kepercayaan terhadap diri, sesama dan dunianya.

Secara positif, Nietzsche memandang dunia sebagai tempat yang sangat baik, polos dan strategis untuk mengaktualisasikan ‘kehendak berkuasa’ ini. Sebagai tempat yang baik dan strategis untuk dikuasai, seseorang disarankan untuk menyelami secara mendalam dimensi-dimensi terdalam dari dunia, termasuk apa saja yang menjadi ‘kebutuhan-kebutuhannya’. Dunia yang terbentuk dalam kepolosan, tidak memiliki awal, selalu terbuka untuk ditafsirkan, belum memiliki kebenaran, belum berpihak dan belum memiliki orientasi, sangat membutuhkan kreasi dan aktivasi gagasan manusia. Karena itu kehadiran manusia menjadi harapan agar dunia memiliki nilai yang bermakna dalam dirinya, memiliki potensi untuk berkembang, berorientasi dan berpihak pada kebaikan, kebenaran dan keadilan. Harapan ini tercapai bila manusia memiliki kehendak berkuasa dengan motivasi yang luhur dan tulus, penuh sukacita, optimis, senantiasa terarah pada nilai-nilai kebaikan, kebenaran dan keadilan, baik yang dibutuhkan oleh dunia maupun yang diinginkan oleh manusia sendiri. Manusia harus menyadari betul bahwa berkuasa atas dunia bukan kesempatan untuk mengalahkan, mengeksploitasi, dan memanfaatkan dunia untuk kepentingan egotarian, manipulatif dan pragmatis, tetapi menjadi momen afirmasi diri dan hidupnya secara lebih baik. Afirmasi yang penuh sukacita ini menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan dunia atas manusia dan kepercayaan



manusia atas dirinya. Kehendak untuk berkuasa memotivasi manusia untuk menjadi subjek yang aktif dan percaya diri dalam memberi makna dan menata dunia dengan baik dan manusiawi.

Disadari atau tidak disadari, ketika terjun dalam kontestasi Pilkada, pasangan calon sudah memiliki kehendak berkuasa/memimpin dalam dirinya. Secara positif kehendak berkuasa/memimpin ini didorong oleh berbagai motivasi untuk memberi makna pada dunia, yang dapat dibaca melalui paparan visi-misi dan program kerjanya. Menurut saya, dalam momentum Pilkada, kehendak (motivasi) berkuasa dapat menjadi sesuatu yang imperatif, inheren dan perlu diapresiasi. Karena justru dengan 'libido' berkuasa dan motivasi yang luhur di baliknya, pasangan calon sudah pasti akan memiliki semangat dan militansi untuk menjadi pemenang dalam kontestasi politik tersebut. Munculnya kehendak berkuasa dan berikut motivasinya dapat menjadikan Pilkada sebagai momentum strategis dan potensial demi mencari pemimpin 'manusia super'. Dalam momentum ini, masyarakat akan menilai secara lugas dan gamblang tentang calon pemimpinnya, baik yang sudah tergambar dalam visi misi dan program kerja, tetapi juga bertolak dari sosok, profil, rekam jejak dan ideologi yang dianut. Pada sisi lain, kontestasi Pilkada menjadi ajang untuk mengkonstruksi bentuk kepercayaan masyarakat bukan saja pada pasangan calon yang akan dipilih, tetapi juga membangun investasi kepercayaan dirinya akan suatu harapan dan optimisme hidup yang lebih baik pada masa yang akan datang. Dengan modal investasi kepercayaan ini, masyarakat kemudian akan secara adil, benar dan bijaksana dalam menilai dan menentukan pilihan politiknya.

Menurut saya, elaborasi antara variabel tingkat kepercayaan dan kehendak (motivasi) berkuasa dari pasangan calon dan tentunya partai pendukung, sudah tentu menjadi dasar yang kuat dalam



Narasi Bangsa yang Tercecer

menentukan pilihan politik masyarakat. Tinggi rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat sangat bersinggungan dengan motivasi dari pasangan calon untuk berkuasa. Sudah dipastikan bahwa dalam konteks Pilkada, kepercayaan sebagai gambaran kualitas kemauan dan keyakinan mental psikologis masyarakat terhadap pasangan calon tertentu, menjadi begitu fundamental. Adapun ciri-ciri fundamental kepercayaan masyarakat dalam berpolitik, saya adaptasi dari pemikiran McKnight, dkk. (2002), yakni: Pertama, keyakinan masyarakat terhadap motivasi seseorang ketika ingin berkuasa/memimpin (*trusting belief*) yang diukur dari niat baik (*benevolence*), kejujuran dan ketulusan (*integrity*) dan kemampuan (*competence*). Kedua, maksud masyarakat percaya pada seseorang untuk memimpin (*trusting intention*) yang didasarkan pada kesediaan menerima konsekuensi dari kepercayaannya itu (*willingness to depend*) dan kesediaan subjektif masyarakat untuk memberi informasi kepada pihak lain tentang orang yang dipercayainya (*subjective probability of depending*).

Selanjutnya, bangunan kepercayaan politik publik kepada calon pemimpinnya mestinya didukung oleh kajian yang kritis terhadap motivasinya untuk berkuasa. Menurut Coleman (2000), sekurangnya ada tiga jenis motivasi untuk berkuasa yang sangat berdampak pada perspektif dan model praktiknya, yakni: (1) Kognitif, di mana seseorang berkuasa karena ingin menerapkan konsep, teori, gagasan, ideologi seperti radikalisme, pluralisme, liberalisme, unitarisme, dll. (2) Motivasional, di mana seseorang mau berkuasa karena ingin mengafirmasi diri dan memuaskan diri (*personalized power orientation*) dan meningkatkan status sosial (*socialized power orientation*). (3) Moral, di mana seseorang berkuasa untuk menegakkan egalitarianitas, utilitarianitas, partisipasi, kontrol dan pemberdayaan masyarakat. Bila motivasinya bersifat kognitif maka ada kecenderungan untuk menerapkan *Power Over*, yakni



kekuasaan untuk memaksa masyarakat dalam mencapai tujuan, ideologi dan pemikiran tertentu. Kekuasaan ini kerap dipakai untuk meningkatkan kompetisi, prestasi, prestise dan determinasi diri bangsa (national self determination). Bila bersifat motivasional, maka akan menerapkan *Power Under*, yakni kekuasaan yang dapat membuat masyarakat tidak berdaya dan bergantung (powerlessness and dependence), dibelenggu, ditindas, kaku, irasional dan stagnan. Masyarakat dieksploitasi untuk kepentingan pemuasan diri dan peningkatan status sosial dari penguasa serta kroni-kroninya. Sedangkan jika bersifat moral, maka kekuasaan yang diterapkan adalah *Power With* yang menekankan tentang efektivitas aksi bersama/kooperatif. Kekuasaan ini dikembangkan secara bersama-sama, saling melayani dan tidak bersifat memaksa. Kekuasaan ini membuka pintu untuk berkembangnya perspektif dan praktik *Power To*, yaitu kekuasaan untuk memberdayakan dan membebaskan (empowered and independent) masyarakat dari situasi yang membelenggu dan membuatnya terbuka, bertindak bebas, serta memiliki rasa harga diri, efikasi diri, dan kepercayaan diri untuk berkembang.

Momentum Pilkada adalah kesempatan memurnikan motivasi untuk berkuasa, merajut kepercayaan masyarakat dan memupuk kepercayaan dalam diri pasangan calon. Melalui informasi dan kajian kritis terhadap sosok, profil, rekam jejak, visi-misi, program kerja, ideologi, isu-isu yang dikedepankan, pergerakan tim sukses, partai dan ormas pendukung, publik dapat melihat dan memahami apa yang menjadi motivasi pasangan calon untuk memimpin. Penglihatan dan pemahaman itu menjadi basis dan pegangan dalam membangun kepercayaan ketika memilih calon pemimpinnya. Sebaliknya untuk pasangan calon, dengan memurnikan motivasi untuk berkuasa/memimpin mereka dapat semakin percaya diri, bersemangat dan elegan dalam berkontestasi. Dia akan menjadi 'manusia super' yang militan dan bertanggung jawab saat berjuang



Narasi Bangsa yang Tercecer

dalam meraih kemenangan. Kepercayaan diri yang baik membuat pasangan calon semakin mencintai perjuangan hidup dan melihat kemenangan dan kekalahan sebagai bagian yang harus dihargai pada segala bentuk kontestasi.

Lastest Dummy



MENCERMATI HATE SPEECH DALAM PILKADA*

Dua ungkapan ini, benar adanya: 'Anda adalah apa yang anda tuturkan' dan 'Mulutmu adalah harimaumu'. Identitas seseorang atau sekelompok masyarakat salah satunya dicirikan oleh bagaimana dia berujar/berbahasa. Bahkan ada pepatah Melayu berujar 'bahasa menunjukkan bangsa'. Pepatah ini bermakna, konten bahasa dan cara menuturkannya sering mengkonfirmasi tentang tinggi-rendah, maju-mundurnya peradaban suatu bangsa. Bahasa adalah keniscayaan dalam berkomunikasi masyarakat bangsa tertentu. Bangsa yang sejahtera salah satunya didukung oleh kecerdasan berbahasa/berujar. Kecerdasan berbahasa/berujar menjadi sangat relevan, karena dengannya masyarakat bisa saling mengerti dan memahami saat berdialog, menyampaikan ide, gagasan, wacana, opini.

* SKH Pos Kupang, 19/11/2015



Menjelang Pilkada 9 Desember 2015, persoalan ‘ujaran/tuturan’ menjadi krusial, ketika berbagai upaya meyakinkan dan mempengaruhi konstituen kadang terjebak pada kecenderungan bertutur demi membangkitkan sentimen kebencian pada pasangan calon lain. Menurut saya, bertutur kebencian (hate speech) lebih merusak dibandingkan kampanye hitam dan negative (negative and black campaign), karena cenderung tidak etis, *out of control*, sporadik dan brutal, yang selain merugikan pasangan calon lain dan pendukungnya, juga meresahkan masyarakat umum. Bila tidak dicegah dan diatur, maka momen Pilkada bisa berpotensi friksi, konflik, kegaduhan dan kekacauan sosial yang berbias suku, ras, golongan dan agama.

RASIONAL DALAM BERUJAR (BERBAHASA)

Ernest Cassirer (1874-1945) mengisyaratkan, manusia selain sebagai makhluk social (animal sociale), tetapi juga makhluk bersymbol (animal symbolicum). Symbol dimanfaatkan manusia dalam berinteraksi, ber-relasi dan berinterdependensi. Salah satu bentuk symbolnya adalah bahasa sebagai fasilitas yang efektif, efisien dan bermakna dalam membangun peradaban manusia. Filsuf Bertrand Russel (1872-1970) dan Ludwig Wittgenstein (1889-1951) menegaskan, bahasa merupakan symbol yang logis dan jelas dalam memberi identitas terhadap fakta/peristiwa hidup manusia. Berbahasa yang logis, baik, dan benar mencerminkan secara positif gambaran diri seseorang, masyarakat dan kehidupannya.

Secara teoretis, George L. Trage (1949) dalam *Studies in Linguistics: Occasional Papers* menuturkan tentang komponen penting dalam berbahasa, yakni: *Fonologi*, terkait ciri-ciri bunyi bahasa, cara terjadinya, fungsinya dalam sistem kebahasaan secara keseluruhan. *Morfologi*, terkait struktur kata, bagian-bagiannya,



serta cara pembentukannya. *Semantik*, terkait makna bahasa baik yang bersifat leksikal, gramatikal, maupun kontekstual. *Sintaksis*, terkait satuan-satuan kata dan satuan-satuan lain, hubungan satu dengan lainnya, serta cara penyusunannya sehingga menjadi satuan ujaran. *Leksikologi*, terkait kosa kata suatu bahasa dari berbagai aspeknya. Namun secara teknis praktis, ada berapa unsur dalam berbahasa/berujar yang perlu diperhatikan secara serius, yakni: *apa yang dikatakan, siapa yang mengatakan, kepada siapa, di mana, kapan, dan bagaimana mengatakannya*. Unsur-unsur ini menjadi pendukung kuat dalam membuat format tutur dan isi dalam berkomunikasi. Perkara format tutur dan isi menjadi vital ketika masyarakat sudah memiliki teknologi tingkat tinggi dalam berkomunikasi dan berpengaruh signifikan pada perilaku berbahasa.

Cara bertutur/berbahasa modern yang langsung, vulgar, tanpa neko-neko, penuh singkatan, gaul dan berbias/bersayap sering menghilangkan esensi martabat, sopan satun, kehormatan, keadilan, dan perasaan personal dan sosial. Bahkan ada cara berujar yang begitu 'telanjang', ekspresif, impresif, reaktif, provokatif, dan agitatif dalam mengumbar kebencian, ketidaksukaan, dan kemarahan pada seseorang atau sekelompok masyarakat yang memiliki identitas suku, rasa, agama, golongan dan agama tertentu. Norma dan nilai dalam berbahasa mengalami degradasi yang menjadi pemicu maraknya berbagai ekse negatif dan mengusik kenyamanan umum.

Upaya normalisasi, standarisasi, revitalisasi dan reklamasi bahasa menjadi sangat mendesak untuk diprogramkan agar kemampuan, keterampilan dan kecerdasan berbahasa tetap terpelihara. Unsur-unsur cerdas dalam berbahasa diedukasi secara kontinyu untuk membangun masyarakat Indonesia yang rasional-komunikatif.



"SE" TENTANG HATE SPEECH DALAM BERPILKADA

Pada 8 Oktober 2015, telah terbit Surat Edaran (SE) Kapolri bernomor SE/06/X/2015 tentang ujaran kebencian (hate speech). SE ini merujuk pada KUHAP, UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No 2/2002 tentang Polri, UU No 12/2008 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta UU No 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Masyarakat Indonesia mengapresiasi munculnya SE ini. Ekspektasinya, SE ini akan mengantisipasi berbagai potensi 'kerusakan' sosial akibat cara-cara bertutur yang destruktif pada eskalasi politik sebelum dan sesudah Pilkada.

Dalam SE nomor 2 huruf (f) dan (g), dinyatakan bahwa bentuk dan manifestasi ujaran kebencian adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial yang bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek: suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan atau kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, orientasi seksual. Sementara pada huruf (h) dinyatakan tentang media yang digunakan untuk memfasilitasi ujaran kebencian seperti orasi kampanye, spanduk atau *banner*, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media massa cetak atau elektronik, pamflet.



Elaborasi Filosofis, Pedagogik Kritis, Sosial, dan Politik

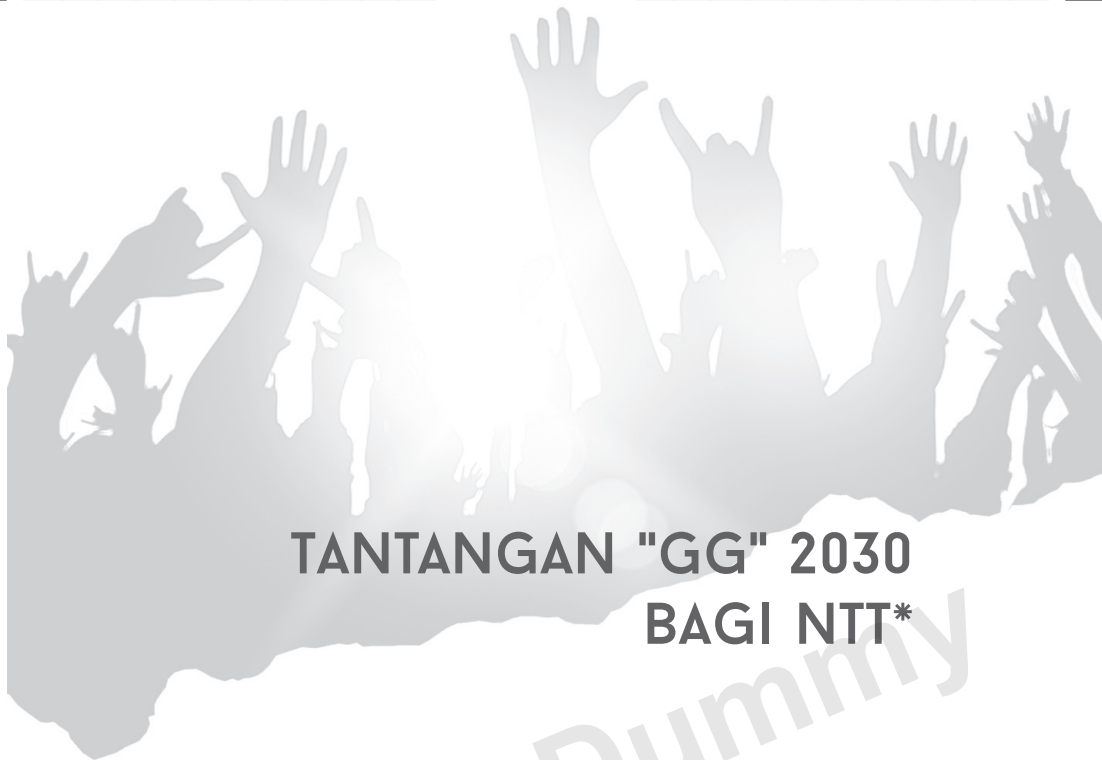
Mencermati tiga poin penting ini, maka yang mesti diperhatikan pasangan calon, pendukung, partai politik, dan konstituen, adalah tetap menjaga iklim yang kondusif dalam ber-Pilkada. Sangat positif dan konstruktif, bila setiap elemen terkait, memahami, memaknai dan menindaklanjuti SE ini dalam pola pikir dan pola laku politik yang baik dan benar. Upaya mawas, kontrol dan kendali diri dalam 'berbahasa/berujar' menjadi imperatif moral-sosial untuk mencegah berbagai eksese buruk, demi menjaga stabilitas lokal dan nasional. Bertarung secara elegan, cerdas, dan santun menjadi nilai yang paling terhormat dan terpuji. Mari kita buktikan, Pilkada akan menjadi momen potensial untuk pendewasaan demokrasi menuju masyarakat yang komunikatif, bermartabat dan sejahtera.

Lastest Dummy



Narasi Bangsa yang Tercecer

Lastest Dummy



TANTANGAN "GG" 2030 BAGI NTT*

S elaras dengan gagasan *Millenium Development Goals* (MDGs), muncul gagasan turunan yang mengemuka saat ini, yakni *Global Goals* (GG). Gagasan GG menjadi semakin menguat ketika 193 pemimpin dunia termasuk Indonesia pada 25 September 2015 ‘meratifikasi’ komitmen dan tanggung jawab dalam mencapai 17 tujuan dunia dengan penekanan pada 3 isu fundamental. Tiga isu mendasar yang harus dicapai pada 2030, yakni upaya mengakhiri kemiskinan yang ekstrem, melawan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, dan memperbaiki perubahan iklim.

Menindaklanjuti komitmen untuk menyukseskan GG pada 2030, maka pemerintah maupun masyarakat Indonesia harus menanggapinya secara serius dan konsern dengan langkah-langkah

* SKH Pos Kupang, 31/10/2015.



Narasi Bangsa yang Tercecer

progresif dan nyata. Pemerintah didesak segera membuat kajian yang komprehensif, holistik dan lintas sektoral tentang GG ini, dengan mengintegrasikan pemikiran dari berbagai *stakeholders* bangsa. Hasil kajian ini kemudian dikonversi secara praktis dan riil dalam penyusunan kebijakan, program dan langkah strategis. Berikutnya, pemerintah pusat membangun jalinan kerja sama secara sinergik dan simultan dengan pemerintah daerah untuk mensosialisasi dan mengedukasi kepada masyarakat tentang gagasan GG, yang diaksentuasikan pada tiga isu mendasar di atas.

BAGAIMANA DENGAN NTT?

Berdasarkan data BPS 2010, NTT berpenduduk sejumlah 4.953.967 jiwa. Sementara laju pertumbuhan penduduknya kira-kira sebesar 2,07%, dengan proyeksi penduduk baik laki-laki maupun perempuan pada 2020 sebesar 5.541.394.00. Selain itu, perkiraan kepadatan penduduk di NTT sebesar 96 jiwa/km², dengan presentasi penduduk yang tinggal di perkotaan kurang lebih 20%, dan sisanya sebesar 80% mendiami kawasan pedesaan.

Secara normatif dari perspektif *Bonus Demografi*, potensi jumlah penduduk ini *das sollen* berkontribusi positif bagi pertumbuhan dan perkembangan NTT, dengan pengandaian adanya dukungan dari sektor atau kondisi-kondisi lain. Namun, menurut kami, catatan informasi data kualitatif dan kuantitatif di bawah ini memberi *trend* negatif, dengan pemaknaan bahwa *das sein*, belum cukup kuatnya dukungan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang lebih baik bagi NTT ke depan.

Pos Kupang online, edisi Jumat 24 Januari 2014 memberitakan Bappenas yang merilis data tentang rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT. Menurut Bappenas, IPM NTT berkisar 68,77, jauh di bawah rata-rata IPM Nasional yang berkutat di 72,77. Statusnya berada pada urutan ke-3 terbawah sebelum Propinsi



Papua dan NTB. Hal ini berarti indikator pembangunan manusia seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi belum cukup optimal dan memadai, baik dari segi infrastruktur (sarana prasarana dan fasilitas pendukung lainnya), maupun suprastruktur (sumber daya manusia).

Dalam bidang pendidikan secara kasat mata menggambarkan bahwa masih cukup rendahnya angka partisipasi sekolah dan tingginya prosentase putus sekolah. Banyak anak yang tidak melanjutkan sekolah selain karena tidak adanya biaya, tetapi juga sarana prasarana pendidikan yang belum memadai. Banyak kegiatan pembelajaran dijalankan dengan fasilitas yang minim dan seadanya. Sementara di pihak lain, banyak guru yang belum memenuhi kualifikasi seperti yang telah disyaratkan undang-undang, serta tingkat kesejahteraan guru masih memprihatinkan.

Bidang kesehatan juga mengalami situasi yang tidak kalah mencemaskan. Grafik kematian ibu dan bayi belum cukup signifikan bergerak menurun. Sementara fakta gizi buruk masih akrab dengan kehidupan masyarakat di Kepulauan NTT. Makan empat sehat lima sempurna dan makan tiga kali sehari hanya merupakan retorika ekonomi yang sangat utopis bagi kebanyakan masyarakat NTT. Sementara itu perilaku hidup sehat dan bersih (PHBS) belum sepenuhnya menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya rumah tangga yang belum memiliki kamar mandi, cuci dan kakus yang higienis. Selain itu, tingkat pelayanan kesehatan oleh paramedik juga belum optimal. Hal ini terkendala dengan jumlah tenaga paramedik yang masih minim, berikut tingkat pengalaman dan kualifikasinya yang banyak belum memenuhi standar/syarat undang-undang.

Data kualitatif berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat di Kepulauan NTT menggaratkan masih banyak rumah tangga miskin yang belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi dasar



Narasi Bangsa yang Tercecer

(sandang, pangan dan papan). Kondisi ini terkonfirmasi secara kuantitatif melalui data BPS (per Maret 2015), di mana jumlah penduduk miskin di NTT pada September 2014 berjumlah 991,88 ribu orang (19.60 %) menjadi sebesar 1.159,84 ribu orang (22,61%) pada 2015. Ada peningkatan sekitar 168 ribu orang.

Realitas ini berlanjut pada kondisi minimnya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya, seperti kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi. Minimnya biaya berdampak pada kurangnya jaminan masa depan, sebab tidak ada investasi untuk pendidikan dan keluarga. Kebanyakan masyarakat NTT juga belum memiliki akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan. Menggejala dan meningkatnya angka pengangguran, urbanisasi, TKI ilegal, penjualan manusia (*human trafficking*), kekerasan rumah tangga, perceraian, anak-anak terlantar, kriminalitas, penyakit sosial, disparitas sosial, sporadisasi kerusakan alam, dan menjadi konsekuensi logis dari kondisi di atas.

NTT MESTI BANGKIT!

Fakta dan data empirik ini bisa saja memunculkan pesimisme untuk merdeka dari kerangkeng kemiskinan dengan berbagai dampak sistemik dan pengaruh gandanya (*multiplier effect*). Namun, kita tidak mungkin mau terjebak dalam fatalisme! NTT harus bangkit! Kita harus mampu menegasikan fakta ini! Pemerintah dan masyarakat harus responsif dan progresif membangun komitmen untuk menjawab tantangan GG ini. Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/kota sampai kepada pemerintahan lurah/desa/RT-RW perlu menjalin koordinasi dan konsolidasi untuk merancang program-program yang berkelanjutan (*sustainable living programme*) dengan berbasiskan pada masalah kemiskinan, ketidaksetaraan dan ketidakadilan dan kerusakan lingkungan hidup.



Elaborasi Filosofis, Pedagogik Kritis, Sosial, dan Politik

Partisipasi secara sinergis para tokoh masyarakat agama/ adat, akademisi/ perguruan tinggi, politisi, pegiat LSM, kaum muda/ mahasiswa, dalam menyusun program tindak lanjut yang strategis dan praktis, menjadi suatu kemendesakan. Keikutsertaan berbagai komponen masyarakat ini bersinambung pada aktivitas informasi/ sosialisasi, edukasi/ advokasi, pemberdayaan/ penguatan kepada masyarakat. Bila semua kegiatan ini berjalan efektif, efisien dan berdaya guna, maka bukan tidak mungkin propinsi NTT mulai lepas bebas dari kungkungan kemiskinan, ketidaksetaraan/ ketidakadilan dan kerusakan alam. Kita harus bisa buktikan kepada Indonesia dan kepada dunia, 2030 pasti ada perubahan yang signifikan dari NTT!

Lastest Dummy



Narasi Bangsa yang Tercecer

Lastest Dummy



MASYARAKAT NTT: BISA-KAH MENJADI READING SOCIETY?*

NTT merupakan propinsi berkarakter dan berkhazanah sosial budaya yang berbeda dari masyarakat propinsi lain. Semua ini menjadi 'kekayaan' yang potensial untuk pengembangan NTT ke depan. Untuk sekadar membantu pengembangan propinsi ini, kami mencoba menganalisisnya dari perspektif sosial kemasyarakatan berdasarkan beberapa model perkembangan masyarakat. Dengan ini, mungkin kita secara cerdas menilai masyarakat NTT masuk dalam model yang mana saat ini? Bila masuk dalam salah satu model masyarakat tertentu, maka kemungkinan ada peluang bagi kita untuk dapat mengevaluasi, merencanakan perbaikan, penguatan dan pengembangan yang tepat pada masa mendatang.

* SKH Flores Pos, 31/10/2015 (Penulis pertama, Dr. Marsel R. Payong, M. Pd).



MODEL MASYARAKAT

Pertama, masyarakat yang tidak dapat berbuat apa-apa (Doing Nothing Society), dan menerima apa yang sudah ada dan dianggap baik selanjutnya, tidak ada yang perlu diusahakan lagi. Waktu bisa diulang, karena itu pekerjaan pun bisa ditunda. Kehidupannya sangat alamiah, komunal, primordial, emosional, mistis, dan terarah pada yang adikodrati, supra natural seperti mimpi, ramalan, mitos dan kekuatan metafisis. Dilihat dari karakteristiknya, masyarakat model ini masuk dalam kelas *pra modern*.

Kedua, masyarakat bekerja (working society) yang dicirikan dengan tingginya 'wabah' semangat (etos) kerja. Semangat ini turut dipengaruhi penghayatan waktu yang linear, yang tidak bisa diulang. Pekerjaan harus dikerjakan hari ini, besok masih ada pekerjaan lain. Bekerja untuk mendapatkan uang demi membiayai kehidupannya agar lebih baik dan bermutu. Efektivitas waktu dan efisiensi tenaga/modal menjadi prioritas dalam mengelola kehidupannya, disertai dengan pertimbangan rasional (reasonable) terhadap segala sesuatu. Yang berwangi komunal, mistis, primordial dan emosional secara perlahan meluntur seiring dengan menguatnya rasionalisme, ontologisme dan fungsionalisme (Puersen/Hartoko, 1976). Model masyarakat ini umumnya masuk dalam kelas *modern*.

Ketiga, Masyarakat (sedang) belajar (Learning Society), di mana sudah maju dalam memahami realitas kehidupan yang lebih bermakna. Masyarakat ini tahu bagaimana seharusnya menjalani hidupnya, belajar dari sejarah orang/masyarakat/bangsa lain, termasuk belajar dari kesalahan/kemunduran sejarah masa lalunya. Mereka memaknai waktu secara spiral; ada pergerakan maju, tetapi ada pergerakan mundur untuk bisa belajar/merefleksi/mengevaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan selama rentang waktu tertentu, dan kemudian bergerak maju lagi, sehingga hidup tahap berikutnya menjadi lebih berkualitas dan bermakna. Masyarakat ini sudah cukup



memadai dari kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Melihat modelnya, masyarakat ini masuk dalam kelas *post modern* dengan predikasi tambahannya, masyarakat madani (*civil society*).

Keempat, masyarakat membaca (*reading society*). Masyarakat ini menurut kami adalah masyarakat *pasca post modern*, karena memiliki tingkatan peradaban yang sudah sangat maju. Mereka memiliki habituasi sekaligus antara bekerja, 'belajar' dan membaca. Kegiatan membaca menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan anak kecil sampai orang tua. Membaca menjadi kebiasaan kuat di sekolah, kampus, taman baca, rumah, dapur, pasar, jalan, angkot, halte, stasiun, tempat rekreasi, dll. Bukan saja membaca buku, koran, komik secara manual, tetapi juga membaca secara elektronik.

Secara futuris, membaca adalah kemampuan dari masyarakat untuk membuat proyeksi/prediksi kejadian masa mendatang, dengan membangun skenario (*scenario building*) berdasarkan kekuatan-kekuatan penentu (*driving forces*) yang faktual-empirik sekarang dan di sini. Model masyarakat pada 30-50 tahun ke depan, sudah bisa dibaca mulai saat ini. Karenanya, mereka mampu secara rasional-ilmiah mengontrol, mengantisipasi, dan memproteksi berbagai kemungkinan kejadian kemunduran, degradasi, destruksi, *force majeure*, bahkan perubahan radikal (*sudden shift*) sekalipun. Penghayatan waktu masyarakat ini bukan hanya spiral tetapi spiral yang berkesinambungan dan berkelanjutan secara futurik (*futuric unlimited time*), yang berdampak pada pengelolaan sumber daya secara efektif, efisien, bermakna dan futuris. Mereka memberdayakan kemampuan meta-kognitif, meta-afektif dan meta-psikomotor pada rencana kehidupan yang berkelanjutan (*sustainable living plan*).



MASYARAKAT NTT MASUK MODEL MANA? APA YANG HARUS DIKEMBANGKAN?

Nah sekarang, kita bisa menilai, masuk model masyarakat yang mana? Beberapa kondisi berikut perlu diperhatikan. *Pertama*, laporan USAID (2014) memperlihatkan indeks literasi siswa SD kelas I dan II di NTT hanya 23%, sedangkan kondisi Indonesia 47%. Artinya hanya 23% dari siswa-siswa SD kelas I dan II di NTT yang mampu membaca dan memahami bacaan dengan baik (Kompas, 5/3/2015). *Kedua*, data yang dirilis oleh *Save the Children* dari hasil penelitiannya di Kab. Belu (2012), memperlihatkan kemampuan membaca dan memahami bacaan siswa-siswa SD di sana masih memprihatinkan. Dari 674 siswa sebagai sampel di 35 SD di Kab. Belu, 25% siswa tidak dapat membaca 20 kata umum dan 49% siswa tidak dapat membaca kata-kata dari kalimat sederhana. Selanjutnya, 61% siswa tidak dapat membaca/menjawab pertanyaan dan memahami teks yang dibaca (Tempo, 27/5/2015). Kondisi ini mungkin tidak jauh berbeda dengan kabupaten-kabupaten lain di NTT.

Ketiga, di satu sisi kemampuan membaca siswa masih rendah karena masih terikat dengan budaya lisan, namun di sisi lain para siswa dan juga masyarakat NTT sudah langsung digempur dengan budaya pandang dengar (audio visual), budaya multimedia, budaya digital (digital culture), dan budaya maya (cyber society). Televisi, *handphone*, *smartphone*, akses internet sudah masuk sampai ke kampung-kampung udik dengan tawaran yang sangat instan sehingga membuat masyarakat tidak terpacu untuk membaca. Kondisi ini dapat menimbulkan lompatan katak yang bisa merusak kemampuan membaca masyarakat. Orang lebih interes membaca teks-teks pada *handphone/smartphone* yang singkat (yang sebagian besarnya menyalahi kaidah tata bahasa yang baik dan benar) atau menonton televisi berjam-jam daripada membaca teks pada buku-buku.



Elaborasi Filosofis, Pedagogik Kritis, Sosial, dan Politik

Dari beberapa kondisi di atas menurut hemat kami, masih sulit mewujudkan *reading society* pada masyarakat NTT. Masyarakat membaca merupakan salah satu prasyarat untuk memasuki era masyarakat belajar (*learning society*) menurut Torsten Husen (1974). Jika gemar membaca sulit untuk diwujudkan maka kondisi ini lebih jauh akan berpengaruh terhadap kualitas SDM NTT. Karenanya, perlu ada gerakan bersama seperti gerakan membaca yang mulai digalakkan di sekolah-sekolah bahkan di komunitas-komunitas. Untuk mewujudkannya, Pemda perlu memfasilitasi secara profesional penyediaan perpustakaan keliling dan taman-taman bacaan. Bila perlu revitalisasi KLOMPENCAPIR yang ditinggalkan sejak era reformasi.

Lastest Dummy



Narasi Bangsa yang Tercecer

Lastest Dummy



MEA DAN TIPIKALITAS GURU/ DOSEN PROFESIONAL

(Catatan untuk Wisuda Sarjana STKIP St. Paulus Ruteng
26 September 2015)*

Pada Januari 2015 Komunitas ASEAN terbentuk sesuai dengan amanat *ASEAN Vision 2020* dan *Bali Concord II*. Selanjutnya, para pemimpin 10 negara ASEAN berkomitmen membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA terbentuk dengan satu orientasi, yakni menjadikan ASEAN parameter dan barometer ekonomi global dengan melakukan integrasi ekonomi jelang era pasar bebas. Karenanya kita tidak bisa menafikan lagi kenyataan bahwa produk-produk negara ASEAN akan bertebaran di pasar-pasar Indonesia. Tenaga-tenaga kerja profesional dan terlatih dari negara-negara ASEAN akan berpeluang sama dengan tenaga kerja lokal untuk bekerja pada lapangan kerja seperti rumah sakit internasional, sekolah-sekolah internasional, perusahaan-

* SKH Pos Kupang, 26/09/2015 (Penulis pertama, Dr. Marsel R. Payong, M. Pd.).



Narasi Bangsa yang Tercecer

perusahaan multinasional, dan perbankan internasional. Untuk itu, tugas dan tanggung jawab kita adalah mengantisipasi dengan mempersiapkan SDM yang andal dan berupaya meningkatkan kualitas produk-produk dalam negeri yang kompetitif. Bila hal ini tidak segera diantisipasi maka masyarakat Indonesia menjadi kuli dan penonton, bahkan teralienasi di negerinya sendiri.

KARAKTERISTIK MEA

MEA didasarkan pada konvergensi kepentingan integrasi ekonomi negara ASEAN. Dalam pergerakannya, MEA berbasiskan pada prinsip-prinsip keterbukaan, berorientasi global, inklusif, konsisten dan patuh pada aturan dan sistem multilateral di bidang ekonomi. MEA membangun sistem dan mekanisme yang lebih efektif-efisien dalam memfasilitasi pergerakan bisnis, barang dan jasa, pemberdayaan tenaga kerja terampil serta memperkuat kelembagaan ASEAN itu sendiri.

Adapun karakteristik MEA: *pertama*, terbentuknya pasar berbasis produksi tunggal yang ditandai dengan bebas dan terbukanya aliran barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja terampil dan profesional. *Kedua*, kawasan ekonomi kompetitif yang dimanifestasikan dalam berbagai kebijakan seperti persaingan usaha yang sehat; adanya perlindungan konsumen, pengakuan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang dapat memicu tumbuhnya kreativitas budaya, intelektual dan aplikasi teknologi tingkat tinggi; adanya pembangunan infrastruktur yang komprehensif dalam bidang industri pariwisata dan investasi; serta terbentuknya perdagangan elektronik (*e-commerce*). *Ketiga*, kebijakan pembangunan ekonomi setara yang didukung dengan kebijakan mempercepat pengembangan dan memperkuat daya saing UKM ASEAN dalam mengatasi kesulitan ekonomi makro dan keuangan, serta tantangan dalam iklim perdagangan yang lebih



liberal; mempersempit kesenjangan pembangunan di negara-negara ASEAN dengan menandatangani *initiative for ASEAN integration* (IAI); upaya ekspansi ke dalam ekonomi global; pendekatan terpadu terhadap hubungan ekonomi eksternal; dan meningkatkan partisipasi dalam jaringan pasokan ekonomi global.

TIPIKALITAS GURU/DOSEN PROFESIONAL

MEA sudah menjadi bagian dari komitmen masyarakat Indonesia dalam memajukan peradaban dunia melalui aktivitas ekonomi. Menurut kami, hal mendesak dilakukan pemerintah bersama masyarakat adalah memperkuat ketahanan dan fundamen ekonomi domestik dengan memberdayakan produsen dalam negeri agar mampu menghasilkan produk-produk berdaya saing global. Infrastruktur ekonomi harus diberdayakan, UKM harus didukung dan difasilitasi, serta produk-produk dalam negeri disertifikasi sehingga mudah diekspor.

Sementara itu, upaya peningkatan kualitas suprastruktur pendidikan dini sampai pada pendidikan tinggi menjadi hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Pendidikan Indonesia harus didesain untuk mampu menghasilkan kualitas manusia kompetitif. Dengan meningkatnya kualitas manusia Indonesia maka, bangsa ini juga dapat menjadi pemasok tenaga kerja tidak hanya dalam skala domestik tetapi juga untuk kawasan ASEAN. Salah satu kegiatan yang urgen adalah memberdayakan pendidik (guru dan dosen). Bila dalam diri pendidik sudah melekat tipikalitas profesional maka, dipastikan tenaga yang dihasilkan juga menjadi terampil sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi berstandar internasional.

Menurut Payong (2011) ada beberapa tipikalitas guru/dosen yang profesional selaras spirit MEA: *pertama*, memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan basis keilmuan/keahlian bidangnya. Kualifikasi akademik pendidik dapat ditingkatkan dengan



Narasi Bangsa yang Tercecer

mengikuti proses pendidikan yang intensif sehingga mumpuni di ranah pedagogik, profesional, komunikasi, kepribadian, dan sosial seperti yang disyaratkan dalam UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen. *Kedua*, terlibat dalam pengembangan profesionalisme berkelanjutan. Guru/dosen yang profesional senantiasa terbuka dan tanggap terhadap berbagai perubahan, serta mampu mempertegas profesinya secara berkelanjutan seperti mengembangkan diri, mengembangkan kompetensi keilmuannya, melakukan refleksi dan penelitian-penelitian tindakan kelas, membaca jurnal-jurnal ilmiah, memperluas jaringan kerja, meningkatkan koleksi perpustakaan pribadi, dll. Pengembangan dapat juga dilakukan secara institusional melalui wadah seperti Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), dan komunitas-komunitas akademik di kampus.

Ketiga, memiliki dedikasi dengan etika dan moralitas yang tinggi, serta komit dan tanggung jawab terhadap tugas mencerdaskan siswa/mahasiswa. *Keempat*, terlibat secara aktif dengan menghargai kode etik organisasi profesi keguruan/dosen. Melalui wadah organisasi profesi, guru/dosen dapat saling belajar, menukar pengetahuan dan pengalaman bahkan juga hasil-hasil riset yang dilakukan. *Kelima*, penghargaan yang pantas dan layak terhadap pelayanan guru/dosen sesuai dengan aturan yang berlaku, bukan saja untuk guru/dosen yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) tetapi yang dipekerjakan yayasan/badan penyelenggara pendidikan swasta.

Bagaimana dengan STKIP St. Paulus Ruteng? Momen wisuda kali ini perlu menjadi ruang refleksi dan evaluasi tentang kesiapannya dalam menanggapi tantangan MEA. Lembaga ini perlu senantiasa melakukan pembaharuan kurikulum sesuai dengan tuntutan daya saing nasional dan global. Kebijakan mengakomodasi



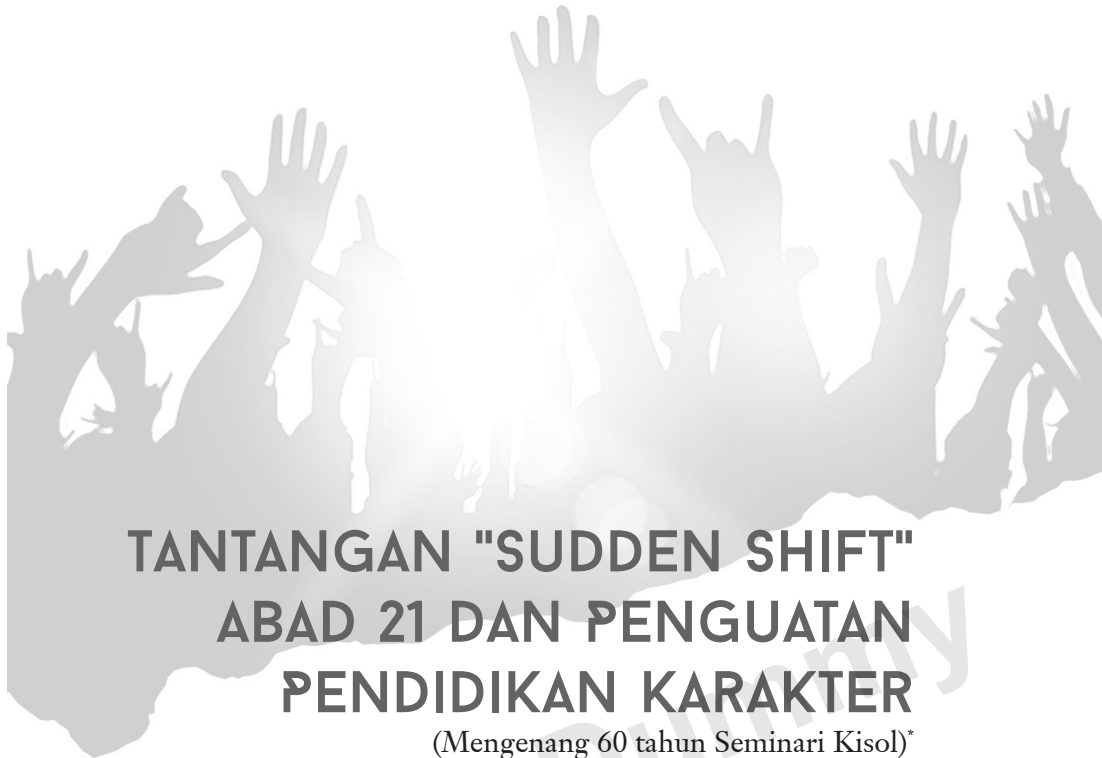
kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) seperti yang dimaklumkan dalam Perpres No. 8 tahun 2012, menjadi hal yang mendesak. Secara konseptual dan praksis, KKNI dinilai dapat menjembatani berbagai bentuk tuntutan standar kualifikasi dan kompetensi minimal ketika seseorang hendak bersaing dalam bursa kerja nasional bahkan internasional.

Upaya yang lain adalah peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan dosen dengan mengirim studi lanjut, magang, pelatihan serta mendorong partisipasi dalam melakukan penelitian skala nasional maupun internasional. Selanjutnya, perlu disiapkan secara optimal sarana prasarana vital demi mendukung pembelajaran yang efektif agar tetap terjaga kesinambungan yang berkualitas antara *input, process, output/outcome*. Pengembangan program-program studi baru merupakan strategi bijak demi mengakomodasi kebutuhan masyarakat lokal, nasional maupun mondial. Bahkan peningkatan status STKIP/STIKes St. Paulus menjadi universitas bukan lagi sekadar wacana, tetapi harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah praktis dengan melibatkan *stakeholders!* Proficiat untuk STKIP Ruteng dan wisudawan!



Narasi Bangsa yang Tercecer

Lastest Dummy



TANTANGAN "SUDDEN SHIFT" ABAD 21 DAN PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

(Mengenang 60 tahun Seminari Kisol)*

Kompas edisi 24 Agustus 2015 memuat tulisan Rhenal Kasali tentang fenomena 'Sudden shift' (tiba-tiba berpindah) pada abad 21. Menurutnya, fenomena ini memiliki karakter perpindahan yang berlangsung begitu tiba-tiba (sudden), cepat (speed), dan mengejutkan (surprise). Fenomena ini berbeda dengan gejala anomali. Bila anomali merupakan perubahan tanpa identitas dan tak teratur, maka 'sudden shift' masih tetap mempertahankan identitasnya tetapi berubah dari waktu, tempat dan cara aktivitasnya secara tiba-tiba, cepat dan mengejutkan. Saya menduga, bisa saja gejala ini muncul karena hilangnya kepercayaan (distrust) yang mendalam terhadap keadaan sosial, ekonomi, politik, budaya,

* SKH Pos Kupang, 08/09/2015.



Narasi Bangsa yang Tercecer

hukum, keamanan, dll. Namun untuk kita saat ini, apapun bentuk perubahan itu, harus ditantang, bila tidak mau menjadi korban (victim of change).

TUNTUTAN PENGEMBANGAN KUALITAS DIRI

Ulasan Kasali sebenarnya sudah diisyaratkan jauh sebelumnya dalam laporan Komisi Pendidikan UNESCO yang berjudul *Learning: The Treasure Within* (Delors, 1996). Komisi ini mengangkat beberapa macam ketegangan yang menjadi tantangan masyarakat dunia di abad 21, seperti ketegangan antara globalisasi dan lokalisasi, antara universalitas dan individualitas, antara tradisi dan modernitas, antara kompetisi dan solidaritas, antara akselerasi/ekspansi pengetahuan dan daya serap manusia, dan antara yang spiritual dan material. Berbagai ketegangan ini sangat masif dan sporadis, dan menuntut kemampuan kita dalam mengelola dan mentransformasikannya pada hal-hal yang positif.

Fenomena 'sudden shift' merupakan salah satu manifestasi dari perubahan. Sementara perubahan adalah keniscayaan, yang mengharuskan kita untuk ikut berubah (*tempora muntantur et nos muntantur in illis*). Agar tidak menjadi tumbal, maka kita wajib menjadi pengendali dan pelaku utama dari perubahan. Kekuatan dan potensi diri perlu dimunculkan sebagai tameng ketikan hendak menantang perubahan tersebut.

Perlu disadari, secara negatif perubahan pasti memunculkan berbagai persoalan yang sulit, rumit dan ambigu. Bila persoalan ini tidak segera dicari jalan keluarnya, maka akan berdampak buruk pada kehidupan selanjutnya. Karenanya, sangat dibutuhkan kualitas manusia yang kompeten, integritas, kompetitif, rasional, kritis, alternatif, dan selektif dalam membahas dan menyelesaikannya. Tetapi juga yang tak kalah penting adalah mampu berpikir dan bertindak solutif.



PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

Ketegangan-ketegangan dan fenomena ‘sudden shift’ menantang kita agar bisa berjuang dan bertahan (*struggle and survive*). Karena itu, upaya-upaya afirmasi karakter diri melalui pendidikan, mesti mengemuka. Pendidikan bukan sekadar aktivitas pemberian informasi, tetapi juga merupakan aktivitas formasi diri manusia; bukan hanya kegiatan alih pengetahuan tetapi juga penanaman nilai-nilai (*core values*). Nilai-nilai sedapat mungkin *inheren* dan terintegrasi dalam kehidupan manusia. Nilai-nilai ini kemudian menjadi basis pembentukan karakter manusiawi.

Pendidikan nilai sebagai piranti pembentukan karakter manusiawi merujuk pada pemikiran optimisme humanistik yang menegaskan bahwa manusia memiliki potensi baik dalam berpikir dan bertindak. Potensi baik ini sedapat mungkin diaktualisasikan dalam bentuk tindakan nyata dan praktis. Jika potensi baik ini tidak ditumbuhkembangkan, maka akan mati. Dengan adanya aktivitas pendidikan, potensi-potensi ini dieksplorasi dan dielaborasi sehingga bisa berkembang dan kemudian membantu pembentukan karakter manusiawi. Yang dimaksudkan berkarakter manusiawi adalah seseorang dengan cerdas melibatkan secara komprehensif, holistik, dan proporsional aspek pengetahuan, perasaan, dan tindakan.

Saya mengadaptasi pandangan pedagog Jerman, Foerster (Pandor, 2012) tentang beberapa gambaran pribadi yang berkarakter manusiawi nan cerdas: *pertama*, memiliki keteraturan internal yang membuat tindakannya senantiasa berorientasi nilai kebaikan. *Kedua*, adanya konsisten (ketetapan) dan koherensi (keterkaitan) antara pikiran dan tindakan nyata. *Ketiga*, memiliki otonomi diri dan menghindari kecenderungan pengaruh/determinasi dari pihak luar (heteronomi). *Keempat*, keteguhan dalam menghendaki apa yang dipandang baik, setia dan memiliki komitmen dan tanggung jawab pada pilihan hidup. *Kelima*, memiliki kepercayaan diri yang kuat pada prinsip saling percaya, kredibel, dan integritas.



BAGAIMANA DENGAN PENDIDIKAN DI SEMINARI KISOL?

Seminari Kisol sudah berkarya dan memproduksi banyak insan bangsa selama 60 tahun. Dalam rentang waktu yang cukup lama ini, kurikulum pendidikan seminari Kisol sudah sering mengalami transformasi sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan perubahan dan perkembangan masyarakat lokal, nasional maupun mondial. Menurut saya, hal mendesak dan perlu mendapat perhatian serius adalah pentingnya penguatan pendidikan berbasis dan berorientasi karakter.

Urgensi pendidikan berbasis dan berorientasi karakter ini berangkat dari pengamatan bahwa ketika masuk seminari, *input* intelektual bagus karena merupakan hasil seleksi yang ketat, dan ketika keluar dari sana kualitas intelektualnya juga sudah sangat mumpuni. Namun, fakta empirik mengisahkan sisi di mana tidak sedikit *output* yang menjadi pribadi *trouble maker* pada sekolah lain, keluarga dan masyarakat. Lantas, apa yang salah? Saya cuma berasumsi, mungkin kita terlalu berbangga pada kemampuan intelektual dan cukup mengabaikan kemampuan emosional, sosial, kultural dan spiritual. Yang dibutuhkan masyarakat bangsa saat ini bukan orang-orang pintar saja, tetapi orang-orang pintar yang memiliki kebiasaan melakukan kebaikan (*habitus operationis bono*) di tengah keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Itulah yang dinamakan kecerdasan. *Ad multos Annos, almamater!*



IDOLATRIA "UANG" TRUMP DAN REALITAS KORUPTIF*

Meskipun Donald Trump sudah menikah resmi dengan seorang model Ivana Marie Zelnickova (1977), tetapi keidolaannya terhadap putri Diana sangat besar. Tanpa menghiraukan perasaan istrinya, dia berani mengumbar pernyataan bahwa Putri Diana adalah istri yang layak diperebutkan. Dalam bukunya *Trump: The Art of the Comeback*, Trump mengungkapkan hasratnya untuk berkencan dengan Lady Diana Spencer setelah cerai dari Pangeran Charles (1996). Namun hasratnya tidak kesampaian karena Putri Diana keburu meninggal dalam kecelakaan (1997). Trump pun menyesal sepanjang hidup dengan mengatakan bahwa Lady Diana satu-satunya perempuan yang tidak bisa diajaknya berkencan.

* SKH Pos Kupang, 21/09/2015.



Narasi Bangsa yang Tercecer

Dengan Putri Diana dia boleh merasakan pahitnya cerita tentang cinta tak kesampaian ini, tetapi dengan banyak perempuan lain, ia dengan mudah mendapatkannya. Apa yang membuat banyak perempuan cantik lengket dengan Trump? Menurut banyak pakar fasion, dia bukanlah laki-laki yang terlalu menarik secara fisiologis, mungkin juga psikologis. Lantas, apa yang membuat banyak perempuan jatuh ke dalam pelukannya? *Money!* Uang menjadi kekuatan maha dahsyat yang bisa dengan mudah mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan. Uang menjadi sembah baru (idolatria) yang diyakini sebagai penentu utama dalam kehidupan.

WABAH IDOLATRIA "UANG" TRUMP

Idolatria dipahami sebagai bentuk penghambaan sekaligus penyembahan terhadap sesuatu/seseorang yang memiliki sumber kekuatan tertentu, tetapi ternyata kekuatan itu sementara dan semu sifatnya. Idolatria menjadi istilah yang pernah melekat dalam sejarah bangsa Israel ketika proses eksodus dari Mesir penderitaan menuju Kanaan pembebasan. Ketika bangsa Israel merasa 'dikhianati' oleh Allah yang sudah berkomitmen membebaskan, muncullah krisis kepercayaan terhadapNya. Krisis kepercayaan ini berdampak pada pembuatan lembu emas sebagai allah baru. Mereka menjadikan lembu emas tersebut sebagai sumber penyelamat dan pembebas. Lembu emas dijadikan sebagai idola baru pengganti Allah, meskipun pada akhirnya Nabi Musa menyadarkan mereka tentang kesemuan idolatria tersebut.

Dalam Kamus Filsafat (Blackburn, 2013), filsuf modern Francis Bacon (1561-1626) mengartikan Idolatria (eidola) sebagai bentuk keteralihan sesaat yang menipu, gambaran semu tentang seseorang/sesuatu, persepsi indra yang semu, dan kecenderungan untuk memuja sesuatu secara berlebihan. Berdasarkan pengertian ini, idolatria dipahami sebagai keterarahan semu dalam mendewakan



atau mengkultuskan seseorang/sesuatu sebagai penentu utama hidup manusia. Salah satu bentuk pendewaan atau Idolatria yang tidak bisa terhindarkan dewasa ini adalah uang. Uang menjadi kekuatan yang dominan dan determinan pada segala bidang kehidupan manusia. Adagium yang menyatakan ‘tidak ada uang, tidak ada kekuatan dan berarti tidak ada kehidupan (no money, no power and its means no life), benar adanya.

Trump sangat identik dengan uang. Hal itu terbukti dengan gaya hidupnya. Bahkan ketika dia terjun dalam kancah politik di negeri Paman Sam, yang diandalkan pertama adalah uang, berikutnya baru ketenaran. Bisa disimpulkan bahwa Trump lebih populer karena uang dibandingkan dengan prestasinya dalam dunia politik. *Money is the first! Trump is money! Money is Trump! So, Trump is the first! Trump is Idolatria!* Ini adalah silogisme yang paling pas dalam menggambarkan sosok Trump. Dengan uangnya, dia bisa membeli benda sekaligus manusia. Selain istri sah dan Putri Diana yang hendak dikencani, nama-nama seperti Maria Marples (1993), supermodel Slovenia Melanija Kanvs (2004), Sarah Palin dan Ann Coulter (2015) merupakan perempuan-perempuan hasil taklukan idolatria Trump. Pertanyaannya, apakah hanya perempuan saja yang takluk dan terpukau dengan idolatria Trump? Oh tidak! Setidak-tidaknya sosok Setya Novanto dan Fadli Zon sudah cukup memberi konklusi kepada saya (mungkin juga masyarakat bangsa Indonesia) tentang takluknya laki-laki pada idolatria Trump.

REALITAS KORUPTIF

Pendewaan terhadap uang mewabah secara signifikan dalam kehidupan bangsa pada dekade terakhir, yang secara faktis dapat mendeskripsikan sekaligus menjustifikasi predikat Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia. *Indonesia Corruption Watch* (CNN Indonesia, 14/09/2015) merilis bahwa selama semester



Narasi Bangsa yang Tercecer

pertama 2015 terdapat 212 pejabat, 28 kepala desa, camat, lurah, 27 kepala daerah dan 24 anggota DPR, DPRD, DPD, dan 97 pihak swasta (direktur, komisar, konsultan) yang diduga dan ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana korupsi. Kerugian negara akibat semua tindakan korupsi sebesar 227,3 miliar. Sementara itu, pada periode Januari-Juli NTT adalah salah propinsi dengan kasus korupsi terbesar dari 10 propinsi di Indonesia (Kompas. Com, 14/09/2015). Jumlah kasus korupsi di NTT mencapai 24 kasus dengan taksiran kerugian negara mencapai 4,1 Miliar.

Di tengah krisis keuangan/ekonomi saat ini, ternyata wabah idolatria uang masih secara nyata menggerogoti kehidupan bangsa ini. Ketika banyak masyarakat yang terdampak krisis, tidak sedikit pejabat yang masih menghamburkan uang dengan dalih perjalanan dinas; dan tidak sedikit juga para pejabat publik yang masih bergaya hidup konsumeris, vulgar, dan glamour. Ironisnya, saat krisis ini, ketika orang miskin masih bertanya ‘apa bisa makan hari ini?’ atau ‘bagaimana bisa makan hari ini?’, para pejabat sudah bertanya ‘makan apa, makan di mana hari ini?’ atau bahkan lebih miris lagi, ‘makan siapa hari ini?’. Akankah wabah idolatria ini terus merusak dan merusak kehidupan bangsa ini? *Wait and see!*



HUT KEMERDEKAAN RI: KEMANA REVOLUSI MENTAL JOKOWI-JK?*

Pada momen HUT Indonesia yang ke-70 kembali kita diingatkan pada *branding* revolusi mental pemerintahan Jokowi-JK. Sejak terbentuknya rezim Jokowi-JK, label revolusi mental menjadi napas yang melekat erat dengan aktivitas pemerintahannya. Sepengetahuan saya, ikon revolusi mental ini telah dikonstruksi melalui berbagai argumentasi dan pendasaran-pendasaran rasional, yang tentunya berangkat dari studi dan kajian kasus terhadap kondisi faktual dan empirik di Indonesia. Kondisi faktual dan empirik ini berkaitan dengan berbagai fenomena degradasi mental beberapa dekade terakhir, yang berimplikasi secara signifikan terhadap rendahnya kualitas kehidupan orang Indonesia. Hipotesisnya adalah jika mental masyarakat bangsa

* SKH Pos Kupang, 16/08/2015.



Narasi Bangsa yang Tercecer

Indonesia baik dan benar, maka dengan sendirinya kehidupannya berkualitas. Mental sangat berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas kehidupan seseorang atau suatu masyarakat bangsa. Saya kira, hal inilah yang menjadi titik pijak dalam penentuan *branding* revolusi mental.

SOSIALISASI DAN EDUKASI YANG BERKELANJUTAN

Bila membuat uji petik, secara umum masyarakat bangsa Indonesia sampai saat ini belum sepenuhnya memahami apa yang menjadi *content* dari revolusi mental, baik dari segi konsep maupun praksisnya. Masyarakat Indonesia belum cukup paham dan mengerti apa yang 'dimau' oleh para konseptor revolusi mental. Pada galibnya, pemahaman yang komprehensif dan utuh tentang konsep dan praksis revolusi mental ini menjadi hal mutlak untuk semua masyarakat bangsa Indonesia. Hal ini menjadi penting agar menghindari salah penafsiran, salah pengertian dan keablasan dalam implementasi. Untuk menghindari hal tersebut, sejatinya pemerintahan Jokowi-JK perlu membangun kembali basis komitmen yang jelas dalam mengaktualisasi dan mengkontekstualisasikan konsep dan praksis revolusi mental.

Sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan dan intens bertujuan untuk memberi penguatan dan konfirmasi, apakah konsep dan praksis revolusi mental relevan dan implikatif serta berdampak signifikan bagi perubahan bangsa Indonesia atau tidak. Dengan demikian, revolusi mental bukan hanya 'milik' pemerintahan Jokowi-JK saja, tetapi juga menjadi ikon yang inheren dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Revolusi mental semestinya merasuk cara berpikir, bersikap dan berketerampilan hidup masyarakat Indonesia. Revolusi mental harus menjadi roh yang



menyemangati sendi-sendi dan dimensi-dimensi kehidupan orang Indonesia dalam bidang pendidikan, kesehatan, agama, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum.

Ketika revolusi mental ini menjadi sesuatu yang baik dan mendesak untuk bangsa Indonesia saat ini, maka seharusnya revolusi mental ini menjadi bahan diskusi di rumah, ruang kelas, ruang kuliah, ruang kerja kantor, di dalam bis, dalam kereta api, di warung kopi, di warung makan, ladang, sawah, pantai, dan sebagainya. Revolusi mental juga seharusnya menjadi konten dari kurikulum pendidikan dari tingkat pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi, isi dari berbagai kegiatan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat baik dari kota sampai ke desa, isi dari program-program pembangunan di tingkat nasional sampai pada tingkat lokal, dan isi dari khotbah para pemuka agama dan pemuka adat, isi dari kajian-kajian para birokrat, teknokrat, ekonom, sosiolog, budayawan, politikus, peneliti dan pembelajar.

Pemerintahan Jokowi-JK harus bisa membuktikan bahwa revolusi mental bukan hanya menjadi kemasan instan dan pragmatis, atau lebih buruk dari itu, hanya menjadi pepesan kosong dan sekadar konsep gagah-gagahan untuk menarik minat dan simpati konstituen pada pemilihan presiden kali lalu. Pemerintahan Jokowi-JK mesti meyakinkan secara adekuat dan valid kepada masyarakat bangsa Indonesia bahwa revolusi mental menjadi spirit yang mampu menggerakkan perubahan kehidupan bangsa ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu dan mendesak adanya upaya-upaya penguatan dan pengembangan yang intens dalam mengimplementasikannya. Perlu dirancang program-program sosialisasi dan edukasi yang mendalam dan terus menerus dan secara detail dalam praksisnya. Jika tidak, revolusi mental akan menjadi preseden buruk bagi pemerintahan Jokowi-JK dan hanya menjadi label yang kadaluwarsa dan usang sampai akhir masa jabatan.



PERLU BELAJAR DARI SEJARAH REVOLUSI

Sejarah di beberapa negara maju menunjukkan bahwa revolusi tidak berlangsung begitu saja tanpa melalui proses yang panjang dan melelahkan. Para pencetus revolusi dengan tekun mensosialisasi dan edukasi, bahkan sampai membuat agenda program-program detail. Sosialisasi, edukasi dan program-program detail tentang revolusi tersebut bertujuan agar menghindari penyimpangan, ketidakpahaman, salah tafsir, salah konsep dan salah praksis dalam melaksanakan revolusi tersebut. Misalkan saja, konsep revolusi Karl Marx (1818-1883) di Jerman. Marx dan para pengikutnya tidak menjadikan konsep revolusi ini sekali jadi, tetapi melalui proses lama, dengan melakukan berbagai kegiatan yang membantu pemahaman dan pengertian masyarakat tentang revolusi tersebut. Pada akhirnya, revolusi ini menjadi inspirasi bagi banyak tokoh pembaharuan untuk melakukan perubahan-perubahan di negaranya dalam berbagai bentuk dan manifestasinya, seperti revolusi sosial Prancis pada tahun 1789, Revolusi sosial China pada tahun 1949, Revolusi politik Jerman pada tahun 1933, dan Revolusi politik Turki pada tahun 1921. Saya yakin, revolusi mental Jokowi-JK secara konseptual teoritik bahkan praksis, terinspirasi dari kejadian-kejadian revolusi yang telah berlangsung di negara-negara di atas. Tinggal sekarang, bagaimana rezim Jokowi-JK belajar dari sejarah-sejarah dan mengkontekstualisasikannya dengan kebutuhan masyarakat bangsa Indonesia.



MENGENAL DIMENSI- DIMENSI REVOLUSI MENTAL*

Pada opini SKH Pos Kupang edisi 14 Agustus 2015 dengan judul: *HUT Kemerdekaan RI: Kemanakah Revolusi Mental Jokowi-JK?*, saya telah membahas tentang urgensi dari sosialisasi dan edukasi konsep dan praksis revolusi mental, yang sudah menjadi semangat dasar roda pemerintahan Jokowi-JK. Sosialisasi dan edukasi bertujuan agar adanya keberlanjutan dan internalisasi konsep maupun praksis revolusi mental. Revolusi mental mesti menjadi *branding* dan *ikon* yang inheren dengan kehidupan masyarakat bangsa Indonesia.

Revolusi mental dapat diartikan sebagai gerakan radikal dan progresif yang menuntut setiap orang untuk mengubah dan memperbaiki mental dalam menghayati kehidupannya. Sebagai

* SKH Pos Kupang, /09/2015.



Narasi Bangsa yang Tercecer

gerakan yang radikal dan progresif, perubahan dan perbaikan tersebut seharusnya secara signifikan dan implikatif mengemuka dalam mental cara berpikir, berperilaku dan berkemampuan hidup. Menurut ideal saya, perbaikan dan perubahan mental berpikir, berperilaku, berketerampilan hidup dapat menyangkut sekurang-kurangnya tiga dimensi, yakni: personal, sosial dan budaya.

DIMENSI PERSONAL

Revolusi mental sangat berhubungan dengan eksistensi seseorang. Revolusi mental sejatinya harus menegaskan personalitas seseorang dalam memiliki karakter-karakter manusiawi. Revolusi mental mengubah hakikat manusia dari hanya sekadar bertindak manusia (*actus hominis*), menuju pada pribadi manusia yang mampu bertindak manusiawi (*actus humanus*). Revolusi mental perlu mengubah personalitas manusia Indonesia pada berbagai tindakan-tindakan manusiawi yang berdampak pada kondisi dan situasi bersama yang lebih baik, lebih maju dan lebih bermartabat.

Tindakan-tindakan manusiawi ini termanifestasi dalam beberapa modus: *Pertama*, modus berpikir, yakni perubahan pola konvensional, tradisionalistik, fundamentalistik, monolitik dan monokulturalis yang cenderung destruktif menuju pola berpikir yang lebih modern, moderat, multikulturalis yang mengarah pada hal-hal yang konstruktif. Modus ini membentuk pribadi yang mampu berpikir positif (*positive thinking*) terhadap orang lain dan terhadap perubahan. Cara berpikir ini juga berkaitan dengan keberanian berpikir alternatif, *out of box*, kritis dan selektif; berani keluar dari kegelapan budi; ketidaktahuan menuju keadaan berpengetahuan. Karakter-karakter cara berpikir ini menjadikan manusia Indonesia lebih berdaya dan diperhitungkan oleh manusia lain.



Kedua, modus bersikap yang terbentuk dalam perubahan dari sikap egosentris, egosektoral, arogan, antikritik, eksklusif, defensif, ambigu menuju pola laku yang mementingkan kebaikan umum (*bonum commune*), rendah hati, mampu menerima kritik, inklusif, bermoral, beretika, dan terbuka pada masukan dan mampu mengambil keputusan secara arif dan bijaksana. Banyak masalah yang terjadi dewasa ini, antara lain: pelecehan, pembunuhan, perang, dan korupsi, bukan karena masalah pola pikir, tetapi lebih karena pola sikap yang tidak cukup berkualitas. Banyak orang Indonesia yang memiliki pengetahuan yang cukup, tetapi karena tidak didukung oleh sikap yang baik, tetap saja melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan sesama, melawan norma dan hukum yang berlaku.

Ketiga, modus berterampil atau berkemampuan hidup (*life skill*) yang terpapar dalam kemampuan untuk bertahan, berjuang dan meningkatnya kualitas hidup. Pengetahuan dan sikap yang dimiliki oleh seseorang, diafirmasi dengan berbagai keterampilan hidup yang berkualitas secara jasmani maupun rohani dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi dan politik. Revolusi mental berorientasi pada terbentuknya pribadi yang mampu bekerja keras, menghindari mental instan, pragmatis dan *easy going*, lebih mementingkan proses, dan menghindari kerja yang menghalalkan segala macam cara.

DIMENSI SOSIAL

Revolusi mental juga menyangkut hubungan relasional dalam suatu masyarakat bangsa. Idealnya revolusi mental mampu membangun dan membentuk relasi sosial yang konstruktif dan mengandung rasa adil, setara, nyaman dan sejahtera. Revolusi mental mesti menjadi proses untuk memfasilitasi perubahan kondisi masyarakat dari yang berkarakter arkais-brutal, yang melihat sesama sebagai



Narasi Bangsa yang Tercecer

lawan (*homo homini lupus*), kepada kondisi masyarakat yang melihat sesama sebagai sesama manusia (*homo homini socius*), dimana harkat dan martabatnya dihargai; atau ke tingkat taraf masyarakat bangsa yang lebih madanis-religius, yakni melihat sesama sebagai gambaran Tuhan yang menciptakannya (*homo homini Deus*). Revolusi mental menjadi basis dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara Indonesia secara lebih bermartabat dengan menjunjung tinggi rasa keadilan, kebaikan dan kebenaran umum.

Indonesia terkenal dengan keramahan, kesantunan, tolong menolong, dalam bermasyarakat. Revolusi mental semestinya menegaskan karakter-karakter sosial ini agar tidak kemudian hilang, tetapi justru dapat diturunkan kepada generasi-generasi selanjutnya dengan kurikulum pewarisan yang berdesain jelas, sistematis dan terstruktur.

DIMENSI KULTURAL

Revolusi mental berkaitan dengan kemampuan manusia dalam suatu masyarakat bangsa untuk memperjuangkan, mempertahankan, menumbuhkan dan mengembangkan serta memberdayakan kehidupannya pada kondisi yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Revolusi mental ini berkaitan dengan dimensi kultural, di mana berlangsungnya pembudayaan (kulturasi) dalam membentuk karakter manusia dalam memahami dan menghayati budaya sebagai bagian dari kesehariannya. Revolusi mental menjadi wahana agar entitas, identitas dan integritas budaya masyarakat Indonesia semakin dikenal oleh masyarakat berbudaya lain. Revolusi mental memformasi pribadi-pribadi manusia Indonesia yang arif, bijaksana, berintegritas, inklusif dan demokratis.

Kulturasi yang bermakna terkonfirmasi dari menguatnya sistem pengetahuan, mampu berteknologi tingkat tinggi, berbahasa secara baik, benar, dan santun, membangun sistem ekonomi berbasis



Elaborasi Filosofis, Pedagogik Kritis, Sosial, dan Politik

kerakyatan dan kemaslahatan umum, membangun sistem sosial politik yang demokratis, membangun kearifan lokal, menjaga lingkungan alam, membangun kehidupan yang bersih dan sehat, membangun kerja sama dan jaringan kerja yang luas dan bermanfaat.

Lastest Dummy



Narasi Bangsa yang Tercecer

Lastest Dummy



CERDAS DAN ETIS DALAM PILKADA*

Pilkada serentak 9 Desember 2015 merupakan wahana demokrasi, agar masyarakat daerah dapat secara langsung memilih pemimpinnya. Ada 269 kepala daerah yang akan dipilih, 9 provinsi untuk gubernur dan wakil gubernur, 36 kota untuk wali kota dan wakil walikota, dan 224 kabupaten untuk bupati dan wakil Bupati. Terdapat 537 jumlah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia atau 53 persen wilayah di Indonesia yang menggelar pesta rakyat ini. Sementara itu, ada 852 pasangan calon yang terdiri dari 21 pasangan calon untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 714 untuk pemilihan bupati/wakil bupati, serta 117 pasangan calon untuk pemilihan walikota dan wakil walikota. Sedangkan pemilih untuk Pilkada serentak ada sekitar 100 juta.

* Tidak dipublikasikan.



Narasi Bangsa yang Tercecer

Menilik dari besarnya persentase wilayah, maka suksesnya Pilkada serentak di beberapa daerah ini menjadi parameter bagi tatanan demokrasi nasional.

Pilkada serentak merupakan yang pertama kali dalam sejarah bangsa, yang telah ditetapkan berdasarkan pasal 201 (ayat) UU No. 1 tahun 2014, UU No. 1 tahun 2015, dan UU No. 8 tahun 2015. Sebagai yang pertama, Pilkada serentak ini menjadi barometer untuk pelaksanaan demokrasi pada masa-masa mendatang. Bila berdasarkan evaluasi, Pilkada serentak ini sangat konstruktif untuk membangun kedewasaan demokrasi khususnya, dan membantu pembangunan bangsa pada umumnya, maka pendekatan atau model demokrasi seperti ini tetap menjadi pilihan yang terbaik bagi negara dan masyarakatnya. Asumsinya, proses demokrasi yang dijalankan secara baik, benar, dan bermanfaat, maka akan berdampak positif bagi kenyamanan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat bangsa.

MASYARAKAT PEMILIH YANG CERDAS

Banyak pihak berharap penuh bahwa selain Pilkada serentak menjadi momentum pemenuhan hak-hak politik masyarakat secara langsung, inklusif dan demokratis, tetapi juga menjadi ruang untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif demi percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Karenanya, demi memunculkan pemimpin yang berkualitas pada lima tahun mendatang, dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat dengan menggunakan hak suaranya secara cerdas. Masyarakat harus bisa menunjukkan bahwa dirinya adalah pemilik (subjek) dari pesta demokrasi ini untuk menentukan pemimpin yang terbaik bagi dirinya. Selain itu, tingginya keterlibatan masyarakat berkontribusi baik terhadap kuatnya struktur fondasi demokrasi bangsa.



Sebagaimana pesta demokrasi sebelumnya, Pilkada serentak ini berpotensi timbulnya masalah dan konflik. Masalah dan konflik yang bisa saja muncul dalam tataran teknis berikut proses penyelenggaraannya, menuntut sikap cerdas dari masyarakat. Menurut saya, kecerdasan masyarakat terletak pada: *Pertama*, mendalamnya pemahaman terhadap visi, misi serta program kerja Pasangan calon (Paslon) yang sudah didiseminasikan melalui sosialisasi dan kampanye. Masyarakat yang cerdas dalam memilih kepala daerahnya, pasti rasional dan dapat menghindari unsur irasional, emosional dan primordial. *Kedua*, memilih secara jujur, adil, terbuka dan tidak terjebak dalam permainan politik busuk dan uang dalam segala bentuknya, yang secara yuridis mencederai amanat pasal 47 UU No. 8 tahun 2015 tentang Pilkada, tetapi juga secara fundamental merusak citra nurani sebagai manusia.

Ketiga, mampu mengelola isu-isu, berbagai provokasi/agitasi dan upaya-upaya lain untuk memecah belah masyarakat sebelum dan sesudah pemilihan. Tingginya eskalasi iklim politik akan menyebabkan panasnya atmosfer relasi sosial. Dalam rangka ini, masyarakat perlu mengendalikan pikiran, sikap dan perkataan (ujaran), yang berpotensi menciptakan konflik horizontal dan gejala separatis, sesuai dengan isi Surat Edaran Kapolri No. SE/06/X/2015 tentang *Hate Speech* (Opini Pos Kupang, 19/11/2015).

Keempat, mampu mengawal independensi para penyelenggara Pilkada (KPU, Panwas) sesuai UU No. 15/2011, UU No. 1/2015, Peraturan KPU No. 2/15; dan netralitas PNS, TNI/Polri sesuai UU ASN No. 5/2015 dan Surat Edaran Menteri PANRB No. B/2355/M.PANRB/07/2015. Masyarakat yang cerdas berhak melapor kepada pihak-pihak yang berwajib bila ada oknum Lembaga penyelenggara Pilkada dan PNS, TNI/Polri yang tidak independen dan tidak netral.



PASANGAN CALON YANG ETIS/MORAL

Selain KPU, pemerintah, masyarakat pemilih dan partai politik; pasangan calon juga adalah pelaku utama dalam Pilkada serentak. Sebagai pelaku utama, Paslon berperan sentral karena sudah menjadi figur umum, yang pikiran, sikap dan perkataannya sangat berpengaruh terhadap suasana kebatinan masyarakat. Karenanya, mereka harus mengedepankan integritas dan akuntabilitas etis/moral politiknya, dan mampu mengedukasi masyarakat untuk berdemokrasi dalam kegembiraan/keriangan, termasuk menerima fakta kekalahan. Selain memiliki *bard skills* dalam meyakinkan visi, misi dan program kerjanya, para Paslon mesti memiliki *soft skills* seperti bersaing sehat, elegan, jujur, santun, ikhlas, dan siap kalah. Dalam Pilkada, kemenangan memang menjadi target, tetapi jangan sampai menghalalkan segala cara. Hindari permainan politik yang kasar, saling gesek, dan cenderung anarkis. Ibarat bermain sepakbola, Pilkada adalah *friendly match*, dengan spirit *fair play*, dan menjauhi peran sebagai *match fixer* yang melakukan mufakat/sekongkol dengan pihak tertentu untuk pengaturan skors/hasil pemilihan demi suatu kemenangan.

Salah satu imperatif etis/moral Pilkada adalah menghindari politik busuk (uang). Praksis politik uang dalam segala manifestasinya secara substansial mengganggu spirit Pilkada sebagai yang jujur dan adil. Lebih penting dari itu, sangat merusak hati nurani Paslon itu sendiri dan mental masyarakat. Ungkapan Latin mengatakan: *crescit amor nummi, quantum ipsa pecunia crevit*, yang berarti bahwa bertambahnya cinta akan uang, sebesar itu pula nafsu untuk mengeruk uang. Politik uang selain akan mencederai demokrasi, tetapi juga akan menciptakan impresi, persepsi dan gambaran negatif masyarakat umum tentang sosok pemimpinnya nanti. Merancang permainan busuk (uang) demi kemenangan politik, sama hal dengan merancang kegagalan. Kegagalan itu adalah



Elaborasi Filosofis, Pedagogik Kritis, Sosial, dan Politik

kegagalan moral. Ingatlah ungkapan Seneca (4 SM-65 M) ini:
“Yang memperoleh imbalan dari sebuah kejahatan adalah dia yang melakukannya (*cui prodest scelus, is fecit*).

Lastest Dummy



Narasi Bangsa yang Tercecer

Lastest Dummy



MAHAR POLITIK: PERTARUNGAN UANG DAN KUALITAS DIRI*

Terminologi 'mahar' menjadi sangat fenomenal di tengah hiruk pikuk pencalonan para kandidat kepala daerah pada Pilkada serentak 9 Desember 2015. Mahar secara umum dapat dipahami sebagai sejumlah materi (uang, perhiasan, dll) yang diberikan oleh seseorang laki-laki dan keluarganya kepada seorang perempuan dan keluarganya ketika meminang perempuan tersebut untuk dijadikan istri atau anggota keluarga dari pihak laki-laki. Dalam sistem perkawinan patrilineal 'mahar' selain sebagai bentuk kerelaan (tidak harus), tetapi juga pada sisi tertentu merupakan suatu yang imperatif (keharusan) dari pihak laki-laki untuk diberikan kepada pihak keluarga perempuan.

* SKH Flores Pos, 03/08/2015.



Narasi Bangsa yang Tercecer

Besarnya kecilnya mahar sudah pasti sangat tergantung pada kualitas-kualitas tertentu yang melekat pada diri perempuan dan keluarganya dan dalam diri laki-laki dan keluarganya. Kualitas-kualitas itu antara lain, strata, status atau posisi sosial, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Pada umumnya kualitas-kualitas ini berpengaruh secara signifikan dan berkorelasi secara positif terhadap besar kecilnya mahar yang diberikan atau diwajibkan. Namun, selain kualitas-kualitas di atas yang berpengaruh pada besar kecilnya mahar, juga tergantung pada lobi-lobi yang biasa dilakukan pihak keluarga yang difasilitasi oleh seorang utusan dari masing-masing pihak keluarga. Kemampuan-kemampuan dari lobi dari wakil keluarga cukup menentukan berhasil tidaknya kesepakatan dua keluarga tentang mahar tersebut.

Dalam perspektif sosiologi perkawinan mahar diartikan sebagai bentuk tanda jadinya hubungan perkawinan antara dua sejoli. Mahar menjadi menjadi manifestasi material tentang sahnya hubungan suami istri. Bila urusan mahar ini sudah selesai, maka sangat terbuka lancarnya urusan selanjutnya seperti akad nikah baik secara keagamaan dan juga dalam bentuk resepsi dan keramaian lainnya. Dalam sistem kekerabatan di beberapa tempat di nusa tenggara, mahar sering diistilahkan dengan 'belis'. Belis atau mahar ini secara legal, yuridis, dan formal tidak pernah diatur. Semuanya tidak didasarkan pada hitam di atas putih (tertulis), tetapi lebih berdasarkan pada kepercayaan, yang berujung pada kesepakatan dan komitmen. Peningkaran dan penyelewengan terhadap kepercayaan, komitmen dan kesepakatan tidak secara signifikan berdampak pada sanksi hukum formal.

Secara teoretik istilah mahar tidak pernah dikenal dalam dunia perpolitikan. Istilah umum yang mungkin mendekati istilah mahar adalah biaya politik (*political cost*) dan politik uang (*money politic*). Menurut para pakar dan praktisi politik, biaya politik lebih



dilihat secara positif sebagai sesuatu yang inheren dalam kegiatan ideal politik, tetapi politik uang merupakan konsep dan praktik negatif, yang mencederai makna ideal politik. Namun sampai saat ini secara faktual empiris, baik biaya politik dan politik uang sulit didistingksi secara jelas. Seringkali orang berdalih melakukan politik uang dengan menyebutnya sebagai biaya politik. Selanjutnya, apakah istilah ‘mahar politik’, meski tidak memiliki teori, dan diatur secara ekspilist dalam undang-undang, dapat menjadi terminologi baru dalam konsep dan praksis politik?

Istilah mahar rupanya dengan mudah diadopsi dan diadaptasi dan bahkan dikawinkan dengan istilah politik sehingga muncullah frasa ‘mahar politik’. Dengan merujuk pada ulasan tentang mahar di atas tadi, maka saya dapat mengartikan ‘mahar politik’ sebagai salah satu manifestasi material dalam urusan politik. Dalam hal ini urusan tentang pinang meminang antara para pasangan bakal calon dengan pihak partai yang menurut UU Pemilu memiliki keterwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat suatu kabupaten/kota. Dalam konteks politik, pihak perempuan adalah partai atau gabungan partai yang memiliki keterwakilan di DPR; sedangkan pihak laki-laki adalah para bakal calon yang melamar pada partai atau gabungan partai. Tentang besar kecilnya mahar politik, sama seperti urusan adat perkawinan, sangat tergantung pada pertimbangan ‘kualitas’ yang melekat pada bakal calon kepala daerah dan partai yang calon pengusung.

Pertimbangan ‘kualitas’ ini sudah pasti merujuk pada rekam jejak nasional partai tersebut pada perolehan suara pemilu legislatif 2014 lalu. Partai-partai besar yang meraup suara besar, sudah tentu menjadi incaran dari banyak paket bakal calon kepala daerah. Logika pasar mengatakan bahwa ketika permintaan banyak, maka harga pasti naik. Dalam hal ini menjadi jelas, mahar politik partai besar, pasti besar pula. Selanjutnya semakin besar kredibilitas satu partai, maka semakin banyak banyak pula yang berminat padanya.



Narasi Bangsa yang Tercecer

Selain calon partai pengusung berkualitas dan kredibel secara nasional, tentu juga berkualitas dan kredibel secara lokal. Partai pengusung harus memiliki kepercayaan masyarakat yang tinggi, dibuktikan dengan prosentase keterwakilan yang potensial dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah. Dengan demikian, semakin berkualitas dan kredibel partai pengusung dan semakin banyak keterwakilannya di DPR, maka bisa diproyeksi, semakin besar pula mahar yang diminta dan diberikan oleh pelamar. Dengan demikian, bakal calon kepala daerah yang memiliki pundi-pundi tebal saja yang berpeluang mendapatkan kendaraan partai besar dan memenuhi syarat minimal mendaftar sebagai paket calon kepala daerah.

Pada sisi lain, kualitas peminang juga turut berpengaruh pada kesepakatan mahar. Persisnya, kesepakatan mahar semakin lancar, bila paket bakal calon dianggap bisa 'dijual' dalam pertarungan Pilkada 9 Desember 2015 mendatang. Kualitas itu tampak pada tingkat popularitas dan elektabilitas paket bakal calon. Paket bakal calon yang memiliki popularitas sekaligus elektabilitas yang tinggi sudah barang tentu menjadi salah satu input dalam kesepakatan mahar politik. Mekanisme uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) dan pemaparan visi dan misi dari para bakal calon dalam berbagai tingkatannya bisa ditafsirkan sebagai mekanisme formal untuk membuat kesepakatan tentang mahar politik ini.

Dalam mekanisme ini partai bisa melihat kredibilitas, kualitas, rekam jejak, kapasitas, kapabilitas dan kompetensi-kompetensi yang dimiliki bakal calon kepala daerah. Paket bakal calon kepala daerah yang visioner, kapabel dan kompeten dapat menjadi bahan pertimbangan partai untuk diterima lamarannya, yang berarti memberi ruang pada kesepakatan mahar. Pada sisi ini, mahar politik bisa jadi memiliki makna baru, bukan lagi hanya sebagai manifestasi material saja, tetapi juga manifestasi kualitas. Dalam hal



ini mahar politik adalah frasa mahar politik yang dapat dimaknai manifestasi kualitas dan kredibilitas dari bakal calon kepala daerah maupun manifestasi kualitas dan kredibilitas dari partai pengusung.

Selain itu, variabel kualitas dan kredibilitas bakal calon dan calon partai pengusung, persoalan kesepakatan besar kecilnya mahar, juga tergantung pada variabel intervensi, yakni kemampuan lobi-lobi politik yang dilakukan oleh para bakal calon kepala daerah, berikut timnya. Para bakal calon yang memiliki kemampuan lobi yang efektif, baik dalam dirinya sendiri maupun timnya, bisa saja mendapatkan tanda tangan partai tertentu dengan mahar yang kecil bahkan gratis. Dalam hal ini, kecerdasan sosial atau jaringan politik dari bakal calon menjadi kekuatan yang tidak boleh dianggap remeh. Ada banyak paket atau orang yang memenangkan pertarungan politik di beberapa tempat, bukan karena faktor uang, tetapi karena memiliki kemampuan lobi, kemampuan sosial, dan jaringan yang luas.

Bila kesepakatan mahar politik ini sudah terjadi antara pihak partai atau gabungan partai dan bakal calon, maka keduanya bisa berpeluang masuk pada tahap pencalonan kepala daerah. Sesuatu yang harus diingat bahwa meskipun politik dan kegiatannya diatur secara yuridis formal di Negara ini, tetapi urusan 'mahar politik' ini tidak pernah diatur secara yuridis formal. Karena itu, pengingkaran, penyimpangan dan inkonsistensi dalam kesepakatan tidak akan pernah dapat diselesaikan melalui domain hukum. Dengan demikian, bila ada kasus di mana satu partai atau gabungan partai ternyata telah menerima mahar dari bakal calon lain, maka akan sangat sulit menyelesaikannya melalui jalur hukum.

Dari hasil telusuran di atas, terdapat beberapa poin yang bisa mengemuka. *Pertama*, meskipun mahar politik tidak pernah dikonsepsikan dalam teori politik, undang-undang dan AD/ART Partai, tetapi secara faktual-empirik terjadi dalam konstelasi politik



Narasi Bangsa yang Tercecer

jelang Pilkada. Hal ini tidak bisa dipungkiri lagi. Kenyataan ini menegaskan hipotesis bahwa politik itu mahal, tidak murah dan tidak gratis. Berdasarkan hipotesis di atas, siapa saja yang ingin terlibat dalam dunia politik, tentunya harus mempersiapkan pundi-pundi yang tebal. Meskipun ada orang memiliki kapasitas, kapabilitas dan kompetensi yang mumpuni, tetapi tidak didukung dengan pundi-pundi yang tebal, maka akan sulit untuk mendapatkan rekomendasi partai.

Kedua, mahar politik dalam hal ini tidak hanya diartikan sebagai manifestasi material semata-mata, tetapi juga menjadi manifestasi kualitas. Manifestasi kualitas yang ada dalam diri paket bakal calon kepala daerah dan dalam diri partai pengusung. Bila ada bakal calon yang sakunya tebal tetapi bila tidak didukung oleh kemampuan-kemampuan sebagai seorang pemimpin, maka pasti partai akan mempertimbangkan untuk tidak mengusungnya. Meskipun dalam kasus tertentu, ada partai yang mengesampingkan pertimbangan-pertimbangan kualitas tersebut. Partai yang kredibel dan konsisten pasti menjadikan pertimbangan kualitas sebagai yang utama dalam membuat kesepakatan mahar politiknya. Hal ini akan berlanjut pada tanggung jawab politik dari partai pengusung untuk memenangkan paket yang diusungnya.

Konsep dan praksis mahar politik, dalam konteks pembelajaran politik menjadi sangat relevan dan implikatif. Relevansi dan implikasinya mungkin terletak pada dua sisi. Sisi pertama adalah sisi negatif, di mana politik diidentikan dengan uang dan kemahalan. Selain itu itu, fenomena mahar politik sebenarnya perwujudan dari mental instan dan pragmatis. Mental instan dan pragmatis ini terkonfirmasi dari gaya-gaya hidup modern yang serba mau cepat selesai dan menyepelkan proses. Implikasinya adalah orang bisa menggunakan segala cara untuk mendapatkan sesuatu, termasuk dengan mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya. Keadaan ini



mengartikulasikan tentang diri yang memiliki nafsu untuk berkuasa (*desire to power*) yang tidak terbandung lagi. Nafsu berkuasa yang sangat tinggi menjadikan kekuasaan sebagai objek yang bisa dibeli dan digadaikan. Dengan uang kekuasaan dan jabatan dapat dibeli; selanjutnya kekuasaan dan jabatan dapat ‘membeli’ (mendatangkan kembali) uang yang sudah dikeluarkan; bahkan lebih banyak dari yang sudah dikeluarkan dulu untuk membeli kekuasaan dan jabatan.

Sisi kedua adalah sisi positif, di mana kualitas menjadi garansi yang mengedepan dewasa ini. Setiap pribadi dan pasangan yang mau bertarung dalam kancah apa saja, termasuk politik, mesti memupuk dan memelihara kualitas-kualitas tertentu dalam dirinya. Era sekarang adalah era kompetensi dan profesionalitas. Oleh karena itu, kesiapan diri dengan berbagai kecerdasan, baik personal maupun sosial (jaringan), menjadi suatu yang tidak boleh tidak (*condition sine qua non*). Dewasa ini, masih banyak institusi politik yang kredibel dan bonafit, secara konsisten menegakkan prinsip kualitas dalam merekrut anggota atau paket yang hendak diusungnya. Untuk institusi politik seperti ini, uang menjadi pertimbangan kesekian. Bahkan ada partai tertentu yang memiliki tanggung jawab politik dengan mem-*back up*, memfasilitasi, dan bahkan membantu secara finansial proses pemenangan paket tertentu, yang dianggap berkualitas, populer dan memiliki kemampuan elektoral yang baik dalam pertarungan politik pemilihan kepala daerah. Bentuk tanggung jawab politik ini merupakan eksplisitasi dari komitmen dalam membuat kesepakatan mahar politik.



Narasi Bangsa yang Tercecer

Lastest Dummy



KAPASITAS, POPULARITAS DAN ELEKTABILITAS DALAM PILKADA SERENTAK*

Pilkada serentak yang dipentaskan pada 9 Desember 2015 mendatang sudah pasti mengisyaratkan tentang bagaimana seharusnya para paket calon kepala daerah dan wakil kepala daerah mempersiapkan diri. Menurut saya, beberapa variabel di bawah ini mesti dipertimbangkan secara matang dan komprehensif oleh para paket dan tim suksesnya bila ingin menang dalam kontestasi Pilkada serentak nanti. Variabel-variabel tersebut, yakni: kapasitas, popularitas, dan elektabilitas.

* SKH Flores Pos, 07/09/2015.



KAPASITAS DIRI

Variabel kapasitas yang dimaksudkan adalah kesiapan diri. Variabel ini menjadi penting ketika seseorang hendak menang dalam suatu pertarungan atau kompetisi. Suatu kemenangan ditentukan sejauh mana kesiapan seseorang atau tim dalam berkontestasi. Dalam konteks Pilkada, kapasitas kesiapan paket berkaitan dengan biaya dan material politik. Dalam politik uang bukan segala-galanya, tetapi segala sesuatu sudah pasti membutuhkan biaya; dari biaya alat peraga sampai sosialisasi dan saksi; dari biaya untuk ‘serangan udara’ (iklan televisi, radio, SMS, media sosial), maupun ‘serangan darat’ melalui pemasangan baliho, leaflet, stiker, dan atribut lainnya).

Kesiapan yang berikut adalah fisik dan mental. Fisik dari para calon harus kuat ketika harus mensosialisasikan visi, misi dan program kerja secara intens dan kontinu. Mental paket juga akan ditempa ketika berhadapan dengan berbagai bentuk kampanye negatif, kampanye hitam, atau permainan politik uang dan politik busuk. Yang juga penting adalah kesiapan mental dalam menerima fakta kekalahan. Hal ini perlu disadari untuk mengantisipasi gejolak-gejolak horizontal, dikarenakan ada paket yang tidak siap menerima kekalahan, lantas melakukan protes, provokasi, destruksi tanpa memperhatikan prosedur hukum.

POPULARITAS

Dalam domain politik, popularitas dapat dipahami sebagai kondisi ‘terkenalnya’ satu paket oleh masyarakat publik. Semakin satu paket dikenal atau terkenal, maka tingkat popularitasnya juga semakin tinggi. Jelasnya, popularitas paket dapat dicapai melalui strategi sosialisasi dan promosi secara manifest maupun laten. Dalam perspektif psikologi politik, variabel popularitas lebih mengarah pada level ketertarikan yang sifatnya simpatik, artifisial, atau pada



faktor ‘luar’, seperti sering muncul di media massa, penampilan fisik yang gagah, kemampuan retorika yang mumpuni, dll. Karena pemahaman inilah, maka ada yang menganggap variabel popularitas hanyalah sebagai pendukung atau komplementer sifatnya. Tingkat popularitas tidak serta merta menjadi penentu kemenangan paket, karena popularitas tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat keterpilihan atau elektabilitas.

Meskipun demikian, tidak berarti paket dan timnya menganggap sepele variabel ini. Variabel ini perlu dieksplorasi untuk mendapat penguatan dan pengayaan yang pada gilirannya dapat mendukung tingkat elektabilitas. Oleh karena itu, upaya-upaya yang lebih intens dan efektif dalam mensosialisasikan paket menjadi tugas nan berat. Visi, misi, program kerja yang bagus dari satu paket tidak akan dikenal, jika tidak disosialisasi dan dipromosi secara sporadik dan berkelanjutan.

ELEKTABILITAS (ELEKTORALITAS)

Sementara itu, elektabilitas dipahami sebagai atribut dalam diri satu paket yang membuat masyarakat politik tertarik untuk memilihnya. Kalau variabel popularitas dipahami sebagai faktor ‘luar’ (simpati), maka variabel elektabilitas merupakan faktor ‘dalam’ (empati) yang mendeterminasi tingkat penerimaan (akseptabilitas) dan keterpilihan (elektoralitas). Dalam hal ini, masyarakat politik menerima dan memilih satu paket bukan karena melihat kemasan luar, tetapi lebih dari itu, melihat apa yang menjadi konten (substansi dan esensi) visi, misi, program kerja dan tindakan-tindakan serta pengalaman-pengalaman nyata dari paket tersebut. Paket yang memiliki visi, misi, program kerja, tindakan-tindakan serta pengalaman-pengalaman nyata, yang menyentuh jantung kehidupan masyarakat, maka paket itulah yang akan dipilih. Masyarakat memilih paket yang



Narasi Bangsa yang Tercecer

bersangkutan karena menganggap visi, misi, program kerja dan tindakan-tindakan serta pengalaman-pengalaman nyata adalah bagian dari kehidupannya.

Pertimbangan elektabilitas paket menjadi sesuatu yang sangat mendasar karena berpengaruh signifikan, dominan dan determinan pada kemenangan dalam Pilkada. Karena itu, selain upaya mengelaborasi elektabilitas dengan dukungan popularitas, yang tidak kalah pentingnya adalah membuat pergerakan-pergerakan praktis, nyata dan persuasif untuk semakin mendekatkan 'diri' paket dengan masyarakat, sehingga dapat mempengaruhi dan menguatkan pilihan politik masyarakat terhadap paketnya.

INTERDEPENDENSI KETIGA VARIABEL

Variabel kapasitas, popularitas dan elektabilitas menjadi tiga kekuatan penentu (*driving force*) dalam meraih kemenangan Pilkada. Ketiga variabel ini bersenyawa secara kohesif sehingga satu menggandaikan yang lainnya. Kapasitas yang tidak didukung oleh elektabilitas dan popularitas akan menjadi konyol, sama seperti popularitas yang tidak dikonfirmasi dengan tingkat elektabilitas dan kapasitas akan sia-sia; atau elektabilitas yang tidak diafirmasi oleh kapasitas dan popularitas akan menjadi gagal total.

Menurut saya, dalam peristiwa politik kapan, di mana saja, dalam bentuk apa saja, tiga variabel dapat bersenyawa secara kuat bila di dalamnya mengandung anasir-anasir di bawah ini. *Pertama*, Kapasitas diri atau kesiapan diri dalam bentuk uang, material dan mental. *Kedua*, Kapabilitas atau kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan, ketrampilan dan ketangkasan dalam memimpin, menguasai peluang, tantangan dan masalah dalam masyarakat. *Ketiga*, akseptabilitas. Suatu kondisi keterterimaan, kecocokkan dan kepantasan seseorang menjadi pemimpin yang dicintai dan



Elaborasi Filosofis, Pedagogik Kritis, Sosial, dan Politik

dihormati masyarakat karena memiliki karakter pengayom, pemecah masalah dan pemberi harapan bagi hidup masa depan yang lebih baik.

Lastest Dummy



Narasi Bangsa yang Tercecer

Lastest Dummy



MEMPERTIMBANGKAN SOCIAL CRITICAL THINKING PADA MASYARAKAT NTT*

Menurut data Bappenas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT berkutat di 68.77 (IPM Nasional, 72,77). Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan, kesehatan dan ekonomi belum cukup optimal, baik dari segi sarana prasarana dan fasilitas pendukung lainnya, maupun dari sudut sumber daya manusia. Pada ranah pendidikan, masih cukup rendahnya angka partisipasi sekolah dan tingginya angka putus sekolah, yang disebabkan karena kurangnya biaya dan sarana prasarana pendidikan. Pada sisi lain, ada sekian guru yang belum berkualifikasi sesuai standar undang-undang, dan tingkat kemakmuran yang belum mendukung kinerja. Hal ini secara pasti berakibat pada pembelajaran yang tidak efektif, efisien dan berkualitas.

* SKH Pos Kupang, /10/2016.



Narasi Bangsa yang Tercecer

Yang juga tidak kalah memperhatikan terjadi pada ranah kesehatan. Selain fakta kematian ibu dan bayi yang cukup tinggi, fakta gizi buruk juga belum lepas dari kehidupan masyarakat di Kepulauan NTT. Sementara itu perilaku hidup sehat dan bersih (PHBS) belum menyatu dengan keseharian masyarakat. Masih banyak rumah tangga yang belum memiliki kamar mandi, cuci dan kakus yang higienis. Selain itu, kinerja pelayanan kesehatan oleh paramedik belum cukup optimal, dikarenakan jumlah tenaga yang minim, berikut tingkat pengalaman dan kualifikasi yang belum memenuhi standar undang-undang.

Sementara fakta pada ranah ekonomi menggaratkan bahwa masih banyak rumah tangga miskin yang belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi dasar sandang, pangan dan papan. Data BPS per Maret 2015 menunjukkan penduduk miskin di NTT pada September 2014 berjumlah 991,88 ribu orang (19.60 %) menjadi 1.159,84 ribu orang (22,61%) pada 2015. Ada peningkatan sekitar 168 ribu orang. Tingginya peningkatan ini berlanjut pada kondisi rendahnya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya, seperti kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi. Minimnya biaya berdampak pada kurangnya jaminan masa depan, sebab tidak ada investasi untuk pendidikan dan masa depan keluarga. Masyarakat juga belum memiliki akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang tetap. Dampak logis dari kondisi ini adalah meningkatnya angka pengangguran, urbanisasi, TKI ilegal, penjualan manusia, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, anak-anak terlantar, kriminalitas, penyakit sosial, korupsi, disparitas sosial dan sporadisasi kerusakan alam.

Menurut Kinch (1974, 13-16) dalam bukunya *Social Problems in the World Today's*, permasalahan sosial ini secara faktual berdampak sistemik pada goyahnya tatanan kehidupan masyarakat serta memperlambat program-program pembangunan dan pengembangan



masyarakat. Menurutnya, memang tugas pemerintah memecahkan berbagai masalah sosial tersebut, tetapi yang lebih penting, masyarakat mesti memiliki kesadaran kritisnya sendiri. Kesadaran kritis ini menjadi dasar untuk berpikir, bersikap dan bertindak kritis sosial. Masyarakat harus secara mandiri bangkit dari keterpurukan dan keterbelengguan kehidupannya. Masyarakat mesti mampu mengelola kehidupannya, sementara program-program pemerintah atau pihak lain bisa dijadikan sebagai pendukung.

PENGEMBANGAN KONSEP DAN PRAKSIS BERBASIS SOCIAL CRITICAL THINKING

Sebagai anggota masyarakat yang baik, fakta empirik nan miris di atas menjadi tanggung jawab bersama. Butuh ketekadan dan komitmen dalam memecahkannya. Jika tidak, masalah-masalah di atas akan menjadi warisan sosial yang mendera anak cucu kita selamanya. Merujuk pada pemikiran Kinch, kegiatan edukasi, advokasi dan pencerahan yang berbasis kritis sosial untuk keluar dari berbagai situasi yang memprihatinkan perlu dikembangkan oleh semua komponen masyarakat. Pengembangan konsep dan program yang memberdayakan kemampuan berpikir, bersikap dan bertindak kritis sosial menjadi tawaran yang strategis dan mendesak. Dengan mampu berpikir, bersikap dan bertindak kritis sosial, masyarakat diarahkan secara mandiri dalam mengatasi berbagai masalah sosial yang melingkupinya.

Secara praktis, strategi pengembangan berpikir kritis sosial masyarakat diawali dengan pemberian segala bentuk informasi krusial dan penting berkaitan dengan masalah kehidupannya. Informasi ini bertujuan untuk membangun kesadaran sosial (*sosial awareness*) tentang situasi nyata yang terjadi dalam dan sekitar hidup kesehariannya. Kesadaran ini kemudian menjadi dasar dalam mengumpulkan, mendata, mengelompokkan dan mencermati



Narasi Bangsa yang Tercecer

fakta-fakta sosial yang merusak dan tidak mendukung kehidupan yang layak. Kegiatan membahas dan mendalami fakta-fakta sosial ini bisa dijalankan dengan sangat informal seperti : duduk sambil minum di warung kopi, bincang-bincang waktu arisan atau kumpul keluarga, atau kegiatan sejenis yang berbasis kearifan lokal dari masing-masing daerah.

Biasanya, pertanyaan-pertanyaan praktis untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan di atas, seperti: apa-apa saja masalah-masalah yang sering melanda masyarakat? Dalam bidang kesehatan, apa? Dalam bidang ekonomi, apa? Dalam bidang Pendidikan, apa? Hasil dari jawaban-jawaban dikumpulkan lalu dikelompokkan. Selanjutnya berdasarkan data-data itu, dibuatlah kegiatan untuk melakukan pembahasan dan pendalaman. Pembahasan dan pendalaman terhadap berbagai fakta sosial ini berlanjut pada mendiskusikan tentang faktor-faktor penyebab dari masing-masing masalah.

Berdasarkan faktor-faktor penyebab ini, masyarakat bisa diarahkan untuk kemudian memikirkan dan menawarkan berbagai kemungkinan pemecahan untuk berbagai masalah tersebut. Pertanyaan kritis sosial yang bisa memfasilitasi seperti: mengapa terjadi peningkatan angka pengangguran, urbanisasi, TKI illegal, penjualan manusia (*human trafficking*), kekerasan rumah tangga, perceraian, anak-anak terlantar, kriminalitas, penyakit sosial, korupsi, disparitas sosial dan sporadisasi kerusakan alam? Apa saja dampak-dampak lanjutan, bila masalah-masalah tersebut tidak segera diatasi? Komitmen seperti apa untuk mengatasinya? Bagaimana mengatasi semuanya itu? Tindakan-tindakan atau program-program praktis apa yang harus dilakukan dalam jangka dekat, menengah dan panjang? Siapa-siapa yang harus terlibat agar tindakan-tindakan atau program-program praktis bisa berjalan secara efektif-efisien?



Berpikir dan bertindak kritis sosial secara praktis dapat dijalankan seperti yang digambarkan di atas. Memang sulit untuk memulai dan membiasakannya. Namun, kita bisa belajar dari negara-negara maju di Asia, seperti China, Jepang, Korea Selatan dan Singapur, yang sudah menjadikan pola-pola berpikir dan bersikap kritis sosial sebagai bagian dari kehidupan keseharian masyarakatnya. Kebiasaan berpikir, bersikap dan bertindak kritis sosial sudah menjadi *inheren* dari kehidupan, terutama ketika mereka mengalami masalah yang berdampak pribadi maupun sosial. Hal ini terbukti, tingkat masalah sosial pada negara-negara ini berkurang dibandingkan dengan negara-negara lainnya di Asia. Bila tingkat masalah sosial rendah, maka pembangunan dan pengembangan kehidupan masyarakat berjalan dengan lancar.

PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN SOCIAL CRITICAL THINKING

Tak dapat dipungkiri, pengembangan berpikir kritis sosial tidak bisa terlepas dari majunya tingkat pendidikan dalam masyarakat. Pendidikan dalam segala perangkat dan bentuk kegiatannya menjadi salah satu andalan untuk membangun kemampuan berpikir kritis sosial masyarakat dalam mengantisipasi dan mengatasi permasalahan sosialnya. Masyarakat yang sudah maju kualitas pendidikannya, secara langsung atau tidak langsung membantu membangun kemampuan berpikir kritis sosial masyarakatnya, sehingga dapat memecahkan berbagai masalah dengan cepat, efektif dan efisien. Pendidikan dalam segala bentuknya menjadikan masyarakat lebih cerdas, kompeten, memiliki kemampuan *hard skills* dan *soft skills*, yang dapat diberdayakan dan dimanfaatkan untuk membuat analisis, sintesis, evaluasi, memberi keputusan dan solusi terhadap berbagai persoalan, baik dalam dirinya, maupun lingkungan sosialnya.



Narasi Bangsa yang Tercecer

Pendidikan yang memberdayakan kemampuan berpikir kritis sosial akan berkontribusi pada pembentukan tatanan sosial yang kuat dalam satu negara. Hal ini terkonfirmasi dari pandangan Bertrand Russel dalam artikelnya yang berjudul *Education for Democracy* (1939:530). Menurutnya, bangsa yang kuat tatanan sosialnya tidak terlepas dari upaya pendidikan dalam membangun karakter kritis (*critical character building*) dalam diri warganya. Masyarakat yang rasional dan kritis memiliki kompetensi untuk membahas berbagai kepentingan pembangunan negara, termasuk memecahkan masalah-masalah sosialnya.

Sementara Jurgen Habermas (2002:19) dalam bukunya *Religion and Rationality: Essays on Reason, God, and Modernity*, mengungkapkan bahwa yang menjadi penyebab munculnya berbagai masalah social dan sulitnya untuk keluar dari masalah-masalah tersebut adalah bentuk-bentuk irasionalitas warga masyarakatnya. Masyarakat yang rasional kritis mesti dibangun untuk mengatasi berbagai bentuk irasionalitas, dengan berbagai bentuk pendidikan kritis yang dapat dilakukan di rumah, tempat-tempat ibadat, warung kopi, pusat perbelajaran, sekolah-sekolah, dll. Dengan demikian, berpikir kritis sosial menjadi 'kebiasaan' yang melekat dalam diri masyarakat. Awal dari terjadinya transformasi atau bahkan revolusi kehidupan, terjadi ketika masyarakat mampu mengevaluasi diri tentang bagaimana membangun kehidupannya secara lebih baik pada masa-masa mendatang. Kemampuan berpikir kritis sosial berdampak pada pembentukan karakter warga masyarakat yang berkualitas, memiliki ketahanan dan daya saing, rasional, selektif, positif, solutif, alternatif, konstruktif, dan inovatif.



MELAWAN TERORISME DENGAN SOCIAL CRITICAL SKILLS*

Serangan bom di Sarinah Jakarta (14/01/2016) kembali merusak suasana kebatinan masyarakat bangsa Indonesia, setelah Bom Bali (01/10/2005) dan Bom JW Marriott dan Ritz-Carlton, Jakarta (17/07/ 2009). Sebagai masyarakat awam, kita sendiri tidak akan pernah tahu (kecuali pihak inteligen) kapan, di mana, bagaimana teror bom terjadi, dan siapa pelakunya. Yang mungkin dapat kita lakukan adalah tetap menjaga kewaspadaan yang rasional dan mendukung serta terlibat dalam upaya deradikalisasi. Menurut saya, kewaspadaan rasional dan upaya-upaya deradikalisasi bisa dibangun melalui pengembangan dan penguatan kemampuan berpikir, bersikap dan bertindak kritis dalam menjalani keseharian sebagai warga masyarakat. Berpikir, bersikap dan bertindak kritis

* SKH Pos Kupang, /04/2016.



adalah kemampuan-kemampuan sosial (*Social Critical Skills/SCS*), yang dapat menjadi salah satu strategi fundamental untuk mencegah dan memecahkan masalah radikalisasi dan terorisme.

Negara-negara maju di Asia, seperti Jepang, Singapura, Korea Selatan, dan China, sudah menjadikan pola-pola SCS sebagai bagian dari kehidupan masyarakatnya. Kebiasaan berpikir, bersikap dan bertindak kritis sosial sudah menjadi *inheren* dalam kehidupan, terutama ketika mereka berhadapan dengan berbagai ancaman yang akan merusak tatanan hidup sosialnya. Terbukti, kecenderungan terorisme dan radikalisme pada negara-negara ini berkurang, yang berdampak sangat pesatnya pembangunan dan pengembangan kehidupan bangsanya.

MELAWAN IRASIONALITAS TERORISME DAN RADIKALISME

Mengapa SCS ini perlu ditumbuhkembangkan dalam masyarakat? Saya bertolak dari pemahaman bahwa terorisme dan radikalisme selain sebagai fenomena lokal, tetapi juga merupakan fenomena global, yang dapat muncul karena berbagai sebab berikut ini: (1) Sentimen kesukuan dan nasionalisme yang berlebihan. Teror ini bertujuan untuk menghilangkan etnis atau bangsa tertentu; (2) Kemiskinan dan kesenjangan. Teror dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kondisi yang tidak adil atau gap yang besar antara kaum kaya dan kaum miskin; (3) Otoritarianisme pemerintahan suatu negara. Teror dibuat untuk mengugat sistem yang mengekang kebebasan hidup dari masyarakat sipil. (4) Teror sebagai bentuk protes terhadap berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dilakukan suatu negara atau kelompok masyarakat; (5) Radikalisme agama. Teror dibuat karena indoktrinasi ajaran-ajaran agama yang radikal dan cara pandang para pelaku yang menganggap penganut atau kelompok masyarakat lain sebagai 'pengganggu'



rasa keagamaannya; dan (6) Marjinalisasi pengetahuan. Teror dilakukan oleh orang-orang yang lemah dalam berpengetahuan, setelah kaum yang kuat dalam pengetahuan mencuci otaknya. Kaum berpengetahuan dengan gampang menggiring mereka untuk melakukan berbagai bentuk kegiatan demi untuk mencapai keinginannya. Mereka layaknya manusia robot yang dikendalikan dengan kontrol otak manusia lain.

Menurut Rubenstein (1987:xvii) dalam artikelnya: *A primary Internal Cause of Terrorism, Dictating to A Degree Its Philosophy, Tactics and Consequences*, penyebab utama dari adanya terorisme adalah ‘pengetahuan marjinal’ (*Disaffected intelligentia*) atau kondisi minimnya pengetahuan dari seseorang atau sekelompok masyarakat. Nah, ketika suatu bangsa mengalami konflik sosial, politik, ekonomi, atau yang berbau SARA, maka mereka yang memiliki ‘pengetahuan marginal’ ini menjadi sangat potensial untuk dieksploitasi elit intelektual politik, ekonomi atau agama. Mereka diperdaya untuk melakukan tindakan-tindakan ekstrem, anarkis, bahkan suicidal demi kepentingan terselubung dari elit intelektual politik, ekonomi atau agama tersebut. Tidak cukupnya pengetahuan menyebabkan kaum ini ‘gagal paham’ dan ‘gagal mengerti’ terhadap bentuk provokasi, agitasi dan indoktrinasi yang sesat. Berikutnya, kaum elit intelektual tadi, secara masif, terstruktur dan sistematis menanamkan sentimen-sentimen yang berbau suku, ras, agama dan bangsa demi membangkitkan militansi ‘berani mati’ dari kaum ini.

Menurut saya, istilah ‘pengetahuan marjinal’ dari Rubenstein sangat identik dengan istilah ‘irasionalitas’ Jurgen Habermas (2002:19) dalam bukunya *Religion and Rationality: Essays on Reason, God, and Modernity*. Menurutny, irasionalitas adalah suatu kondisi dalam diri seseorang atau sekelompok orang yang tidak memiliki cukup informasi dan pengetahuan tentang perkembangan yang



Narasi Bangsa yang Tercecer

sedang terjadi di dunia. Hal ini membuat mereka menganggap apa yang sudah dijalankan selama ini sudah benar, tetapi pada pihak lain, mereka dengan mudah menjadi korban dari informasi dan perkembangan yang ada. Mereka mudah disetir dan digiring oleh kaum berpengetahuan untuk melakukan hal-hal yang bisa merusak tatanan kehidupan sosial. Jadi, radikalisme dan terorisme merupakan bentuk-bentuk irasionalitas, yang sering dimanfaatkan oleh kekuatan intelektual elit-elit tertentu.

MENGEMBANGKAN KONSEP SOCIAL CRITICAL SKILLS

Masalah terorisme dan radikalisme menjadi tanggung jawab bersama dalam mencegahnya. Merujuk pada pemikiran Rubenstein dan Habermas tadi, maka salah satu yang harus ditumbuhkembangkan secara simultan dan komprehensif adalah SCS. SCS bisa dilakukan melalui kegiatan edukasi, advokasi, pencerahan dan diskursus, demi penguatan kemampuan berpikir, bersikap dan bertindak kritis sosial. Ketika mampu berpikir, bersikap dan bertindak kritis sosial, warga masyarakat bisa merasionalisasi berbagai isu, gerakan, agitasi, provokasi dan indoktrinasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Dengan itu, masyarakat tidak mudah terpengaruh dan tergiring untuk melakukan tindakan-tindakan destruktif.

Pengembangan SCS ini secara strategis dapat diintegrasikan dalam pendidikan seperti kegiatan-kegiatan formal di sekolah-sekolah, informal di masyarakat (agama dan keluarga) dan non formal di tempat-tempat pelatihan/kursus. Pendidikan berbasis SCS ini akan meningkatkan *hard skills* warga masyarakat untuk mampu menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, membuat keputusan dan menemukan solusi terhadap berbagai persoalan, termasuk persoalan terorisme. Selain itu, dapat juga meningkatkan *soft skills* dalam hal kerukunan, kesantunan, keterbukaan, saling menghargai, toleransi,



Elaborasi Filosofis, Pedagogik Kritis, Sosial, dan Politik

bekerjasama, dll. Bertrand Russel dalam artikelnya *Education for Democracy* (1939:530) mengafirmasi, bangsa yang kuat tatanan sosialnya tidak terlepas dari upaya pendidikan dalam membangun karakter kritis sosial dalam diri warganya. Masyarakat yang rasional dan kritis memiliki dasar yang kuat dalam membangun tatanan sosial termasuk mencegah dan melawan berbagai bentuk terorisme dan radikalisme.

Lastest Dummy



Narasi Bangsa yang Tercecer

Lastest Dummy



BAHAYA LATEN RADIKALISME PADA SISWA*

Hasil survei Setara Institute pada April 2016 terhadap tingkat toleransi pada siswa SMA Negeri di Jakarta dan Bandung Raya, cukup melegakan dunia pendidikan. Survei dengan responden 760 siswa mempresentasikan: 61% bersikap toleran, 35,7% intoleran pasif/puritan, 2,4% intoleran aktif/radikal, dan 0,3% berpotensi menjadi teroris. Ketika mengukur variabel toleransi: 81% menolak adanya organisasi agama yang ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara, 85,2% menolak adanya pelarangan pendirian rumah ibadah, 79,4% menolak adanya pihak yang melakukan kekerasan dalam memperjuangkan keyakinannya, dan 74,4% menolak kelompok yang mengkafirkan agama lain (Kompas.com, Rabu/05/2016). Meskipun demikian,

* SKH Pos Kupang, 01/06/2016



Narasi Bangsa yang Tercecer

Stara Institute tetap memberi *warning* kepada pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Dinas-dinas Pendidikan dan dinas-dinas terkait di tiap wilayah untuk intens memberi perhatian terhadap dinamika toleransi siswa. Selain itu, pihak sekolah dan para guru harus tetap memiliki komitmen dan 'passion' untuk meningkatkan toleransi pada diri siswa, misalnya dengan mencegah merasuknya paham radikalisme, rasisme, primordialisme, dan etnosentrisme.

PENTINGNYA PENDIDIKAN DEMOKRASI KRITIS

Berdasarkan hasil penelitian Nicole Mirra, ddk yang dipublikasikan dalam artikel: *Educating For Critical Democracy (Civic Participation Reimagined In The Council Of The Youth Research (Journal Democracy & Education, 2011)*, sekitar di atas 50% siswa SMA perkotaan di California (AS) memiliki keterarahan pada tindakan radikalistik dan rasialistik. Hal ini diduga kuat karena besarnya determinasi dan dominasi pandangan neoliberal, yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada kebijakan dan praktik pendidikan yang represif, sektarian, dan rasis, sehingga menciptakan kesenjangan dan ketidakadilan dalam layanan pendidikan. Suasana pembelajaran menjadi tidak demokratis, tidak bebas dalam berpendapat/bertukar gagasan, serta rendahnya partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran. Situasi ini akan menjadi 'bom waktu' munculnya berbagai bentuk radikalisme, rasisme, primordialisme, dan etnosentrisme serta paham-paham destruktif lainnya.

Hasil temuan ini tentu saja menjadi sangat kontra produktif dengan identitas Amerika Serikat sebagai negara demokrasi terbesar di dunia. Menurut saya, hal yang sangat masuk akal dan beralasan, ketika para peneliti melalui Dewan Peneliti untuk Kaum Muda (*The Council Of The Youth Research*) memperingatkan dan mendesak



Dinas Pendidikan dan sekolah di California untuk mengevaluasi dan mendefenisi ulang kurikulum pendidikan dan praktik pembelajaran demi mengantisipasi munculnya berbagai paham yang dapat merusak kepribadian peserta didik. Penegasannya, pemerintah dan masyarakat sekolah harus memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk melakukan pencegahan terhadap berbagai upaya merongrong keutuhan negara bangsa (*nation state*). Menurut para peneliti, tindakan pencegahan yang efektif, salah satunya melalui kebijakan dan implementasi pendidikan demokrasi kritis yang dapat dimulai sejak tingkat pendidikan dini sampai perguruan tinggi.

Peringatan Star Institute dari Indonesia dan Dewan Peneliti untuk Kaum Muda dari California, ternyata sejalan juga dengan rekomendasi yang dibuat oleh Joana Lopes, ddk dalam artikel: *Young People's Intended Civic and Political Participation: Does Education Matter?* (*Journal of Youth Studies*, 2009). Artikel ini mulai dari mengupas tentang fenomena tergerusnya partisipasi orang muda di Inggris dalam kehidupan berbangsa, yang sudah pasti menjadi 'lampu merah' bagi pemerintah dan masyarakat. Degradasi mental dan sikap nasionalisme ini seiring dengan munculnya kecenderungan apatisme, indiferentisme, dan intoleran terhadap permasalahan kebangsaan. Kondisi ini mesti dibaca oleh pemerintah dan masyarakat Inggris sebagai akibat dari melunturnya pendidikan demokrasi kritis, yang sebenarnya sudah terintegrasi dalam pembelajaran/perkuliahan bidang pendidikan kewarganegaraan dan di bidang lainnya. Karenanya, Joana Lopes, ddk mendesak pemerintah dan masyarakat Inggris, terutama 'The Advisory Group', sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk mengurus Pendidikan Kewarganegaraan dan Pengajaran Demokrasi di Sekolah untuk mengevaluasi dan mengkaji ulang sistem dan struktur kurikulum di sekolah dan Perguruan Tinggi. Menggagas ulang sistem, struktur dan perangkat kurikulum yang berkarakter demokrasi



Narasi Bangsa yang Tercecer

kritis akan sangat membantu mendorong partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran dan memupuk tanggung jawabnya sebagai warganegara ketika bersosialisasi.

BEKERJASAMA MEMERANGI RADIKALISME

Indonesia dikenal dunia sebagai negara bangsa yang dibangun di atas konstruksi kuat multikulturalisme. Di satu sisi karakter multikulturalisme ini bisa menjadi potensi yang kuat untuk membangun bangsa menjadi lebih baik, tetapi pada sisi lain, bila tidak dimanfaatkan dan dikelola secara baik dan benar, maka akan menyebabkan impotensi dalam bernegara. Bahkan bila kita tidak kuat berperang secara paradigmatik dengan paham-paham baru yang secara laten merusak cara berpikir, mental dan sikap, maka cepat atau lambat konstruksi multikulturalisme itu akan runtuh. Oleh karenanya, pemerintah, masyarakat dan sekolah perlu mengantisipasi dengan membangun kultur berpikir dan bersikap cerdas, kritis, ilmiah dan religius, yang dapat ditumbuhkembangkan melalui pendidikan berbasis demokrasi kritis.

Menurut saya, peringatan dan rekomendasi hasil penelitian di atas bisa menjadi rujukan bagi pemerintah dan masyarakat untuk memunculkan berbagai kebijakan dan program yang berorientasi pada pemberdayaan demi meningkatkan partisipasi kaum muda dalam kehidupan berbangsa. Sementara pada tingkat sekolah, gagasan yang transformatif tentang kebijakan pendidikan dan kurikulum yang mengedepankan dialog dan partisipasi siswa, perlu dikembangkan secara berkelanjutan. Setelahnya, pada praksis pembelajaran di kelas, para guru dan siswa mesti diberdayakan dengan pemahaman pedagogi kritis, di mana mereka terbiasa berada dalam ruang dialogis, rasional, cerdas dan ilmiah dalam membahas masalah kebangsaan.



Melalui wadah MKKS/KKKS, MGMP/KKG, para kepala sekolah dan guru diperkenalkan beberapa ‘best practices’ tentang pembelajaran demokratis kritis di negara lain atau di beberapa tempat di Indonesia yang sudah mempraktikannya. Mereka kemudian bisa membentuk *Focus Group Discussion* untuk merancang pembelajaran berbasis demokrasi kritis yang sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal di sekolahnya. Para Kepala sekolah dan guru bersama-sama merancang pendekatan, metode, model dan perangkat pembelajaran yang berparadigma demokratis kritis, yang secara instruksional maupun nurturant berefek pada munculnya kesadaran dan tanggung jawab dalam diri siswa untuk menjaga keutuhan dan membangun negara bangsa Indonesia. Demi mendukung gagasan dan praksis pendidikan dan pembelajaran berbasis demokrasi kritis ini, Dinas Pendidikan dapat bermitra dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Agama, Badan Komunikasi dan Informatika, Perguruan Tinggi, LSM, serta unit-unit teknis pemerintah daerah lainnya, untuk memformulasi, mendesain dan mengimplementasikannya secara lebih komprehensif dan kontekstual.



Narasi Bangsa yang Tercecer

Lastest Dummy



"ANCAMAN" MENTAL MEKANIK PEJABAT BAGI KEPALA DAERAH*

Parade pelantikan para Kepala Daerah yang terpilih pada Pilkada 9 Desember 2015 yang lalu, sudah berlangsung. Sebagai Kepala Daerah, tentu banyak agenda yang harus segera diimplementasikan sesuai amanah visi misi dan janji-janji kampanye. Dengan itu, euforia dan sukacita pelantikan sebaiknya tidak berlama-lama. Konsolidasi, koordinasi dan (re)strukturisasi kerja dengan pihak-pihak terkait di daerah menjadi sebuah kemendesakan, dan penting untuk segera dilakukan. Salah satu bentuk konsolidasi, koordinasi dan (re)strukturisasi yang perlu dilakukan oleh Kepala Daerah adalah penataan dan proses 'recovery' birokrasi pemerintahan yang sudah mengalami 'porak poranda' pada masa-masa Pilkada.

* SKH Pos Kupang, 26/02/2016.



Narasi Bangsa yang Tercecer

Salah salah satu bentuk penataan birokrasi bisa saja dimulai dari penunjukan dan penempatan pejabat-pejabat pemerintah yang kompeten dan profesional di bidangnya untuk menduduki jabatan strategis di instansi/unit kerja tertentu. Dalam perspektif konstruksi pemerintahan modern dan sesuai tuntutan *good and clean governance*, penunjukan dan penempatan pejabat dengan pertimbangan *the right man on the right place*, yang dapat dijamin melalui uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*), merupakan *conditio sine qua non*. Untuk beberapa wilayah di Indonesia, seperti yang telah dilakukan oleh Gubernur Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) di DKI Jakarta, penunjukan dan penempatan pejabat pemerintahan dibuat secara ketat melalui sistem lelang jabatan dengan menguji tingkat kompetensi dan profesionalitas (kapasitas dan kapabilitas) dan kinerja sebelumnya dari para calon pejabat. Bahkan, pada negara-negara tertentu sudah menerapkan sistem *meritokrasi*, di mana seseorang dipercayakan untuk menduduki sebuah jabatan, murni karena prestasi (kinerja) yang pernah dicapai dalam bidangnya.

URGENSI BIROKRASI BERBASIS KOMPETENSI, PROFESIONALITAS DAN KINERJA

Pendekatan penataan birokrasi dengan berbasis pada kompetensi, profesionalitas dan kinerja, sudah sangat umum dan modern dilakukan di negara-negara yang sudah berkembang wawasan pemerintahan dan politiknya. Berdasarkan studi teoritik dan faktual, penerapan model penataan birokrasi pemerintah seperti ini dapat bertujuan untuk: *Pertama*, membangun sistem birokrasi yang kuat, kompeten, dan profesional sesuai dengan tuntutan pola-pola pemerintahan modern. *Kedua*, membangun postur birokrasi ramping tetapi efektif dan efisien; miskin struktur tetapi



kaya kinerja. *Ketiga*, membangun sistem kerja pemerintahan yang bersih, baik dan etis (*good, clean, and ethical governance*) dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. *Keempat*, membangun etos kerja organik, di mana para pejabat pemerintahan bekerja karena totalitas, dedikasi, dan *passion* yang tinggi terhadap pembangunan masyarakat daerah. Para pejabat bekerja selain karena tuntutan jabatannya, tetapi lebih dari itu, sebagai bentuk aktualisasi diri yang total untuk melayani dan mengabdikan kepada masyarakat. Pejabat bermental kerja organik adalah mereka yang memiliki integritas kepribadian dan kredibilitas dalam mengemban jabatannya.

Pentingnya menerapkan sistem birokrasi yang merujuk pada kompetensi, profesionalitas dan kinerja ini, selain untuk tujuan-tujuan di atas, sebenarnya bermanfaat secara personal bagi para Kepala Daerah. Menurut saya manfaat yang pertama adalah menghilangkan beban 'janji politik' yang sudah dilontarkan secara sengaja atau tidak sengaja pada masa-masa kampanye kepada pribadi-pribadi untuk menduduki jabatan tertentu. Beban 'janji politik' ini sangat berat, bahkan bisa menjadi buah simalakama bagi Kepala Daerah. Banyak pemerintahan yang tidak berjalan dengan baik, hanya karena terjerembab dalam politik balas budi dalam membangun sistem birokrasi pemerintahannya. Secara faktual empirik, sistem politik birokrasi pemerintahan yang dibangun dengan semangat 'saya memberi supaya engkau memberi' (*do ut des*) akan menjadi pedang bermata dua bagi Kepala Daerah dan masyarakat yang dipimpinnya.

Selanjutnya, bila dikaji dari perspektif revolusi mental ala pemerintahan Jokowi-JK, manfaat dari penerapan sistem birokrasi yang berbasis kompetensi, profesionalitas dan kinerja ini adalah bagian dari upaya mengeliminasi mental mekanik yang lagi mewabah dalam diri para pejabat pemerintahan saat ini. Mental mekanik adalah mental yang terkondisi oleh *automatically system* dari



Narasi Bangsa yang Tercecer

sebuah sistem pemerintahan. Ada pejabat yang melakukan tugas utama, pokok dan fungsinya hanya karena jabatan yang melekat padanya. Kreativitas, inisiasi, kemandirian, dan dedikasi sering mengalami proses degradasi dan hibridisasi (kebiri) oleh mental mekanik ini. Mental mekanik ini secara masif membangun kultur senang membuat ‘asal bapak senang’; bahkan secara struktural dan sistematis membangun ‘kerajaan kecil’ di instansinya. Selain itu, mental ini secara laten membentuk egosektoral dan arogansi pada pribadi pejabat yang tergambar dalam perilaku mati-matian mempertahankan jabatan, meskipun mengalami ‘gagal kinerja’, terindikasi korup dan berperilaku amoral. Bentuk-bentuk lain sebagai polarisasi dari mental ini adalah mental proyek, mental studi banding, mental SPPD, mental konsultasi, mental reses, yang lebih berorientasi uang dari pada asas manfaatnya.

MENTAL MEKANIK: MOMOK BAGI MASYARAKAT

Tentang mental mekanik ini, saya mengelaborasinya dari pandangan Antonio Gramsci (1891-1937). Menurutnya mental mekanik adalah cerminan dari pribadi oportunistis, pragmatis, yang menggunakan segala macam cara, taktik, dan strategi untuk mengekalkan posisi, jabatan dan kekuasaan pada instansi negara dan masyarakat. Mereka mengeksploitasi pengaruh dirinya untuk kepentingan jabatannya sehingga cenderung terlibat dalam konflik kepentingan (*conflict of interest*). Menurut Nietzsche (1844-1900) mental mekanik merupakan manifestasi dari nafsu yang besar untuk berkuasa (*will to power*). Secara sosiologis, mental ini merupakan hasil dari bentukan sosial budaya dari suatu masyarakat yang sudah terkontaminasi dengan gejala pragmatisme, instantisme, hedonisme dan konsumerisme.



Mental mekanik ini mendaraskan bahwa jabatannya merupakan sesuatu yang 'sakral' meskipun indikator sakralitasnya sangat subjektif, merujuk hanya pada perspektif pejabatnya. Masyarakat 'dipaksa' untuk mengakui saja apa yang sudah terberi dalam diri pejabat tersebut. Mereka cenderung meyakinkan masyarakat dengan berbagai dalil/argumentasi yang sebenarnya merupakan bentuk rasionalisasi, justifikasi dan legitimasi terhadap jabatannya. Bila mereka terbukti melanggar hukum dan moral, maka pejabat bermental mekanik tersebut berusaha dengan segala cara membebaskan diri. Mental mekanik begitu resisten dan indifferen (masa bodoh) terhadap kritik dan masukan yang rasional dari pihak lain terkait kinerjanya. Segala bentuk masukan kritis dan rasional dinilai sebagai bentuk fitnah, pencemaran nama baik dan merongrong jabatannya.

Lastest Dummy



Narasi Bangsa yang Tercecer

Lastest Dummy



IMPERATIF BERPIKIR KRITIS MAHASISWA!*

Fenomena berbagai tindakan kekerasan dan kriminal yang terjadi dunia Kampus di Indonesia semakin menggejala. Dalam kurun waktu bulan Februari sampai Mei 2016, ada beberapa peristiwa yang melibatkan mahasiswa dalam kasus moral, seperti terjeratnya mahasiswa IAIN Bandar Lampung sebagai pengedar narkoba, pembunuhan Dosen oleh mahasiswa di Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, dan perkelahian di antara mahasiswa di Universitas Negeri Makassar, dan keseringan demonstrasi mahasiswa Universitas Cenderawasih sampai memaksa dosen untuk tidak mengajar, diusir keluar dari ruang kuliah. Beberapa peristiwa ini hanyalah rangkaian kecil dari banyak peristiwa lainnya, yang secara kasat mata menayangkan adanya

* SKH Pos Kupang, 25/08/2015.



Narasi Bangsa yang Tercecer

‘pertentangan internal’ (*contradictio interminis*) dalam diri lembaga kampus. Kampus yang idealnya merupakan sumber dan referensi keadaban intelektual publik, pada kenyataan justru mempresentasikan buramnya perilaku menyimpang para calon intelektual.

Menurut saya, kontradiksi ini dapat membuat status kampus sebagai ‘darurat identitas intelektual’ (*emergency of intellectual identity*). Sebutan status ini, pada satu sisi mungkin dianggap terlalu dipaksakan dan berlebihan. Sebab kenyataannya, masih banyak kampus yang ‘sehat’, kredibel dan bonafide, serta mempunyai sekian banyak mahasiswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis, berperilaku santun dan berprestasi sehingga membanggakan keluarga, kampus dan bangsa. Namun pada sisi lain, prediksi ini bisa menjadi semacam peringatan bagi masyarakat kampus, pemerintah, dan semua pihak terkait untuk mencermatinya secara serius. Keseriusan ini bertalian dengan upaya mengafirmasi dan memperkuat kembali identitas kampus sebagai lembaga parametrik dalam bidang intelektual-akademik dan institusi barometrik dalam berbagai perubahan bangsa dan dunia. Praktisnya, perlu ada agenda kebijakan dan program dari pihak kampus dan pemerintah untuk merevitalisasi ‘positive image’ dan ‘trust’ masyarakat pada lembaga perguruan tinggi, entah melalui fasilitas kurikulum, konten dan proses pembelajarannya, atau kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang secara sinergik dan simultan melibatkan mahasiswa.

MEMBANGUN SISTEM ADAPTASI YANG KRITIS DI KAMPUS

Masyarakat sekarang ini, yang begitu terbuka terhadap berbagai perkembangan teknologi dan informasi, bergerak non linear, bersikap permisif terhadap berbagai kecenderungan penyimpangan, kompetisi yang kuat, perluasan dan membiasnya batas-batas moral dan budaya, dan benturan kepentingan ekonomi, politik, ideologi dan



agama, bisa diklaim sebagai penyebab sekaligus pemicu munculnya tindakan kekerasan dan kriminal di kampus. Sebenarnya, para pemikir jauh hari sebelumnya telah memberi gambaran tentang ciri kehidupan masyarakat saat ini, yang begitu laten juga turut mempengaruhi mentalitas kehidupan kampus. Masyarakat sekarang menurut Emile Durkheim, akan berkembang ‘tanpa nilai’ atau ‘anomie’, dan akan mengalami gelombang perubahan yang kuat dan tiba-tiba, *discontinue*, *unlinier* dan *unpredictable* dalam analisis Alvin Toffler. John Naisbit mencermatinya sebagai masyarakat yang mengalami peralihan dari ‘small village’ ke ‘global village’, dan ditandai oleh adanya ‘clash of civilization’ seturut kajian Samuel Huntington. Selanjutnya Gibson menyelisknya sebagai masyarakat yang sarat dengan perang paradigmatis, hiper-kompetisi, sukseksi revolusi teknologi, dislokasi dan konflik sosial.

Kampus dan kehidupannya sudah pasti turut terpapar dengan perubahan ini. Bila mahasiswa tidak memiliki kapasitas dan integritas pengetahuan dan moral yang kuat, maka bukan tidak mungkin bisa terjerembab dalam paham ekstrem eksklusivisme, fundamentalisme, radikalisme, sekularisme, pornoisme, sektarianisme, oppurtunisme, pragmatisme, hedonisme, instantisme dan konsumerisme. Bila paham-paham ekstrem ini terus melekat dalam keseharian perilaku mahasiswa, maka dengan sendirinya melunturkan identitas diri dan kampusnya sebagai pribadi dan lembaga intelektual-akademik. Keterjebakan kaum (calon) intelektual pada paham-paham ekstrem ini dapat ditafsir sebagai manifestasi lain ‘pengkhianatan intelektual’ seturut perspektif Julian Benda (1867-1956).

Karena itu, untuk menghadapi perkembangan dan mengantisipasi dampaknya, maka perlu adanya kemampuan dan daya kritis dalam kampus dan diri mahasiswa. Dalam hal ini kampus sebagai lembaga intelektual-akademik, mesti memiliki sistem ‘adaptasi yang kritis’ (critical adaptive system) yang dapat difasilitasi



Narasi Bangsa yang Tercecer

melalui kegiatan pembelajaran kurikuler dan ekstrakurikuler. Tujuan sistem ini adalah mempersiapkan kampus dan mahasiswa dalam mengelola berbagai bentuk perubahan yang berdampak positif maupun negative, dan bisa memberdayakan mahasiswa secara personal demi memiliki integritas budaya, moral dan religius. Selain itu, dalam sistem ini, melalui perangkat kurikulum, konten dan proses pembelajaran, mahasiswa dibekali keterampilan melek teknologi informasi dan komunikasi (information and communication technology literacy skill), keterampilan memecahkan masalah (problem solving skill), keterampilan berkomunikasi efektif (effective communication skill) dan keterampilan berkolaborasi (collaborate skill), keterampilan berpikir kreatif (creative thinking skill) dan keterampilan berpikir kritis (critical thinking skill). Berbagai keterampilan ini menjadi tipikalitas dari kampus sebagai masyarakat berpengetahuan (knowledge-based society).

Untuk mendukung sistem ini mahasiswa juga perlu membiasakan diri berdialog, berkomunikasi, berdiskursus dan mengikuti berbagai seminar ilmiah. Dengan menerjunkan diri para kegiatan-kegiatan berbasis intelektual akademik ini, mereka dapat berlatih berpikir secara terstruktur, logis dan sistematis, berwawasan luas, bersikap inklusif, rasional, kritis, selektif dan konstruktif dalam mencermati realitas diri dan sosialnya. Keterlibatan mahasiswa pada organisasi internal kampus, seperti: Organisasi Mahasiswa Kampus (OMK), Unit Kegiatan Kampus (UKM), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), Forum Kerjasama Mahasiswa (FKM) dan organisasi-organisasi eksternal lainnya, dapat membantu mahasiswa untuk bersosialisasi dan berinteraksi. Selain itu, dengan berpartisipasi dalam banyak kegiatan di lingkungan yang positif dan ilmiah, mereka memiliki keterarahan pada perilaku etis, moral dan religius serta bertanggung jawab dalam berkehidupan.



MAHASISWA DAN KEHARUSAN BERPIKIR KRITIS

Dalam buku *Student Guide to Historical Thinking* (2011) Ricard Paul dan Linda Elder menegaskan tentang pentingnya berpikir kritis dalam diri seorang mahasiswa yang bertujuan agar mampu mencermati berbagai fenomena dan realitas. Karenanya, kemampuan berpikir kritis menjadi ‘*conditio sine qua non*’ dalam diri mahasiswa. Wajib hukum bagi mereka untuk selalu merespons berbagai persoalan diri dan masyarakatnya sesuai dengan kompetensi dan bidang keilmuan yang digelutinya dengan cara mengidentifikasi masalah, mensintesis, menganalisis dan selanjutnya dapat memberi jalan keluarnya.

Secara prosedural, Bloom (1959) menyebut kemampuan berpikir kritis mahasiswa dapat mengikuti alur segitiga berpikir (*thinking triangle*), yaitu: (1) Mengevaluasi: menilai suatu informasi dan pengetahuan baru; (2) Mensintesis: menggabungkan informasi dan pengetahuan baru tersebut dengan berbagai gagasan-gagasan baru; (3) Menganalisa: Membuat pengujian secara metodikal ilmiah atas gagasan-gagasan baru tersebut; (4) Mengaplikasi: menggunakan pengetahuannya untuk menerapkan apa saja yang sudah disintesis dan dianalisa; (5) Komprehensi: menyempurnakan dengan menggunakan pemahaman untuk kepentingan pengembangan pengetahuan secara kontekstual dan berkelanjutan. Namun saya perlu memberi catatan, kemampuan berpikir kritis sangat didukung oleh literasi berbahasa, baik lisan maupun tulis. Kemampuan literasilah yang menentukan kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis. Jadi dengan banyak membaca, menulis, dan berdiskusi akan sangat signifikan membantu mengkonstruksi literasi dalam berpikir kritis mahasiswa.



Narasi Bangsa yang Tercecer

Lastest Dummy



MEMELIHARA REVOLUSI GERAKAN MAHASISWA

(Catatan Lepas untuk Kongres XIX GMNI)*

Sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan kongres XIX Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) pada 5-9 September 2015, maka sebagai mahasiswa yang juga pernah terlibat dalam organisasi kemahasiswaan, saya membuat catatan lepas ini. Sangat kebetulan kongres ini dijalankan di Maumere, tempat di mana saya pernah berjuang sebagai mahasiswa ketika meletusnya revolusi gerakan mahasiswa pada tahun 1998.

Sangat beralasan kalau ada adagium yang mendaraskan bahwa perubahan senantiasa muncul dari dunia kampus. Kampus memang merupakan habitat dari para pemikir-pejuang dan pejuang-pemikir yang biasa disebut mahasiswa. Pemikiran dan perjuangan mahasiswa sering menjadi basis, parameter dan barometer berbagai perubahan

* SKH Flores Pos, 14/09/2015.



Narasi Bangsa yang Tercecer

yang terjadi sepanjang sejarah dunia. Hampir semua negara, tak terkecuali Indonesia, sudah merasakan betapa sentral dan vital peran mahasiswa dalam menentukan sejarahnya. Dalam sejarah Indonesia, peran gerakan mahasiswa sangat dominan, determinan dan signifikan baik sebelum, sesudah dan maupun setelah kemerdekaan. Fase-fase sejarah bangsa mencatat dengan jelas tentang revolusi gerakan mahasiswa ketika merintis, memperjuangkan, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan bangsa.

NAPAK TILAS REVOLUSI GERAKAN MAHASISWA DI INDONESIA

Revolusi gerakan mahasiswa pada fase pra kemerdekaan ditandai dengan hadirnya organisasi perintis, Boedi Oetomo tahun 1908, diikuti organisasi penggerak, Soempah Pemoeda tahun 1928. Dua organisasi ini menjadi embrio dari segala gerakan revolusi dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan. Pada masa sebelum dan sesudah tahun 1945, muncul secara sporadik berbagai organisasi gerakan mahasiswa yang semuanya mengarah pada revolusi perjuangan untuk mendapatkan hak kemerdekaan dan mempertahankannya.

Fase pasca kemerdekaan dimulai dengan munculnya berbagai bentuk organisasi Gerakan mahasiswa (GERMA) pada tahun 1966 dan 1974. Pada masa ini gerakan mahasiswa dibenturkan dengan kebijakan pemerintah untuk membuat Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK), yang pada tahun 1990 dicabut kembali. Selanjutnya, pada masa 'mengisi' kemerdekaan, terjadi momentum krusial nan heroik gerakan revolusi mahasiswa. Karakter krusial nan heroik ini tampak pada beberapa kejadian penting seperti, Tragedi Trisakti 12 Mei 1998, mahasiswa menduduki gedung DPR/MPR, lengsernya Soeharto 21 Mei 1998.



Menurut saya, peristiwa 1998 adalah momentum revolusi yang merupakan rangkaian berkelanjutan dari percikan-percikan revolusi fase-fase sebelumnya. Peristiwa 1998 adalah penanda sekaligus pembuktian dari militansi berpikir, bersikap, berjuang, bergerak dan bertindak dari mahasiswa. Peristiwa ini juga merupakan akumulasi, simultansi, dan signifikansi dari revolusi gerakan yang kerap dimotori mahasiswa. Peristiwa 1998 memberi paparan jelas tentang komitmen, tipikalitas, identitas dan entitas revolusi gerakan kemahasiswaan di Indonesia. Bahkan momentum ini kemudian menjadi basis spirit dan kerangka gerak untuk berbagai revolusi gerakan kemahasiswaan selanjutnya.

NEGARA "DILARANG" MENGEKBIRI REVOLUSI GERAKAN MAHASISWA

Saat ini banyak bentuk organisasi gerakan mahasiswa, yang memiliki komitmen dan tanggung jawab secara positif dalam membangun negara bangsa. Banyak diantaranya turut berperan strategis dalam mengkonstruksi keadaban dan kesejahteraan publik. Bahkan ada yang menjadi garda terdepan untuk memfasilitasi visi, misi, dan program-program pembangunan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Banyak juga organisasi kemahasiswaan yang terlibat dalam membantu negara, seperti kegiatan kaderisasi, kepemimpinan, edukasi dan advokasi masyarakat kecil, pemberdayaan generasi muda yang sehat, bebas narkoba, agamis. Selain itu, ada juga yang turut membantu terpeliharanya perdamaian bangsa dan dunia, menggagas pemeliharaan lingkungan alam sosial yang bersih, sehat, damai, dan membantu menangkal berbagai gejala separatisme, fundamentalisme, brutalisme dan anarkisme. Dalam ajang kompetisi dalam dan luar negeri, banyak mahasiswa yang telah menoreh prestasi membanggakan di bidang olah otak, olah rasa/seni-budaya dan olah raga.



Narasi Bangsa yang Tercecer

Berbagai kontribusi strategis ini memberi konfirmasi kepada negara bahwa mahasiswa harus selalu diakui, diperhitungkan dan dipertimbangkan eksistensinya. Negara mesti selalu mengapresiasi kehadiran berbagai organisasi gerakan mahasiswa, karena mereka sudah membuktikan posisi tawarnya yang tinggi dalam mendirikan dan mengembangkan negara bangsa. Revolusi gerakan mahasiswa dalam berbagai manifestasinya mesti diapresiasi, diberdayakan dan difasilitasi untuk bisa berperan lebih optimal dalam kegiatan pembangunan.

Mahasiswa memang sangat lekat dengan ‘dunia ide-ide’ karena itu cenderung idealistis, dan kadang melupakan praksis. Tugas dan tanggung jawab moral negara adalah mendorong pengungkapan dan pengeskpresian ide-ide pada berbagai kegiatan, dalam maupun lintas organisasi. Negara perlu membuat *grand design* untuk mengakomodasi secara lebih efektif gerakan mahasiswa, baik interkampus maupun intrakampus, bahkan internasional. Negara sejauh mungkin untuk tidak mengintervensi dengan membuat kebijakan-kebijakan kontraproduktif, yang cenderung mensteril berbagai kegiatan dan gerakan kemahasiswaan. Bung Karno mempertegas hal ini dalam pidato sambutannya pada Konferensi Besar GMNI di Kaliurang tahun 1959: Hilangkan *Sterilitiet* dalam Gerakan Mahasiswa!

REVOLUSI GERAKAN MAHASISWA: BERGERAK DARI OPORTUNISME IDE KE PRAXIS OPPORTUNITY

Ada semangat dalam dunia gerakan mahasiswa yang mengatakan bahwa idealisme adalah harta terakhir yang dimiliki mahasiswa. Menurut saya, semangat ini perlu dikritisi dan dievaluasi. Mahasiswa tidak boleh berhenti pada kebanggaan dan kejayaan idealisme, sebab akan terjebak dalam konseptualisme, romantisme dan oportuniste



ide. Mahasiswa mesti bangkit untuk mentransformasi, mengkonversi dan mengaplikasikan idealisme pada praksis, pada tindakan-tindakan praktis, nyata dan faktual. Karenanya, kreativitas, progresivitas, aktualitas dan kontekstualitas cara berpikir dan bertindak harus diperkuat dan diberdayakan pada kedirian mahasiswa.

Revolusi gerakan memungkinkan mahasiswa untuk memanfaatkan peluang berpraxis (*praxis opportunity*). Dalam hal ini mahasiswa perlu berpartisipasi aktif dan kreatif ketika merumuskan dan mengambil kebijakan, baik di tingkat kampus, masyarakat dan negara. Mahasiswa perlu berperan optimal sebagai juru damai (*peace maker*) sekaligus agen perubahan (*agent of change*). Selain itu, mahasiswa mesti menghindari kecenderungan berpikir dan bertindak instan, pragmatis, *easy going*; tetapi berani berproses, berpikir alternatif dan *out of box*, serta menghindari sebagai konflik kepentingan yang bisa menggadaikan secara murah harga diri dan intelektualitas. Mahasiswa perlu bersikap terbuka, inklusif dan multikulturalis dalam memahami beragam perkembangan, serta berusaha mengabdikan intelektualitas pada kebiasaan melakukan perbuatan-perbuatan baik (*habitus operationis bono*).



Narasi Bangsa yang Tercecer

Lastest Dummy



PENDIDIKAN KARAKTER YANG PREMATUR*

Beberapa bulan terakhir ini, kejadian demi kejadian yang menggambarkan tentang rusaknya moral generasi muda sekolah, sangat faktis. Mulai dari peristiwa pembunuhan terhadap dosen, pembunuhan terhadap siswa dan mahasiswa, perkelahian antara mahasiswa dan siswa, pemerkosaan, pelecehan seksual, kekerasan (bully) yang dilakukan teman sebaya di sekolah, gambar-gambar dan aksi-aksi tak senonoh yang disebarluaskan di media sosial, dll. Hampir semua kejadian ini berlangsung di sekolah atau perguruan tinggi. Hal ini menjadi sangat kontraproduktif dengan posisi sekolah atau perguruan tinggi sebagai institusi pengembangan dan peningkatan kecerdasan, juga tempat pembinaan karakter. Dengan demikian, pertanyaan retorisnya, 'apa yang

* SKH Pos Kupang, 06/06/2016.



Narasi Bangsa yang Tercecer

terjadi dengan moral pendidikan bangsa?’, ‘Adakah yang salah dengan sistem pendidikan kita?’

Berbagai masalah di atas tentunya telah menciptakan polarisasi dalam bentuk saling menyalahkan di antara berbagai pihak. Ada yang mempersalahkan pihak sekolah karena waktu anak lebih banyak di sekolah dan perkara pendidikan sebagian besar sudah diberikan kepada pihak sekolah. Sementara pihak sekolah beralih bahwa tugas mereka mendidik lebih besar pada tataran formal, sedangkan tanggung jawab pendidikan informal tetap dijalankan di rumah dan masyarakat. Belum lagi ada yang begitu ekstrem mempersalahkan pengaruh perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial yang menyesatkan. Ada juga yang menyalahkan lingkungan masyarakat yang sudah begitu terbuka dan permisif terhadap kesalahan dan perilaku menyimpang dari generasi muda sekarang ini. Bahkan, Pemerintah *casu quo* Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan lembaga turunannya di daerah, turut dihakimi berkaitan dengan kebijakan dan implementasi kurikulum yang belum optimal dalam membentuk karakter siswa. Sementara itu, di antara para pemikir, pengambil kebijakan dan praktisi pendidikan saling *men-judge* berkaitan dengan landasan filosofis, struktur, sistem, pendekatan, dan konten kurikulum yang kurang responsif dan akomodatif terhadap pentingnya pendidikan karakter. Kesimpulan sementara saya, tampaknya kita masih berada dalam pusaran ‘siklus kambing hitam’ (scapegoat cycle) yang berkepanjangan.

POLEMIC TENTANG PREMATURNYA PENDIDIKAN KARAKTER

Siklus ‘kambing hitam’ yang berkepanjangan ini rupanya tidak muncul begitu saja saat ini. Bila merujuk pada sejarah perkembangan pemikiran pendidikan modern, siklus kambing hitam sudah



mengemuka dalam dialektika polemik antara John Dewey (1859-1952) dengan para kritikus pendidikan. Dalam artikel Brian White yang berjudul: *Scapegoat: John Dewey and The Character Education Crisis* (Journal of Moral Education, 2015), tergambar tentang sosok Dewey yang begitu gencar berbicara tentang pendidikan praktis dan pragmatis dengan penekanan pada *learning by doing*. Menurutnya, tujuan dan arah dasar pendidikan agar siswa memiliki kemampuan untuk hidup (life skill), sedangkan karakter dengan sendirinya terbentuk ketika siswa berada dalam proses pembelajaran dan mempraktikkan pengetahuan saat bekerja.

Berkaitan dengan pembentukan karakter, Dewey tidak setuju dengan sistem dan konten pembelajaran yang bertujuan memberitahu tentang karakter 'apa', 'bagaimana' dan 'untuk apa' siswa harus bersikap. Menurutnya, yang lebih penting adalah siswa ditanya tentang bagaimana mereka sebaiknya diperlakukan tanpa memandang usia, status sosial ekonomi, jenis kelamin, atau budaya. Yang perlu ditagih dari siswa adalah kemampuan menunjukkan nilai-nilai atas penghormatan, keadilan, kebaikan, kejujuran, pengertian/empati, dan kasih. Karena itu, ia menganggap, pendidikan moral dan agama yang struktur dan kontennya membelajarkan tentang apa dan bagaimana bersikap, tidak terlalu penting. Justru, pendidikan agama dan moral 'menghalangi' pembentukan kemampuan intelektual dan akademik seseorang untuk kemudian bisa menghidupi dirinya di kemudian hari.

Menanggapi hal ini, para kritikus pendidikan seperti Hunter (2000) dan Edmundson (2006) mengatakan, kematian karakter dalam pendidikan sudah dimulai ketika mengesampingkan moral-religius yang sebenarnya menjadi landasan praktik pendidikan. Dewey telah membuat pendidikan karakter menjadi premature (istilah saya) dengan menafikan kompetensi bidang moral-religius dalam proses pembelajaran. Para kritikus pendidikan ini menilai,



Narasi Bangsa yang Tercecer

Dewey lupa bahwa untuk bisa menjadi pekerja dan hidup yang baik dan sukses, yang dibutuhkan bukan Cuma kemampuan intelektual dan akademik semata-mata, tetapi juga berbagai karakter yang melandasinya. Mereka mengambil contoh, banyak para akademisi dan intelektual yang sukses dalam pekerjaan tetapi gagal dalam kehidupannya. Banyak di antaranya yang menjadi pembuat masalah (trouble maker), penyimpang, dan pelaku tindak kejahatan. Hal ini disebabkan karena mereka tidak dibentuk untuk berlaku ‘seperti apa’ dan ‘bagaimana bersikap’ dan ‘tujuan bersikap’. Semua ini merupakan dasar-dasar yang mesti dibelajarkan dalam pendidikan moral dan religius.

PENTINGNYA PENGUATAN BIDANG MORAL-RELIGIUS

Saya sama sekali tidak berpretensi untuk menjadi penengah dalam mengurai ‘siklus kambing hitam yang berkepanjangan ini. Namun kita bila mendalami hasil penelitian Wouter Sanderse dalam artikelnya: *The Meaning of Role modelling In Moral and Character Education (Journal of Moral Education, 2013)* bahwa negara yang sudah lebih maju peradabannya seperti Austria dan Jerman sudah lama dan akan tetap menjadikan pendidikan moral karakter sebagai salah satu tonggak untuk membentuk kehidupan pribadi dan sosial yang lebih baik dan beradab. Baik orang tua, siswa dan guru di dua negara ini begitu adaptif, apresiatif, respons dan respek terhadap pendidikan moral karakter, tentunya dengan berbagai model penerapan, baik di sekolah, rumah dan masyarakat. Mereka menganggap pendidikan moral karakter masih urgen dan relevan dalam kehidupannya pada masa kini dan masa datang.

Dalam konteks Indonesia, meskipun kita baru mewacanakan dan mempraktikkan pendidikan karakter dalam kurikulum nasional pada akhir 20 dan awal abad 21, namun dalam perspektif pendidikan,



tidak ada yang disebut terlambat untuk memulai sesuatu yang baik demi kehidupan yang lebih baik. Dalam struktur kurikulum nasional, pendidikan karakter sudah secara eksplisit diturunkan dan terdistribusi dalam muatan pembelajaran moral-religius dan kewarganeraan. Oleh karenanya, upaya penguatan dan penegasan terhadap keterlaksanaan bidang ini menjadi sesuatu yang imperatif. Perhatian dan kerjasama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekolah (kepala sekolah dan guru-guru), orang tua, lembaga agama, masyarakat terhadap proses berlangsung pembelajaran moral-religius, baik secara formal maupun informal, perlu ditingkatkan muatan, intensitas dan kualitasnya.

Adanya imperatif penguatan ini didasarkan pada prinsip filosofis bahwa pembelajaran moral dan religius terintegrasi secara kuat dan mendalam ajaran tentang nilai-nilai kebaikan, kebenaran, keadilan dan penghormatan terhadap kehidupan. Dalam pembelajaran moral-religius, siswa diarahkan untuk biasa melakukan kebaikan (*habitus operationis bono*), keteraturan internal, konsistensi dan koherensi dalam berpikir pikiran dan bertindak. Mereka juga diarahkan untuk memiliki otonomi diri dan menghindari kecenderungan pengaruh dari pihak luar (*heteronomi*), keteguhan dan *passion* dalam berpihak pada kebenaran, setia, komit, dan bertanggung jawab pada pilihan hidup pribadi dan sesama.



Narasi Bangsa yang Tercecer

Lastest Dummy



TENAGA KESEHATAN YANG ENTREPREUNIAL*

Tenaga kerja yang berjiwa entrepreneurial menjadi salah satu perhatian penting saat ini ketika persaingan menuntut orang harus cerdas, kreatif dan inovatif dalam menciptakan peluang-peluang kerja dengan membangun sistem jaringan, berorganisasi dan berwirausaha. Menurut Peter & Waterman dalam *A Passion of Excellence* (2012), kebutuhan akan kewirausahaan semakin meningkat, selain karena semakin banyaknya kompetitor dalam mendapatkan lapangan kerja di mana masing-masing mereka memiliki keunggulan dalam bidangnya, juga karena konsep dan praksis manajemen yang sudah modern, digital, otonom, fleksibel, non birokratik dan hierarkis, yang menyebabkan pribadi-pribadi kemudian bisa berkreasi dan berinovasi secara

* SKH Pos Kupang, 21 Oktober 2017 (ditulis bersama Hardy Sungkang)



Narasi Bangsa yang Tercecer

lebih leluasa. Masing-masing orang sepertinya mendapatkan ruang yang luas untuk mengembangkan kesejahteraan dirinya dengan memanfaatkan kompetensi dan ruang wirausaha pada berbagai segmen dunia usaha. Dengan demikian, ruang untuk menjadi tenaga kerja yang berkarakter entrepreneurial sangat terbuka luas. Semua orang telah diberi kesempatan untuk memberdayakan kemampuan dan keterampilan dalam menciptakan iklim usaha yang berorientasi pasar, terlibat dalam organisasi profesi yang efektif dan efisien dalam mengelola peluang-peluang usaha, serta memungkinkan adanya proses belajar interaktif dan suportif di antara para pegiat/pelaku usaha.

Untuk negara-negara post modern kegiatan entrepreneurial tidak lagi menjadi monopoli dari orang-orang yang berprofesi sebagai pengusaha saja, tetapi juga sudah merambah pada profesi-profesi lain seperti dalam dunia pendidikan dan kesehatan. Menurut Ulrich Beck dalam *Risk Society: Toward a New Modernity* (1992), fenomena kegiatan wirausaha yang merambah profesi yang lain selain pengusaha ini merupakan salah ciri dari masyarakat berisiko (risk society) atau masyarakat modern baru. Menurutnya, masyarakat berisiko adalah masyarakat yang muncul sebagai hasil refleksi terhadap modernitas kehidupan yang telah 'kalah' dan terpuruk karena masing-masing orang berjuang sendiri, berkompetisi tidak sehat, saling mengalahkan dan menjajah satu dengan yang lain. Mereka terjebak dalam praktik-praktik kompetisi yang kapitalistik, monopolistik, dikotomistik yang bercampur individualistik dalam menjalankan hidup. Bertolak dari refleksi yang panjang dan dalam mengenai situasi ini, sekelompok masyarakat yang terafiliasi dalam komunitas 'berani berisiko' berusaha bangkit, membangun komitmen dan kemudian membuka diri untuk membangun kerja sama dengan orang lain. Meskipun risiko yang mereka alami adalah kehilangan identitas individualnya, tetapi mereka menyadari bahwa



bekerja sama dan membangun jaringan dengan orang lain adalah pilihan yang paling tepat untuk membangun diri dan masyarakat secara lebih cerdas dan sejahtera. Mereka membuat komitmen untuk saling mendukung satu sama lain dan membuka ruang-ruang usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Salah satu yang sangat menonjol dalam masyarakat berisiko ini adalah dorongan untuk berwirausaha dan membuka peluang usaha bagi semua lapisan masyarakat.

Program-program pemberdayaan dan peningkatan dalam bidang usaha ekonomi kecil dan menengah menjadi basis dalam pembangunan ekonomi masyarakat modern baru ini. Bahkan, berbagai kegiatan wirausaha akhirnya menjadi tahapan penting bagi masyarakat berisiko ini karena menjadi titik pijak dalam bersaing sekaligus bekerja sama secara lebih kuat (*powerful*) dan bermakna (*meaningful*). Hampir segala lini kehidupan tersentuh dengan dengan simpul-simpul wirausaha. Hal ini tentu saja tidak menghilangkan hubungan sosial dan jaringan sosial di antara anggota masyarakat karena komitmen, soliditas dan solidaritas di antara mereka justru telah menjadi dasar kuat dalam membangun berbagai kegiatan wirausaha ini. Dengan adanya semangat untuk berjuang dan keluar dari keterpurukan hidup, berbagai bentuk disparitas dan kesenjangan dan ketidakadilan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan budaya dengan sendiri terselesaikan, karena dengan usaha bersama semua risiko dan permasalahan diatasi dan diupayakan pemecahannya. Sebab itu, cita-cita utama dari masyarakat berisiko ini bukan hanya sekadar kesamaan dan keadilan dalam berbagai bidang kehidupan, tetapi lebih dari itu, yakni keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik pada masa depan.

Bagusnya, masyarakat modern baru ini tidak lagi terikat secara politik dan ekonomi (*unbinding of politics and economics*) karena



Narasi Bangsa yang Tercecer

mereka sudah dalam keadaan bebas dan otonom untuk menentukan kebijakan-kebijakan strategis dalam membangun masyarakatnya. Masyarakat ini mampu menanggulangi risiko dan permasalahan sosial secara rasional, matang dan cepat. Hal ini bertolak dari asumsi bahwa penyelesaian berbagai permasalahan sosial yang cepat tidak akan mengganggu iklim usaha dan investasi. Kepercayaan masyarakat dan investor akan iklim usaha tetap terjaga sehingga roda pembangunan ekonomi tetap berjalan dengan stabil. Singapura merupakan salah satu contoh dari negara modern baru atau negara berisiko yang memiliki tingkat kenyamanan dalam berwirausaha dan berinvestasi yang paling tinggi di Asia. Dengan memiliki wirausahawan sekitar 7,2% dari jumlah penduduknya, negara ini menjadi yang paling maju di Asia dengan indeks perekonomian dan kesejahteraan yang paling tinggi.

Hari ini, untuk pertama kalinya STIKes St. Paulus Ruteng mewisuda 59 mahasiswa untuk menjadi tenaga kesehatan yang siap pakai. Banyak harapan yang muncul untuk lulusan pertama ini. Harapan ini tertuju pada tiga hal: *Pertama*, lulusan ini harus mampu bersaing dengan lulusan dari perguruan tinggi lain untuk mendapatkan lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi atau bidang keahliannya. Kecepatan mereka dalam mendapatkan lapangan kerja dapat memberi gambaran tentang kualitas proses pembelajaran yang terjadi dalam dirinya dan lembaga yang telah membentuk keahliannya. *Kedua*, sebagai lulusan tenaga kesehatan, mereka harus lebih menempatkan diri sebagai corong dan promotor peningkatan derajat kesehatan untuk masyarakat di Manggarai raya dan sekitarnya. Kehadiran mereka diharapkan membawa perubahan yang signifikan dalam menumbuhkembangkan perhatian dan penghargaan masyarakat terhadap pentingnya hidup sehat sebagai bagian dari pembentukan karakter masyarakat bangsa. Karena itu,



para lulusan perlu membekali diri dengan pemikiran-pemikiran yang revolutif dan transformatif tentang urgennya fondasi kesehatan dalam membangun negara bangsa. *Ketiga*, kreasi dan inovasi dalam mengembangkan diri sebagai tenaga kesehatan sangat diharapkan. Hal ini terkait dengan sulitnya mendapatkan kesempatan kerja yang layak dan sesuai dengan bidang yang digeluti. Oleh karena itu, pengembangan diri dengan berwirausaha dalam berprofesi dan atau berwirausaha di luar profesi sangat mungkin ketika dunia usaha telah membuka ruang yang selebar-lebarnya untuk itu. Dalam hal ini, wirausaha yang dilakukan bisa saja untuk semakin mendukung profesionalitasnya sebagai tenaga kesehatan, tetapi juga berwirausaha untuk sekadar mendukung kehidupannya agar menjadi lebih baik dan sejahtera tanpa mengesampingkan tugas-tugas pokok sebagai tenaga kesehatan.

Sudah jelas bahwa konteks membangun gagasan tentang tenaga kesehatan yang profesional dan berjiwa entrepreneurial bertolak dari pendasaran bahwa tenaga kesehatan menjadi garda terdepan dalam membangun martabat bangsa. Dengan segala kapasitas, kapabilitas dan kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kesehatan saat ini, sebenarnya dapat memberi garansi akan terbentuknya masyarakat yang memiliki jaminan akan masa depan yang lebih baik di segala bidang kehidupan. Dengan pengetahuan konseptual dan praktis, terampil bekerja, dan berkemampuan afeksional, mereka mampu memposisikan diri di tengah tuntutan kompetisi nasional dan global. Menurut Salesman (2017) kemampuan dan keterampilan ini mesti didukung oleh beberapa hal, antara lain: (1) Sikap berperilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma akademik dicerminkan dalam kehidupan spiritual dan sosial; (2) Penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja, penelitian dan/atau



Narasi Bangsa yang Tercecer

pengabdian kepada masyarakat; (3) Keterampilan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan instrumen, yang diperoleh dari pembelajaran, pengalaman kerja, penelitian dan pengabdian masyarakat. Mereka juga harus mumpuni baik dalam bentuk keterampilan umum maupun keterampilan laboratorium, klinis, dan lapangan.

Tenaga kesehatan yang profesional dan berjiwa entrepreneurial juga perlu memunculkan beberapa sikap nurturan dalam dirinya. Muh. Hadi (2017) mengemukakan tiga sikap nurturan yang perlu ditumbuhkembangkan demi mendukung profesionalitas dan entrepreneurship dari para praktisi kesehatan, yaitu: (1) *Care*. Sikap ini merupakan manifestasi dari ketulusan dan kejujuran hati dalam melayani, merawat dan menjaga orang yang sedang mengalami penderitaan. Sikap ini harus menjadi pilihan dasar (*optio fundamentalis*) bagi semua yang ingin dan telah mendedikasikan diri untuk melayani sesamanya. Sikap *care* yang kuat akan sangat membantu pelayan kesehatan dalam melayani secara optimal dan menghindari terjadinya disorientasi, penyimpangan dan malpraktik. (2) *Core*. Sikap ini sangat berhubungan dengan kecerdasan sosial untuk membangun hubungan sosial yang baik dengan sesama yang dilayani. Hubungan sosial yang baik bisa menjadi sebuah bentuk terapeutik atau penyembuhan untuk membantu masyarakat yang mengalami penderitaan fisik akibat rusaknya relasi sosial dengan sesama. Membuat rekonsiliasi dan rehabilitasi hubungan sosial dengan mengembangkan kembali nilai dan kearifan sosial-budaya akan dapat menjadi rujukan dalam proses terapeutik sosial yang efektif. (3) *Cure*. Sikap ini berkaitan dengan penyelesaian yang bersifat patologis untuk menyembuhkan penderitaan fisik yang disebabkan tekanan sosial, disparitas, banyaknya masalah sosial yang muncul dalam masyarakat. Sikap *cure* ini dapat dikembangkan dengan membangun gagasan sekaligus praktik-praktik konkrit



Elaborasi Filosofis, Pedagogik Kritis, Sosial, dan Politik

penyelesaian permasalahan kemasyarakatan. Terlibat secara aktif menangani berbagai patologi sosial merupakan salah satu bentuk *passion* yang perlu dipelihara dalam diri tenaga kesehatan saat ini, sehingga dapat menyembuhkan sesama dari model penderitaan fisik maupun kejiwaan.

Lastest Dummy



Narasi Bangsa yang Tercecer

Lastest Dummy



KURIKULUM 2013 DAN KEMENDESAKAN PENDIDIKAN NILAI*

Kurikulum 2013 (K-13) sudah disosialisasikan dan bahkan untuk beberapa wilayah sudah diimplementasikan baik secara penuh untuk semua tingkatan usia belajar maupun hanya beberapa tingkatan. Terlepas dari polemik yang berkepanjangan tentang konten dan substansi serta teknis operasionalnya, toh K-13 sudah secara wajib dijalankan oleh semua pelaku pendidikan di mana saja mereka berada, baik dalam tataran kerangka berpikir (*mindset*) maupun dalam tataran implementasi (*mindshift*).

Menurut kajian para pakar kurikulum, K-13 lebih pada mengakomodasi berbagai perubahan di abad 21, yang memiliki karakteristik sebagai berikut: pertama, era informasi yang tersedia

* Tidak dipublikasikan.



Narasi Bangsa yang Tercecer

kapan dan di mana saja, yang jelas menuntut adanya pengembangan kurikulum dan model pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk mencari tahu dari berbagai sumber observasi, bukan diberi tahu. Kedua, era komputasi, dimana cara kerja lebih dari cara kerja mesin. Hal ini menuntut ada pengembangan model kurikulum dan pembelajaran yang mengarahkan dan memotivasi peserta didik untuk mampu merumuskan masalah (menanya) bukan hanya menyelesaikan masalah (menjawab). Ketiga, era otomasi yang merambah pada semua bentuk pekerjaan. Hal ini jelas menuntut pengembangan kurikulum dan praktik pembelajaran yang dapat melatih peserta didik untuk berpikir analitis, mampu mengambil keputusan; dan menghindari diri cara berpikir mekanistik dan rutinistik. Keempat, era komunikasi yang dapat dilakukan kapan dan di mana saja. Era juga menuntut pengembangan pembelajaran yang menekankan pentingnya kerjasama, kolaborasi dan membangun jaringan kerja (*networking*) dalam menyelesaikan berbagai masalah.

Perubahan menjadi sebuah keniscayaan dewasa ini. Manusia dunia sudah pasti tidak bisa melepaskan diri dari tuntutan perubahan tersebut. Secara alamiah, perubahan selalu menuntut agar manusia dapat mengikuti perubahan tersebut dan menjadi bagian yang tak terpisahkan darinya. Pada galibnuya, waktu berubah dan kita pun berubah karenanya (*tempora muntantur et nos muntamur in illis*). Tepatnya kita adalah aktor atau pelaku perubahan. Sebagai pelaku perubahan perlu ditanamkan keyakinan bahwa terdapat potensi dalam diri untuk berubah dan berkembang ke arah yang lebih baik. Selain itu, perubahan selalu pasti memposisikan secara kritis seseorang pada kutub positif dan negatif. Posisi ini sudah pasti menempatkan seseorang pada tegangan atau tarik menariknya dua kutub tadi. Dengan demikian, tuntutan kepada setiap individu adalah untuk mampu memiliki pikiran dan sikap rasional, kritis



dan selektif. Pikiran dan sikap rasional, kritis dan selektif akan mengarahkan seseorang pada penentuan nilai-nilai yang akhirnya positif dan konstruktif bagi dirinya sendiri.

Perubahan dalam berbagai manifestasinya tidak saja memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan manusia, tetapi juga justru memunculkan berbagai persoalan yang sulit dan rumit. Untuk itu, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, yang mampu mengatasi masalah-masalah kehidupan tersebut. Dampak kemajuan ilmu pengetahuan teknologi diperkirakan akan timbul berbagai masalah yang rumit dan sulit sehingga memerlukan ketahanan dan daya saing diri yang andal. Individu yang memiliki karakter dan ketahanan diri yang kuat mampu menanggapi masalah, dan tidak mudah menjadi 'korban' dari masalahnya sendiri. Sebaliknya, individu yang memiliki ketahanan diri mampu melahirkan banyak gagasan atau alternatif pemecahan masalah yang dihadapinya. Selain itu, ia juga dapat menentukan dan menilai tentang segala sesuatu yang melingkupi diri dan lingkungannya, sehingga dia tidak terjerembab dan lantas menjadi korban berbagai ketegangan akibat berbagai perubahan yang terjadi.

Komisi Internasional tentang Pendidikan di Abad ke-21 UNESCO dalam laporannya yang berjudul *Learning: The Treasure Within* (Delors, 1996) mengangkat beberapa macam ketegangan yang menjadi tantangan yang dihadapi masyarakat di abad ke-21, antara lain: Pertama, ketegangan antara *globalisasi* dan *lokalisasi*. Ketegangan ini membawa manusia dunia pada tuntutan bergerak statusnya selain menjadi warga dunia tanpa kehilangan akar-akar kehidupannya, tetapi tetap menegaskan secara aktif identitas dan entitas konteks lokalnya. Pada posisi ini manusia dunia dituntut pada kemampuan untuk dapat berpikir secara global, tetapi tindakan dan perbuatan secara lokal (*think globally, act locally*).



Narasi Bangsa yang Tercecer

Kedua, ketegangan antara *universalitas* dan *individualitas*. Manusia yang berada dalam perubahan tentunya harus menyadari diri sebagai bagian dari masyarakat dunia. Karena itu, standar budaya dan cara berpikir niscaya mengikuti standar budaya dan cara berpikir dunia. Namun pada saat yang sama, manusia menjadi individu yang memiliki budaya dan cara berpikir yang otonom dan mandiri. Manusia secara individual memiliki karakter yang khas, yang tidak dimiliki dan disamakan dengan karakter orang lain.

Ketiga, ketegangan antara *tradisi* dan *modernitas*. Perubahan sering diidentikkan dengan ‘selamat datang modernitas’ dan ‘selamat jalan tradisi’. Jelasnya bahwa manusia dunia dituntut untuk menjadi manusia modern dengan segala pernik-perniknya, tetapi pada saat yang sama manusia dunia tidak berarti harus meninggalkan tradisi yang menjadi basis dasar kehidupannya. Dalam hal ini, manusia diarahkan pada kemampuan untuk bisa mengadaptasikan tradisi pada arus modernitas, serta sebaliknya menyesuaikan modernitas dengan dasar tradisi, agar tidak dikatakan ketinggalan zaman, melainkan mengikuti arus perkembangan zaman. Namun pada pihak lain modernitas akan menjadi kegamangan tersendiri bagi manusia bila tanpa adanya basis tradisi. Tradisi memberi penjelasan bahwa manusia masing-masing memiliki akar atau dasar yang sangat menentukan arah perubahan dan perkembangannya di dunia.

Keempat, ketegangan antara *kompetisi* dan *solidaritas*. Perkembangan dunia saat ini mengisyaratkan manusia pada persaingan yang bahkan dapat mengarah pada konflik atau perang. Siapa yang dapat bersaing, dia bisa bertahan; sebaliknya yang tidak bisa bersaing akan tumbang dan punah. Kompetisi sudah pasti menuntut kompetensi atau sejumlah kemampuan yang dapat menjadi kekuatan dalam bersaing. Namun pada pihak lain, sejumlah gerakan kemanusiaan muncul secara baru untuk memberi dukungan dan berbagai bentuk keprihatinan serta solidaritas bagi



mereka yang 'kalah' bersaing dalam kancah kehidupan dewasa ini. Muncul berbagai kegiatan kemanusiaan yang memberi penjelasan bahwa masih ada ruang lain di dunia ini selain ruang kompetisi, yaitu solidaritas. Berbagai bentuk solidaritas muncul akhir-akhir, menunjukkan kepedulian terhadap sesama masih ada dan berkembang di dunia ini.

Kelima, ketegangan antara *akselerasi dan ekspansi pengetahuan*, dan *daya serap* manusia. Salah satu faktor utama dari perkembangan adalah maju-pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini jelas menuntut manusia untuk mampu memahami dan mengerti tentang perkembangan tersebut. Dalam hal ini, manusia dituntut untuk memiliki daya serap yang tinggi, bila tidak ingin menjadi korban dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena peran pendidikan menjadi sentral untuk membentuk dan membina manusia yang memiliki daya serap dan daya retensi yang tinggi.

Keenam, ketegangan antara yang *spiritual* dan *material*. Dalam perjalanan hidupnya manusia tidak dapat menghindari diri dari pengejaran akan hal-hal material seperti makanan, pakaian dan rumah serta hal material lainnya. Namun di samping upaya pengejaran hal-hal material tersebut, sering tanpa disadari, manusia memiliki suatu kerinduan yang sering tidak terungkap, akan suatu cita-cita atau nilai spiritual. Nilai spiritual ini tidak ada pada realitas manusiawi, tetapi hanya ada pada suatu Realitas yang lebih tinggi atau Realitas Mutlak. Untuk mencapai nilai-nilai yang ada pada Realitas Mutlak ini sangat dibutuhkan motivasi dan keyakinan pada diri manusia. Motivasi dan keyakinan ini dapat dipupuk dan dibina melalui proses pendidikan. Dengan pendidikan, manusia kemudian dapat membedakan nilai-nilai yang perlu untuk diperjuangkan; entahkah itu nilai material atautkah nilai spiritual.



Narasi Bangsa yang Tercecer

Ketegangan-ketegangan ini jelas menuntut manusia pada suatu imperatif untuk memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menghadapinya. Sebab jika tidak, manusia bisa saja terjerembab dalam kubangan kegamangan yang pada gilirannya membawa dia pada suatu keadaan ‘mati sebelum meninggal’, atau dengan kata lain kematian karakter diri atau kesejatian dirinya sebagai manusia. Oleh karena itu, upaya-upaya afirmasi karakter diri, menjadi kegiatan yang senantiasa menggaungi derap langkah kehidupan. Salah satu bentuk upaya afirmasi diri yang mesti secara nyata dan eksplisit dilakukan adalah melalui pendidikan. Kegiatan pendidikan selain merupakan kegiatan alih pengetahuan tetapi juga merupakan kegiatan alih nilai-nilai; pendidikan selain merupakan aktivitas pemberian informasi, tetapi juga merupakan aktivitas pembentuk diri manusia. Dalam konteks inilah maka upaya penegakan-penegakan kembali nilai pada kehidupan manusia mesti dijaga secara seimbang selain pencapaian-pencapaian kemampuan pengetahuan. Nilai-nilai harus menjadi *inheren* dan terintegrasi dalam kehidupan manusia; dimana nilai-nilai ini akan membantu menjaga keseimbangan dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia ini.

Sementara ini, yang dapat diandalkan untuk mengembalikan nilai-nilai yang tergerus akibat berbagai ketegangan di atas adalah kegiatan pendidikan, atau lebih konsern dan fokus pada pendidikan nilai. Sebab, salah satu tujuan pendidikan nilai adalah terbentuknya karakter kepribadian manusia yang tangguh dan kuat dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Karakter kepribadian dan yang tangguh dan kuat ini tampak dalam cara berpikir, bertindak dan berperilaku. Untuk dapat sampai pada pembentukan karakter ini, pendidikan dalam berbagai aktivitasnya sangat perlu mengintegrasikan berbagai nilai-nilai tertentu yang mendasari cara berpikir, bertindak dan berperilaku seseorang. Dalam hal ini, nilai-nilai ini akan menjadi piranti untuk menjembatani



kesesuaian antara cara berpikir, berperilaku dan bertindak seseorang. Kemampuan berpikir seharusnya dijumpai dengan kemampuan mengaplikasikan dan mengimplementasikan pemikiran itu dalam tindakan praktis. Oleh karena itu, pembiasaan dan pelatihan menjadi salah satu faktor penentu dalam suatu kegiatan pendidikan.

Pendidikan nilai sebagai wahana pembentukan karakter seseorang merujuk pada dua pemahaman dasar, yakni: Pertama, kepercayaan bahwa setiap manusia terdapat potensi-potensi karakter yang menjadi basis dalam menentukan cara berpikir dan bertindak tentang kebaikan. Ada suatu optimisme humanistik yang menekankan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan baik, dan dari kebaikan ini dia dapat melakukan tindakan yang baik pula. Namun potensi ini akan tetap menjadi potensi belaka jika tidak diaktualisasikan dalam bentuk tindakan nyata dan praktis. Ia akan tetap seperti sebuah benih, yang jika tidak ditumbuhkembangkan, tidak akan menjadi apa-apa dan pada gilirannya mati. Potensi-potensi tersebut harus dieksplorasi dan selanjutnya dielaborasi dalam kehidupan nyata. Kedua, pendidikan berlangsung sebagai upaya pengenalan kembali sekaligus mengkonfirmasi nilai-nilai yang sudah diaktualisasikan. Dengan demikian, nilai-nilai tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari diri seseorang. Apapun pengaruh dari luar, nilai-nilai tersebut tidak mengalami kelunturan dan bahkan semakin menegaskan secara jelas dan pasti karakter seseorang.

Seorang pakar pendidikan karakter, Lickona (Masnur, 2011) menandakan bahwa dalam pembentukan karakter kepribadian seseorang, pendidikan nilai mesti bergerak mulai pada tiga komponen utama karakter yang baik: pertama, pengetahuan tentang moral atau biasa juga dikenal dengan moral kognitif, perasaan moral, perbuatan atau tindakan moral. Pengetahuan moral berkaitan dengan kesadaran moral, pengetahuan tentang nilai-nilai moral,



Narasi Bangsa yang Tercecer

pandangan untuk mengambil keputusan untuk bertindak, pendasaran moral, pembuatan keputusan, dan pemahaman diri. Perasaan moral merupakan sumber energi dari diri manusia untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral.

Sementara itu, tindakan moral merupakan bukti nyata atau praksis dari pengetahuan moral yang diejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Perbuatan atau tindakan moral merupakan resultan dari pengetahuan moral dan perasaan moral. Dengan demikian, untuk memahami apa yang mendorong seseorang dalam perbuatan baik maka harus dilihat dalam tiga aspek, yakni: kompetensi, kehendak dan kebiasaan. Pembiasaan menjadi kegiatan penting untuk membuat pengetahuan moral, perasaan moral dan perbuatan moral menjadi lebih nyata. Ketika semua dibiasakan, maka perbuatan baik menjadi intuisi dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam perilaku keseharian seseorang.

Dalam pendidikan nilai, pembentukan karakter diri tidak bisa terlepas dari peran lingkungan masyarakat dan kebudayaan. Nilai-nilai yang diedukasi merupakan nilai-nilai yang ada tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai itu selanjutnya diinternalisasikan dalam diri seseorang yang kemudian diberi tanggung jawab untuk melestarikan nilai tersebut. Internalisasi nilai-nilai yang membentuk karakter seseorang dapat didesain dalam konfigurasi karakter seperti ini: Olah hati, olah pikir, olah raga-kinestetik, dan olah rasa dan karsa. Konfigurasi karakter ini didesain dan diimplementasikan simultan dan sinergis, baik dalam konsep-konsep dasar pendidikan maupun praksis pendidikan.

Menurut pedagog Jerman, Foerster (Pandor, 2012), ciri dari seseorang yang memiliki keberpihakan nilai dalam dirinya, antara lain: pertama, memiliki keteraturan internal dimana setiap tindakannya diukur dan didasarkan pada hierarki atau gradasi nilai. Nilai menjadi pedoman normatif dari setiap tindakan



manusia. Kedua, adanya konsisten (ketetapan hati) dan koherensi (keterkaitan) dalam tindakan yang memegang prinsip dan tidak mudah goyah. Koherensi dan konsistensi seorang dalam berprinsip akan berpengaruh pada sikap saling percaya dan kredibel serta integritas diri. Ketiga, memiliki otonomi diri. Menjadikan nilai-nilai umum menjadi nilai-nilai yang dapat menjadi bagian dari dirinya (internalisasi). Hal ini menghindari yang disebut heteronomi, yakni kecenderungan pengaruh luar atau determinasi dari pihak luar. Keempat, keteguhan dan kesetiaan. Keteguhan merupakan daya tahan seseorang guna mengingini apa yang dipandang baik; dan kesetiaan merupakan dasar bagi penghormatan dan komitmen yang dipilih. Pendidikan yang bertujuan melahirkan insan cerdas dan berkarakter kuat itu, juga pernah dikatakan Martin Luther King, yakni; *intelligence plus character... that is the goal of true education* (kecerdasan yang berkarakter... adalah tujuan akhir pendidikan yang sebenarnya). Seseorang yang berkarakter adalah orang yang mampu melibatkan secara seimbang aspek pengetahuan, perasaan, dan tindakan.

Pada akhirnya, saya sampai pada kesimpulan bahwa K-13 dibentuk dan dibangun berdasarkan keprihatinan mengaburnya nilai-nilai dalam kehidupan manusia, yang berdampak pada berbagai masalah sosial kehidupan. Karena keprihatinan inilah maka berbagai baik dalam bentuk pemikiran maupun tindakan untuk kembali pada nilai-nilai dasar yang mendasari kehidupan manusia. K-13 dapat dianggap sebagai kesadaran kembali akan pentingnya pendidikan nilai. K-13 merupakan perwujudan dari upaya untuk memunculkan atau mengeksplorasi kembali nilai-nilai penting yang mendasari hidup manusia.

Kegiatan mengeksplorasi nilai-nilai ini dalam K-13 diikuti dengan kegiatan lanjutan, yaitu elaborasi nilai tersebut dalam praksis kehidupan manusia. Selanjutnya, nilai-nilai tersebut dibuat



Narasi Bangsa yang Tercecer

konfirmasi atau penilaian, apakah nilai-nilai yang dijalankan tersebut sesuai atau selaras dengan kebutuhan kehidupan sosial. Kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi terhadap nilai-nilai tersebut menjadi bagian dari aktivitas pendidikan yang bertujuan pada pembentukan karakter seseorang yang di dalam dirinya memiliki sikap dasar dan keberpihakan penuh pada nilai kebenaran dan kebaikan, baik dalam tataran konseptual maupun dalam tataran praksis hidupnya. Secara praktis, karakter yang dibutuhkan dalam diri seseorang adalah kemampuan yang membedakan yang baik dan yang buruk; bahkan lebih pada kecenderungan atau kebiasaan melakukan yang baik (*habitus operationis bono*).

Lastest Dummy



IIS DAN REVOLUSI "KEJUJURAN" PENDIDIKAN*

Ulasan Y Nugroho Widiyanto dalam Skh Pos Kupang.com.,19/01/2016 dengan judul “NTT Contoh Menarik Terkait Ujian Nasional (UN)” melecut nurani intelektual saya untuk sedikit mendalaminya dari sudut pandang kritik pedagogik. Ternyata fakta yang mengemuka, Propinsi NTT menjadi salah satu dari tujuh propinsi yang memiliki tingkat Indeks Integritas Sekolah (IIS) tertinggi, tetapi dalam soal hasil UN propinsi ini hanya menduduki peringkat keempat terbawah. Sementara ada satu sekolah dari satu kabupaten di Jawa Timur menempati peringkat delapan dari sepuluh peraih nilai tertinggi di tingkat propinsi, tetapi sekolahnya sama sekali tidak masuk dalam daftar sekolah dengan indeks integritas tertinggi.

* SKH Pos Kupang, 02/04/2015.



Narasi Bangsa yang Tercecer

Saya sama sekali tidak berpretensi untuk menghakimi. Namun, berangkat dari pengalaman selama ini, saya sependapat dengan penulis bahwa kepala sekolah dan para guru sudah menjadi ‘pemburu nilai UN’. Mereka memburu nilai UN yang tinggi (diduga) dengan melakukan berbagai kecurangan yang dilakukan secara massif, senyap, terstruktur dan dan sistematis. Kelihatannya, semua pihak (kepala daerah, dinas pendidikan, kepala sekolah, guru dan pengawas UN) terlibat dalam pemufakatan untuk merancang dan melakukan tindakan memburu nilai berbagai momen UN, sehingga kadang menganggapnya sebagai sebuah ‘kewajaran’. ‘Kewajaran’ yang tidak wajar ini senantiasa dilakukan demi menjaga nama baik sekolah dan daerah mereka, atau tidak dinilai buruk dalam prestasi pendidikan.

Hal ini jelas membuat sekolah-sekolah yang sudah bersusah payah menjaga ‘kesucian’ UN, meradang. Betapa tidak, mereka sudah dengan gigih menjadi keutuhan UN, sementara sekolah-sekolah lain dengan entengnya mendapat nilai tinggi dengan berbagai *modus*. Padahal, semua sekolah wajib menandatangani dokumen pakta integritas, yang sepengetahuan saya berisi tentang poin-poin moral untuk menjaga ‘kejujuran’ dalam ber-UN. Alhasil, dalam publikasi hasil UN, sekolah-sekolah yang berintegritas tinggi, tetapi nilai UN-nya rendah, *de facto* dianggap buruk dan gagal dalam berprestasi. Sementara pada pihak lain, sekolah-sekolah yang memperoleh nilai UN tinggi dengan cara tidak halal, diapresiasi. Bila ini benar, saya kira menjadi paradoksi dalam dunia pendidikan kita. Seandainya kondisi ini terus terpelihara, saya berani bertaruh, akan terjadi fatalisme dalam dunia pendidikan, yang menyebabkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia kita tidak akan bergerak positif.



URGENSI MENGINTEGRASIKAN IIS

Upaya pemerintah untuk mengintegrasikan IIS dalam kegiatan UN perlu ditanggapi secara positif. Dari sudut pandang kritik pedagogik, mengintegrasikan IIS ini berpijak pada pemahaman bahwa hasil/prestasi belajar sekolah seharusnya merangkul secara holistik dan komprehensif domain pengetahuan (kognitif), emosi/perasaan (afektif), kecenderungan perilaku (konatif), dan keterampilan (psikomotor) dari para siswa. Sesuatu yang janggal, pincang dan fatal bila prestasi belajar hanya diukur dari satu aspek saja. Taksonomi tujuan pendidikan mengisyaratkan bahwa kecerdasan merupakan simultansi dan resultansi dari ketercapaian dari berbagai domain di atas, dengan turunan indikator-indikatornya.

Pentingnya mengintegrasikan IIS dalam mengukur prestasi belajar sekolah dan dalam menetapkan standar-standar kelulusan pada setiap jenjang pendidikan, justru ketika bangsa kita sudah digerogoti dengan pola pikir/laku pragmatis dan instan. Cara pikir pragmatis dan instan ini juga sudah merambah sampai ke dunia pendidikan, berikut praktik-praktiknya. Cara pikir ini sudah pasti menafikan pengertian pendidikan sebagai kesinambungan yang utuh antara komponen masukan (input), proses, hasil (output/outcome) serta keterlibatan dari lingkungan (pemerintah, masyarakat dan keluarga). Dengan dalih memburu target nilai dan nama baik, sekolah-sekolah terjebak dalam *'output-ism mindset'*. Konstruksi pikir yang cenderung mementingkan hasil ini sebenarnya sangat baik untuk memotivasi ketercapaian kinerja; tetapi bila dengan sengaja mengabaikan komponen input, proses, keterlibatan *stakeholder* dan pengaruh lingkungan, maka akan cenderung terjerembab dalam *'menghalalkan segala cara'*, atau melakukan berbagai penyimpangan dalam mencapai tujuannya.

Berbagai produk laten dari pragmatisme dan *'output-ism mindset'* pendidikan tampak dalam kebiasaan mencuri, merampok,



Narasi Bangsa yang Tercecer

mencontek, mem-*bully*, kekerasan, korupsi, kolusi dan nepotisme. Selama ini, kegaduhan dan kerusakan dalam bidang politik, agama, ekonomi, sosial dan budaya saat ini, tidak pernah terlepas dari sistem pendidikan bangsa yang terlalu mengaksentuasi pada hasil. Karena itu, sangatlah naif dan konyol, bila masih ada pemerintah daerah dan sekolah-sekolah tertentu yang doyan berbangga dengan rating kelulusan yang tinggi, tetapi diraih dengan berbagai *modus* kecurangan. Mereka lupa bahwa ‘gagal jujur’ dalam tindakan-tindakan kecil akan berakumulasi pada kegagalan-kegagalan besar pada bangsa ini.

REVOLUSI PENDIDIKAN YANG JUJUR

Demi memperkuat sendi-sendi revolusi mental, pemerintahan Jokowi seharusnya berani membuat revolusi dalam ranah pendidikan, khusus secara konsisten mengintegrasikan Indeks Integritas Sekolah (IIS). Asumsinya, pendidikan sudah menjadi garda terdepan untuk membangun karakter cerdas anak bangsa, yang terwakili dengan keseimbangan dalam berpengetahuan, bersikap dan berketerampilan, serta memiliki kehendak yang baik dan jujur terhadap diri dan sesama. Kebaikan dan kejujuran merupakan keutamaan yang perlu dalam membangun karakter diri seseorang. “Kejujuran adalah nilai fundamental, nilai dasar dalam membangun karakter bangsa. Jadikan sekolah sebagai arena terbaik untuk pendidikan karakter, serta jadikan sekolah sebagai zona jujur.” Pernyataan ini diungkapkan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/12/2015) di depan 503 kepala sekolah yang sekolahnya memiliki indeks integritas ujian nasional (UN) tertinggi se-Indonesia.

Yah, kejujuran dan kebaikan adalah tanda kebahagiaan manusia. Dalam bukunya *Ethika Nikomacheia*, Aritoteles (384 SM-322 SM) mengungkapkan tujuan pendidikan adalah kebahagiaan (eudaimonia) manusia, yang mesti didukung oleh kebaikan dan



Elaborasi Filosofis, Pedagogik Kritis, Sosial, dan Politik

kejujuran. Sebagai pendidik, keutamaan seperti kebaikan dan kejujuran menjadi sangat penting dalam membangun keutuhan bangsa dan negara. Karenanya, komitmen dan integritas untuk membangun ‘zona jujur dan baik’ sekolah menjadi imperatif dalam mendukung revolusi ‘mental’ pendidikan kita. Mendidik dengan penuh kebaikan dan kejujuran akan membahagiakan dan mensejahterakan, bukan hanya untuk pendidik dan anak didik saja, tetapi untuk masyarakat bangsa.

Lastest Dummy



Narasi Bangsa yang Tercecer

Lastest Dummy



PENDIDIKAN BERBASIS SOSIAL MASYARAKAT, MASIHKAH DIANGGAP PENTING?

Kiyai sejuta umat, K.H. Zainnudin M. Z. saat memberikan pengajaran dalam bulan Ramadhan di salah satu TV swasta mengatakan bahwa dalam zaman perubahan ini orang Indonesia sudah berada dalam kondisi kontradiksi seperti ini: *sering merasa pintar, tetapi tidak pintar merasa, dan sering merasa tabu, tetapi tidak tabu merasa*. Dalam hati kecil, selain kagum dengan gaya retorikanya, juga merasakan betul apa yang hendak disampaikan kepada pemirsa. Selanjutnya beliau menandakan bahwa yang dipertaruhkan saat ini untuk orang Indonesia adalah perasaan sosial dan kepekaan sosial. Perasaan sosial dan kepekaan sosial bisa muncul dengan kuat dalam hati setiap insan manusia bila melalui pembinaan akhlak, nurani dan etika. Dan semuanya itu

* Tidak dipublikasikan.



Narasi Bangsa yang Tercecer

hanya lewat pendidikan, baik yang terjadi di sekolah, masyarakat ataupun lembaga-lembaga lain. Sekali lagi lewat pendidikan!

FAKTA DESOSIALISASI DALAM DUNIA PENDIDIKAN

Kenyataan memang menunjukkan bahwa ketika orang begitu mengagungkan kepintaran otak untuk memikirkan dan berbuat sesuatu, tetapi pada saat yang sama orang semakin lupa mendayagunakan kepintaran untuk merasakan apa yang ada di sekitarnya. Sekarang, banyak orang Indonesia yang pintar untuk membuat teknologi muktahir, dari bom yang berhulu ledak kecil, sampai pada nuklir yang berdaya ledak besar; dari teknologi yang menggunakan perangkat halus (software) sampai pada yang menggunakan perangkat kasar (hardware), tetapi melupakan kepintaran untuk merasakan apa semua itu berguna bagi kehidupan seluruh masyarakat, ataukah bahkan membunuh masyarakat banyak. Kecenderungan yang terjadi dewasa ini, orang yang pintar sering melupakan perasaan kemanusiaan dan perasaan sosialnya, sehingga tidak heran bila membuat bom nuklir yang bisa membunuh banyak orang dianggap sebagai kemajuan kepintaran otak manusia. Dari segi perkembangan Iptek, membuat Bom nuklir dapat diacungi jempol, tetapi dari segi sosial kemanusiaan merupakan ancaman yang menakutkan.

Dalam dunia pendidikan kita, tidak bisa dielakkan bahwa para pendidikan sudah berusaha mendidikan peserta didik menjadi anak yang pintar secara kognitif-rasional, tetapi belum tentu secara emosional-sosial. Anak didik boleh saja menguasai konsep-konsep dan teori-teori tentang kehidupan masyarakat di luar sekolahnya, tetapi belum tentu sampai pada kepintaran untuk merasakan apa yang sudah, sedang dan akan terjadi pada kehidupan di luar dirinya. Bahkan ketika penekanan pendidikan hanya berdasarkan



penilaian kemampuan kognitif, maka tidak heran bila pendidikan mengarahkan peserta didik pada kebanggaan tentang kepintaran otaknya saja, dan selalu merasa pintar atau merasa tahu, tetapi tidak pintar merasa atau tahu merasa tentang keadaan lingkungan di sekitarnya.

Anak-anak yang menganggap diri pintar, sering merasa sombong dan meremehkan anak yang lain. Anak-anak yang orang tuanya kaya raya sering merasa kaya dan tidak kaya ‘perasaan’ bergaul dengan anak-anak dari keluarga miskin atau tidak mampu. Anak yang pintar akan menjadi yang terdepan dan diperhatikan guru, sedangkan anak yang kurang pintar menjadi terbelakang dan ditelantarkan. Dengan demikian, lembaga pendidikan dapat beralih fungsi menjadi laboratorium untuk menciptakan *social gap* antara peserta didik. Peserta didik dengan sendiri berada dalam proses levelisasi yang mengakibatkan desosialisasi di antara mereka.

Sistem ini sudah tertanam dan mengakar dalam sistem nilai sosial kita ketika anak ada di bangku sekolah dasar. Para pendidik sendiri tidak menyadari sistem nilai yang keliru, bahkan memberikan penguatan melalui dorongan kepada peserta didik untuk meraih prestasi dan ranking yang tertulis di buku raportnya, yang berlanjut pada usaha halal atau tidak halal untuk memperoleh NEM yang setinggi-tingginya. Sementara, anak yang seharusnya menjadi subjek pendidikan, diplesetkan menjadi sarana untuk mendongkrak keberhasilan lembaga pendidikan. Anak dipaksa untuk menguasai pengetahuan dari guru sebanyak-banyaknya, tanpa memahami dan ‘merasa’ memiliki pengetahuan tersebut. Orientasi pembelajaran hanya bertujuan supaya kurikulum yang ditargetkan dapat terpenuhi, dan taruhan kredibilitas sekolah dan pemerintah terletak pada apakah siswa mampu mengerjakan soal-soal kognitif dalam Ebtanas atau tidak.



Narasi Bangsa yang Tercecer

Orientasi utama dalam proses pendidikan adalah keberhasilan pendidikan melalui data angka kuantitatif baik dalam raport, ijazah ataupun Danem. Padahal, nilai kuantitatif yang berupa angka-angka mati yang tidak menginformasikan keseluruhan kualitas seseorang menjadi ukuran kemajuan dan keberhasilan pendidikan. Jelasnya, yang menjadi tolok ukur kemajuan pendidikan adalah angka-angka yang tertulis dalam berbagai laporan penilaian pendidikan, bukan pada kualitas yang ditunjukkan melalui perubahan sikap dan ketrampilan hidup serta perilaku seseorang ketika bersosialisasi di masyarakat.

Dengan demikian, dalam proses kegiatan belajar mengajar hampir semua sekolah menganggap kurangnya lokasi jam efektif sekolah yang sudah ditetapkan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. Sekolah membuat program jam tambahan dengan nama Bimbingan Belajar, Pendalaman Materi atau nama yang lain, yang berorientasi pada tercapainya NEM yang tinggi. Seharusnya anak dapat menikmati dunianya di masyarakat, terpaksa merelakannya untuk mengikuti les-les mata pelajaran. Menurut penelitian, dari sekian juta anak di Indonesia yang mengikuti les mata pelajaran, hanya segelintir anak saja yang bertujuan supaya memiliki ketrampilan hidup sesuai dengan mata pelajaran les yang diikutinya, dan berapa juta anak yang bertujuan supaya nilai menjadi baik, tanpa disertai ketrampilan hidup yang berkaitan dengan mata pelajaran tersebut. Dengan demikian, pengembangan kepribadian anak selama mengikuti proses pendidikan hanya sebatas pengembangan intelektual pada domain kognitif, dan belum mencakup perkembangan kepribadiannya secara utuh. Karena perkembangan kepribadian peserta didik yang tidak utuh inilah maka muncul sikap mental seperti *instant*, *konsumtif* dan *pragmatis*. Anak hanya terampil dan bangga dalam *membeli*, bukan *menjual*; *menggunakan*, bukan *menciptakan*; *menerima*, bukan *memberi*;



melibat, bukan *melakukan*, serta perilaku-perilaku yang lainnya, di mana menunjukkan kemunduran yang cukup signifikan dalam dunia pendidikan kita.

Kenyataan lain menunjukkan, bahwa peserta didik sering diajarkan hal-hal yang baru dan mengagumkan, terutama ketika kurikulum mengarahkan dunia pendidikan pada pendidikan berbasis teknologi. Para peserta didik begitu cepat untuk menguasai hal-hal baru, tetapi permasalahan ketika mereka kembali ke masyarakat dan keluarga, apa yang sudah diajarkan tidak mendapat tempat untuk mengaplikasikannya, sebab masyarakat dan keluarga belum memiliki fasilitas-fasilitas tersebut atau bahkan belum masuk pada wilayah berbasis teknologi.

Dampaknya, bisa berakibat dua hal, *pertama*, karena adanya locatan teknologi yang dialami peserta didik, maka akan menimbulkan ketegangan teknologis (*technologic lag*) yang bisa membuat mereka frustrasi dan menjadi manusia teoritik, penuh dengan konsep yang semu. Konsep-konsep semu ini secara laten dapat membentuk penyimpangan kejiwaan seperti takluk pada teknologi (*teknofilia*). Contohnya, anak diajarkan untuk mengenal komputer dan internet, tetapi fasilitas tersebut tidak tersedia di masyarakat dan keluarga. Jadi pendidikan itu mengalami diskontinuitas yang menyebabkan tidak langgengnya daya ingat anak. *Kedua*, meskipun ada fasilitas yang tersedia, namun masyarakat atau keluarga belum mampu mengontrol dan mengawasi secara ketat dan kritis, sebab masyarakat dan keluarga belum memiliki pengetahuan yang luas tentang segala yang telah diperoleh oleh anak mereka di sekolah. Masalahnya terletak pada bagaimana mengambil *starting point* untuk memulai pengontrolan, pembinaan dan pendidikan. Sebab lompatan teknologi tadi sudah menciptakan standar ganda untuk menilai dan mengevaluasi pendidikan anak. Contohnya, sudah ada fasilitas komputer dan internet di masyarakat dan keluarga, anak-



Narasi Bangsa yang Tercecer

anak bisa menjadikan alasan ‘mengembangkan’ ilmu pengetahuan, untuk duduk berjam-jam berada di depan komputer atau internet, padahal yang sedang dikerjakan adalah menonton film porno atau menjelajahi situs-situs porno. Bila terjadi bahwa sesudah menonton film porno dan melihat situs porno, anak-anak jatuh pada *free sex*, seks pranikah, pelacuran diri, dan sebagainya, itu adalah akibat logis. Kontan saja, orang tua dan masyarakat akan menjadi alergi bahkan takut bersentuhan dengan teknologi (teknofobia) dan dengan begitu “melarang” anak-anaknya bergaul dengan setan teknologi tersebut.

PENDIDIKAN DAN TANGGUNG JAWAB INTELIGENSIA SOSIAL MASYARAKAT

Situasi pendidikan seperti yang telah dipaparkan jelas memprihatinkan karena sebenarnya salah satu tujuan pendidikan dan persekolahan adalah agar peserta ditempatkan secara baik dan benar dalam sosialitasnya atau kebersamaannya. Dalam hal pendidikan bukan berarti menghilangkan batas-batas individualitasnya, tetapi individualitas peserta didik semakin dipertegas dan diperkaya lewat sosialitasnya di lingkungan sekolah. Selanjutnya, apapun yang diajarkan di sekolah mestinya harus berangkat dari kenyataan kebutuhan peserta didik dalam korelasinya dengan masyarakat. Kurikulum seyogianya senantiasa berbasis pada masyarakat, karena apapun yang diperoleh peserta didik di sekolah justru mendapat maknanya ketika dijabarkan atau diejawantahkan di masyarakat, agar tidak menjadi mubazir.

Secara konseptual pendidikan kita sudah mengikuti trend perubahan paradigma yang dulu hanya menekankan kecerdasan otak (Intelligence quotient) menuju pada penekanan yang seimbang atau lebih pada kecerdasan emosional (emotional quotient), dan paradigma yang terakhir, yang semakin mendapat perhatian adalah



bagaimana membangun kecerdasan sosial (social quotient). Perubahan paradigma ini sudah mendapat tempatnya dalam tubuh UNESCO, yang menggelar tentang *four pillars of education* in ada empat dasar pendidikan, yakni: *Learning to Know* (Belajar untuk mengetahui); *Learning to Do* (Belajar untuk bertindak); *Learning to Be* (Belajar untuk menjadi (seseorang)); dan *Learning to Live Together* (Belajar untuk hidup bersama). Empat dasar ini adalah pegangan kita dalam penerapan semua kurikulum pendidikan di negara kita. Karena itu yang menjadi perhatian dan opsi para pendidik adalah bagaimana mendukung bertumbuh dan berkembangnya kecerdasan sosial yang ada pada anak didik. Kecerdasan sosial justru akan berkembang secara baik dan benar ketika para pelaku pendidikan dan peserta didik menjadi masyarakat sebagai laboratorium pertama dan utama.

Hal ini berarti semua kegiatan pendidikan mesti mengarahkan peserta didik untuk menghubungkan isi mata pelajaran dengan situasi keadaan di dunia (real world) dan memotivasi siswa/i untuk lebih paham hubungan antara pengetahuan dan aplikasinya kepada hidup mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat (Contextual Learning). Menurut Ign Sumarya, untuk mendukung pelaksanaan sistem tersebut di atas perlu dihayati bahwa pendidikan adalah 'proses'. Proses berarti mulai dari sesuatu apa adanya dan sedikit-demi sedikit ditumbuhkembangkan bersama-sama. Di sini pendidik dan peserta didik sama-sama berdiri sebagai subjek/pribadi yang sama-sama masih butuh tumbuh dan berkembang. Dari pihak pendidik memang dituntut sikap terbuka, rendah hati, sabar, mendengarkan dst. Berproses dalam hal ini bukan ingin cepat-cepat jadi atau instant. Berproses dalam hal ini berarti berpartisipasi dalam pertumbuhan dan perkembangan seperti seorang ibu yang sedang mengandung anaknya atau seorang petani yang merawat tanamannya. Keutamaan-keutamaan yang



Narasi Bangsa yang Tercecer

dimiliki oleh ibu atau petani tersebut juga dibutuhkan oleh seorang guru atau pendidik.

Sebelum mulai belajar seseorang hendaknya telah tuntas menajamkan visi pendidikannya. Bahwa belajar tentunya bukan sekadar menghafal berbaris kata dari buku atau catatan. Tentu saja bukan menelan bulat-bulat semua fatwa pengajar. Mereka meresapi bahwa belajar bagaimana berbuat (*learn to do*), bagaimana menjadi diri (*learn to be*), dan bagaimana bisa hidup bersama dengan orang lain (*learn to live together*), jauh lebih penting dari belajar menghafal. Ilmu perlu diiringi oleh amalan. Sekolah belum tentu menjadi obat hati, akal, dan moral etika, bahkan bisa menjadi racun. Buktinya, banyak sarjana atau lulusan sekolah menengah yang keluar dari pekarangan kampus dan sekolah, pandai segala macam ilmu. Dalam laut mampu ia ukur, jumlah bintang di langit sanggup ia hitung. Kemana-mana dipamerkannya ijazah sarjana dengan nilai luar biasa. Namun setelah itu perangnya lebih jelek dari bandit, sifatnya lebih busuk dari mafia, bahkan menjadi *troublemaker* hampir semua persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat dan keluarga.

Sekali lagi perlu ditekankan bahwa masyarakat adalah *frame of reference* dan *field of experience* dalam kancah pergulatan ilmu pengetahuan. Tanggung jawab pendidikan adalah bagaimana membuat masyarakat menjadi cerdas dan matang dengan mendidik anggota masyarakat secara formal menjadi cerdas. Karena itu, proses pendidikan secara langsung atau tidak langsung mesti berbasiskan masyarakat sosial demi terciptanya kesadaran sosial bersama. Hakikat masyarakat sebagai laboratorium semua ilmu pengetahuan adalah menjadikan pendidikan bangsa kita menjadi semakin profesional, kompeten, aktual dan kontekstual. Meskipun ada keraguan untuk melakukan semua hal di atas, tetapi keharusan untuk mendedikasikan amanah ilmu dalam wujud amalan nyata, sangatlah mendesak.



MEMPERTIMBANGKAN HUMAN AND CIVIC EDUCATION DALAM PENDIDIKAN YANG BERADAB*

Driyarkara (1913-67) menyebutkan bahwa melalui pendidikan manusia mengalami dua fase proses penting, yakni pertama, proses hominisasi suatu proses dimana manusia mesti dibedakan dari binatang jika tak mau menjadi sama seperti binatang. Mengapa demikian? Karena dalam dirinya manusia adalah binatang, tetapi binatang yang memiliki kelebihan, yakni akal budi (animal rationale). Proses yang kedua adalah humanisasi, yakni proses peningkatan taraf kemanusiaan manusia yang berakal budi menjadi lebih manusiawi. Dengan kata lain, proses humanisasi adalah proses civilisasi, proses peradaban, agar manusia betul-betul dilihat dan dihargai sebagai manusia. Kedua proses bisa berlangsung secara baik bila seseorang ini masuk dalam dunia pendidikan.

* Tidak dipublikasikan.



Narasi Bangsa yang Tercecer

Kedua proses ini saling mengisi satu sama lain. Proses hominisasi tanpa humanisasi akan menjadikan manusia tidak atau kurang mengalami perkembangan dalam peradabannya sebagai manusia, sebaliknya proses humanisasi tanpa hominisasi tidak akan pernah terjadi. Tidak ada manusia yang dilahirkan secara sempurna dan lengkap sebagai manusia yang betul-betul manusiawi. Saling mengisi dunia proses ini akan membentuk proses civilisasi atau proses peradaban manusia. Secara negatif muncul pengandaian bahwa bila semua manusia (Indonesia) sudah mengalami proses pembedaan dirinya dari binatang, maka sekurang-kurangnya perilaku kebinatangan kurang terjadi. Misalnya tidak ada lagi kasus perang antara suku, ras, agama, dll. Tidak ada lagi kasus bom. Tidak ada lagi kasus tawuran antara siswa dan mahasiswa, dan tidak ada lagi ketakutan dan keresahan kolektif. Secara positif dapat muncul pengandaian berikut, bila taraf kemanusiaan kita sudah semakin manusiawi, maka sesama akan dilihat sebagai saudara, perkembangan IPTEK dilihat sebagai peluang untuk pembangunan peradaban, dan globalisasi dan modernisasi dilihat sebagai bagian dari pembentukan peradaban tersebut. Bumi Indonesia akan menjadi *the dream global village*, yang menjadi idaman untuk dihuni. Semua orang ketika menjejakan kakinya di bumi pertiwi ini akan merasa *at home*.

Oleh karena itu, apa yang menjadi prinsip dasar tujuan pendidikan menurut Socrates yakni menjadikan manusia lebih beradab mesti menjadi bahan pertimbangan mendalam bagi para *stakeholder* pendidikan. Pendidikan dalam dirinya memiliki tugas mulia yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, sungguh tidak masuk akal bila justru karena pendidikan bangsa ini mengalami kemunduran dalam peradaban, misalnya terjadi perang berbau sara dan kerusuhan terjadi di mana-mana, tawuran antara pelajar dan mahasiswa, bahkan sampai pada pembunuhan



berencana dengan menggunakan bom, dan sebagainya. Kenyataan ini sudah berlangsung lama dan laten. Pertanyaannya, apakah sistem pendidikan yang salah ataukah manusia-manusia Indonesia belum sepenuhnya menjalani proses pembedaan dari binatang dan menjalani proses menuju lebih manusiawi?

PENDIDIKAN: INVESTASI MANUSIA, BUKAN INVESTASI MODAL

Yang menjadi tujuan dari proses pendidikan adalah terbentuknya keadaban publik yang utuh dan manusiawi. Selain manusia menjadi pusat dari peradaban tersebut juga menjadi subjek pendidikan. Yang menjadi masalahnya ketika dalam pendidikan, manusia bukan lagi menjadi tujuan atau subjek, tetapi malah diobyeikan atau disarankan untuk kepentingan ekonomi, politik, demokrasi dan sebagainya. Dengan demikian strategi pembangunan bergerak sejalan minat politik dan ekonomi rezim sezaman. Misalnya bagi Soekarno, *politics is the king* dan ia rajin mengubrak-abrik kabinet. Soeharto percaya, *economic is the king* dan di kota-kota besar Indonesia muncul gedung-gedung bertingkat, perumahan eksklusif, mal-mal keren, jalan tol dan jalan layang, serta berbagai fasilitas trendi yang memanjakan pemilik modal. Megawati yakin, *democracy is the king*, karenanya membangun budaya demokrasi sampai daerah-daerah terpencil lebih menjadi prioritas daripada membangun sekolah-sekolah di daerah terpencil. Hal ini semakin nampak ketika semua para penentu kebijakan pembangunan di negara, baik dari tingkat pusat sampai daerah lebih menganut prinsip, kemiskinan terjadi karena kurangnya kesanggupan untuk menabung dan membangun modal fisik.

Theodore W Schultz lalu mengembangkan prinsip modal manusiawi yang dalam penelitiannya bisa membuktikan bahwa mutu penduduk, yaitu kemampuan fisik maupun psikis-intelektual, lebih



Narasi Bangsa yang Tercecer

penting bagi proses pembangunan daripada modal fisik. Investasi manusia lebih penting daripada investasi modal. Bertolak dari pandangan ini, negara-negara maju berinisiatif mendahulukan penanaman modal pada manusia di bidang kesehatan dan pendidikan. Pandangan ini dipertegas Amartya Sen (pemenang Nobel Ekonomi tahun 1998) dalam buku *Inequality Reexamined* (1992) yang menekankan pentingnya kesempatan (entitlement) karena penyediaan lembaga pendidikan dan sekolah saja tidak cukup jika tidak sekaligus diciptakan kerangka institusional, yang mendukung orang yang paling miskin bisa masuk ke lembaga itu dan memanfaatkannya untuk memerangi kemiskinan.

Sejak tahun 1990, Bank Dunia lewat Annual World Development Report-nya menekankan urgensi pembangunan manusia. Hal yang sama ditekankan lagi dalam Human Development Report (HDR) yang tiap tahun diterbitkan UNDP dan memuat Human Development Index (HDI) yang menggarisbawahi perkembangan dan penggunaan kemampuan-kemampuan manusiawi sebagai soko guru pembangunan. Maka, perlu penanaman modal pada manusia dalam bidang pendidikan sebagai prasyarat untuk memberdayakan orang agar berjaya memerangi kemiskinan. Hal yang sama ditegaskan lagi dalam 'Inisiatif 20:20' di Kopenhagen tahun 1995, yang mewajibkan semua negara kaya dan berkembang memakai 20 persen dari bantuan pembangunan atau anggaran belanja negara bagi kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Di awal tahun 1972, ketika program *life long education* sedang disosialisasikan UNESCO, kesadaran akan pembangunan manusia ini sudah disuarakan Edgar Faure, Ketua *The International Commission for Education Development*, yang menekankan bahwa pendidikan adalah tugas negara yang paling penting!

Dalam bukunya *The Wealth of a Nation* David Warwick menilai bahwa Indonesia, yang mempunyai penduduk lebih dari



250 juta jiwa ditambah kelimpahan sumber daya alam yang tak terukur, adalah sebuah kekayaan yang sedang terabaikan dan justru menjadi miskin karena kebodohan. Kemiskinan membuat anak-anak Indonesia tidak cerdas sebagai akibat kurangnya sekolah yang baik. Pemerintah acuh tak acuh pada pembangunan manusia dan sibuk memikirkan kontinuitas kekuasaan. Karena itu yang dibutuhkan adalah pemerintah yang bermoral, yang anti kemiskinan dan KKN, yang berempati kepada rakyat yang didera kemiskinan karena kurang berpendidikan. Yang sangat diperlukan adalah orang-orang kaya yang tidak hanya cekatan membangun plaza yang mewah di kota-kota besar, tetapi juga cekatan membangun sekolah yang baik di desa-desa. Sebenarnya, bangsa ini tidak miskin harta. Kemiskinan kita terutama kemiskinan hati: tak mau berbagi dan egois. Efeknya adalah tak cukup uang untuk pendidikan sehingga anak-anak bangsa ini menjadi bodoh dan karena bodoh menjadi miskin.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MEMPERCEPAT CIVILISASI

Dalam rangka percepatan proses peradaban bangsa, selain memperhatikan pendidikan berbasis kemanusiaan, maka yang perlu diperhatikan adalah pendidikan kewarganegaraan. Dalam buku Belajar *Civic Education* (Pendidikan Kewarganegaraan) Benjamin Barber menjelaskan tentang *Civic Education* sebagai bagian dari kegiatan pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memperkuat pemerintahan otonom (self government). Pemerintahan otonom demokratis berarti bahwa warga negara aktif terlibat dalam pemerintahannya sendiri; mereka tidak hanya menerima didikte orang lain atau memenuhi tuntutan orang lain. Cita-cita demokrasi dapat diwujudkan dengan sesungguhnya bila setiap warganegara dapat berpartisipasi dalam pemerintahannya. Dalam demokrasi konstitusional, *civic education* yang efektif adalah suatu



Narasi Bangsa yang Tercecer

keharusan karena kemampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat demokratis, berpikir secara kritis, dan bertindak secara sadar dalam dunia yang plural, memerlukan empati yang memungkinkan kita mendengar dan oleh karenanya mengakomodasi pihak lain, semuanya itu memerlukan kemampuan yang memadai. Dalam negara kita, tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan untuk warga negara Indonesia sangat jelas tercantum dalam Pasal 31 Amandemen UUD 1945 Ayat (1) menyatakan, “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”, Selanjutnya dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional antara lain disebutkan: “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu” (Pasal 5 Ayat (1)).

Tujuan *civic education* adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat baik di tingkat lokal, maupun nasional. Hasilnya adalah dalam masyarakat demokratis kemungkinan mengadakan perubahan sosial akan selalu ada, jika warga negaranya mempunyai pengetahuan, kemampuan dan kemauan untuk mewujudkannya. Partisipasi warga negara dalam masyarakat demokratis, harus didasarkan pada pengetahuan, refleksi kritis dan pemahaman serta penerimaan akan hak-hak dan tanggung jawab. Partisipasi semacam itu memerlukan penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman tertentu, pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatoris, pengembangan karakter atau sikap mental tertentu, dan komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip fundamental demokrasi.

Dalam Pendidikan kewarganegaraan dikembangkan tiga komponen utama: pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*), dan watak-watak kewarganegaraan (*civic dispositions*). Pendidikan kewarganegaraan memberdayakan warganegara untuk dapat membuat pilihan yang bijak dan penuh dengan kesadaran dari berbagai alternatif yang



ditawarkan, memberikan pengalaman-pengalaman dan pemahaman yang dapat memupuk berkembangnya komitmen yang benar terhadap nilai-nilai dan prinsip yang memberdayakan sebuah masyarakat bebas untuk tetap bertahan. Pendidikan kewarganegaraan bukan hanya meningkatkan partisipasi warga negara, tetapi juga menanamkan kompetensi tanggungjawab inteligensia dan moral.

Pendidikan kewarganegaraan menekankan pada empat hal: *Pertama*, pendidikan kewarganegaraan bukan sebagai Indoktrinasi politik, karena bukan merupakan alat indoktrinasi politik dari pemerintahan yang berkuasa. Karena itu Pendidikan kewarganegaraan seharusnya menjadi bidang kajian kewarganegaraan serta disiplin lainnya yang berkaitan secara langsung dengan proses pengembangan warga negara yang demokratis sebagai pelaku-pelaku pembangunan bangsa yang bertanggung jawab. *Kedua*, pendidikan kewarganegaraan mengembangkan *state of mind*, pembangunan karakter bangsa yang cerdas serta berdaya nalar tinggi dengan membentuk kecerdasan (civic intelligence), tanggung jawab (civic responsibility), dan partisipasi (civic participation) warga negara sebagai landasan untuk mengembangkan nilai dan perilaku demokrasi. Demokrasi dikembangkan melalui perluasan wawasan, pengembangan kemampuan analisis serta kepekaan sosial bagi warga negara agar mereka ikut memecahkan permasalahan lingkungan. Wawasan dan kecakapan analitis diperlukan dalam kaitan dengan sistem politik, kenegaraan, dan peraturan perundang-undangan agar pemecahan masalah yang mereka lakukan adalah realistis. *Ketiga*, pendidikan kewarganegaraan adalah suatu proses pencerdasan. Pendidikan kewarganegaraan membelajarkan siswa untuk memiliki kepekaan sosial dan memahami secara cerdas permasalahan yang terjadi di lingkungan, baik secara rasional, emosional, sosial dan maupun spiritual dalam pemecahan permasalahan sosial dalam masyarakat. *Keempat*, Pendidikan kewarganegaraan sebagai laboratorium



Narasi Bangsa yang Tercecer

demokrasi membentuk sikap dan perilaku demokratis yang tidak saja dijalankan dengan hanya mengajar demokrasi (*teaching democracy*), akan tetapi melalui penerapan cara hidup berdemokrasi (*doing democracy*) sebagai modus pembelajaran. Melalui penerapan demokrasi, siswa diharapkan akan secepatnya memahami bahwa demokrasi itu penting bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam hal ini Pendidikan kewarganegaraan lebih dipentingkan karena menekankan pada: *Pertama*, Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya sekadar melayani kebutuhan-kebutuhan warga dalam memahami masalah-masalah sosial politik yang terjadi, tetapi lebih dari itu. Ia pun memberikan informasi dan wawasan tentang berbagai hal menyangkut cara-cara penyelesaian masalah. Dalam konteks ini, Pendidikan kewarganegaraan selain menjanjikan *civic knowledge* yang tidak saja menawarkan solusi alternatif, tetapi juga sangat terbuka dengan kritik (konstruktif). *Kedua*, Pendidikan kewarganegaraan dirasakan sebagai sebuah kebutuhan mendesak karena merupakan sebuah proses yang mempersiapkan partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara demokratis. Pendidikan yang bersifat demokratis, harus memiliki tujuan untuk menghasilkan lulusan yang mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan mampu mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan publik. Dengan kata lain, pendidikan harus mampu menanamkan kesadaran dan membekali pengetahuan akan peran warga dalam masyarakat demokratis.

Demi membangun keadaban publik demokratis, pendidikan mengarahkan agar warganya dapat mengkritisi dan memahami permasalahan yang ada. Pendidikan kewarganegaraan akan menghasilkan suatu pendidikan yang demokratis dengan melahirkan generasi masa depan yang cerdas, terbuka, mandiri dan demokratis.



Elaborasi Filosofis, Pedagogik Kritis, Sosial, dan Politik

Sangat diharapkan pendidikan kewarganegaraan dapat memberikan nilai-nilai demokrasi dengan tujuan : *Pertama*, dapat memberikan sebuah gambaran mengenai hak dan kewajiban warga negara sebagai bagian dari integral suatu bangsa dalam upaya mendukung terealisasinya proses transisi menuju transformasi, dengan mengembangkan wacana demokrasi, penegakan HAM dan *civil society* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *Kedua*, menjadikan warga negara yang baik (*good citizen*) menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengedepankan semangat demokrasi keadaban, egaliter serta menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. *Ketiga*, meningkatkan daya kritis masyarakat sipil. *Keempat*, menumbuhkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat sipil secara aktif dalam setiap kegiatan yang menunjang demokratisasi, penegakan HAM dan perwujudan keadaban publik.

Lastest Duminy



Narasi Bangsa yang Tercecer

Lastest Dummy



MENDIDIK MANUSIA MUDA MENJADI CALON PEMIMPIN

(Mengenang 50 tahun SMA I Ruteng)*

Pada tanggal 22-24 Juni 2015 saya diundang untuk menjadi narasumber dalam kegiatan lokakarya Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) di SMA I Ruteng (Lengka Rembong). Ada tiga refleksi penting dari kegiatan ini, yakni: *pertama*, menyiapkan orang muda (peserta didik) menjadi pemimpin masa depan menjadi tugas berat ketika perubahan cenderung secara masal berpengaruh negatif. *Kedua*, orang muda selalu mesti disadarkan secara kontinu dan berkelanjutan tentang identitas dan entitas dirinya. Dengan demikian, mereka memahami potensi-potensi dalam dirinya dan berupaya terlibat dalam berbagai kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler untuk mengeksplorasi kemampuan-kemampuannya secara lebih optimal. Kalau potensi ini diberdayakan, maka dengan

* Surat Kabar online Flores.Co, 11/09/2015.



Narasi Bangsa yang Tercecer

kemampuan berpikir dan bertindak kritis, selektif dan rasional, mereka dapat mentransformasi perubahan pada hal-hal yang positif dan baik. *Ketiga*, upaya memproyeksi, mempersiapkan dan memberdayakan orang muda menjadi pemimpin masa depan adalah tugas dan tanggung jawab semua guru, orang tua, masyarakat dan pemerintah.

PENDIDIKAN ADALAH MEMANUSIAKAN MANUSIA MUDA

Seorang filsuf pendidikan Indonesia, Driyakarya memaknai aktivitas pendidikan sebagai upaya ‘manusia memanusiakan manusia muda’. Berdasarkan pemaknaan ini, saya coba mengembangkan beberapa pemikiran. *Pertama*, sebagai *kegiatan manusia*, pendidikan mesti dijalankan dalam kesadaran dan keterlibatannya sebagai manusia. Manusia-manusia yang terlibat adalah guru sebagai *pembelajar* dan peserta didik sebagai *pebelajar*. Kegiatan ‘belajar’ yang melekat dalam diri keduanya mengartikan tentang hubungan multirelasional, multiinteraksional, timbal balik, *take and give*, dan menghargai satu dengan yang lain dengan melibatkan sumber/media dan lingkungan sosial budaya sebagai sumber belajar. Dalam kerangka konstruktivisme, peserta didik belajar dari guru dan sebaliknya, guru bisa belajar dari peserta didik. Saling menghargai sebagai manusia antara keduanya menjadi substansi pendidikan sebagai aktivitas manusiawi.

Kedua, pendidikan sebagai kegiatan *memanusiakan* menekankan tentang suatu proses yang berlangsung lama dan mendalam. Proses ini berhubungan dengan upaya membedakan/memilahkan manusia dari perilaku ‘kebinatangan’. Manusia dilahirkan sebagai ‘binatang’ (animal), tetapi kelebihanannya terletak pada akal budinya sehingga disebut sebagai *animal rationale*. Secara alamiah, tak dapat dipungkiri, perilaku dan tindakan awal manusia persis



seperti binatang. Dengan adanya kegiatan advokasi dan habituasi dalam pendidikan maka terjadilah proses hominisasi, yaitu proses membedakan (distingsi) manusia dari binatang. Tanpa proses ini, peluang untuk bisa memasuki proses yang lebih tinggi, tidak mungkin terjadi.

Proses berikutnya adalah humanisasi, yang berkaitan dengan upaya mengangkat hakikat manusia ke taraf yang lebih manusiawi. Berbagai upaya membuat manusia lebih manusiawi seperti mengikuti pendidikan formal, non formal, dan informal. Pada fase humanisasi ini, manusia dapat membedakan baik/benar dan salah/tidak benar, memiliki pikiran/pengetahuan, perasaan/sikap, dan tindakan/keterampilan yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri, kebaikan dan kesejahteraan umum (common good). Bila tingkat ini dijalankan secara baik dan benar, maka citra manusia mengalami transformasi menjadi 'homo yang human', manusia yang manusiawi. Pikiran, perasaan dan tindakannya sudah bergerak dari hanya sekadar *manusia* (actus hominis) menuju tingkatan yang lebih tinggi, yakni *manusiawi* (actus humanus).

Ketiga, pendidikan berkaitan dengan manusia muda. Orang muda menjadi subjek utama dari aktivitas pendidikan. Sebagai subjek utama, mereka memiliki potensi dan kemampuan yang masih bisa dikembangkan dan dibentuk sesuai dengan sasaran dan tujuan pendidikan. Orang muda menjadi andalan untuk menggantikan generasi tua yang pada fase-fase tertentu mengalami penurunan (antiklimaks) kemampuannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Menurut Socrates (470 SM-399 SM), tugas dan tanggung jawab utama dari generasi tua adalah mendidik dan 'mendialogkan' dengan orang muda tentang masa depan tentang, serta menjelaskan cara-cara, metode, strategi dan pendekatan menjadi pemimpin baru yang kompeten dan profesional. Orang muda perlu menerima masukan pikiran dari orang tua tentang



Narasi Bangsa yang Tercecer

profil pemimpin yang baik untuk diri, keluarga, masyarakat dan bangsa. Pendidikan menjadi aktivitas peralihan (regenerasi) yang dijalankan secara terus menerus dan berkelanjutan.

Ketiga poin di atas bermuara pada tujuan pendidikan untuk membentuk profil karakter calon pemimpin yang memiliki pikiran, sikap dan keterampilan yang mumpuni. Kemampuan-kemampuan ini kemudian diabdikan untuk membangun masyarakat bangsa, yang tidak melihat sesama sebagai lawan (*homo homini lupus*), tetapi melihat sesama sebagai sesama manusia (*homo homini socius*), dan melihat sesama sebagai gambaran Tuhan yang menciptakannya (*homo homini Deus*). Pendidikan menjadi menjadi basis dan orientasi dalam memimpin kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara lebih bermartabat dengan menjunjung tinggi rasa keadilan, kebaikan dan kebenaran umum.

SMA I LANGKE REMBONG DAN PENDIDIKAN CALON PEMIMPIN BARU

SMA Langke Rembong (Ruteng) dalam usia emasnya pasti sudah banyak menghasilkan profil lulusan yang bisa diandalkan sebagai pemimpin untuk diri, keluarga, masyarakat dan maupun bangsa. Berarti lembaga ini sudah berkontribusi signifikan dalam membangun masyarakat Manggarai Raya khususnya dan bangsa Indonesia umumnya. Sebagai sebuah institusi pendidikan yang sudah bertumbuh dan berkembang matang, sekolah ini masih memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih berat pada masa-masa mendatang. Tugas dan tanggung jawab ini berkaitan dengan tuntutan kurikulum berbasis kompetensi dan profesionalitas profil lulusan yang tinggi

Upaya-upaya humanisasi demi menghasilkan calon pemimpin baru, harus terus mengemuka dengan memberdayakan dan melibatkan semua *stakeholders* pendidikan. Penyusunan dan revisi



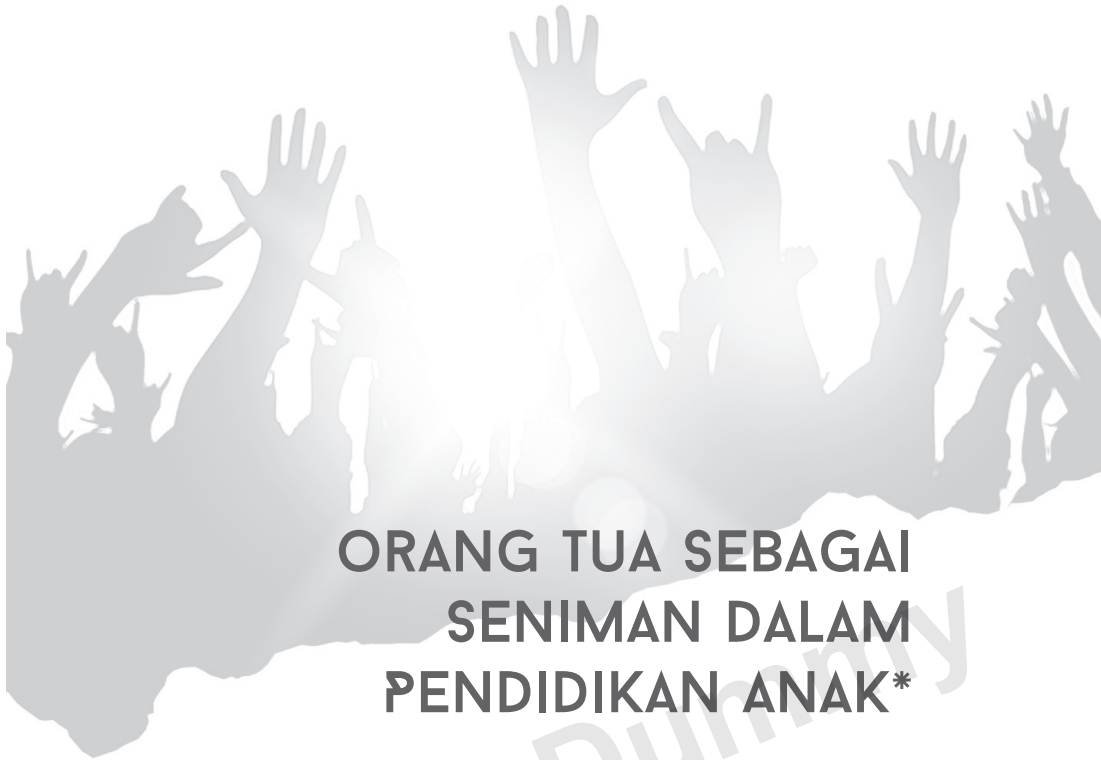
kurikulum mesti berdasarkan pada refleksi dan evaluasi yang komprehensif dan holistik sesuai dengan permintaan perubahan. Selain pembelajaran menghasilkan efek instruksional, tetapi juga efek pendamping dengan mengelaborasi nilai-nilai dalam sintaksnya. Tujuan dan capaian belajar (learning outcomes) harus memperhatikan kesetaraan antara pengetahuan, sikap dan keterampilan.

Selanjutnya, kegiatan pembelajaran mesti mengkaji keseimbangan antara kegiatan pemberian informasi (transfer of knowledge), pengalihan nilai (transfer of value), dan pembentukan keterampilan (skills formation) peserta didik. Meskipun semua itu tidak bisa terakomodasi secara utuh dalam kegiatan pembelajaran, tetapi dengan memperbanyak kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler maka pembentukan karakter peserta didik sebagai calon pemimpin baru untuk diri, keluarga, masyarakat dan bangsa mungkin akan tercapai secara optimal. *Ad Multos Annos, SMANSA! Be the best, always!*



Narasi Bangsa yang Tercecer

Lastest Dummy



ORANG TUA SEBAGAI SENIMAN DALAM PENDIDIKAN ANAK*

Pernah sekali di tempat saya, Flores-Manggarai, orang tua seorang siswi datang ke sekolah dan mengadakan ‘demo’ karena anaknya didapati sedang berpacaran di suatu kantin bersama pacarnya waktu jam pelajaran. Orang tua tersebut memprotes kenapa sekolah membiarkan begitu saja anak tidak masuk sekolah? Mengapa tidak dikontrol? Mengapa tidak dibuat absensi? Mengapa sekolah masa bodoh saja? Begitulah pertanyaan yang dilontarkan secara berapi-api oleh orang tua tersebut. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat mendasar untuk sebuah lembaga pendidikan yang ‘dinilai’ tidak bertanggung jawab terhadap anak didiknya.

* Tidak dipublikasikan



Narasi Bangsa yang Tercecer

Namun, apakah pertanyaan yang sama tidak mendasar juga untuk orang tua dan untuk masyarakat? Mengapa Cuma bisa dilemparkan kepada pihak sekolah? Apakah tanggungjawab sepenuhnya hanya ada pada pihak sekolah? Lalu dimana letak tanggung jawab orang tua sebagai orang tua kandung? Apakah pendidikan hanya sebatas pengajaran di sekolah, dan dengan demikian kebetulan para pelaku pendidikan di sekolah adalah guru, maka gurulah yang bertanggung jawab penuh terhadap pendidikan anak? Sebagai pendidikan, saya begitu sanksi dan malah langsung membuat protes balik kepada orang tua tadi. Memang secara formal, pendidikan itu berlangsung di sekolah, tetapi menurut Undang-undang Pendidikan No. 20 tahun 2003 menyebutkan bahwa selain pendidikan dilakukan secara formal, pendidikan juga berlangsung secara non formal yakni melalui pelatihan-pelatihan, kursus, kursus, dan sebagainya, serta pendidikan yang dilaksanakan secara informal, yaitu melalui pendidikan nilai-nilai, moral, etika yang berlangsung di sekolah atau di masyarakat.

Secara implisit dapat diungkapkan bahwa kepenuhan dan kesempurnaan pendidikan terletak pada bagaimana ketiga bentuk pendidikan dijalankan secara sinergis dan komprehensif. Pemahaman tentang tiga bentuk pendidikan ini mesti dipahami secara baik dan benar oleh *stake holder* pendidikan formal, informal dan non formal. Pemahaman yang mendalam tentang pendidikan yang sinergis dan komprehensif sangat perlu untuk menghindari dikotomi-dikotomi yang perlu dalam dunia pendidikan, atau demi menghindari aksi ‘mengkambinghitamkan” pihak lain dalam dunia pendidikan. Orang tua, atau guru, atau masyarakat yang suka melemparkan tugas dan tanggung jawab adalah pihak-pihak yang belum memahami secara sepenuhnya apa itu pendidikan. Sebenarnya kalau para pelaku pendidikan (orang tua, guru dan masyarakat) mengerti apa yang dengan manajemen pendidikan



berbasis keluarga, manajemen pendidikan berbasis sekolah, dan manajemen berbasis masyarakat maka dengan sendiri yang bertanggung jawab penuh pada pendidikan anak adalah pelaku pendidik tersebut. Yang mungkin menjadi persoalannya adalah bagaimana menyeimbangkan peran-peran dari para pelaku pendidikan.

Secara filosofis, kata pendidikan berasal dari kata bahasa Yunani, *paedagogi* (*paedos*: anak, *gogos*: cara mendidikan). Jadi *paedagogi* adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seni membimbing anak. Dari kajian kata ini ada dua hal yang perlu mendapat penekanan. *Pertama*, yang pertama kali menyebut 'anak' pada seseorang adalah orang tua dalam keluarga dan selanjutnya oleh masyarakat. Karena itu selain menyebut 'anak' maka yang berlaku secara logis selanjutnya adalah menegaskan hubungan antara orang tua dan anak dalam sebuah aktivitas. Aktivitas yang paling nampak sebagai ekspresi dari hubungan tersebut adalah membimbing, mengasuh, mengajar, dan lain-lain. Karenanya bila aktivitas ini tidak berjalan sebagai mestinya maka jelas tak adanya hubungan yang baik antara anak dan orang tua. Jangan heran bila ada pernyataan-pernyataan seperti: 'dasar anak tak diajar', 'kurang ajar', 'kurang perhatian', 'orang tua tidak tahu mengajar', dan sebutan lainnya.

Kedua, dalam tindakan membimbing anak yang mendapat penekanan adalah seni. Perkara mendidik adalah perkara seni. Kurikulum formal yang dibuat di sekolah adalah bagian dari sebuah seni yang tersusun secara sistematis. Karenanya para guru yang menjalankan kegiatan mendidik secara baik dan benar adalah seorang seniman kenamaan. Begitu juga dengan orang tua. Meskipun tidak tersusun dalam kurikulum yang tersusun secara sistematis, proses membimbing anak adalah seni yang mesti dijalankan di keluarga. Orang tua yang pandai membimbing anak akan disebut sebagai seniman tersohor. Keberhasilan dan kesuksesan anak dalam keluarga



Narasi Bangsa yang Tercecer

adalah hasil polesan dari para seniman keluarga yang tidak akan terlupakan. Dengan demikian, entitas sebuah seni adalah terletak pada bagaimana membuat orang takjub, kagum, dan bangga pada produk yang dihasilkan para seniman. Kualitas artistiknya selain terkandung secara inheren dalam diri hasil ciptaannya, juga secara kasat mata memberikan kebahagiaan dan kesenangan bagi orang lain. Jelas sekali bahwa orang tua yang sudah berlaku sebagai seniman sejati sangat nampak pada hasil karya. Pendidikan (the art of education). Anak-anak yang gagal baik secara akademis, emosional, sosial berikut spiritual memberikan penilaian bahwa orang tua gagal menjadi seorang seniman. Dalam hal ini yang menjadi aksentuasi dari cara pendidikan orang tua di keluarga adalah cara pendidikan yang bersifat praktis, non teoretis, di mana semuanya langsung dipraktikkan anak secara praktis pula. Keluarga menjadi sekolah sekaligus laboratorium bagi anak untuk mendalami dan memperkaya ilmu yang sudah diperolehnya di sekolah.

Seniman pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya adalah orang tua. Di dalam keluarga, sebelum anak masuk sekolah, anak-anak memperoleh pendidikan dengan bebas dan cintakasih serta tanpa kurikulum yang ketat. Materi pendidikan apa saja yang kemudian dapat dikembangkan kelak jika anak masuk ke sekolah. Orang tua mengajar anak-anak: berhitung, membaca, ilmu alam dst. serta budi pekerti atau agama atau iman. Sistem pendidikan, sejauh orangtua berhasil mendidik, dengan keteladanan atau contoh ataupun refleksi hidup sehari-hari. Dalam hal pendidikan budi pekerti lebih diutamakan pelaksanaan daripada ajaran atau wacana/ omongan atau yang disebut *hidden curriculum*. Ketika orangtua tidak mampu lagi untuk mendidik anak-anaknya, maka mereka baru dapat meminta bantuan instansi pendidikan atau sekolah. Sekolah adalah pembantu orangtua dalam mendidik anak-anaknya.



Menurut Ign. Sumarya SJ, dalam hal apa kita dapat belajar dari para orangtua, sebagai seniman pendidikan pertama dan utama, yang berhasil mendidik anak-anaknya. *Pertama*, kebebasan dan cinta kasih: tanpa kebebasan dan cintakasih, pendidikan akan gagal. Cintakasih tanpa batas alias bebas, sedangkan kebebasan batasnya adalah cintakasih, dimana orang tidak melecehkan atau merendahkan yang lain (Ingat: Pendidikan yang membebaskan dari Paulo Freire). Dengan kata lain semakin banyak aturan yang dikenakan di dalam dunia pendidikan, hemat kami merupakan rambu-rambu yang menunjukkan pendidikan akan gagal. Dalam hal kebebasan dan cintakasih lebih banyak dibutuhkan keteladanan atau kesaksian dari para pendidik/guru. Anak yang tertekan atau suasana pendidikan yang menekan akan membuat frustrasi, dan jika anak atau siapapun berada di bawah tekanan, jelas mereka tidak akan mudah untuk berkembang dan bertumbuh.

Kedua, perhatian terhadap pendidikan berarti memiliki opsi pada anak-anak. Perhatian orangtua terhadap pendidikan dengan jelas dapat dilihat dengan penyediaan dana dan menyediakan ruang dan waktu bagi pendidikan anak. Pendidikan mesti disadari sebagai bentuk “human investment” dan bukan “material investment.” Karenanya, baik orang tua, masyarakat, pemerintah dan para pelaku pendidikan di sekolah mesti menyadari betul hakikat tujuan pendidikan, yakni pengembangan diri manusia secara utuh dan sempurna. Setiap orang harusnya menyadari bahwa pendidikan itu mutlak untuk diutamakan.

Ketiga, pendidikan budi pekerti atau agama sebagai “hidden curriculum”: Pendidikan budi pekerti/agama lebih ditekankan dalam pelaksanaan hidup sehari-hari, yang menjadi nyata dalam cintakasih kepada sesama, terutama terhadap mereka yang miskin atau kurang beruntung.



Narasi Bangsa yang Tercecer

Lastest Dummy



BERPIKIR KRITIS, EMANSIPATORIS DAN DIALEKTIS PADA SISWA SEKOLAH MENENGAH

(Mengenang 14 tahun Meninggalnya 'Sang Jenderal' Pater Leo Perik, SVD, Pendiri Seminari Pius XII Kisol)¹

SANPIO "DENSUS" 88

Kami adalah angkatan 1988. Dalam group Whatsapp (WAG) kami pun sepakat memberi nama: Sanpio 'Densus' 88. Rupanya penamaan terhadap group WA bukan suatu kebetulan. Dalam kilas balik memori, angkatan kami termasuk yang cukup dekat dengan 'operasi' intelijen yang menjadi bagian penting dari sistem kerja Detasemen Khusus. Tentu cara kerja spionase itu dalam skala dan konteks kehidupan sebagai siswa seminari, di mana kami- dalam bahasa psikologi perkembangan sedang mengalami

¹ Artikel ini dibuat pada buku kenangan 'Mengenang 14 tahun meninggalnya Pater Leo Perik, SVD.' Karya Max Regus, MA, Ph.D.



Narasi Bangsa yang Tercecer

masa perkembangan dan mencari jati diri. Beberapa bentuk kerja ‘mata-mata’ seperti mencuri buah-buahan di gudang penyimpanan, memindahkan pisang yang sudah diperam orang lain di tempat yang berbeda, bolos untuk plesir ke borong atau ke rumah para guru, sengaja mengklaim kepemilikan kiriman *rebok* atau *kompiang* lalu mengundang pemilik yang sebenarnya untuk makan bersama (setelah kiriman dihabiskan baru diberi tahu kepada pemiliknya), sengaja mengedarkan surat korespondensi dari teman perempuan selama pelajaran berlangsung tanpa diketahui guru yang sedang mengajar, menulis secara bersama surat korespondensi (minta bantuan teman yang hurufnya bagus), menjarah makanan sisa dari patres yang akan dibawa kembali ke dapur. Dan masih banyak lagi perilaku bernuansa inteligen lainnya.

Yang pasti kerja-kerja inteligen di atas menuntut kekompakan, kecermatan, kreativitas, kritisitas, soliditas, solidaritas, dan reponsibilitas di antara kami. Mirisnya, setelah dijejaki, tak ada satu pun dari antara kami yang berprofesi sebagai polisi, tentara atau intel (mata-mata). Kami sepakat bahwa apa yang kami lakukan dulu mungkin saja termasuk dalam kategori ‘menyimpang’ atau ‘tidak lazim’ bila dilihat dari sisi perkembangan moral yang normal. Namun di sisi lain, sebagai remaja lelaki normal kami merasa bahwa perilaku-perilaku tersebut justru ‘wajib’ kami alami. Selain perilaku di atas hendak mengafirmasi identitas sebagai remaja lelaki, tetapi ada nilai lain yang muncul secara tidak disadari, yaitu solidaritas, soliditas, kreativitas, kejujuran, tanggung jawab dan kesetiakawanan sosial.

Kami beranggapan, apa yang dulu kami lakukan masih masuk dalam kategori baik dan wajar bila ‘apple to apple’ dengan apa yang dilakukan oleh para remaja sekarang ini. Mungkin yang ada pada kami waktu itu adalah sudah cukup kuatnya kemampuan berpikir kritis. Sebab, selain karena kami merupakan siswa unggulan



dari masing-masing sekolah dasar di Manggarai Raya, tetapi juga karena kuatnya suasana pendidikan kritis, baik formal maupun non formal yang kemudian terjadi di seminari. Dalam pelajaran bahasa Indonesia dan bahkan pelajaran lain (seperti juga dalam mapel Matematika dan bahasa Jerman yang diajarkan oleh Almarhum Pater Leo Perik), kami sudah dibiasakan dengan pendekatan dalam dunia jurnalistik, yakni 5 W + 1 H (*What, Who, Where, When, Why* dan *How*). Atau, kebiasaan untuk berdebat di kamar makan ketika seseorang memberikan pengumuman/menyampaikan ide, gagasan, kebijakan, atau program dari seksi kerjanya. Kebiasaan lain yang menumbuhkan kemampuan dan keterampilan berpikir kritis adalah program 'sidang akademik' pada minggu tertentu dalam bulan. Kegiatan ini banyak manfaatnya dari sisi pengembangan berpikir kritis, dialektis dan emansipatoris. Ketika seseorang atau sekelompok orang menyiapkan makalah untuk dipresentasikan dan diperdebatkan oleh forum, maka pada kesempatan itu pula terjadi pembentukan pola berpikir sistematis, berstruktur dan kritis. Kegiatan yang tak kalah penting lainnya adalah kreativitas yang tinggi dalam mengisi tulisan di majalah dinding dan masalah Puspita. Nah...bila ada di antara kami ada yang berprofesi sebagai pastor, pendidik, wartawan, birokrat, politisi, pengamat politik yang kritis, maka bisa jadi ini adalah dampak instruksional dan nurturan dari edukasi dan habituasi yang berskema berpikir kritis.

URGENSI DAN RELEVANSI ISU PENDIDIKAN KRITIS

Tingginya indeks perilaku menyimpang pada diri siswa SMP/SMA dalam berbagai bentuk kejadian seperti tawuran, pornografi, pornoaksi dan narkoba, dll, dan semakin banyaknya masalah social yang terjadi di sekitarnya, yang bila tidak 'selesaikan' dengan baik, secara langsung atau tidak langsung dapat menyebabkan runtuhnya



Narasi Bangsa yang Tercecer

sendi-sendi peradaban bangsa. Padahal, harapan bangsa untuk generasi muda dengan segala potensi yang dimiliki untuk bisa membangun Indonesia pada dua puluh atau tiga puluh tahun lagi, sangat bergantung pada kondisi mereka sekarang ini. Mungkin tidak disadari sepenuhnya bahwa bila hal ini terus berlanjut, maka akan terjadi kondisi yang disebut *lost generation*, yang akan menyebabkan adanya *lost nation*.

Bangsa-bangsa yang di benua America, Eropa, Australia dan beberapa di Asia, telah melihat fenomena ‘generasi yang hilang’ ini sebagai ancaman yang besar bagi konstruksi peradabannya. Karena itu dengan segala daya upaya, mereka mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dan kemudian merancang berbagai bentuk program pendidikan dan pemberdayaan demi mengantisipasi berlanjutnya fenomena ini. Salah satu bidang yang diandalkan adalah menata dan membangun sistem pendidikan yang berbasis ‘pendidikan kritis’. Ketika menjadi salah satu isu yang diangkat dan dikemudian diintegrasikan dalam sistem kurikulum yang ada, berarti ada keyakinan pada bangsa-bangsa tersebut bahwa pendidikan kritis memiliki ‘kekuatan’ yang dapat diandalkan dalam membentuk generasi bangsa yang baik.

Konsep dan praksis pendidikan kritis dilandaskan pada suatu pemahaman bahwa pendidikan terintegrasi dan tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial, kultural, ekonomi, dan politik yang lebih luas. Institusi pendidikan tidaklah netral, independen, dan bebas dari pelbagai kepentingan, tapi malah menjadi bagian dari institusi sosial lain yang menjadi ajang pertarungan kepentingan. Pendidikan harus dipahami dalam kerangka relasi-relasi antara pengetahuan, kekuasaan, dan ideologi (Ira Shor & Freire, 1945). Pelbagai kepentingan inilah yang akan membentuk wajah institusi pendidikan dan mempengaruhi subyektivitas peserta didik. Harus disadari, subyektivitas manusia tidak bisa dipisahkan dari konteks



sosial yang lebih luas. Subyektivitas manusia sangat dipengaruhi oleh apa yang dibaca dan dipelajari, lingkungan sekolah tempat manusia belajar, lingkungan sosial tempatnya berinteraksi, lingkungan keluarga tempat dia tinggal, sistem informasi, system politik yang mengatur kehidupan publik, dan entitas-entitas lain yang turut membentuk dan mempengaruhi kesadaran individu.

Dalam konteks di atas, perlu membangun kesadaran kritis peserta didik agar mereka mampu mendemistifikasi kepentingan ideologis yang menyelimuti realitas. Kesadaran kritis merupakan kata kunci yang sangat penting, sebab penindasan, dominasi, eksploitasi itu berlangsung karena terdegradasinya fakultas kritis manusia. Yang dimaksud dengan berpikir kritis (*critical thinking*) di sini adalah adalah model berpikir (*mode of thought*) yang mampu menyingkap fenomena-fenomena tersembunyi atau melampaui asumsi-asumsi yang hanya berdasarkan pengetahuan umum (*common sense*), tetapi mengembangkan *critical* kesadaran kritis (*critical consciousness*). Kesadaran kritis ini tidak bisa dengan cara didepositokan atau diimpose dari luar, tapi harus dilahirkan lewat usaha yang kreatif dari dalam peserta didik sendiri. Kesadaran kritis tidak dapat dicangkokkan, tapi dibangun lewat kesadaran diri peserta didik (Kincheloe, 2008).

REKONSTRUKSI GAGASAN BERPIKIR KRITIS

Gagasan tentang pendidikan kritis dan berpikir kritis dapat dilihat dari dialektika pemikiran antara mazhab Frankfurt dan Postmodernisme (Habermas, 2006). Mazhab Frankfurt memiliki gagasan dan keyakinan bahwa proyek modernisme bertitik tolak pada asumsi perlunya meletakkan fondasi dasar bagi kehidupan masyarakat modern dengan bertumpu pada universalisme akal, hak



Narasi Bangsa yang Tercecer

dan otonomi individu. Sedangkan, postmodernisme, kebalikannya, tidak meyakini apa yang disebut dengan universalisme, yang ada adalah partikularitas, pluralitas dan keragaman. Mazhab Frankfurt melihat kebenaran sebagai suatu yang sifatnya tetap dan tidak mungkin dapat dirubah lagi. Kebenaran sejati adalah kebenaran yang tetap dan memayungi segala bentuk pergerakan kehidupan manusia. Sementara, postmodernisme tidak ada kebenaran sejati karena yang disebut dengan kebenaran itu sebenarnya hanyalah interpretasi manusia atas realitas itu sendiri yang dihasilkan, tapi cuma konstruksi bahasa manusia. Dengan demikian, postmodernisme menganut paham relativisme.

Merujuk pada dialektika ini, mazhab Pendidikan Kritis mengambil unsur-unsur konstruktif dari mazhab Frankfurt dan postmodernisme yang bisa diadaptasi dalam upaya mengkonstruksi satu bentuk pendidikan yang membebaskan dan kritis, di mana dapat menjadi medium bagi kritik sosial dan sekaligus mampu menawarkan kemungkinan-kemungkinan dikembangkannya ruang publik demokratis (*democratic public spheres*) (Thahjadi, 2004). Dua hal yang ditekankan dalam mazhab ini adalah pemberdayaan diri (*self-empowerment*) dan refleksi diri (*self-reflection*) sebagai titik tolak untuk melakukan transformasi social dengan berpihak kepada yang lemah (*powerless*) (McLaren, 1998). Salah satu tema pokok mazhab pendidikan kritis adalah tentang kapitalisme karena pengaruhnya yang besar dalam kehidupan masyarakat modern. Apa yang dilahirkan dari rahim kapitalisme adalah *culture of positivism* dan rasionalitas teknokratik/instrumental, satu bentuk budaya dan model berpikir yang berpengaruh atas laju arah pendidikan. Karena ilmu yang disampaikan kepada peserta didik dalam budaya ini adalah ilmu yang mengorientasikan mereka untuk beradaptasi dengan dunia masyarakat industri. Proses pembelajaran pun ditekankan pada upaya untuk mengakumulasi dan memiliki



ilmu pengetahuan yang ditujukan untuk mengejar profit. Jadilah pembelajaran sebagai arena imposisi pengetahuan dari mereka yang menganggap tahu segalanya kepada mereka yang tidak mengetahui apa-apa. Lebih dari itu, dalam budaya positivisme, pengetahuan cenderung dipisahkan dari proses pembentukannya. Seolah-olah keduanya bisa dipisahkan. Pengetahuan dianggap seperti “barang jadi” yang siap ditelan peserta didik tanpa melalui proses seleksi dan refleksi bersama. Padahal kalau kita memakai perspektif Paulo Freire (1973) dalam *The Gnosiological Cycle of Knowledge*, proses pembentukan pengetahuan itu secara dialektis berkaitan erat dengan proses penerimaan (Delgaauw, 1988). Keduanya tidak bisa dipisahkan. Jika dipisahkan, maka pembelajaran sama saja mengabaikan unsure-unsur penting yang perlu dikembangkan di dalam diri peserta didik, seperti refleksi kritis, keingintahuan (*curiosity*), dan dialog.

Karenanya, pembelajaran yang ditekankan dalam pendidikan kritis adalah bagaimana memahami, mengkritisi, memproduksi, dan menggunakan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk memahami realitas hidup dan mengubahnya. Metode yang dipakai adalah kodifikasi dan dekodifikasi. Kodifikasi mengacu pada proses merepresentasikan fakta yang diambil dari kehidupan peserta didik dan kemudian memasalahkannya (*problematizing*). Sedangkan dekodifikasi adalah proses pembacaan atas fakta-fakta tersebut melalui dua metode: deskriptif dan analitis. Tahap deskriptif digunakan untuk memahami, meminjam istilah Chomsky (1978), “surface structure”, sedangkan tahap analitis digunakan untuk memahami, “deep structure”. Dua metode itulah yang dijadikan sebagai alat analisis untuk memahami relasi-relasi antar kategori (ideologi, ras, gender, kelas) dalam memahami realitas termasuk di dalamnya dunia pendidikan.



Narasi Bangsa yang Tercecer

Dari perspektif pendidikan kritis, sekolah diyakini memainkan peranan yang signifikan dalam membentuk kehidupan politik dan kultural (Supardan, 2015). Sekolah adalah media untuk menyiapkan dan melegitimasi bentuk-bentuk tertentu kehidupan sosial. Sementara itu, guru tidak dianggap sebagai pusat segalanya. Ia bukan satu-satunya sumber pemilik otoritas kebenaran dan pengetahuan. Dia bukan pemilik tunggal kelas. Hubungan guru-murid bukanlah bersifat vertikal seperti yang terjadi di pabrik yang mengidentifikasi atasan-bawahan atau manajer-buruh, tapi bersifat horizontal dan egalitarian. Isi dan materi pembelajaran dalam pendidikan kritis tidaklah semata-mata hak prerogative guru, kepala sekolah atau para ahli tanpa melibatkan peserta didik. Pendekatan *bottom up* dan partisipatif lebih dipilih dalam mengkonstruksi ini pembelajaran atau kurikulum dengan menjadikan kehidupan peserta didik sebagai titik pijak.

Proses pembelajaran dalam pendidikan kritis lebih menekankan pada aspek 'bagaimana berpikir' (*how to think*) daripada 'berpikir apa' (*what to think*). Penekanan pada aspek *what to think* atau materi pembelajaran itu penting, tapi proses atau metodologi untuk mendekati materi itu lebih penting. Dengan demikian, proses berpikir, berdebat, berargumentasi, mengapresiasi pendapat orang lain, selama masa pembelajaran jauh lebih penting daripada materi pelajaran itu sendiri. Karena dalam proses itulah akan terjadi kritisisme, *sharing ideas*, saling menghargai dan penilaian dan evaluasi terhadap pengetahuan. Penekanan aspek *how to think* akan bisa terlaksana jika metode yang dipakai dalam proses pembelajaran adalah metode dialogis, bukan metode ceramah. Dialog merupakan sarana humanis, sarana untuk menemukan jati diri sebagai manusia, sarana untuk memanusiakan manusia. Namun, tetap saja harus diingat, dialog apapun tentang suatu pengetahuan atau nilai di kelas harus steril dari upaya untuk mencapai konsensus.



Hal ini dimaksudkan agar ada kesempatan bagi peserta didik untuk berpikir lewat persepektif mereka sendiri.

Proses dialog akan menghasilkan apa yang disebut Freire dengan yaitu proses berkembangnya kesadaran (*conscientization*). Konsientisasi adalah proses dimana manusia mempunyai kesadaran kritis (*critical awareness*) sehingga mampu melihat secara kritis berbagai kontradiksi, penyimpangan dan ketimpangan sosial yang ada di sekelilingnya dan kemudian ada kesadaran untuk berupaya mengubahnya (McLaren, 1995). Pendidikan kritis menganggap bahwa tujuan pendidikan itu sebenarnya adalah untuk meningkatkan kesadaran peserta didik, dari kesadaran magis dan naif, menuju kesadaran kritis.

Demi mendukung peningkatan kesadaran di atas, ada tiga tahapan dasar dalam pendidikan (Taylor, 1983; Supardan, 2015). Tiga tahapan itu merupakan derivasi dari filsafat praksis. Tahap pertama, adalah *naming*, yaitu tahap menanyakan sesuatu: *what is the problem?* Tahap ini merupakan latihan untuk mempertanyakan sesuatu, baik itu berkaitan dengan teks, realitas sosial ataupun struktur ekonomi-politik. Tahap *kedua*, adalah *reflecting*, yaitu dengan mengajukan pertanyaan mendasar untuk mencari akan persoalan: *why is it happening?* Tahap ini dimaksudkan agar murid dibiasakan untuk tidak berpikir simplistik, tapi berpikir kritis dan reflektif. Tahap *ketiga*, adalah *acting*, yaitu proses pencarian alternatif untuk memecahkan persoalan: *what can be done to change the situation?* Ini merupakan tahapan praksis. Memang, refleksi dan aksi merupakan dua sisi dari satu koin yang sama dalam pendidikan kritis (*critical pedagogy*). Tiga tahap merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam proses pendidikan.



HABITUASI DAN KULTURASI BERPIKIR KRITIS

Tahapan berpikir kritis di atas sudah pasti menuntut pembiasaan dan pembudayaan yang intens dalam diri peserta didik. Pembiasaan dan pemberdayaan ini menjadi sangat penting karena pada dasarnya berpikir kritis merupakan salah satu model aktivitas kognitif yang menuntut keterampilan yang tinggi dalam mengembangkan dan mengaplikasikannya. Dalam sejarah perkembangan peradaban bangsa di dunia, kegiatan berpikir kritis ini sudah dilansir sebagai salah satu tumpuan dalam mengembangkan karakter manusia dan keadaban masyarakatnya. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa manusia yang memiliki potensi intelektual, memungkinkan dia bisa berpikir dalam mencermati kehidupannya dan kehidupan masyarakatnya. Dalam perjalanan sejarah peradaban bangsa di dunia, kegiatan berpikir sosial menjadi salah satu kekuatan demi mengkonstruksi kehidupan sosial yang baik.

Berpikir kritis itu sendiri merupakan salah satu dari empat karakter yang harus dimiliki oleh peserta didik pada abad 21, yakni: Komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis dan kreativitas. Sementara, berpikir kritis juga Berpikir kritis menjadi tuntutan ketika masyarakat dunia di abad 21 ini mendapat tantangan yang besar dan kuat. Delors dalam *Learning: The Treasure Within* (1996) mengangkat beberapa macam ketegangan yang kasat mata pada masyarakat abad ini, seperti ketegangan antara globalisasi dan lokalisasi, antara universalitas dan individualitas, antara tradisi dan modernitas, antara kompetisi dan solidaritas, antara akselerasi/ekspansi pengetahuan dan daya serap manusia, dan antara yang spiritual dan material. Berbagai ketegangan ini menuntut seseorang untuk mengembangkan kompetensi, kapasitas dan kapabilitas dan keterampilannya dalam mengkritisi berbagai kondisi dan situasi sosial yang menjadi dampak dari berbagai ketegangan dan masalah. Untuk dapat memiliki kemampuan berpikir kritis yang baik dan



benar maka diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki ketahanan dan daya saing, mampu berpikir dan bersikap rasional, kritis, solutif, alternatif, konstruktif, dan transformative.

Kemampuan berpikir kritis tidak muncul dan dikembangkan begitu saja pada masa ini, tetapi berangkat dari perjalanan sejarah sejak zaman Yunani kuno sampai zaman modern. Dalam hal ini, filsafat kritis menjadi sendi-sendi awal pengembangan berpikir kritis dan selanjutnya kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya, penulis memberi perhatian pada pemikiran Karl Marx tentang dialektika (Blackburn, 2013) dan Jurgen Habermas tentang belajar emansipatori (*emancipatory learning*) untuk menjadi dasar dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Dialektika (Inggris; *dialectic*, Yunani, *dialetikos*, yang berarti bermakna perdebatan/diskusi yang mencerahkan, membebaskan dan transformatif (Bagus, 1991). Dialektika dalam pemikiran Marx dipahami sebagai proses pertemuan integral antara suatu hal sebagai ‘pengetahuan awal’ (tesis) dengan hal yang lain sebagai ‘pengetahuan kemudian’ (antitesis). Kedua hal di atas dipertemukan menjadi pengetahuan baru (sintesis) yang lengkap, utuh dan komprehensif. Dalam menghasilkan sintesis, ada proses integrasi dari berbagai hal yang sudah mengalami desintegrasi dalam dirinya. Pengetahuan-pengetahuan yang dianggap tidak penting, bersifat dangkal, artifisial dan tidak berkualitas ditanggalkan dalam proses yang disebut desintegrasi. Untuk mencapai pengetahuan baru ini dibutuhkan sikap kritis, terutama dalam mencermati ‘pengetahuan awal’ sebagai tesis, ‘pengetahuan kemudian’ sebagai antitesis, dan selanjutnya memunculkan ‘pengetahuan baru’ sebagai sintesis.

Sementara belajar emansipatori dalam pemikiran Habermas berarti suatu kegiatan belajar yang melibatkan pikiran kritis peserta didik dalam mengkonstruksi kesadaran dan pengetahuannya. Keterlibatan pikiran kritis peserta didik dalam mengkonstruksi



Narasi Bangsa yang Tercecer

kesadaran dan pengetahuannya dilakukan melalui tahapan teknis, praktis dan emansipatoris. Dalam tahapan teknis, peserta didik secara kritis mempelajari konten pengetahuannya dan menguasainya secara secara struktural dan sistematis. Pada tahapan praktis, peserta didik berpikir untuk menghubungkan pengetahuan yang dikuasainya dengan kenyataan sosial dan secara kritis menilai relevansi, kecocokan dan kesesuaian pengetahuannya dengan pengalaman sosial empirik. Pada tahap ketiga, peserta didik terlibat secara aktif untuk menangani berbagai masalah sosial kemasyarakatan yang membutuhkan perbaikan dan jalan keluar.

Saya kemudian berupaya mensintesis dan mengelaborasi kedua pemikiran ini untuk kepentingan konsep pengembangan kemampuan kritis pada diri siswa SMP/SMA. Hal ini didasarkan pada urgensi bahwa peserta didik akan kembali menjadi anggota masyarakat dan menjadi andalan utama dalam melakukan pengabdianya dan menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah diperolehnya di sekolah-sekolah, lebih khusus ketika peserta didik berhadapan dengan berbagai fakta dan kenyataan masalah dan ketimpangan sosial. Salah satu yang dituntut darinya adalah kemampuannya kritis terhadap berbagai situasi, kondisi, ketegangan dan masalah sosial masyarakat. Kemampuan kritis ini tentunya dimanfaatkan untuk peningkatan dan pengembangan kehidupan masyarakat yang lebih baik, positif dan konstruktif.

Menurut saya, ada alasan mendasar mengapa emansipatoris dan dialektis ini sangat urgen dan relevan dengan usia belajar SMP/SMA, yakni: Pertama, dalam konsep berpikir emansipatoris dan dialektis terkandung unsur-unsur yang senantiasa mendorong dan mengarahkan seseorang untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan berpikir tingkat tinggi (high order thinking) seperti cara berpikir kritis. Berpikir kritis berarti mampu menghubungkan pengetahuan, ide, dan gagasannya dengan kenyataan-kenyataan



sosial empirik yang terjadi di dalam masyarakat (Althusser, 1993). Kedua, pengembangan-pengembangan berpikir kritis, menagih kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam diri seseorang. Usia belajar sekolah menengah sangat relevan dan cocok untuk mengembangkan model kemampuan berpikir kritik sosial ini. Hal ini selaras dengan kemampuan siswa sekolah menengah tersebut yang sudah masuk pada tahap berpikir analitis-kritis dan sintesis emansipatori. Dengan perpaduan dialektis antara kemampuan belajar teknis, praktis dan emansipatoris, siswa sekolah menengah memiliki ruang untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritik sosialnya. Pemberdayaan dan penguatan atas kemampuan-kemampuan ini dapat memfasilitasi mereka untuk berpikir kritis terhadap berbagai kondisi dan situasi masyarakat di sekitarnya. Pada level teknis aplikatif, dengan keterampilan kritik sosialnya ini, siswa sekolah menengah mampu mengeksplorasi, mengakomodasi, mengelaborasi dan mengkonfirmasi berbagai masalah sosial yang ada di sekitarnya.

KEMBALI KE WAG

Dalam WAG ini banyak yang kami perdebatkan secara kritis. Politik, ekonomi, kesehatan, pendidikan, kenangan masa lalu (teman kores), keadaan rumah tangga (tentu bagi mereka yang keluarga), dan hal-hal *nyeleneh* lainnya. Bahkan saking sengitnya perdebatan tentang (pilihan) ideologi politik, sampai ada yang terpaksa 'pamit' dari group (tentu masuk lagi setelah melalui pendekatan yang alot). Kalau saya menulis opini biasanya *soft copy* saya kirim ke grup untuk sekedar mendapat masukan dan catatan kritis. Dari masukan dan catatan kritis itu saya akhirnya mendapat banyak hal untuk perbaikan. Inilah kami, Sanpio 'Densus' 88. Kompak, solider dan tetap kritis. Namun di atas semuanya, kami semua akan topi buat sang jenderal kami: Pater Leo Perik, SVD! Rest in Peace!



Narasi Bangsa yang Tercecer

Lastest Dummy



RASIONALITAS YANG ETIS DAN BERNILAI*

PENGANTAR

Saat diminta untuk memberi pengantar pada buku ini, maka intuisi akademik kemudian membawa saya pada upaya untuk sedikit memberi penguatan filosofis kepadanya. Selain karena basis akademik adalah filsafat, juga karena saya sangat interes dengan pergumulan-pergumulan pemikiran filosofis yang sudah, sedang dan akan berkembang. Dengan belajar dan membuat kajian terhadap berapa pemikiran filosofis, saya sangat berharap akan memberikan dasar-dasar berpijak yang baik pada buku ini, maupun pada diskursus-diskursus yang terjadi di dunia luar. Pada kesempatan mengantar buku ini, saya sama sekali tidak berpretensi untuk mengkaji secara fundamental-filosofis tentang judul yang

* Tulisan ini merupakan isi pengantar dari buku: "Berdamai dengan Realitas?" terbitan PKM Sambi Poleng.



Narasi Bangsa yang Tercecer

saya angkat di atas, tetapi lebih melihat persoalan rasionalitas, yang menurut saya, pada saat ini tengah berada dalam tegangan yang paradoksal. Ketegangan paradoksal itu terlihat, di satu sisi rasionalitas diagungkan sebagai salah sumber kekuatan dalam membangun masyarakat dunia, tetapi pada sisi lain justru menjadi malapetaka bagi kehidupan dunia saat ini. Lalu, pertanyaan yang muncul: Apa yang salah dengan rasionalitas? Sampai kapan ketegangan ini melanda rasionalitas dan masyarakat dunia yang memanfaatkannya? Nah, untuk menelusuri pertanyaan-pertanyaan ini, beberapa gagasan di bawah ini coba dikemukakan.

RASIONALITAS YANG IRASIONAL

Seorang Weberian yang bernama Friedman dalam bukunya *Cultural Identity and Global Processes* (1994) pernah berujar begini: “Auschwitz adalah tempat yang rasional, tetapi bukan tempat yang masuk akal (reasonable)” Yah, untuk sebuah kebijakan politik kekuasaan totalitarian, maka Auschwitz merupakan tempat yang rasional, meskipun secara akal sehat Auschwitz adalah simbol dari realitas penderitaan, penyiksaan dan ketiadaan harapan akan kehidupan. Sebenarnya ungkapan Friedman ini secara lugas mau menggugat tentang glorifikasi terhadap rasionalitas yang sudah dan sedang bertumbuh dalam masyarakat modern. Masyarakat terbuai dengan slogan-slogan yang bernaung di bawah payung rasionalitas. Realitasnya, rasionalitas dalam berbagai bentuk dan manifestasinya secara faktual telah mendera, membelenggu, mengeksploitasi masyarakat sendiri, dan telah meminggirkan hakekatnya diri pada jurang realitas kehidupan. Bayangkan saja, berbagai bentuk perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan industri, serta pola-pola pembangunan yang merupakan hasil dari kajian rasional justru telah memberangus nilai-nilai inti dari kemanusiaan. Banyak manusia terjerembab



dalam kerangkeng kemiskinan dalam artian fisiologis, psikologis, sosiologis dan bahkan moral. Selain pada sisi manusia, kemiskinan pada sisi alam dunia terlihat faktis, yang ditandai dengan kerusakan alam sebagai akibat pola pembangunan yang eksploitatif dan tidak mempertimbangkan dampak-dampak buruknya bagi lingkungan.

Dalam buku *The Critique of Domination* (1973) Trent Schroyer menjelaskan tentang kenyataan bahwa dalam masyarakat modern, penindasan justru telah dihasilkan oleh rasionalitas, di mana kebijakan politik pembangunan yang berorientasi pada ekonomi berdampak pada munculnya berbagai masalah sosial. Masalah-masalah sosial ini kemudian membidani lahirnya penurunan kualitas kemanusiaan dalam beberapa dimensinya. Hal ini terjadi karena yang mengemuka dalam kebijakan politik pembangunan dunia adalah rasionalitas formal dan mengesampingkan dengan semena-mena rasionalitas subjektif atau apa yang oleh teoritis radikal sebut sebagai *reason*. Menurut teoritis kritis, rasionalitas formal tak mencerminkan perhatian mengenai cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Hal inilah yang dipandang sebagai 'cara berpikir teknokratis' di mana tujuannya adalah untuk membantu kekuatan yang mendominasi, bukan untuk memerdekakan individu dari dominasi. Perhatiannya semata-mata untuk menemukan cara yang paling efisien untuk mencapai tujuan apapun yang dianggap paling penting oleh pemegang kekuasaan, sekalipun mengorbankan manusia dan alam.

Cara berpikir teknokratis berbeda dari cara berpikir nalar (*reason*), yang dalam pemikiran kaum kritis merupakan tumpuan harapan masyarakat. Nalar meliputi kemampuan untuk melihat realitas dari sudut nilai manusia yang tertinggi yang berkenaan dengan keadilan, perdamaian dan kebahagiaan. Segala bentuk pemaksaan kehendak, totalitarianisme dan fasisme dalam pembangunan ekonomi adalah bentuk-bentuk dari rasionalitas formal yang berusaha melawan



Narasi Bangsa yang Tercecer

dan menjajah rasionalitas subjektif atau nalar sehat. Dengan demikian, paradoks dalam realitas kehidupan modern adalah kelihatan rasional, tetapi penuh dengan ketidakrasionalan. Kondisi inilah yang disebut sebagai 'irasionalitas dari rasionalitas formal'. Menurut pandangan Hebert Marcuse dalam bukunya *One-Dimensional Man* (1964), realitas menggambarkan bahwa tampaknya rasionalitas ada secara keseluruhan dalam diri masyarakat, tetapi rupanya tak rasional secara keseluruhan. Sebagian masyarakat kemudian menjadi tak rasional karena telah merusak individualitas, merampok kebutuhan dan kemampuan bahkan sosialitasnya dengan berbagai bentuk keinginan-keinginan yang dianggap rasional. Kebutuhan hidup dipenuhi dengan mengeksploitasi alam, perdamaian dirancang dengan melakukan perang, atau membangun kebersamaan dengan mengorbankan individualitas. Hasil akhir dari semuanya adalah fakta kemiskinan, ketertindasan, eksploitasi dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

Menurut saya, beberapa faktor berikut ini turut berkontribusi bagi terbentuknya rasionalitas yang irasional dalam diri masyarakat modern, yakni: (1) Masyarakat sudah terlalu dalam terjebak pada hegemoni kehidupan yang berkarakteristik konsumeristik-pragmatis. Pola-pola konsumsi merujuk pada pemenuhan kebutuhan yang keliru (*false needs*) dan bukan berdasarkan kebutuhan real (*real needs*). Banyak masyarakat sudah kehilangan otonomi dan 'pasrah' pada berbagai iklan aneka produk yang justru dalam banyak segi menyesatkan dan mencelakakan. Masyarakat modern tidak menyadari bahwa hegemoni produsen, pemilik media, dan penguasa informasi telah menggerus otonomi, identitas dan jati diri. Variabel keinginan menjadi dominan dibandingkan dengan variabel kebutuhan. Demi memenuhi tingginya tingkat keinginan, bahan-bahan baku yang disiapkan produsen dalam berproduksi sudah pasti mengeksploitasi alam dengan menggunakan cara-cara



instan-pragmatis. Selanjutnya, tak terkontrolnya gaya konsumsi dan pemakaian fasilitas-fasilitas hidup yang ‘bermerek’, tetapi tidak ramah lingkungan, menggambarkan betapa kesadaran kritis masyarakat tersubordinasi oleh hegemoni konsumeristik-pragmatis.

(2) Dalil-dalil kebijakan pembangunan yang pro masyarakat, tetapi sebenarnya kental dengan orientasi teknokratis-kapitalistik dan *profit oriented*, secara tidak langsung ‘membunuh’ kesadaran kritis masyarakat tentang pentingnya kehidupan yang berkelanjutan (*sustainability of life*). Kuatnya dalil investasi, percepatan pembangunan serta akselerasi pergerakan ekonomi, membuat pemerintah pusat maupun daerah ‘membiarkan’ diri untuk dikendalikan oleh pihak-pihak pengembang dan pemodal. Para investor diberi ruang tanpa batas untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi alam serta membangun berbagai infrastruktur. Parahnya, bila kegiatan aktivitas-aktivitas pemanfaatan ini tidak disertakan dengan analisis yang kritis dan intensif mengenai dampaknya terhadap lingkungan, eksistensi ekosistem, sosialitas manusia, maka sudah pasti berdampak buruk pada keberlanjutan kehidupan manusia berikut alamnya. Banyak peristiwa kecelakaan alam dan sosial yang terjadi akhir-akhir ini di negeri kita, disebabkan hanya karena pemerintah dan masyarakat tidak bijak dan benar dalam mengelola kawasan pembangunan, serta kurangnya pertimbangan asas kemanfaatan dan keberlanjutan kehidupan manusia dan alam.

(3) Rendahnya tingkat literasi sosio-ekologis dan belum menguatnya edukasi masyarakat yang berbasis sosio-ekologis pada kerangka pendidikan. Masyarakat modern masih belum cukup diberdayakan dan diceraikan mengenai betapa urgennya membangun kehidupan dengan mempertimbangkan prinsip dan asas kesetaraan, keseimbangan dan keberlanjutan. Rendahnya tingkat literasi dan perspektif ekologis ini membuat masyarakat modern belum semuanya cerdas dalam mengelola alam secara benar dan bijak, yang



Narasi Bangsa yang Tercecer

secara kasat mata ditunjukkan dengan perilaku membakar hutan, menebang pohon secara liar, membuang sampah dan limbah industri di kawasan perairan, menggunakan bahan tidak ramah lingkungan dalam mengelola dan memanfaatkan isi alam. Penggunaan pupuk kimiawi, racun, bahan peledak, bahan bakar beremisi tebal, dll., menjadi kebiasaan yang masih melekat dalam keseharian masyarakat. Konsep dan praktik pendidikan lingkungan hidup sepertinya mengalami involusi karena dilakukan tanpa perencanaan, parsial, bahkan seremonial dan administratif belaka. Literasi dan perspektif ekologis belum diakomodasi secara komprehensif-signifikan dalam konten perangkat kurikulum dan implementasinya, sehingga kurang optimal dalam membentuk kesadaran dan kepedulian masyarakat didik terhadap lingkungan. Padahal, pendidikan dipandang sangat potensial untuk memfasilitasi dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan serta berperan mengadvokasi kapasitas masyarakat dalam menangani masalah-masalah lingkungan hidup. Agaknya, pendidikan belum dilihat sebagai menjadi wahana embrional dalam meng-*endors* tumbuhnya rasionalitas yang berkesadaran, memiliki etika, nilai, sikap, dan keterampilan dalam memelihara lingkungan sosial dan lingkungan alam.

RASIONALITAS YANG BERKESADARAN ETIS

Permasalahan rasionalitas yang tidak rasional, esensi yang sebenarnya terletak pada mental dan perilaku masyarakat modern dalam membangun relasi dengan manusia dan alam. Idealnya, kesadaran harus menjadi garansi utama dan menentukan ketika manusia berhubungan kosmosnya. Baik tidaknya hubungan manusia dengan kosmosnya, sangat bergantung pada tinggi dan rendahnya kesadaran manusia. Menurut saya, adanya irasionalitas hubungan sosial dan lingkungan alam disebabkan karena kesadaran manusia



belum tumbuh dan berkembang secara baik. Kesadaran yang rendah ini telah berimplikasi pada bangunan mental dan perilaku manusia yang menafikan prinsip-prinsip sosial etis dan norma-norma kesetaraan penghargaan antara manusia dan alam. Manusia cenderung irasional, agresif, nafsu dan serakah dalam membangun relasi dengan alam dunianya, dan kadang tidak akan tahu bagaimana seharusnya memperlakukan lingkungan sosialnya. Kondisi ini berlanjut pada krisisnya kemampuan dan keterampilan untuk mencegah, mengatasi dan memperbaiki, baik permasalahan sosial maupun persoalan lingkungan hidup.

Harus disadari bahwa rasionalitas adalah sesuatu kekuatan utama dalam membangun peradaban masyarakat. Rasionalitas menjadi garda terdepan dalam mengonstruksi pola-pola berpikir dan berperilaku dalam masyarakat. Tanpa adanya rasionalitas, masyarakat akan terjebak dalam berpikir dan hal itu akan memengaruhi perjalanan pembangunan dari peradaban suatu masyarakat. Namun, rasionalitas yang dibentuk harus berbasiskan pada kesadaran masyarakat untuk membangun pilar-pilar yang kuat dalam membantu perkembangan masyarakat. Rasionalitas berkesadaran tidak muncul begitu saja dalam diri masyarakat, tetapi membutuhkan proses dalam menumbuhkembangkannya. Immanuel Kant (1724-1804) dalam pengantar buku *Critique of Pure Reason* menyebutkan empat pertanyaan penting yang melandasi proses merancang kesadaran yang rasional manusia dalam bermasyarakat. Pertanyaan-pertanyaan itu, antara lain: (1) 'Apa yang dapat diketahui?'. Pertanyaan ini berhubungan dengan upaya memberdayakan pengetahuan yang benar tentang segala sesuatu; menggunakan rasionya agar bisa membedakan yang baik dan benar, memberi sumbangan pemikiran positif terhadap berbagai persoalan kehidupan, serta mencerna segala informasi buruk yang masuk dalam dirinya. (2) 'Apa yang harus dilakukan?'. Pertanyaan ini berkaitan dengan tindakan-tindakan



Narasi Bangsa yang Tercecer

etis seseorang yang berdampak pada kebaikan bersama (bonum commune), mendukung kehidupan sosial serta mampu memperbaiki tatanan sosial yang sudah rusak; (3) 'Apa yang dapat diharapkan?' Pertanyaan ini bertalian dengan indahnya hidup bersatu dalam keberagaman (estetika) dan cita-cita akan hidup yang lebih baik. (4) 'Siapa itu manusia?'. Pertanyaan ini menjadi jalan bagi upaya menemukan jati diri sebagai manusia sempurna, ketika dia sudah memberdayakan pengetahuan, melakukan tindakan-tindakan etis, memiliki cita rasa kebersamaan dan cita-cita akan masa depan yang lebih baik.

Merujuk pada pemikiran Kant ini, saya menjelaskan empat hal yang perlu mendapat perhatian dalam menumbuhkan kesadaran bermasyarakat. (1) Pada galibnya, untuk membangun lagi kesadaran masyarakat, setiap warganya mesti membekali dirinya dengan berbagai pengetahuan yang mendalam tentang dunianya, baik dari sejarah lahir dan berkembangnya saat ini, maupun berkaitan dengan keunggulan-keunggulan komparatif yang ada padanya. Pengetahuan yang integral, holistik dan komprehensif tentang dunianya akan menumbuhkan kecintaan dan rasa memilikinya. Tumbuh dan berkembangnya rasa cinta pada dunianya disebabkan karena mendalamnya pemahaman tentang kosmosnya. Dalam pemikiran filosofis, kesadaran ini disebut kesadaran ontologik karena berhubungan dengan kemampuan untuk merenungkan tentang 'ada dan mengadanya' dunianya. Kesadaran ontologik menjadi dasar dalam membangun kesadaran epistemologik, yaitu pengetahuan yang benar 'apa adanya' tentang sesama dan lingkungan alamnya. (2) Pengetahuan yang benar dan adanya semangat 'mencintai dunia' menjadi landasan berpikir untuk melakukan (thinking for doing) sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Seseorang yang dalam dirinya ada 'rasa memiliki dunia' (sense of belonging for world) yang tinggi, akan selalu berpikir tentang



apa yang harus dilakukan untuk pertumbuhan dunia ke arah yang lebih konstruktif. Karena itu, otot, otak dan perasaan benar-benar diabdikan untuk pembangunan dunia (world building).

(3) Tumbuhnya harapan akan dunia yang lebih baik pada masa yang akan datang, merupakan resultansi dari perbuatan-perbuatan baik dan benar dari warga. Sejumpat harapan ini mengandung optimisme dan idealisme bahwa dunia ini akan menjadi lebih baik pada masa yang akan datang. (4) Kapasitas pengetahuan, tindakan-tindakan etis, dan memiliki cita rasa kebersamaan dan cita-cita akan masa depan yang lebih baik, harus menjadi tipikalitas dari seorang 'manusia' modern. Bila dia memiliki kapasitas-kapasitas ini, maka dia menemukan kesejatan eksistensinya sebagai warga dunia. Menemukan diri sebagai warga dunia yang sejati merupakan bagian penting dari kesadaran etis. Kesadaran ini terekspresi dari model keadaban hidupnya sebagai warga dunia. Bila kehidupannya sudah beradab, dapat dipastikan sudah terkonstruksi kesadaran etis dalam diri masyarakatnya. Manifestasi utama dari kesadaran etis adalah kebaikan dan konsistensi tindakannya sebagai warga dunia. Praksisnya, dunia yang beradab tercermin dari pemikiran dan tindakan-tindakan etis warganya, seperti senantiasa menjunjung tinggi asas kebenaran, keadilan, kejujuran, menghargai perbedaan, toleransi, hak asasi manusia, hak asasi alam, dll.

BERPIHAK PADA RASIONALITAS NILAI

Juergen Habermas (1929-2015) dalam karya *Knowledge and Human Interests* (1971) dan *Religion and Rationality: Essays on Reason, God, and Modernity* (2002) menggambarkan bangunan masyarakat komunikatif yang mesti didasarkan pada rasionalitas. Namun pertanyaannya, rasionalitas model manakah yang bisa mendukung bangunan masyarakat komunikatif tersebut? Menurutnya, ada tiga manifestasi rasionalitas, yakni: (1) Rasionalitas Tindakan. Rasio



Narasi Bangsa yang Tercecer

teknis yang mengacu pada perhitungan yang masuk akal untuk mencapai sasaran dengan dukungan sarana teknis, teknologis, mekanis, formalistik dan birokratis. (2) Rasionalitas Tujuan. Rasio yang hanya mementingkan tujuan, menafikan proses, dan menggeser nilai-nilai mendasar dalam kesadaran manusia. (3) Rasionalitas Nilai. Rasio yang terbentuk sebagai hasil sebuah proses berkesadaran, yang didukung oleh komitmen personal untuk berpihak pada nilai kebaikan, kebenaran, keadilan dan tanggung jawab sosial. Setiap rasionalitas di atas berpotensi untuk terjadinya perubahan dan transformasi. Namun, rasio model manakah yang dapat membawa perubahan dan transformasi yang berorientasi kesejahteraan masyarakat dan tegaknya fundamen demokrasi?

Menurut Habermas, sudah pasti jawabannya ada pada rasio yang terakhir, karena rasio ini memungkinkan munculnya otonomi kesadaran dan tanggung jawab berpikir dan berperilaku sebagai manusia, yang tercermin dengan menguatnya kapasitas pengetahuan kritis. Rasio ini memerdekakan manusia untuk mengonstruksi dirinya secara kreatif, dinamis, inovatif dan demokratis. Rasio ini mendukung berkembangnya nilai etis-moral yang senantiasa terarah pada keberpihakan nilai kesantunan, kejujuran, kebenaran dan keadilan dalam bermasyarakat. Rasio ini juga membuka ruang dialog dan komunikasi yang seimbang tanpa intimidasi kapitalisme, fatalisme, primordialisme, sektarianisme, dll. Habermas menambahkan, bila mayoritas masyarakat dalam dirinya memiliki rasionalitas nilai maka dunia akan terarah pada habitus yang berkualitas, yang terrefleksi dalam lajunya pembangunan, pertumbuhan dan perkembangan bidang politik, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan budaya pada setiap masyarakat.

Dalam perspektif masyarakat rasional komunikatif, Habermas melihat keterlibatan masyarakat dalam memikirkan dan menentukan arah pembangunan masyarakatnya adalah bentuk dari tanggung



jawab moral politiknya. Menurutnya, mengedepannya tanggung jawab moral politik ini bertolak dari semakin menguatnya kesadaran emansipatoris masyarakat. Dalam masyarakat rasional komunikatif kesadaran emansipatoris ini merupakan akumulasi dari tiga bentuk kesadaran, yaitu: (1) Teknis. Kesadaran tentang kemampuan sekaligus keterampilan dalam mengelola lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan material hidup sehari-hari, seperti kebutuhan dasar terkait sandang, pangan dan papan. Kesadaran ini menjadi prasyarat bagi kesadaran berikutnya. Karenanya, upaya memunculkan dan memberdayakan kesadaran ini menjadi sangat berat baik bagi masyarakat itu sendiri, maupun bagi negara yang secara yuridis formal bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan lahir batin dari masyarakatnya. Pemberdayaan dan pendidikan melalui kegiatan persekolahan, pelatihan, pembimbingan, advokasi, dll menjadi upaya-upaya alternatif dalam menumbuhkan kesadaran teknis ini.

(2) Praktis. Kesadaran yang berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan memuat interaksi dan relasi yang harmonis anggota masyarakat dengan lingkungan sosial dan sesamanya. Kesadaran ini mengarah kepada pemberdayaan kemampuan-kemampuan sosial untuk membangun masyarakat yang beradab dan damai. Kemampuan-kemampuan teknis dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia mesti didukung oleh pola-pola relasi dan interaksi yang baik dan harmonis di antara masyarakat, sehingga terbentuk sensitivitas dan tanggung jawab sosial di antara anggota masyarakat. Dalam hal ini, pemberdayaan dan keterlibatan lembaga-lembaga sosial masyarakat, lembaga adat, dan lembaga agama dapat menjadi ruang dan tempat untuk menumbuhkembangkan kesadaran ini. Pranata dan norma sosial yang sudah ada dalam masyarakat diberi penguatan sehingga tetap membantu pola-pola relasi dan interaksi sosial yang baik dan benar dalam masyarakat. (3) Emansipatoris.



Narasi Bangsa yang Tercecer

Kesadaran berkaitan dengan keterlibatan aktif warga masyarakat untuk memahami perubahan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, dan melakukan evaluasi sekaligus refleksi kritis terhadap perubahan tersebut. Bila masyarakat sudah bisa mengevaluasi dan merefleksikan secara kritis berarti mereka sudah memiliki pengetahuan, pemahaman, perspektif dan pemaknaan baru tentang keadaan lingkungan sosial serta tuntutan-tuntutan perubahan yang wajib dilakukan pada masa-masa yang akan datang. Evaluasi dan refleksi kritis serta munculnya pengetahuan, pemahaman, perspektif dan pemaknaan baru adalah sebuah bentuk transformasi. Jadi, kesadaran emansipatoris sangat identik dengan munculnya transformasi. Sementara itu, tanggung jawab moral politik yang tinggi menjadi salah satu bagian penting dalam membangun transformasi tersebut, yang secara fundamental menasar pada kesejauharaan umum, keadilan dan pemerataan sosial.

Kesadaran emansipatoris ini menjadi basis dalam membangun komitmen dan tanggung jawab untuk membangun masyarakatnya. Kesadaran emansipatoris ini juga berhubungan dengan keterlibatan dalam merancang kebijakan-kebijakan strategis pembangunan bersama dengan negara. Berdasarkan kesadaran emansipatoris ini, masyarakat juga kemudian diberdayakan untuk berani mengambil bagian dalam proses penguatan transformasi tatanan sosialnya. Proses penguatan transformasi tatanan sosial ini tampak dalam berbagai bentuk dan manifestasi pergerakan, seperti beralih dari kekakuan pola pikir dan sikap menuju kepada dinamisitas dan fleksibilitas; bergerak dari hanya sekadar kesadaran diri menuju pada kesadaran kolektif; beralih dari hanya mengandalkan kerja sendiri menuju pada kolaborasi dan jaringan kerja yang luas; berubah dari hanya penghayatan nilai-nilai kehidupan parsial dan eksklusif menuju pada penghayatan nilai-nilai kehidupan yang inklusif, universal dan bermanfaat bagi kepentingan umum.



Menurut Habermas, salah satu karakter dari masyarakat yang beradab adalah tingginya kandungan rasionalitas yang terderivasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi kognitif-teknis dan dimensi moral-komunikatif. Dimensi kognitif-teknis berkaitan dengan kemampuan warga masyarakat dalam mencermati dan menyelesaikan berbagai masalah sehingga tidak terus menerus mengganggu kehidupannya. Masalah tersebut dipecahkan dengan mendiskusikan secara bersama, mencari alternatif jalan keluar, dan menyusun program-program praksis sebagai tindak lanjutnya. Yang menjadi istimewa dari dimensi kognitif ini, ketika berdiskusi segala bentuk prasangka, stereotip, eksklusivisme, dan intoleransi dikandangkan alias tidak mendapat tempatnya. Dalam asas kesetaraan dan persamaan hak, mereka betul-betul fokus pada penyelesaian masalah untuk kepentingan hidup yang lebih baik dengan mengandalkan kemampuan berpikir logis, analitis dan etis serta sedapat mungkin menghindari cara-cara kekerasan.

Sementara dimensi moral-komunikatif berkaitan dengan usaha mencapai kesepakatan atau konsensus dengan orang lain tentang banyak hal dalam bermasyarakat, dengan mengedepankan komunikasi yang dialogis dan emansipatoris. Komunikasi yang dialogis dan emansipatoris ini memungkinkan adanya saling memahami, mengerti, mendukung dan melindungi antara warga masyarakat dari segala bentuk dominasi dan determinasi oleh kelompok dan golongan ideologis tertentu yang berusaha merongrong sendi-sendi kehidupan masyarakatnya. Untuk menangkal dan melemahkan kekuatan-kekuatan ideologis yang mengancam kedamaian dan ketenangan hidup ber dunia, tentu yang ditonjolkan bukan lagi kekuatan otot atau fisik, tetapi kemampuan dan keterampilan logis, analitis, etis dan senantiasa mengedepankan komunikasi yang dialogis dan emansipatoris, serta mampu mengelola risiko dalam kehidupannya.



Narasi Bangsa yang Tercecer

Dalam bukunya *Risk Society: Toward a New Modernity* (1992), Ulrich Beck mengetengahkan tentang masyarakat modern baru sebagai masyarakat yang cerdas dalam mengelola risiko. Kemampuan mengelola risiko dalam masyarakat merupakan akibat dari tinggi kesadaran refleksif (*reflexive modernity*), di mana setiap warga masyarakat mampu melihat hubungan antara sesama sebagai jalinan sosial yang berarti dan penuh makna. Hubungan sosial dan jaringan sosial tergantung pada pilihan setiap orang secara individual yang menyebabkan ikatan sosial semakin refleksif dan bermakna karena dibentuk, dipelihara dan terus menerus diperbarui oleh individu. Selain dalam membina pola relasi yang refleksif, masyarakat yang mampu mengelola risiko adalah masyarakat yang sudah bergerak dari pola pembangunan modernitas klasik yang sangat menekankan tentang kekayaan dan bagaimana cara mendistribusikannya secara lebih merata, kepada masalah sentral dalam modernitas yang lebih maju, yaitu bagaimana cara mencegah, meminimalkannya dan menyalurkannya/konversi ke arah yang lebih baik.

Dalam modernitas klasik cita-cita dan tujuannya adalah persamaan, sedangkan modernitas yang lebih maju atau pada masyarakat berisiko (*risk society*), cita-citanya adalah keselamatan. Dalam modernitas klasik orang mencapai solidaritas dalam mencari-cari tujuan positif persamaan, namun dalam masyarakat berisiko, yang lebih maju adalah upaya mencapai solidaritas sembari berusaha menghindari bahaya yang sebagian bersifat negatif dan defensif. Selain itu, karakter penting dari modernitas baru adalah menciptakan 'ketidakterikatan politik' (*unbinding of politics*). Ketidakterikatan politik ini tampak pada keadaan di mana kekuasaan politik tidak lagi diserahkan kepada pemerintahan pusat, tetapi menjadi wewenang berbagai subkelompok maupun individu. Subkelompok dan individu ini menjadi refleksif dan lebih mampu mawas diri ketimbang yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dan



mereka lebih mampu untuk memikirkan serta lebih baik dalam menanggulangi risiko yang berkaitan dengan modernitas terdahulu. Dengan demikian, secara dialektika modernitas terdahulu telah menimbulkan banyak risiko yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan modernitas baru mengelola dan menyelesaikannya dengan kapasitas refleksif yang ada pada setiap warganya masyarakatnya.

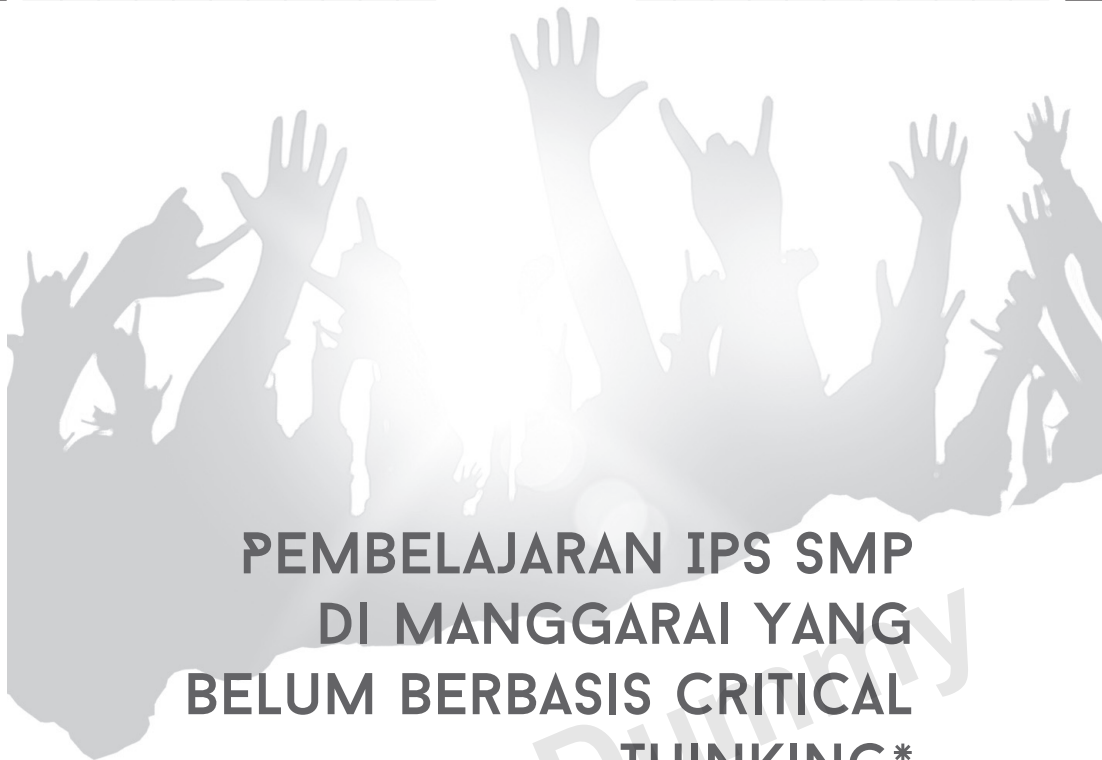
PENUTUP

Percayalah bahwa dialektika antara irasionalitas dan rasionalitas akan tetap terjadi sepanjang masa, tentunya dalam bentuk dan tampilan yang berbeda. Selain itu, dialektika ini sudah pasti akan berimplikasi pada pola-pola berpikir dari masyarakat yang ada pada zamannya. Harapannya adalah masyarakat semakin matang dan dewasa dalam membentuk cara berpikir dan berperilakunya, sehingga rasionalitas tidak lagi menjadi 'hantu' yang mencemaskan kehidupannya. Kita tidak bisa menafikan kontribusi rasionalitas dalam sepanjang sejarah manusia, tetapi kita juga tidak bisa mengabaikan kerentanannya. Karenanya menerima dan mengembangkan rasionalitas dengan berlandaskan pada kesadaran etis dan berpihak pada nilai-nilai luhur kemanusiaan dan alam lingkungan, merupakan pilihan yang perlu dipertimbangkan oleh semua masyarakat dalam zaman apapun. Biarlah Rasionalitas tetap ditumbuhkembangkan sebagai basis dalam berpikir dan menjadi rujukan dalam berperilaku masyarakat, sembari membarunya dalam tataran yang lebih bermakna dan berarti bagi kehidupan di dunia. Di atas semuanya, komitmen agar dunia ini tetap dibangun dalam koridor rasional dan tetap dapat masuk akal (reasonable), harus tetap tumbuh dan berkembang dalam diri manusia.



Narasi Bangsa yang Tercecer

Lastest Dummy



PEMBELAJARAN IPS SMP DI MANGGARAI YANG BELUM BERBASIS CRITICAL THINKING*

Pembelajaran IPS SMP yang berbasis berpikir kritis di sekolah-sekolah di Kabupaten Manggarai, NTT belum menjadi perhatian yang serius. Padahal pembelajaran ini dapat memberikan dampak instruksional dan pengiring bagi tumbuhnya kemampuan siswa dalam menyikapi berbagai permasalahan sosial di Kabupaten Manggarai dengan luas wilayah 1.669,42 km² dan jumlah penduduk 337.286 jiwa (BPS Manggarai, 2015). Sudah pasti kemampuan berpikir kritis ini sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan sekian banyak persoalan kemasyarakatan seperti kemiskinan, pengangguran, penyakit menular, kerusakan lingkungan, narkoba, dan berbagai penyakit sosial lainnya.

* SKH Pos Kupang, 26/09/2017. Tulisan ini merupakan hasil penelitian bersama Dr. Marsel R. Payong, M. Pd.



Narasi Bangsa yang Tercecer

Berbagai permasalahan sosial tersebut selain menuntut penanganan yang serius dari pemerintah atau masyarakat sendiri, tetapi juga menjadi wahana pembelajaran yang relevan bagi para siswa untuk merangsang kemampuan berpikir kritisnya. Usaha untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam mengkaji permasalahan sosial telah ditetapkan oleh pemerintah terutama melalui mata pelajaran IPS di SMP. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 merumuskan bahwa salah satu tujuan pembelajaran IPS di SMP adalah untuk mencerdaskan siswa agar mampu mencegah dan mengatasi berbagai permasalahan sosial. Dan, salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa adalah kemampuan untuk memiliki rasa ingin tahu, terbuka dan sikap kritis terhadap permasalahan sosial (KD 2.2). Karenanya, pemberdayaan dan pembiasaan berpikir kritis dalam diri siswa senantiasa menjadi perhatian baik dari sudut pengembangan kurikulum, maupun guru sebagai pelaksana kurikulum pembelajaran IPS, agar siswa memiliki keterampilan dalam upaya mencegah dan mengatasi berbagai permasalahan sosial yang bisa saja merusak diri dan lingkungannya.

Untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran IPS SMP di kota Ruteng sudah berbasis pada pemberdayaan dan pembiasaan berpikir kritis, kami telah melakukan survei terhadap delapan (8) SMP sebagai sampel di wilayah Kota Ruteng Kec. Langke Rembong Kab. Manggarai. Survei ini dilakukan pada tanggal 15 s/d 27 April 2017 dengan menggunakan teknik pengumpulan data angket tertutup yang diberikan kepada 450 siswa kelas VIII (239 siswi, 211 siswa) sebagai sampel dari 1078 populasi siswa dan 38 guru IPS yang ada di 8 SMP di kota Ruteng. Penelitian ini ingin mengetahui lebih jauh tentang pemberdayaan dan pembiasaan keterampilan berpikir kritis pada siswa SMP dengan mengkaji desain pembelajaran guru (Silabus dan RPP) dan pendapat persepsional tentang pelaksanaan



pembelajaran dari guru maupun siswa. Penilaian terhadap desain pembelajaran guru dilakukan dengan analisis dokumen terhadap silabus dan RPP buatan guru IPS SMP. Sedangkan pendapat persepsional tentang pelaksanaan pembelajaran guru menggunakan angket pertanyaan tertutup opsional (“Ya” dan “Tidak”). Data hasil survei diolah dengan menggunakan teknik analisis statistik non-parametrik untuk melihat kesesuaian atau konsistensi antara pendapat guru dan pendapat siswa dengan menggunakan teknik *Chi Square* dan korelasi kontingensi *Cramer* dengan bantuan SPSS IBM versi 20. Pengujian hipotesis dilakukan dengan derajat signifikansi $\alpha=0,05$. Data survei ini kemudian diperkaya dengan *Focus Group Discussion* (FGD) tentang kondisi pembelajaran IPS bersama para guru IPS SMP se-kota Ruteng yang dilakukan pada tanggal 1-2 Maret 2017.

Hal yang pertama yang dilakukan peneliti adalah membuat analisis terhadap desain pembelajaran guru melalui telaah dokumen Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), yang secara umum memperlihatkan bahwa guru sudah mempersiapkan desain pembelajaran dengan baik sesuai dengan standar proses pembelajaran (Permendiknas No. 41/2007). Untuk dokumen silabus, hampir semua komponennya sudah memenuhi standar proses karena disusun secara bersama di dalam wadah Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan disupervisi oleh pengawas mata pelajaran maupun ahli pendidikan. Berkaitan dengan RPP, terdapat 15 (39,47%) dokumen yang sudah memuat komponen yang lengkap dan memenuhi standar proses terutama terkait dengan pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa. Namun masih ditemukan 5 dokumen RPP (13,16%) yang kurang lengkap pada semua aspek kegiatan baik pendahuluan, inti dan penutup. Komponen yang kurang lengkap terdapat pada bagian inti dan penutup terutama berhubungan dengan pengembangan kemampuan



Narasi Bangsa yang Tercecer

berpikir kritis siswa serta penilaian dan tindak lanjut. Dari analisis terhadap dokumen RPP, juga ditemukan bahwa rancangan kegiatan lebih banyak berkaitan dengan kegiatan guru ketimbang kegiatan siswa, terkhusus yang berhubungan dengan eksplorasi terhadap permasalahan sosial.

Sementara berkaitan dengan Pelaksanaan Pembelajaran yang mencakup tiga kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup; penelitian ini memotret sebagai berikut: (1) Pada Kegiatan Pendahuluan, sekitar 19 guru (50%) sudah melaksanakan kegiatan pendahuluan sesuai dengan rancangan dan standar proses. Dari pihak siswa, diketahui rata-rata 206 siswa (45,73%) menyatakan bahwa guru sudah melaksanakan kegiatan pendahuluan sesuai dengan standar proses. Sebaliknya, masih ada 19 (50%) guru yang belum melaksanakan kegiatan pendahuluan sesuai dengan rancangan dan standar proses. Hal ini juga sejalan dengan pendapat siswa, di mana 244 (54,2%) orang menyatakan guru belum melaksanakan kegiatan pendahuluan sesuai dengan standar proses. (2) Pada Kegiatan Inti sebanyak 200 siswa (44,4 %) berpendapat, guru sudah menjalankan kegiatan inti yang mampu merangsang kemampuan berpikir kritis siswa. Sementara ada 16 (43,16%) guru berpendapat bahwa kegiatan inti yang dilaksanakan sudah sesuai dengan proses dan mampu merangsang kemampuan berpikir kritis siswa. Sebaliknya, terdapat 250 (55,6%) siswa yang menyatakan bahwa kegiatan inti belum memenuhi standar proses dan belum memberdayakan siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap permasalahan sosial. Demikian juga, masih terdapat 22 (56,84%) guru mengakui bahwa mereka belum melaksanakan kegiatan inti yang merangsang kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyikapi permasalahan sosial. (3) Pada kegiatan penutup, terdapat 18 (46,84%) guru menyatakan bahwa mereka telah melaksanakan kegiatan penutup sesuai dengan standar proses; sedangkan ada 226 (50,31%) siswa



menyatakan hal yang sama. Sebaliknya, terdapat 20 (53,16%) guru menyatakan belum melaksanakan kegiatan penutup sesuai dengan standar proses, demikian pun pendapat dari 224 (49,69%) siswa bahwa guru belum menjalankan kegiatan penutup dengan baik.

Potret kegiatan Pelaksanaan Pembelajaran ini memberi gambaran bahwa pembelajaran IPS di SMP di kota Ruteng belum signifikan sesuai dengan konsep dan praksis pembelajaran seperti yang dikemukakan Soemantri (2001:11), bahwa pendidikan IPS dalam segala tingkatannya harus menjadi pendidikan reflektif-kritis di mana peserta didik dapat menjalani hidupnya secara lebih bermakna dan berdaya guna dengan bergulat menyelesaikan berbagai permasalahan hidupnya. Kegiatan pembelajaran IPS seharusnya menjadi fasilitas kritik sosial dan media pengembangan kritisitas terhadap isu-isu sosial dengan mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa dan keterampilan memecahkan masalah. Idealnya, pembelajaran IPS yang memberdayakan kemampuan dan keterampilan berpikir kritis siswanya akan menjadi basis pembentukan karakter bangsa yang kuat, sehingga akan dapat membentuk masyarakat beradab dan mendukung pembangunan dalam segala bidang, baik pada tingkat lokal berikut nasional.

Selain itu, penelitian ini memberi peringatan bahwa guru harus tetap menjadi ujung tombak dalam membentuk karakter siswa sebagai masa depan bangsa dengan membekalinya berbagai kemampuan, pengembangan diri, keterampilan sosial, keberpihakan pada nilai kebenaran dan keadilan (Marsh, 2008). Dengan demikian, urgensi untuk memberdayakan kemampuan berpikir kritis menjadi sangat imperatif dan mendesak pada siswa SMP di kota Ruteng. Sebab dalam penanganannya, kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, bencana alam, ledakan penduduk, kerusakan alam, perilaku/mental yang rusak, dan lain-lain sangat membutuhkan manusia-manusia muda Manggarai yang andal, ulet, cerdas, mampu berpikir kritis



Narasi Bangsa yang Tercecer

dan solutif. Spesifiknya, peserta didik harus memiliki kecerdasan, kompetensi, kemampuan teknis dan sosial, *hard skills* dan *soft skills* untuk dapat menganalisis, menyintesis, mengevaluasi, dan memberi keputusan dan solusi terhadap berbagai permasalahan, baik dalam dirinya maupun lingkungan sosialnya (Moore, 2004).

Berdasarkan penelitian ini disimpulkan tiga poin penting: 1) Meskipun pembelajaran IPS SMP di kota Ruteng sebagian besar sudah memenuhi standar proses dilihat dari administrasi pembelajarannya, namun belum spesifik memberdayakan kemampuan berpikir kritis siswa, terutama dalam menyikapi berbagai permasalahan sosial. Dari berbagai tanggapan guru maupun siswa pada komponen pelaksanaan pembelajaran ditemukan adanya kesesuaian dan konsistensi pendapat pada ketiga kegiatan pokok pembelajaran (pendahuluan, inti, dan penutup) bahwa belum signifikannya pembelajaran yang memberdayakan kemampuan berpikir kritis siswa. Karenanya, perlu ada evaluasi dan pengembangan lebih lanjut terhadap perangkat pembelajaran dan praktik pembelajaran yang berbasis pemberdayaan berpikir kritis siswa SMP, terutama berkaitan dengan penyelesaian permasalahan sosial. (2) Model pembelajaran yang bertujuan memberdayakan kemampuan berpikir kritis siswa belum menjadi pembiasaan dalam diri pembelajar IPS, karena itu para guru IPS harus menambah wawasan pengetahuan dan pemahamannya tentang metode, pendekatan dan model pembelajaran berorientasi pada pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa dengan mencari informasi dan studi literatur yang mendalam. (3) Faktor guru menjadi sangat penting dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berbasis berpikir kritis siswa dalam pembelajaran IPS. Karenanya, perlu sesering mungkin membuat kegiatan peningkatan kapasitas guru dalam merancang pembelajaran sekaligus melaksanakan pembelajaran yang efektif dan berkualitas, seperti melalui wadah Musyawarah Guru



Elaborasi Filosofis, Pedagogik Kritis, Sosial, dan Politik

Mata Pelajaran (MGMP). Demi mendukung upaya peningkatan kapasitas dan kemampuan guru ini perlu adanya kerja sama antara pihak sekolah, dinas Pendidikan kab. Manggarai, perguruan tinggi, dan masyarakat Manggarai.

Lastest Dummy



Narasi Bangsa yang Tercecer

Lastest Dummy



MENYOAL GENERASI YANG BERPIKIR KRITIS

Catatan untuk Wisuda Sarjana STKIP St. Paulus Ruteng
30 September 2017

Tema besar wisuda adalah “Peran Pendidik dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa Menuju Generasi Emas.” Menurut saya tema ini mengingatkan kita pada tiga hal ini: (1) Proyeksi dan prospek bangsa bersandar penuh pada generasi yang sedang bertumbuh dan berkembang saat ini. Karenanya, apa pun yang menjadi kondisi generasi sekarang harus diupayakan agar tetap menjadi andalan bagi perjalanan negara bangsa pada masa mendatang. Kegiatan persekolahan, pendidikan, pemberdayaan dan pelatihan mesti di’endors’ mulai dari yang kecil sampai dewasa, sehingga generasi yang menjadi harapan masa depan bangsa ini tetap ‘berada’ dan ‘mengada’; (2) Peran para pendidik, orang tua, masyarakat, agama dan pemerintah jelas masih sangat dibutuhkan untuk membesut karakter dari generasi ini dengan membuat langkah-langkah konkret seperti pendidikan, pembinaan dan



Narasi Bangsa yang Tercecer

pembimbingan yang intens dan berkelanjutan. Selain dilakukan sejak usia dini, pembinaan dan pembimbingan yang intens dan berkelanjutan, juga sangat diperlukan ketika generasi muda mengalami masa krisis dan situasi ‘angin ribut’, serta munculnya penyimpangan perilaku sebagai akibat perkembangan teknologi-informasi digital yang sedang berkembang pesat.

(3) Generasi berkarakter tidak bisa terlepas dari pola pikir, pola sikap, pola tindakan yang dimiliki seseorang. Sebagai satu kesatuan dengan sikap dan tindakan, pola pikir yang berkualitas akan menjadi parameter dalam membentuk karakter seseorang. Konsep etis filosofis yang mengatakan: “Engkau berpikir maka engkau ada”, “Karena engkau (telah) berpikir maka engkau harus saya melakukan”, “berpikirlah (dua kali) sebelum melakukannya”, ‘engkau adalah apa yang engkau pikirkan’; menjadi seruan imperatif dalam membentuk pribadi berkarakter. Sebagai makhluk yang memiliki kapasitas *vita intelectiva* (bukan *vita vegetativa* dan *vita sensitiva*), manusia mesti memberdayakan pikirannya demi memajukan kehidupan yang lebih bermakna dan bermartabat. Hal ini mengisyaratkan, manusia mesti mendasarkan pergerakan hidupnya lebih karena peran intuisi, bukan insting, di mana segala perbuatan, sikap dan keinginannya diolah dan dikelola secara kritis rasional melalui akal budi. Rasionalitas kritis ini akan menghapus dan memurnikan segala yang bersifat sensasional, artifisial, lipstick, plastik, dan aksidental semata, menuju pada hal yang lebih eksistensial, fundamental dan reflektif tentang kehidupan manusia. Dengan pikiran, manusia bisa memaknai pengalaman sekitarnya dan bisa membuat pilihan antara yang baik atau buruk, benar atau salah, bermanfaat atau merusak, yang harus diterima atau ditolak, yang perlu dikembangkan atau dihilangkan, yang harus dilihat, didengar, ditonton, diekspos, dikomentari, atau yang harus disepelekan karena dianggap tidak berguna (*useless*).



BERPIKIR KRITIS DAN PERADABAN MILENIAL

Berpikir bukan saja tindakan manusia (*actus hominis*), tetapi akan menjadi tindakan manusiawi (*actus humanus*) jika diberdayakan secara optimal. Tindakan manusiawi menegaskan bahwa manusia tidak hanya berpikir tentang dirinya tetapi sudah beralih dengan penuh makna berpikir tentang orang lain dan lingkungannya. Upaya edukasi melalui kegiatan persekolahan, pemberdayaan, pelatihan, pembimbingan dan pembinaan akan mendorong seseorang untuk tidak lagi berpikir sempit, datar, sederhana, dan terkotak-kotak, tetapi sudah berpikir menyeluruh, utuh dan dimensional. Bahkan, bila kegiatan edukasi sangat ‘powerful’ dan ‘meaningful’ maka secara gradual pola pikir akan ditransformasikan pada tahap ‘berpikir untuk berbuat dan bersikap’. Karenanya, pendidikan dalam segala bentuk dan levelnya wajib menggerakkan peserta didik dari hanya sekadar ‘berpikir saja’ kepada kegiatan berpikir untuk bisa ‘berbuat’. Peserta didik harus bisa diarahkan agar dapat mengaplikasikan pikirannya ke dalam sikap dan tindakan, yang disebut Santrock (2010) sebagai keterampilan berpikir tingkat tinggi (*high order thinking*). Kemampuan berpikir tingkat tinggi ini secara esensial terletak pada kecerdasan seseorang untuk memahami realitas dan faktualitas dengan cara berpikir logis-kritis, analitis, mengambil keputusan yang solutif dan melakukan tindakan-tindakan nyata. Menurut Paul dan Linda Elder (2011), salah satu bagian dari berpikir tingkat tinggi ini adalah berpikir kritis (*critical thinking*).

Mengapa berpikir kritis menjadi penting dalam membentuk karakter seseorang? Saya kira kita tak bisa menampik tuntutan peradaban milenial, di mana seseorang harus memiliki tiga keterampilan (Zevin, 2011), yakni: “Learning skills” terdiri dari *communicating, critical thinking, creative thinking, collaborating*; “literacy skills” terdiri dari *information literacy, media literacy,*



Narasi Bangsa yang Tercecer

technology literacy; “life skills” terdiri dari *flexibility, initiative, social skills, productivity, leadership*. Ketiga keterampilan ini terkait erat dan saling mendukung, di mana mengembangkan keterampilan yang satu dapat pula berarti mengembangkan keterampilan yang lain. Bila merujuk pada peradaban bangsa-bangsa yang sudah maju, kegiatan berpikir kritis ini sudah menjadi salah satu tumpuan dalam mengembangkan karakter keadaban masyarakatnya. Sebab peradaban dan martabat bangsa akan berkembang bila sebagian besar masyarakat memberdayakan potensi intelektual secara baik dan cerdas bagi kepentingan pembangunan bangsa.

PERAN PENDIDIKAN UNTUK BERPIKIR KRITIS

Dalam *Critical Thinking: How to Prepare Students for Rapidly Changing World*, Ricard Paul (1995) mengungkapkan, kurikulum dan pembelajaran yang memberi ruang bagi pengembangan kemampuan berpikir kritis akan membentuk karakter peserta didik yang terampil dalam memecahkan berbagai permasalahan sosial. Menurutnya, berpikir kritis merupakan salah satu kemampuan metakognitif, di mana peserta didik dapat berpikir dua kali (*think twice*) sebelum bertindak, menjadi pribadi yang jelas (*be clear*), sadar (*be concise*), akurat (*be accurate*), lengkap (*be complete*), dan dalam (*be deep*). Potensi berpikir kritis sangat kuat dalam diri generasi muda, yang bila dikembangkan melalui pendidikan akan berdampak positif bagi perkembangan diri dan perbaikan masyarakat. Hal ini terkonfirmasi melalui penelitian Yang SC dan Chung TY (2009) pada beberapa SMP di Taiwan yang mengungkapkan bahwa pengembangan keterampilan berpikir kritis di sekolah menengah sangatlah tepat dan efektif dalam membantu peserta didik dalam memecahkan permasalahan sosial dengan cara mengidentifikasi, menganalisis, menemukan kebenaran, membuat keputusan dan



solusi. Pihak sekolah kemudian memanfaatkan keterampilan ini untuk membantu memecahkan berbagai permasalahan konkret yang terjadi di lingkungan sekolah dan lingkungan umum.

Penelitian ini diafirmasi oleh penelitian Genal Hove (2011) yang berjudul: *Developing Critical Thinking Skills in the Junior High School Classroom* di Newcastle AS. Hove mengungkapkan ada 79 % peserta didik di kelas eksperimen mengalami peningkatan dalam berpikir kritis karena perangkat dan pelaksanaan pembelajaran sudah bermodus pemberdayaan berpikir kritis. Sementara kelas kontrol yang tidak menggunakan perangkat dan pelaksanaan pembelajaran bermodus pemberdayaan berpikir kritis cuma mencapai 21 %. Hasil statistik ini didukung dengan kajian kualitatif terhadap tingkat partisipasi peserta didik di kelas eksperimen, di mana peserta didik mengalami peningkatan dalam beberapa dimensi atau standar dalam berpikir kritis, seperti: kejelasan, presisi, akurasi, relevansi, kedalaman, dan kemampuan mengambil kesimpulan dan keputusan. Selanjutnya Hove menyimpulkan, peserta didik yang mengikuti pembelajaran berbasis berpikir kritis akan mengalami presisi dalam belajar dan progresif dalam memahami dunia sekitarnya. Mereka sudah dapat memprediksi mengenai apa yang terjadi pada masyarakatnya pada 20-30 tahun mendatang berdasarkan kondisi yang dialami saat ini. Bahkan, mereka juga sudah memikirkan langkah-langkah praktis-antisipatif agar masyarakatnya tidak mengalami kehancuran pada masa yang akan datang dengan menawarkan berbagai kegiatan yang bersifat preventif dan promotif.

BAGAIMANA DENGAN PENDIDIKAN KITA?

Penelitian awal yang dibuat untuk pengembangan model pembelajaran IPS berbasis berpikir kritis oleh Payong dan Tapung (April 2017) dengan sampel 38 guru IPS dan 450 siswa SMP di kota Ruteng



Narasi Bangsa yang Tercecer

mengungkapkan beberapa fakta: (1) Dari segi desain administrasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) hanya terdapat 15 (39,47%) dokumen yang bermodus pengembangan kemampuan berpikir kritis peserta didik dan komponen pembelajarannya sesuai dengan standar proses menurut Permendiknas No. 41/2007. (2) Dari segi Pelaksanaan Pembelajaran (PP) ditemukan ada 19 (50%) guru yang belum melaksanakan kegiatan pendahuluan sesuai dengan standar proses. Hal ini sejalan dengan 244 (54,2%) siswa yang menyatakan bahwa guru belum melaksanakan kegiatan pendahuluan sesuai dengan standar proses. Pada kegiatan inti, terdapat 22 (56,84%) guru mengakui belum melaksanakan kegiatan inti yang merangsang kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyikapi permasalahan sosial. Hal ini selaras dengan 250 (55,6%) siswa yang menyatakan bahwa kegiatan inti belum memenuhi standar proses dan guru belum memberdayakan siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam menyikapi permasalahan sosial. Sementara pada kegiatan penutup, terdapat 20 (53,16%) guru menyatakan belum melaksanakan kegiatan penutup sesuai dengan standar proses, demikian pun 224 (49,69%) siswa yang menyatakan bahwa guru belum menjalankan kegiatan penutup dengan baik.

Hasil penelitian di atas bisa saja mengarah pada kesimpulan bahwa pendidikan kita belum signifikan memberdayakan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Padahal pendidikan dengan memberdayakan keterampilan berpikir kritis ini dapat memberikan dampak instruksional dan pengiring bagi tumbuhnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan sekian banyak persoalan kemasyarakatan seperti kemiskinan, pengangguran, penyakit menular, kerusakan lingkungan, narkoba, dan berbagai penyakit sosial lainnya. Dalam penanganannya, kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, bencana alam, ledakan penduduk, kerusakan alam, perilaku/mental yang rusak, dan lain-lain sangat membutuhkan



manusia-manusia muda yang andal, ulet, cerdas, mampu berpikir kritis dan solutif. Berbagai permasalahan sosial tersebut selain menuntut perhatian yang serius dari pemerintah dan masyarakat, tetapi juga menjadi wahana pembelajaran yang relevan dalam merangsang kemampuan berpikir kritis peserta didik. Karena itu, mestinya praktik pendidikan berbasis berpikir kritis mulai digagas pada kurikulum dan pembelajaran dari tingkat nasional sampai ke tingkat lokal. Kita mesti menjadikan kegiatan pembelajaran sebagai fasilitas kritik sosial demi pembentukan masyarakat beradab dan mendukung pembangunan dalam segala bidang, di tingkat lokal berikut nasional. Di atas semua itu, guru harus tetap menjadi garda terdepan dalam membentuk karakter peserta didik dengan membekalinya berbagai kemampuan, termasuk kemampuan berpikir kritis.

Lastest Dummy



Narasi Bangsa yang Tercecer

Lastest Dummy



MENILIK KONSTRUKSI FILOSOFIS PADA KONSEP DAN PRAKSIS PENDIDIKAN IPS

Sebagai salah satu cabang ilmu pendidikan yang fokus membahas tentang hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya serta berbagai permasalahannya, Pendidikan IPS sudah pasti harus dibangun dan dikembangkan melalui proses konstruksi filosofis. Pendalaman tentang arti hidup, tujuan hidup, siapa dirinya, siapa sesamanya, di mana dan kapan dia berada, bagaimana cara dia berada, serta upaya-upaya apa yang dia lakukan untuk mempertahankan keberadaannya, menjadi konten inti dalam materi kurikulum IPS, dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Pendalaman-pendalaman filosofis tersebut menjadi kompetensi yang perlu diajarkan dalam pendidikan dan pembelajaran IPS di kelas (Jalaluddin, 1997). Upaya-upaya pendalaman tersebut membuat kegiatan pendidikan dan pembelajaran IPS di sekolah semakin memiliki arti dan maknanya bagi pengembangan tujuan



Narasi Bangsa yang Tercecer

dan kualitas hidup peserta didik, serta memberdayakan kemampuan dan keterampilan manusia dalam berelasi dengan sesama dan lingkungan sekitarnya, serta mampu memahami masalah-masalah sosial dan mampu mengatasinya serta mengambil keputusan yang tepat terhadap masalah yang dihadapinya.

Sementara, pendidikan IPS sebagai ilmu yang memberi perhatian terhadap manusia dan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitasnya diri dan peradabannya (hominisasi dan humanisasi), merupakan bagian dari filsafat. Sebagai bagian dari filsafat, pendidikan IPS memiliki sistem pengetahuan yang metodis, sistematis, koheren, dan mempunyai objek material dan formal. Selain itu, pendidikan IPS juga dikategorikan sebagai filsafat praktis karena bermanfaat langsung bagi umat manusia dalam rangka memerangi masalah atau membantu pemecahan masalah kehidupan manusia, baik yang menyangkut masalah fisik alamiah, maupun sosial kemanusiaan (*humanities*). Untuk semakin memperkuat konstruksi tersebut, konsep dan praksis pendidikan IPS membutuhkan filsafat dalam mengkaji berbagai masalah, baik yang menyangkut pelaksanaan pendidikan yang dibatasi pengalaman, juga masalah-masalah yang lebih luas, lebih kompleks yang tidak dibatasi pengalaman ataupun fakta-fakta pendidikan, dan tidak memungkinkan dapat dijangkau seluruhnya oleh pendidikan IPS itu sendiri. Dengan landasan filosofis yang kuat, pendidikan IPS semakin berkembang dan berperan sentral dalam membentuk kesejatian dan kebermaknaan tujuan hidup manusia dengan mengeksplorasi dan mengelaborasi makna-makna ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya.



NILAI-NILAI FILOSOFIS DALAM PENDIDIKAN IPS

Filsafat adalah pengetahuan yang mempelajari seluruh fenomena kehidupan manusia dengan nalar kritis dan mencari hakikat berbagai fenomena kehidupan manusia dan keseluruhan realitasnya secara metodis, sistematis, dan koheren. Filsafat merupakan refleksi rasional terhadap realitas kehidupan manusia dalam segala dimensinya. Dia memberi sumbangan dan peran sebagai induk yang melahirkan dan membantu mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga ilmu pengetahuan itu dapat hidup dan berkembang. Filsafat membantu ilmu pengetahuan untuk bersikap rasional dalam mempertanggungjawabkan ilmunya. Sementara pengertian pendidikan selalu berkaitan erat dengan pengertian tentang manusia dan tujuan hidup manusia. Sesudah memahami pertanyaan tentang siapakah manusia dan apa tujuan akhir hidupnya, harus diajukan pertanyaan tentang bagaimana menjadi manusia yang sesungguhnya dan bagaimana mencapai tujuan akhir manusia itu (Titus, dkk, 1984). Maka ilmu pendidikan harus dibangun di atas dasar filsafat yang sehat dan juga atas dasar etika yang seimbang. Filsafat pendidikan memberikan landasan teoretis dan kritis tentang data-data, gejala-gejala dan teori-teori pendidikan, termasuk pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Data-data, gejala-gejala, dan teori-teori itu tidak diterima saja tetapi diterima dan dianalisis secara kritis untuk melihat sejauh mana data, gejala dan teori itu mencerminkan suatu pandangan tentang manusia yang utuh.

Karena adanya hubungan yang erat antara filsafat dan pendidikan, maka di bawah ini dipaparkan beberapa konsep filosofis yang mendasari konsep dan praksis pendidikan pada umumnya, dan pendidikan IPS khususnya (Ceunfin, 1997), yaitu: *Pertama*, fenomena pendidikan merupakan sesuatu yang hakiki



Narasi Bangsa yang Tercecer

dan eksistensial bagi kehidupan manusia. Pendidikan merupakan fenomena bukan hanya karena tampak bagi mata sebagai data dan gejala, melainkan tampak bagi kesadaran manusia: pikiran, jiwa dan pribadinya. Fenomena itu disebut hakiki karena di mana pun manusia ada selalu ada pendidikan. Pendidikan disebut eksistensial karena menyangkut eksistensi manusia. Di sini eksistensi berarti cara manusia berada yang khas di dunia. Cara berada manusia menurut eksistensialis Heidegger (1889-1976) adalah *dasein* (*da*: di sana, *sein* : berada). *Da* menunjuk pada kehadiran, dalam arti bersatu dan terlibat dalam alam jasmani. Dengan 'kehadiran di sini' dimaksudkan bahwa manusia itu serentak ada di dalam (imanan dalam alam), tetapi serentak mengatasi (transenden) dalam arti menguasai, mengerti susunan alam dan hukum-hukumnya, dia memberi arti kepada dunia (Ceunfin, 1975; Adian, 2011). Dua pandangan ekstrem ini perlu mengemuka karena adanya dunia luar tak mungkin disangkal dan realitas manusia yang transenden terhadap alam tidak mungkin ditolak. Keberadaan manusia dalam alam dunia senantiasa memperlihatkan hubungan yang saling mengerti dan memberi arti (Freire, 1984).

Dunia manusia adalah dunia penuh dengan arti dan makna. Dalam kesatuan dengan alam, manusia menjadi sadar akan diri, akan alam dan akan seluruh kenyataan. Dalam kesadarannya ia hidup dan menghidupi alam jasmani. Dalam kesadaran itu, manusia memanusiation diri dan memanusiation dunia. Bukti dasar tentang itu adalah kebudayaan, baik dalam arti aktif maupun dalam arti pasif. Dalam arti aktif, kebudayaan adalah hasil pengangkatan diri manusia di atas kodrat alam dan dunia jasmani. Manusia menata dan mengatur alam jasmani. Dalam arti pasif, kebudayaan adalah hasil-hasil dari relasi manusia dan alam, selain benda-benda tetapi juga ritus-ritus, keyakinan-keyakinan, dan sebagainya (Cassirer, 1944).



Selanjutnya, pendidikan IPS berkaitan dengan cara orang berelasi dengan orang lain. Manusia tidak bisa berkembang dan menjadi diri sendiri tanpa hubungan dengan manusia-manusia lain. Dunia manusia adalah dunia arti-arti, dan arti-arti itu juga berlaku untuk manusia-manusia lain sebagai subjek. Manusia hanya dapat hidup sebagai manusia kalau ia hidup bersama dengan manusia lain. Cara berada manusia adalah ada bersama dengan subjek-subjek, dalam cinta kasih, yang saling membangun dan menyempurnakan. Cita-cita dari individu diarahkan kepada cinta tanpa pamrih sebagai pemenuhannya (Driyarkarya, 1980). Cinta menciptakan persekutuan. Karena itu, 'ada bersama' bersifat hakiki bagi manusia. Fenomena pendidikan IPS begitu nyata dalam hubungan antar manusia. Hubungan itu bersifat saling memberi arti, hubungan membangun dan menyempurnakan dalam cinta kasih. Suatu perbuatan disebut fenomen mendidik karena hasilnya apakah baik atau buruk. Pendidikan adalah suatu aktivitas fundamental karena pendidikan itu menyentuh akar-akar hidup manusia sehingga mengubah dan menentukan hidup itu.

Kedua, pendidikan IPS merupakan aktivitas pemanusiaan. Pendidikan adalah proses pemanusiaan manusia muda (Driyarkarya, 1980). Dalam proses pendidikan dua pribadi (*aku*) bertemu, yaitu *aku* dari pendidik dan *aku* dari yang dididik, sehingga yang dididik diangkat ke tingkat *aku* pendidik. Pengangkat itu yang disebut pemanusiaan. Pemanusiaan itu dibedakan atas proses hominisasi dan humanisasi. (1) Proses hominisasi (*homo*; manusia), yaitu perkembangan menjadi manusia. Pendidikan disebut hominisasi bukan karena proses bertumbuh dan berkembang yang diharapkan dari pendidikan secara lambat laun membawa kepada kesempurnaan diri sebagai manusia, baik dari aspek biologis maupun dari aspek psikologis. Homonisasi itu mengarah kepada menjadi seorang pribadi, seorang subjek yang mengerti diri dan tahu



Narasi Bangsa yang Tercecer

menempatkan diri dalam situasi. (1) Proses humanisasi (*humanus*; manusiawi, *humanisme*; kehidupan manusia dan masyarakat yang sempurna karena cocok dengan tuntutan dan cita-cita manusia), yaitu proses perkembangan manusia yang lebih tinggi dari tingkat yang minimal (hominisasi), kepada perkembangan ke tingkat yang lebih sempurna.

Tingkat lebih tinggi itu adalah kebudayaan yang lebih tinggi. Kebudayaan adalah hasil pengangkatan alam (kodrat) ke tingkat lebih tinggi dengan kekuatan akal budi manusia. Kata *cultura* berasal dari kata bahasa Latin "colere" yang berarti mengolah, mengerjakan, mengembangkan dan memelihara dan merawat, tetapi juga berarti memperhalus. Dengan kebudayaan sebagai hasil pengolahan manusia dengan menggunakan akal budinya, maka barang-barang menjadi berguna, alat-alat yang merupakan perpanjangan tangan manusia untuk mengolah alam dan mempermudah hidup diciptakan, ekspresinya menjadi lebih halus seperti gerak, perasaan, cita-cita dan jiwanya yang terungkap dalam kesenian, bangunan, keyakinan religius dan tingkah laku (Cassirer, 1944). Tujuan pendidikan adalah membantu manusia yang muda sehingga bisa bergerak, bertindak dan bersikap sebagai manusia. Pendidikan tidak hanya bermaksud memimpin manusia menjadi *homo* tetapi menjadi *homo yang human* (homo humanus). Jadi pendidikan sebenarnya bertujuan untuk membantu seorang manusia muda untuk menjadi pribadi atau subjek yang human.

Ketiga, pendidikan IPS berkaitan dengan tiga dimensi dasar pendidikan. Adapun tiga dimensi dasar dalam pendidikan (Ceunfin, 1997; Adian, 2011), yaitu: (1) *Personal*. Pendidikan berlangsung di antara pribadi-pribadi. Peserta didik bukanlah objek atau benda melainkan subjek dengan berbagai kemampuan dan kreativitas yang khas. Aktivitas pendidikan harus mampu memajukan pribadi dan membuat ia mengembangkan diri. (2) *Sosial*. Pendidikan adalah



suatu aktivitas antar-subjektif dan bersifat sosial. Pendidikan mampu membantu orang untuk saling mengenal, untuk hidup bersama dan menjamin harmoni sosial dan peka terhadap kepentingan umum suatu kelompok sosial di mana ia hidup, dan ikut memberikan sumbanganya untuk kesejahteraan umum. (3) *Kultural*. Pendidikan mengalihkan nilai-nilai dari generasi yang lebih dahulu kepada generasi berikutnya dalam bentuk pengetahuan, nilai sosial, moral dan agama, yang telah diolah dengan tujuan membuat individu yang menerima menjadi pribadi yang memberikan sumbangannya bagi perkembangan peradaban lebih lanjut. Dalam hal ini, perlu diingat tiga unsur penting dalam perkembangan manusia. (a) Kemampuan dasar, bakat (*nature*; alam yang dibawa sejak lahir). (b) Pemberdayaan (*nurture*; gizi) dan semua bantuan yang memudahkan perkembangan seorang pribadi termasuk pendidikan. (c) Pengolahan sendiri oleh pribadi yang bersangkutan (*culture*; kebudayaan) dan juga hasil olah budidayanya sendiri. Pendidikan bertujuan supaya seseorang dapat mengolah sendiri dirinya dan dunianya sehingga berguna bagi pembentukan peradaban.

Keempat, pendidikan IPS berhubungan dengan konsep *autoedukasi* dan *heteroedukasi*. Dalam pendidikan ada dua hal penting berkaitan dengan tujuan untuk menumbuhkembangkan manusia dan peradabannya (Ceunfin, 1997), yakni: (1) Autoedukasi berarti menjamin perkembangan harmonis berbagai daya dan kemampuan yang ada dalam diri peserta didik tanpa merujuk pada ideal-ideal yang ada di luar individu. Secara negatif, autoedukasi menolak campur tangan dari luar yang bersifat otoriter. Secara positif, autoedukasi memajukan spontanitas dan melindungi yang dididik terhadap dikte-dikte manipulasi dari luar. (2) Heteroedukasi berarti menyesuaikan subjek yang dididik dengan tuntutan struktur-struktur sosial, ekonomis, moral, agama dan politik. Proses pendidikan mencapai sasarannya kalau yang dididik menyesuaikan diri, juga tahu bersikap dan bertindak sesuai



Narasi Bangsa yang Tercecer

dengan tatanan yang ada. Kedua hal ini tidak saling bertentangan dalam konteks pendidikan yang integral. Proses pendidikan di sini mendasari tuntutan akan kebebasan, orisinalitas setiap pribadi tanpa mengabaikan kehadiran kondisi-kondisi sosial dan tuntutan lingkungan. Autoedukasi akan memajukan kematangan dan kedewasaan integral dan menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab personal, sedangkan heteroedukasi akan menumbuhkan dalam diri yang dididik kesadaran akan keterlibatan sosial dan tanggung jawab pribadi di tengah-tengah lingkungan sosial atau religius.

URGENSI KONSTRUKSI FILOSOFIS BAGI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN IPS

Filsafat Pendidikan merupakan ilmu yang bertujuan untuk menyelidiki hakikat ilmu pendidikan dan pelaksanaannya yang meliputi aspek tujuan, latar belakang, cara dan hasilnya; serta yang berhubungan dengan analisis kritis terhadap struktur dan kegunaan pendidikan. Sementara Pendidikan IPS lebih khusus membahas tentang apa yang menjadi dasar dan tujuan dari penetapan isi materi, pendekatan, metode, model pembelajaran serta dan sumber belajar yang dimanfaatkan. Filsafat pendidikan dan Pendidikan IPS menyelidiki data-data dan gejala-gejala yang sama, tetapi dengan metode yang berbeda dan pada taraf berbeda. Mereka memakai istilah yang sama tetapi dengan memakai arti yang berbeda. Filsafat merumuskan prinsip-prinsip dan asas yang mendasari pelaksanaan pendidikan IPS. Ia tidak memperhatikan detail-detail seperti berbicara tentang pendekatan, metode, model dan sumber belajar dan isi materi pembelajaran IPS, juga tidak membahas tentang bagaimana memberi motivasi belajar dalam Pendidikan IPS. Sementara Pendidikan IPS, lebih praktis dan langsung, berdasarkan fakta-fakta dan gejala-gejala konkret.



Hal-hal umum muncul dari kenyataan objektif, dan langsung dihubungkan dengan pengalaman dan memberikan interpretasi yang utuh tentang kenyataan.

Dialektika antara filsafat pendidikan dan pendidikan IPS tergambar dalam dua pemahaman berikut ini (Rochyati, 2002): *Pertama*, secara filosofis kajian pendidikan IPS dibangun secara sinergis, integratif, dan sistemik sehingga mampu merefleksikan 'realitas dinamis' dari pendidikan IPS. Dalam historitas ilmu-ilmu sosial nampak bahwa pengembangan pemikiran dan kajian PIPS saling berkaitan dan terintegrasi. Konstruksi Ilmu-ilmu sosial berisikan asumsi nilai-nilai dan kesadaran multidimensional serta saling berjalanan membentuk teori tentang pendidikan IPS. Di Indonesia gagasan IPS terpadu juga dikemukakan oleh Sumantri (2001) didasarkan pandangan bahwa konstruksi teoretis dapat memanfaatkan teori-teori yang ada dari berbagai bidang ilmu lain, yang dipandang layak dan bermanfaat untuk pengembangannya.

Kedua, secara teoretik pengkajian integratif sangat mendasar untuk menghindari kemungkinan terjadinya bias teori. Pendekatan integratif semakin diperkokoh dengan adanya kesepakatan pakar Pendidikan IPS yang terhimpun dalam organisasi NCSS (*National Council for the Social Studies*) pada tahun 1993, bahwa pendidikan IPS berdaya guna ketika bersifat terpadu (*Social Studies is powerful when it is integrative*). Hal ini berarti, pendidikan IPS sebagai kajian terpadu dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora (filsafat) bertujuan untuk mengembangkan kompetensi kewarganegaraan. Dalam upaya mengembangkan kompetensi kewarganegaraan ini, pendidikan IPS merupakan bentuk kajian terorganisasi dan sistemik dari disiplin ilmu filsafat, antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, politik, psikologi, agama, dan sosiologi, maupun materi-materi yang berkaitan dengan humaniora, matematika, dan ilmu alam.



Narasi Bangsa yang Tercecer

Dialektika dan integrasi antara filsafat dengan Ilmu Pengetahuan Sosial terungkap dalam definisi *Social Studies* dalam rumusan NCSS tahun 1993 merumuskan sebagai berikut : “Studi sosial adalah studi terintegrasi dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora untuk mempromosikan kompetensi sipil. Dalam program sekolah, studi sosial menyediakan terkoordinasi, studi sistematis menggambarkan atas disiplin ilmu seperti antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, ilmu politik, psikologi, agama dan sosiologi, serta konten yang sesuai dari humaniora, matematika, dan ilmu alam.”

Adapun pentingnya konstruksi filosofis pada konsep dan praksis pendidikan IPS (Sumantri, 2001; Bernadib, 2002), yaitu: *Pertama*, memberi landasan terhadap praksis pendidikan IPS sebagai aktivitas transmisi kewarganegaraan (*social studies as citizenship transmission*). IPS sebagai program pendidikan pelestarian kebudayaan suatu bangsa merupakan bagian dari proses transmisi kewarganegaraan. Dalam berbagai program pendidikan transmisi kewarganegaraan dilakukan dengan memberikan contoh-contoh dan pemakaian cerita yang disusun untuk mengajarkan kebijakan, cita-cita luhur suatu bangsa, dan nilai-nilai kebudayaan. Program pendidikan seperti ini banyak dilakukan dalam pembelajaran IPS yang membahas kompetensi sejarah dan pendidikan kewarganegaraan. Tujuan yang hendak dicapai dari transmisi kewarganegaraan adalah sebagai berikut : (a) pengembangan pengertian patriotisme; (b) pengembangan pengertian dasar dan apresiasi terhadap nilai-nilai bangsa, lembaga dan praktik-praktik; (c) memberi inspirasi ada integrasi pribadi dan tanggung jawab warga Negara; (d) membentuk pengertian dan apresiasi terhadap nenek moyang bangsa; (e.) mendorong partisipasi demokrasi aktif; (f) membantu murid-murid mendapatkan kesadaran akan berbagai masalah social; (g) pengembangan dan mempertontonkan cita-cita yang



diinginkan, sikap-sikap, dan keterampilan bertingkah laku yang sangat diperlukan berelasi dengan sesame; (h) untuk mengerti dan memahami sistem ekonomi yang bebas.

Kedua, menegaskan pendidikan IPS sebagai pendidikan reflektif (*social studies as reflective inquiry*). Sebagai pendidikan reflektif, IPS tidak hanya sekadar membelajarkan disiplin ilmu pengetahuan dan pencapaian hasil belajar, tetapi terutama pada memahami kebutuhan dan minat peserta didik agar mereka memiliki kompetensi dalam menjalani hidupnya secara lebih bermakna, serta mampu mengatasi berbagai problematika kehidupannya. Pendidikan IPS perlu mengembangkan dan memberdayakan pengalaman-pengalaman yang sifatnya edukatif, yang bermanfaat bagi persiapan hidup masa depannya. Cara terbaik untuk melatih dan mempersiapkan sikap kewarganegaraan untuk masa mendatang adalah dengan membekali kesempatan-kesempatan untuk mempraktikkan kewarganegaraan. Oleh karena itu, pendidikan IPS harus mengajarkan kejadian dan pengalaman masa lalu dan sekarang untuk menjadi landasannya dalam mengambil keputusan (*decision making*) akan kehidupan masa depannya.

Ketiga, memberdayakan pendidikan IPS sebagai sarana kritik kehidupan sosial (*social studies as social criticism*). Pendidikan IPS sebagai media pengembangan kritisitas lebih pada memanfaatkan isu-isu kontroversial dalam mengembangkan pengetahuan dan memupuk keberanian dalam mengemukakan pendapat atau argumen. Untuk ini pendidikan IPS harus dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis (*critical thinking*) dengan berbagai metode pemecahan masalah (*problem solving*), terutama ketika peserta didik berhadapan dengan berbagai masalah yang melanda diri dan masyarakat. Dalam hal ini peserta didik dimampukan untuk memiliki daya analisis untuk menemukan penyebab masalah dan berusaha mencari cara dalam memecahkannya.



Narasi Bangsa yang Tercecer

Keempat, mengafirmasi pendidikan IPS sebagai wahana pengembangan pribadi seseorang (*social studies personal development of the individual*). Pengembangan pribadi seseorang melalui pendidikan IPS bertujuan untuk membekali seseorang dengan berbagai kemampuan, pengembangan diri dan berketerampilan sosial dalam kehidupan (*social life skills*). Dalam hal ini, pendidikan IPS mesti membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai, sehingga dapat membentuk citra diri peserta didik menjadi manusia yang memiliki jati diri di tengah masyarakat dan dapat hidup dengan damai serta menjadi teladan bagi sesama.

Selanjutnya, untuk mendukung landasan filosofis ini, terdapat tiga landasan turunannya pada Pendidikan IPS (Sumantri, 2001), yaitu: *Pertama*, landasan ontologis. Pendidikan harus secara konsisten memandang manusia sebagai makhluk rasional dan sadar nilai. Dalam tataran praktis pendidikan perlu mengembangkan kemampuan peserta didik untuk melakukan penalaran secara rasional, kritis dan analitis. Untuk itu perlu diajarkan logika, filsafat, ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu sosial dan humaniora dan ilmu pengetahuan lainnya, agar ia mampu berperan dan merespons persoalan kehidupan masa depannya. *Kedua*, landasan epistemologis. Pendidikan mesti didasarkan pengembangan ilmu yang bersumber pada ajaran agama (*intrareceptive/pereneal knowledge*) dan pengembangan ilmu berdasarkan pada pemberdayaan indera dan intelektualitasnya (*extrareceptive/acquired knowledge*).

Ketiga, landasan aksiologis. Pendidikan dilihat sebagai aktivitas yang sarat akan nilai atau bermakna (*repertoire of meanings*) yang akan ditransformasi dan diinternalisasikan ke dalam diri peserta didik. Makna-makna tersebut meliputi simbolik, empirik, estetik, sinoetik, etik dan sinoptik. Makna simbolik meliputi pendidikan bahasa, matematika. Makna empirik meliputi lingkungan fisik (kimia, fisika biologi) dan lingkungan sosial, lingkungan psikologi



dan budaya. Makna estetis meliputi musik, sastra, dan seni gerak. Makna sinoetik meliputi drama, pembahasan tentang film dan berbagai jenis cerita. Makna etik, yakni pendidikan kesadaran untuk menghormati dan mematuhi secara sukarela norma dan nilai-nilai yang ada. Makna sinoptik, yakni pendidikan yang berkaitan dengan sejarah, filsafat dan agama yang dimaksudkan sebagai bekal mengintegrasikan seluruh pengetahuan yang dimiliki. Perbendaharaan makna tersebut membantu menguatkan dan mengembangkan kemampuan intelektualitas peserta didik, sekaligus mengontrol perilakunya agar sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan. Hal ini merupakan wujud nyata dari integrasi adagium *intellectus quarens fidem* (rasio dan intelektualitas lebih dikedepankan dari agama, moral atau keimanan) dan *fides quarens intellectum* (agama, moral dan keyakinan lebih diutamakan dari rasio dan intelektualitas).

Ketiga landasan ini sangat mendukung landasan filosofis dalam pendidikan IPS sehingga sangat membantu dalam memberi arti dan makna dalam praksisnya. Dengan demikian, pendidikan IPS dalam konsep dan praksis pelaksanaannya memiliki kekuatan dan keterarahan yang jelas, baik pada tingkatan pembentukan dan penyusunan kurikulumnya, maupun pada level pengembangan perangkat, pendekatan, metode, dan model pembelajaran di sekolah maupun di ruang kelas. Landasan filosofis yang didukung oleh landasan ontologis, epistemologis dan aksiologis menjadikan pendidikan dan pembelajaran IPS di sekolah semakin memiliki bermakna (meaningful) dan berdaya (powerful).



Narasi Bangsa yang Tercecer

Lastest Dummy



EPILOG

Menggagas Keadaban Bangsa

Max Regus, MA, Ph.D¹

PENGANTAR

Dr. Mantovanny Tapung, penulis buku ini, meminta saya menyiapkan epilog untuk buku kumpulan tulisannya di bawah judul '*Narasi Bangsa yang Tercecer*'. Buku ini, sebagai sebuah kumpulan tulisan, menampilkan kekayaan pengamatan dan refleksi akademik penulis atas sekian banyak masalah sosial, politik, dan budaya di negeri ini. Saya, dalam konteks menyiapkan epilog untuk buku yang bagus ini, mesti memilah dan memilih dengan cermat satu atau dua isu penting yang muncul dalam hubungannya dengan lanskap

¹ S1 Fisafat (STFK Ledalero, Mamuere, Flores, 1998), S2 Sosiologi (UI, Depok, 2009), S3 Ilmu Sosial dan Humaniora (Universitas Tilburg Belanda, 2017). External Fellow School of Humanities, Universitas Tilburg (2018—2020); Postdoctoral Fellow Institute of Missiology Aachen (2018—2020).



Narasi Bangsa yang Tercecer

kehidupan kebangsaan (Indonesia) kita saat ini. Demokrasi, bagi saya sendiri, adalah salah satu, jika tidak mau disebut sebagai satu-satunya tema yang paling menyita perhatian kita.

Indonesia, pada hampir dua dekade ini, dianggap sebagai salah satu negara—yang dikenal dengan sebutan ‘paska-otoritarianisme’—menjatuhkan pilihan pada demokrasi dan memiliki konsistensi mengembangkan paham politik ini. Demokrasi, sebagai ideologi, metode, dan mekanisme politik membangun legitimasi dan legalitas kekuasaan, bergerak dalam kepercayaan politik sebagai sistem dan alat politik yang dapat menghadirkan perubahan signifikan dengan rujukan utama pada pemekaran aspek-aspek kesejahteraan sosial warga dan bangsa.

Sebelum pemilu 2014 lalu, kita, bahkan, dengan penuh keyakinan mengumumkan pencapaian menakjubkan pada level akhir ‘konsolidasi’ demokrasi di negeri ini. Dalam konteks ini, di antara sekian banyak tantangan dan persoalan yang dihadapkan dengan praktek-praktek utama demokrasi, kita menggenggam satu titik raihan penting dalam keseluruhan proses membangun ‘keadaban’ demokrasi. Bagaimanapun, ini bukan akhir dari proses panjang dalam kerangka membuktikan akurasi, kebenaran, dan kesahihan pilihan-pilihan sosial politik kebangsaan dan kenegaraan kita. Kita masih harus melewati banyak ujian membangun narasi kebangsaan yang beradab dengan menjawab dua pertanyaan penting ini: *apakah demokrasi masih menyisakan harapan bagi kita untuk membangun keadaban bangsa dan bagaimana pencapaian itu pada ujungnya memunculkan keadilan dan kebaikan bagi semua warga.*

Pada satu sisi, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan krusial ini berasal dari keyakinan akan proses politik demokratis yang sedikit banyak telah membentuk komunitas politik dan pencapaian yang ada di dalamnya sebagai kesempatan total untuk membangun



kesejahteraan dan kemakmuran sosial yang lebih konkret.² Pada sisi lain, jawaban-jawaban untuk pertanyaan ini, sedikit banyak, juga ditentukan seberapa matang dan berfaedah pertarungan merebut kekuasaan antar klan politik yang kemudian mengembalikan kekuasaan itu bagi kemaslahatan seluruh bangsa.

Saat ini, isu fundamental sekarang ini bukan saja memastikan bagaimana konsolidasi demokrasi tetap berjalan pada jalur yang sebenarnya, melainkan terutama bagaimana praktek-praktek demokrasi di semua level bisa menumbuhkan keadaban bangsa. Hal ini bersentuhan dengan semua aspek kehidupan bersama sebagai bangsa-negara agar demokratisasi tidak menjerumuskan kita ke arah ketidakberdayaan sosial-politik.³ Kita perlu memikirkan bagaimana bangsa ini membangun konsolidasi internal secara sosial dan kultural sekaligus mengelolah tantang eksternal agar tidak menjadi mesin penindas dan penghisap yang menghancurkan.⁴ Banyak jalan yang bisa ditempuh untuk mengalami ranah kebangsaan yang memiliki tiang keadaban yang kuat. Sebagaimana disentuh secara intens dalam buku karya Dr. Mantovanny Tapung, demokrasi secara niscaya dipercayai dan perjuangkan sebagai dasar pembangunan budaya politik bangsa ini.

DEMOKRASI DAN OPTIO FUNDAMENTALIS BANGSA

Ada tiga isu substansial yang mengerucut berhubungan dengan demokrasi. Pertama, demokrasi didefinisikan sebagai metode politik yang dipergunakan untuk mencapai tujuan kesejahteraan

² Reuven Brenner, "Land of Opportunity," *Forbes*, October 12, 1998, p. 66

³ Aurel Croissant, "From transition to defective democracy: Mapping Asian democratization." *Democratization* 11, no. 5 (2004): 156-178.

⁴ Amy Freedman, "Political change and consolidation: democracy's rocky road in Thailand, Indonesia, South Korea, and Malaysia". Springer, 2006.



Narasi Bangsa yang Tercecer

dan kemakmuran sosial. Tujuan ini, bagi Indonesia, sekaligus menjadi *optio fundamentalis* (pilihan dasar) keberadaan komunitas politik (NKRI). Kedua, demokrasi dianggap sebagai mekanisme politik yang digunakan dalam proses membangun legitimasi politik (kekuasaan). Ketiga, demokrasi juga dikenal sebagai basis etik bagi budaya dan perilaku politik pelaku kekuasaan. Ini merujuk pada dedikasi total kekuasaan bagi masa depan kemanusiaan dan semangat egaliter di antara warga politik.

Untuk isu pertama, demokrasi terus berjalan dalam proses ‘uji coba’ politik secara terus menerus untuk menemukan satu keyakinan bersama, baik warga maupun para pelaku politik, bahwa metode dan praktek demokrasi memenuhi ‘prasyarat minimal’ sebagai poros yang dibangun untuk memenangkan kesejahteraan sosial (publik). Pada sisi ini, pemenuhan kepentingan kelompok sosial perifer (pinggiran) niscaya menjadi variabel utama kematangan demokrasi. Pada isu kedua, substansi demokrasi berorientasi pada pentahapan politik (formalisasi demokrasi) dalam proses membangun legitimasi politik kekuasaan. Di sini, pemilihan umum, yang diselenggarakan pada semua level ketatanegaraan, adalah bagian dari mekanisme demokrasi. Partisipasi politik, juga dalam konteks ini, menjadi prinsip terpenting mekanisme demokrasi. Partisipasi politik, yang berarti pengakuan hak-hak politik rakyat, mesti mengerucut pada pematangan demokrasi. Selanjutnya, pada isu ketiga, demokrasi mengandung basis etik politik dan kekuasaan. Prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, kesetaraan, dan kemerdekaan merupakan nilai-nilai absolut dalam keseluruhan metode dan mekanisme demokrasi. Di sini, bukan saja aspek partisipasi politik yang dianggap paling menonjol, melainkan juga terutama pengabdian institusi-institusi politik sebagai hasil mekanisme demokrasi pada nilai-nilai kerakyatan.



Demokrasi, dengan merangkum sejumlah aspek substansial ini, dapat ditetapkan sebagai pilihan, pendirian, dan keberpihakan politik untuk memperjuangkan kesejahteraan dan kemakmuran sosial. Sekaligus, ada kelengkapan makna demokrasi ketika demokrasi dipraktekkan sebagai bagian dari pengabdian politik kekuasaan untuk menunjang keberlangsungan hidup warga politik. Di sini, yang paling utama adalah perhatian politik kekuasaan bagi kelompok sosial paling miskin—mereka yang rentan terhadap multi-wajah penjajahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya.

Secara teoretik, demokrasi memang menjamin semua kelompok sosial, terutama kelompok-kelompok marginal, bisa memastikan ruang dan jangka waktu kehidupan yang bebas dari kekerasan, penindasan, dan represi.⁵ Ini penting dikemukakan, ketika soal-soal ini seringkali menjadi pengalaman kebangsaan, terjadi di Indonesia, bahkan muncul dengan begitu sering pada sesi sejarah reformasi demokratis ini.

Dengan itu, penting pula untuk dikemukakan bahwa demokrasi yang dikerjakan di Indonesia hingga hari ini tidak semata-mata merupakan kebutuhan para pelaku politik dengan ambisi kekuasaan, melainkan terutama dan paling penting jalan kecil yang ditempuh menuju ujung lorong kebuntuan sosial ekonomi yang menistakan rakyat kecil sekian lama.

Tidak ada penyesalan terburuk bagi para penganut demokrasi manakala para pelaku politik dan kekuasaan yang diusung atas nama '*kesucian*' demokrasi meninggalkan perilaku yang menyudutkan keutamaan-keutamaan terpenting kebutuhan publik. Di titik ini, '*anak kandung*' demokrasi menjelma dalam bentuk mesin-mesin kejahatan politik yang memangsa sumber kekuasaan dan

5 Bertrall L. Ross, "Democracy and Renewed Distrust: Equal Protection and the Evolving Judicial Conception of Politics." *Cal. L. Rev.* 101 (2013): 1565.



Narasi Bangsa yang Tercecer

legitimasi politik: warga politik. Tidak mengherankan, pada saat rakyat yang merayakan mekanisme demokrasi dalam proses politik sebegitu rupa sebagai pendewaan (idolatria politik), pada akhirnya mereka berhadapan dengan kejahatan yang terungkap dalam kebijakan pembangunan anti rakyat! Ini bukan sekedar isu fiktif belaka, melainkan kenyataan dan pengalaman publik sehari-hari.⁶ Kepercayaan teoretik seputar daya demokrasi yang diharapkan memunculkan kegairahan politik sirna akibat 'euforia kekuasaan' yang terlalu berlebihan. Kita dengan mudah menemukan kecenderungan yang cukup kuat bahwa kekuasaan dengan basis legitimasi yang sangat besar pada akhirnya terjungkal dalam se bentuk impotensi (ketidakberdayaan) politik untuk menolong nasib rakyat.

Tidak ada kalimat yang cukup tepat untuk menggambarkan arus balik ini selain pelukisan pada totalitas kejahatan politik yang membunuh rakyat. Demokrasi justru menghadapi bahaya ketika praktik politik dan kekuasaan meninggalkan sumber daya politik (rakyat) dan alasan bagi pilihan atas demokrasi sebagai metode dan mekanisme politik. Seharusnya, pada saat demokrasi menjadi pilihan kebangsaan dan kenegaraan kita, maka segenap proses dan hasil yang dicapai dari keseluruhan mekanisme yang dilewati niscaya menghadirkan kesempatan terbaik bagi kita untuk memperbaiki keadaan sosial bagi warga politik. Sebetulnya, inilah alasan paling fundamental dari pilihan terhadap demokrasi sebagai jangkar 'narasi keadaban' politik bangsa kita. Dalam artian tertentu bahkan paling mendasar, demokrasi harus menyingkirkan kemunafikan dan kerakusan agar semua proses demokrasi bisa memperkuat pilihan politik menjadi gerakan sosial yang kuat untuk menolong warga politik yang tidak terurus akibat kejahatan politik pelaku kekuasaan.

6 Tom Serang McCawley, "A People's Economy," *Asiaweek*, December 18, 1998, p. 62



DEMOKRASI DAN PEMBANGUNAN BANGSA

Konsientisasi⁷ prinsip-prinsip fundamental demokrasi niscaya dilakukan tidak hanya dalam tataran praktik-praktik sosial politik, melainkan membangunnya dalam keseluruhan konstruksi kebijakan politik kekuasaan. Dari sekian banyak isu pokok yang harus disentuh dalam usaha menyediakan narasi positif tentang bangsa, diskusi kritis tentang politik pembangunan menjadi penting dan mendesak.

Makna dan nilai yang ada di balik setiap pilihan kebijakan politik pembangunan justru harus menjadi bagian perjuangan para pelaku politik ke depan. Menjadi pelaku politik, pada semua ranah, tidak hanya berkaitan dengan perubahan status sosial dan jaminan ekonomi, melainkan terutama berhubungan dengan kesadaran dan tanggung jawab politik untuk memperjuangkan kemaslahatan rakyat. Artinya, pada tempat pertama, pelaku politik mesti membangun 'pergaulan'⁸ yang efektif dan positif dengan rakyat. Pelaku politik dan kekuasaan akan mencapai level ini hanya dengan ketekunan meniti proses konsientisasi nilai-nilai substansial demokrasi dan politik. Hanya dengan ini mereka dapat menyumbang makna positif dalam keseluruhan narasi kebangsaan.

Pelaku politik, pada tahap ini, mesti berada berada di wilayah rakyat. Hal ini sangat penting untuk disadari dengan mempertimbangkan kondisi miris yang masih mengurung kehidupan sosial. Bukan saat yang tepat untuk menyembunyikan situasi begitu

7 Istilah ini mengacu pada proses membangun kesadaran politik. Bukan sekedar tahu politik lalu mengalami menjadi wakil rakyat dan politikus melainkan nilai-nilai hakiki politik dan demokrasi menjadi bagian dari perilaku personal dan komunal kekuasaan.

8 Pergaulan sosial politik berarti keterhubungan emosional-politis antara perwakilan politik (pelaku politik dan penguasa) dan publik. Pelaku politik kekuasaan harus menyapa rakyat dengan pilihan kebijakan politik yang pro keadilan dan kemanusiaan. Di sini penting bagi mereka mengasah basis etik-moral dari setiap tindakan politik. Lihat Max Regus (2018), *Konstituensi Etik-Moral dalam Politik*, HU Kompas 12 Juli 2018. <https://kompas.id/baca/opini/2018/07/12/konstituensi-etik-moral-dalam-politik/>



Narasi Bangsa yang Tercecer

banyak kelompok sosial pinggiran yang terkurung dalam seabrek persoalan mendasar baik itu jaminan keadilan sosial maupun perlindungan politik. Sekedar awasan, biaya-biaya ekonomi yang tidak terjangkau masyarakat miskin bisa dianggap sebagai suatu kesengajaan politik dan pembangunan yang dapat menjadikan bangsa kita sebagai tubuh sosial yang digerogeti kemiskinan.

Korupsi elite politik kekuasaan saat ini senantiasa berujung pada nasib kelompok masyarakat miskin.⁹ Politik sepertinya belum teruji secara penuh sebagai mekanisme yang efektif-konstruktif untuk meluputkan rakyat dari pengalaman ketidakberdayaan. Krisis sosial belum beranjak dari ruang keprihatinan.

Pendekatan pembangunan yang ditawarkan dari menara kekuasaan telah melumut akibat disorientasi praktik politik kekuasaan. Kebijakan-kebijakan pembangunan tidak lebih daripada ‘permainan ilusif’ yang membelokkan sikap kritis rakyat terhadap kepongahan yang terpompakan tanpa batas di wilayah publik. Barangkali memang sudah terlalu biasa bagi kita melihat bagaimana pembangunan seringkali diperlihatkan pada sisi yang berlawanan dengan kepentingan rakyat. Makanya tidak mengherankan hanya kelompok-kelompok sosial yang berafiliasi pada kekuasaan yang mendapatkan jaminan ekonomi-politik paling pertama dari negara. Inilah kenyataan seputar apa yang disebut dengan *state corporatisme*—ketika kendali kebijakan ada di tangan kelompok tertentu yang memiliki kuasa politik dan ekonomi. Ini akan menjadi sebab paling utama bagaimana kesejahteraan dan kemakmuran semakin sulit untuk berpindah ke tangan rakyat kecil.

Persoalan utama tetap satu, kepentingan rakyat belum menjadi fokus perjuangan politik bangsa ini. Tampaknya, memang

⁹ Pengalaman kemiskinan sosial ekonomi rakyat harus menjadi bagian dari titik pijakan perjuangan pelaku politik kekuasaan (pejabat publik). Ini akan menjadi prasyarat awal bagi penguasa merumuskan strategi pembangunan pro rakyat dan bukan anti-sosial.



masih terhampar sejumlah harapan, hanya tekad elite politik dan pengambil kebijakan yang perlu ditata keberpihakannya. Tuntutan paling pertama bagi para pelaku politik adalah kepekaan untuk merasakan siklus ketidakberuntungan rakyat pinggiran hingga saat ini. Tentu, para pelaku politik dan kekuasaan tidak harus selamanya terhanyut dalam kepekaan akan siklus kemiskinan rakyat. Mereka mesti berani meniti langkah paling berani memperjuangkan kepentingan rakyat. Legitimasi politik merupakan titik pijakan paling penting untuk merintis pembelaan kebutuhan asasi rakyat.

Selama ini, ketiadaan ‘kemauan politik’ memperbaiki kondisi runyam kehidupan publik, seperti yang dialami sejumlah kelompok minoritas agama, merupakan sirkuit utama krisis bangsa, hingga sejauh ini. Dengan demikian, sinergi kekuatan politik amat dibutuhkan dalam kerangka memperbaiki multiwajah ketidakberuntungan bangsa Indonesia. Lembaga-lembaga politik harus menjadi bagian dari sinergi politik strategis antara rakyat dan pelaku kekuasaan untuk menulis narasi kebangsaan yang beradab dan terbuka.

Sampai pada titik ini, di hadapan begitu banyak proses politik dan demokrasi, para pelaku politik, pejabat publik, penguasa bersama rakyat mesti membangun kesepahaman politik sejak awal demi mengaksentuasikan inti harapan bersama akan bangunan kebangsaan. Mesti ada semacam rintisan arus konvergensi politik yang mengerucut pilihan-pilihan cerdas, tepat, dan dengan lekas menuju kebaikan bersama yang lebih nyata.

Kesepakatan-kesepakatan semacam ini seharusnya memang dapat menghadirkan sebuah tekanan politik politik demi membekap manipulasi paradigma pembangunan—yang secara ideologis dan konseptual niscaya harus berpihak pada urusan publik. Gagasan ini penting untuk dikerjakan mengingat sejumlah pencapaian politik dan ekonomi mutakhir tidak serta merta menutup celah-



Narasi Bangsa yang Tercecer

celah kegagalan. Selalu muncul kenyataan bahwa keindahan misi pembangunan mengalami kesepian praktis di atas dokumen politik.

Ada beberapa problem pelik yang sedang menghadang usaha jalan pulang menuju cita-cita kemakmuran sosial bangsa kita. Ada proses politik pembangunan yang mengalami degradasi nilai dan pemihakan. Pertama, pembangunan belum teruji secara serius sebagai mekanisme pembelaan rakyat terhadap multi-wajah kemiskinan. Kedua, solidaritas sosial-politik belum menjadi bagian dari imperatif politik pembangunan kita. Institusionalisasi keberpihakan pembangunan untuk semua warga bangsa mengalami kemacetan. Ketiga, politik pembangunan belum memiliki metode yang efektif untuk membongkar kebekuan yang ada pada wilayah komunitas termiskin, pinggiran, dan minoritas. Masyarakat paling miskin hanya menjadi basis pembenaran munculnya kebijakan publik sesaat. Keempat, tidak jarang pembangunan pada akhirnya menjadi alasan penyingkiran sebagian dari warga negara.

Usaha politik bersama untuk 'mentransendensikan' kebutuhan politik rakyat harus diawali dengan kerelaan untuk menaklukan 'kesenangan' pribadi dan 'kepentingan' kelompok segenap klan-klan politik dan kekuasaan. Perwakilan politik rakyat harus tetap mengintervensi kebijakan politik publik agar skenario pembangunan tetap berada dalam jangkauan kalkulasi kemakmuran rakyat. Hal ini pada gilirannya akan mendorong lahirnya sebuah komunitas politik (negara-bangsa) yang memiliki kualifikasi keadaban mumpuni demi menunjang posisi tawar pada level global.

PENUTUP

Salah satu simpul dari apa yang ditulis Dr. Mantovanny Tapung dalam buku ini tentang 'tercecernya narasi bangsa' adalah menguatnya sejumlah pembenaran dan justifikasi atas tindakan-tindakan yang



di dalam dirinya sendiri mengandung kejahatan sosial politik. Sedemikian jauh, kecenderungan semacam ini telah menyempitkan akal budi publik untuk bekerja secara normal. Ini sejajar dengan apa yang dikemukakan Martin van Creveld dalam buku *The Rise and Decline of The State* (1999). Menurutnya, keruntuhan negara terjadi ketika ‘nurani publik’ tidak lagi menjadi bagian dari pertimbangan politik negara dan pemerintahan.

Penting untuk mendiskusikan apa yang diutarakan John Gledhill (2004) dalam *Power and Its Disguises*.¹⁰ Di sini, dia mengetengahkan dua aspek penting yang harus dimiliki setiap pelaku politik (kekuasaan) untuk menciptakan budaya politik beradab. Aspek pertama berhubungan dengan ‘intimasi personal’ pejabat politik publik terhadap krisis politik yang berimbas pada kehidupan sosial. Keintiman politik secara konsisten mengandung keprihatinan mendalam atas persoalan kebangsaan (politik). Aspek kedua, tidak hanya sebatas keterikatan personal, disposisi batiniah politik ini serentak mendorong keterpanggilan pada pelibatan politik untuk memperjuangkan apa yang baik dan benar untuk kebaikan bersama (bangsa-negara). Dibutuhkan konsistensi dan kesetiaan politik-demokratis dalam menapaki jalan terjal menuju kejujuran demi membungkam semakin banyak perkara yang merusak publik. Kesetiaan pada perjuangan populis si satu pihak dan pengorbanan politik yang harus diberikan secara konsisten oleh para pejabat politik (kekuasaan) di pihak lainnya serentak mewadahi perwujudan itikad baik membetulkan cerita kebangsaan yang sedang terisi kengerian dan kekalahan kelompok lemah dan pinggir.

¹⁰ Lihat analisis populer bagian ini dalam tulisan saya, Max Regus (2009), *Angket dan Publik*, Kompas 7 Desember. Sumber: <https://bola.kompas.com/read/2009/12/03/0259005/Angket.dan.Publik>



Narasi Bangsa yang Tercecer

Dua aspek ini membutuhkan apa yang disebut dengan ‘komitmen politik’ dalam mendukung munculnya potret kebangsaan yang terbuka, demokratis, humanis, dan beradab. Elemen-elemen ini yang dipercaya Dr. Mantovanny Tapung dalam buku ini dapat menjadi cikal bakal pembangunan narasi kebangsaan yang utuh, solid, dan konstruktif—jika dijalankan dengan konsisten—atau serentak mengirim bangsa kita ke pinggiran curam kejatuhan—jika nilai-nilai ini hanya sebatas bagian dari verbalisme kekuasaan belaka.

Dr. Mantovanny Tapung, dengan latar belakang ilmu filsafat yang kuat dan perjalanan panjang sebagai seorang pendidik, mampu melihat sejumlah keretakan sosial, politik, budaya, pada dinding-dinding kebangsaan kita lalu mengolahnya ke dalam luapan suara kenabian seorang akademisi. Artikel-artikel yang dituliskan dan dikumpulkan dalam buku ini, selain mengusung tema aktual, juga menagih tanggung jawab bersama membangun bangsa.

Kita ditarik ke dalam satu panggilan yang sama tentang tanggung jawab (responsibilitas) sosial-politik menyembuhkan luka-luka kebangsaan kita yang mungkin masih menganga. Di hadapan kita membentang sejumlah persoalan pelik. Di situlah kita perlu merumuskan pendirian-pendirian politik-demokratik kita menyusun kembali narasi kebangsaan kita. Dr. Mantovanny Tapung, dalam buku ini, menawarkan cara pandang lintas perspektif di satu sisi dan melontarkan satu aras keprihatinan akademik akan masa depan kebangsaan (keindonesiaan) kita di sisi lain. Kita harus bergerak di dua sisi ini untuk menemukan dan mengalami kembali ranah dan narasi kebangsaan dan kenegaraan kita yang berkeadaban dan berkeadilan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik, 2001. *Nasionalisme dan Sejarah*. Bandung: Satya Historika.
- Adian, Donny Gahral. 2005. *Percik Pemikiran Kontemporer: Sebuah Pengantar Komprehensif*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Adorno, T., 1973. *Negative dialectics*. E. B. Ashton (Trans.). New York: Continuum.
- Althusser, L., 1976. *Essays in Self-Criticism*. G. Lock (Trans.). London:NLB, Humanities Press.
- Adler, Thompson, 2002. *Critical Thinking An Introduction*. Cambridge University Press.Liliasari.
- Apple, M. 1979. *Ideology and Curriculum*, London: Routledge & Kegan Paul.
- Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur 2010.



Narasi Bangsa yang Tercecer

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2013.
- Bakker, Anton, 1984. *Metode-metode Filsafat*. Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Bagus, L, 1999. *Kamus Filsafat*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Beck, Ulrich, 1992. *Risk Society: Toward a New Modernity*. London: Sage.
- Beyer, Barry K. 1985. *Critical Thinking*. Phi Delta Kappa, 408 N. Union, P.O. Box 789, Bloomington, IN 47402-0789.
- Blackburn, Simon. 2013. *Kamus Filsafat*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Brouwer, M.A.W, 1984, *Psikologi Fenomenologis*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Calhoun, C., 1995. *Critical Social Theory*. Cambridge, MA: Blackwell.
- Cassirer, Ernes. 1944. *Manusia dan Kebudayaan : Sebuah Esei Tentang Manusia*. (terjem.) London: Yale UP.
- Chomsky, N. 1978. *Human Rights and American Foreign Policy*. New York: Oxford University.
- Collinson, Diane, 2001, *Lima Puluh Filsuf Dunia yang Menggerakkan*, Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada.
- Craib, Ian. 1986. *Teori – Teori Sosial Modern, Dari Parsons sampai Habermas*. Jakarta: CV. Rajawali Pers.
- Carr, W. dan Kemmis, S. 1986. *Becoming Critical*, New York: Falmer.
- Dagun, Save M., 1990, *Filsafat Eksistensialisme*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Delors, 1996. *Learning: The Treasure Within*, The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Place de Fontenoy, France.



- Delaney. C.F., 1999. "Dewey, John." *In The Cambridge Dictionary of Philosophy*. Robert Audi, ed. 229-231. London: Cambridge University Press.
- Deleuze, Gilles, 2002, *Filsafat Nietzsche*, Ikon Teralitera, Yogyakarta.
- E. Medieta, 2002. *Religion and Rationality: Essays on Reason, God, and Modernity*, Cambridge, MA: MIT Press.
- Eriksen, Erik Oddvar, dan Jarle Weigard, 2004. *Understanding Habermas: Communicative Action and Deliberative Democracy*, Continuum International Publishing.
- Engels, F., 1973. *Dialectics of Nature* (Translator, Clements Dutt). New York: International Publishers.
- Ennis, Robert. H., 1996. *Critical Thinking*. USA :Prentice Hall, IncFacione, N.C, & Facione,P.A
- Fisher, Alec. 2001. *Critical Thinking: Introduction*. UK: Cambridge University Press.
- Freidman, Jonathan, 1994. *Cultural Identity and Global Processes*. London: Sage.
- Freire, Paulo. 1984. *Pendidikan Sebagai Praktik Pembebasan* (diindonesiakan oleh Sindhunata), Jakarta: Gramedia.
- Fromm, Erich, 2001. *Akar Kekerasan: Analisis Sosio-Psikologis atas Watak Manusia* (Penerjemah: Muttaqin) Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- _____, 1988. *Manusia Bagi Dirinya, Suatu Telaah Psikologis-Filosofis Tentang Tingkah laku Manusia*, Jakarta: Akamedika.
- Gergen, Kenneth J, 2001. *Social Construction In Context*, London: SAGE Publicatons.
- George, C. Boeree. 2004. *Personality Theories*. Yogyakarta : Prismsophie



Narasi Bangsa yang Tercecer

- Habermas, Jurgan, 1971. *Knowledge and Human Interests*. J. J. Shapiro (trans.). Boston: Beacon.
- _____, 2002. *Religion and Rationality: Essays on Reason, God, and Modernity*, ed. Eduardo Mendieta, MIT Press.
- _____, 2006. *Teori Tindakan Komunikatif I: Rasio dan Rasionalisasi Masyarakat* (terj.: Nurhadi). Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Hamersma, Herry, 1980. *Pintu Masuk ke Dunia Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hardiman, Budi F., 2007, *Filsafat Modern; dari Machiavelli sampai Nietzsche*, Gramedia, Jakarta.
- _____, 2009. *Kritik Ideologi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- _____, 2009. *Menuju Masyarakat Komunikatif*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Hebert, Anna, 2010. *Pedagogy of Creativity*. London and New York: Routledge.
- Imam, R. Haryono, 1993. *Capita Selecta, Diskursus Kemasyarakatan Dan Kemanusiaan*, Jakarta: Gramedia.
- Ira Shor & Paulo Freire, 1945. *Pedagogy for Liberation*. Bergin dan Garvey Publisher.
- Johnson, Doyle Paul. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta : PT. GRAMEDIA.
- Kant, Immanuel. 2005. *Kritik Atas Akal Budi Praktis*. (Terjem. Nurhadi judul asli: Critique of Practical Reason, 1956), Penerbit Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Kattsoff, Louis O. 1986. *Pengantar Filsafat*, (terjemahan Soejono Soemargo), Yogyakarta: Tiara wacana.



- Kincheloe, J.L., 2008. *Knowledge and Critical Pedagogy: An Introduction*, 3, Springer Science and Business Media B.V.
- Kinch, J.W., 1974. *Social Problems in the World Today*. London : Addison-Wesley Publishing Company.
- Kuhn, Thomas S. 1996. *The Structure of Scientific Revolution 3rd Edition*, Chicago: University of Chicago Press.
- Lopes, Joana, 2009. *Young People's Intended Civic and Political Participation: Does Education Matter?* Journal of Youth Studies.
- Marcuse, Herbert, 1964. *One-Dimensional Man*. Boston: Beacon Press.
- Marcum James A., 2005. *Thomas Kuhn Revolution: An Historical Philosophy of Science*, London: Continuum.
- Magee, B. 2005. *Memoar Seorang Filsuf: Pengembaraan di Belantara Filsafat*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Marsh, Colin, 2008. *Studies of Social and Environment*, Pearson-Practice Hall.
- McLellan, David, 1973. *Karl Marx: His Life and Thought*. New York: Harper Colophon.
- Mirra, Nicole, 2011. *Educating For Critical Democracy (Civic Participation Reimagined In The Council Of The Youth Research)*. Journal Democracy & Education.
- Mohanty, J. N. 1982. *Edmund Husserl's Theory of Meaning*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Nichols, Ray L., 1979. *Treason, Tradition and the Intellectual: Julien Benda and Political Discourse*. Univ. Press of Kansas.
- O'Sullivan, Edmund, 2007. *Learning Transformative: Educational Vision for 21st Century*. UK:Zed Books Ltd., 7.
- Paul, Ricard dan Linda Elder. 2011. *Student Guide to Historical Thinking*. UK: Cambridge University Press.



Narasi Bangsa yang Tercecer

- Pals, L. Daniel., 1996. *Dekonstruksi Kebenaran: Kritik Tujub Teori Agama*. (terjem. Inyik Ridwan Muzir, dkk), Yogyakarta: IRCiSoD.
- Pandor, Pius, 2010. *Ex Latina Claritas. Dari Bahasa Latin Muncul Kejernihan*. Jakarta: Obor.
- Parker, Walter and John Jarolimek, 1984. *Citizenship and The Critical Role of The Social Studies*. Washington, DC: National Council for the Social Studies.
- Rakhmat, Ioanes, 2009. *Sokrates dalam Tetralogi Plato: Sebuah Pengantar dan Terjemahan Teks*. Gramedia, Jakarta.
- Ritzer, George & Goodman, Douglas J. (2010). *Teori Sosiologi, dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Post-Modern* (Edisi Terjemahan). Bantul: Kreasi Wacana.
- Russel, Bertrand, 2007. *The Problem of Philosophy*, (terjem.) . Columbus, Ohio, New Jersey: Merrill Prentice Hall.
- Rubenstein, 1987. "A primary Internal Cause of Terrorism, Dictating to A Degree Its Philosophy, Tactics and Consequences" *Journal Educational, Scientific and Cultural*.
- Sanderse, Wouter 2013. "The Meaning of Role modelling In Moral and Character Education" *Journal of Moral Education*.
- Sarwono, Sarlito 2002. *Berkenalan dengan Aliran-aliran dan Tokoh-tokoh Psikologi*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Schroyer, Trent, 1973. *The Critique of Domination*. Boston: Beacon Press.
- Sindhunata (ed.), *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan; Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi*, Kanisius, Yogyakarta, 2006.



- Soemantri, Muhammad Numan, 2001. *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: Rosdakarya.
- Soeprapto, Riyadi. 2002. *Interaksionisme Simbolik, Perspektif Sosiologi Modern*. Malang : Averroes.
- Suriasumantri, Jujun S.. 2005. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Cetakan XVIII. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sudarminta, J., 1991. *Filsafat Proses: Sebuah Pengantar Sistematis Filsafat Alfred North Whitehead*, Yogyakarta: Kanisius.
- Sunardi, St., 1996, *Nietzsche*, LKiS Yogyakarta, Yogyakarta.
- Supardan, Dadang, 2015. *Manusia, Kekerasan, Multikultural dan Transformasi Pendidikan*, Rizqi: Bandung.
- _____, 2015. *Teori-Teori Belajar dan Pembelajaran; Dari Teori Gestalt sampai Teori Belajar Sosial*. Rahardja: Bandung.
- Suparno, Paul 1997. *Filsafat Konstruktivisme Dalam Dunia Pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Supriatna, Nana. 2016. *Ecopedagogy; Membangun Kecerdasan Ekologis dalam Pembelajaran IPS*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suseno, Franz Magnis, 1992, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, Jakarta, Kanisius,
- _____, 1992. *Berfilsafat dari Konteks*. Jakarta, Gramedia,
- _____. 2003. *Dalam Bayangan Lenin, Enam Pemikir Marxisme dari Lenin sampai Tan Malaka*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- _____, 2005. *Pijar-Pijar Filsafat*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- _____, 1993. *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Kanisius.



Narasi Bangsa yang Tercecer

- Susilo, Rachmad K. Dwi. 2008. *20 Tokoh Sosiologi Modern, Biografi para Peletak Sosiologi Modern*. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- Sutrisno, Mudji dan F. Budi Hardiman, 2005. *Para Filsuf Penentu Gerak Zaman*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Sutrisno, Mudji dan Verhaak, Christ. 1993. *Estetika; Filsafat Keindahan*, Yogyakarta. Kanisius.
- Suwarma, Al Muchtar, 2013. *Inovasi dan Transformasi Pembelajaran Pendidikan IPS*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- Thahjadi, S..P.L. 2004. *Pertualangan Intelektual*, Yogyakarta: Kanisius.
- Zevin, Jack. 2007. *Social Studies for The Twenty-First Century; Methods and Materials for Teaching in Middle and Secondary Schools*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
- Turner, Jonathan H., 1998. *The Structure of Sociological Theory, Six Edition*. Wardsworth Publishing Company.
- Tapung, Marianus Mantovanny, 2013. *Dialektika Filsafat dan Pendidikan; Penguatan Filosofis Konsep dan Praksis Pendidikan*, Pharesia Institute: Jakarta.
- Walker, Paul & Finney, Nicholas. 1999. *Skill Development and Critical Thinking in Higher Education*. Higher Education Research & Development Unit, University College, London WC1E 6BT, UK.
- Watloly Aholiab, 2001. *Tanggung Jawab Pengetahuan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Winarno, Budi, 2011. *Isu-Isu Global Kontemporer*. CAPS: Yogyakarta.
- Wood, Philip A., 2011. *Transforming Education Policy Shaping a Democratic Future*. London: The Policy Press.
- Zamroni M.A. 2001. *Pendidikan Untuk Demokrasi: Tantangan Menuju Civil Society*, Yogyakarta: Bigraf Publishing.



Zeitlin, Irving M. 1999. *Memahami Kembali Sosiologi, Kritik terhadap Teori Sosiologi Kontemporer*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Van der Weij P. A, 1991. *Filsuf-filsuf Besar tentang Manusia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Veeger, K.J. 1984. *Realitas Sosial, Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu – Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

UU ITE No. 11/2008

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015

Kompas (cetak), 24/08/2015

Kompas. Com, 14/09/2015

Kompas.com, Rabu/05/2016

Tempo, 27/5/ 2015.

CNN Indonesia, 14/09/2015.

Pos Kupang online, 24/01/2014

Pos Kupang edisi 14/08/2015

Pos Kupang.com.,19/01/2016

Pos Kupang, 03/08/2016.

UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU No 2/2002 tentang Polri

UU No 12/2008 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik,

UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU No 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

UU No 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial



Narasi Bangsa yang Tercecer

UU No. 1 tahun 2014

UU No. 1 tahun 2015

UU No. 8 tahun 2015

Lastest Dummy



TENTANG PENULIS



Dr. Marianus Mantovanny Tapung, M.Pd., lahir di Waso Ruteng Manggarai Flores NTT, 27 Oktober 1974. Bersekolah di SDK Ruteng II, SDK Reo III, SMP (1991) dan SMA (1994) Seminari Pius XII Kisol, STFK Ledalero (2000), Program S2 IPS Kanjuruhan Malang (2008), menjadi Dosen tetap STKIP St. Paulus Ruteng (2004) dan pindah *homebase* di STIKes St. Paulus Ruteng (2015). Sejak tahun 2015 mengambil program doktor Pendidikan IPS di UPI Bandung dan Agustus 2018 mempertahankan disertasinya berjudul: *Model Emancipatory Learning (Habermas) untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis (EL-KBK) Siswa SMP dalam Menangani Permasalahan Sosial pada Pembelajaran IPS (Studi Pengembangan pada SMP/MTs di Kota Ruteng.*



Narasi Bangsa yang Tercecer

Penulis berminat dalam bidang kajian dan diskusi filsafat, pendidikan kritis, sosial dan politik. Buku yang pernah diterbitkan: Kumpulan Drama Teater *We Have a Dream Vol. I-II* (1999-2000; Seminari Tinggi Ritapiret), *Dialektika Filsafat dan Pendidikan: Penguatan Filosofis atas Konsep dan Praksis Pendidikan* (2013-2014, empat edisi; Pharresia Institute Jakarta), Kumpulan Drama Teater *Pastoral Panggung* (2014; Pharresia Institute Jakarta). Aktif terlibat dalam menulis artikel di beberapa seminar nasional dan internasional yang diselenggarakan oleh STKIP/STIKes, Universitas Pendidikan Indonesia dan kampus lainnya, serta menulis opini di Media Indonesia, Kupang Pos dan Flores Pos. Buku *Narasi Bangsa yang Tercecer; Elaborasi Filosofis, Pedagogik Kritis, Sosial dan Politik*, merupakan buku ke-4 yang dibuat pada masa studi doctoral.

Lastest Duminy